

RPJMD
Kabupaten Paser
2021 - 2026

Pemerintah Kabupaten Paser

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasir Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2005-2025; dan

b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1) RPJMD ini disusun dengan Sistematika terdiri dari:

a.	BAB I	:	PENDAHULUAN;
b.	BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c.	BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d.	BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
e.	BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f.	BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
g.	BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h.	BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
i.	BAB IX	:	PENUTUP

(2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD berfungsi sebagai :
a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD;
b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD;
c. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.01/II/19/4/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ANDI AZIS
NIP 19680816 1998031 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Paser, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2021 hingga tahun 2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Paser senantiasa mendapat petunjuk serta ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Tana Paser, Agustus 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Penulisan I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-38
2.4 Aspek Daya Saing II-156
2.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-161
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-21
3.3 Kerangka Pendanaan III-32
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2 Isu Strategis IV-33
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi V-2
5.2 Misi V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran V-4
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan VI-8
6.3 Program Pembangunan Daerah VI-9

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VI-1
7.2 Program Perangkat Daerah VI-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1
BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser II-2

Tabel II.2. Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser II-4

Tabel II.3. Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser II-5

Tabel II.4. Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser II-6

Tabel II.5. Luas Lahan Padi dan Palawija di Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-8

Tabel II.6. Luas Budidaya Tambak dan Kolam Di kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-9

Tabel II.7. Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Paser Tahun 2019-2020 ..... II-9

Tabel II.8. Luas Areal Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-9

Tabel II.9. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Tahun 2020 ..... II-10

Tabel II.10. Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser II-12

Tabel II.11. Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-13

Tabel II.12. Persentase Penduduk berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-14

Tabel.II.13. Kepadatan Penduduk Kabupaten Paser Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 ..... II-16

Tabel.II.14. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah) II-18

Tabel II.15. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020(Milyaran Rupiah) II-19

Tabel II.16. Distribusi PDRB Kabupaten Paser ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 ..... II-20

Tabel II.17. Distribusi PDRB Kabupaten Paser ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 Tanpa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian II-21

Tabel II.18. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kab. Paser (%) 2016-2020 ..... II-23

Tabel II.19. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020 (%) II-26

Tabel II.20. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Kabupaten Tetangga, 2016-2020 (%) II-27

Tabel II.21. Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-32

Tabel II.22. Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK,TPT, dan TKK Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-32

Tabel II.23. Perkembangan dan Perbandingan Angkatan Kerja, TPAK,TPT, dan TKK Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan Nasional 2016-2020 ..... II-33

Tabel II.24. Indeks Gini Kabupaten Paser dan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020 ..... II-34

Tabel II.25. Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-36
Tabel II.26. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2016-2020 II-36
Tabel II.27. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Paser II-37
Tabel II.28. Indeks Kepuasan Masyarakat 10 Perangkat Daerah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2019 ..... II-39
Tabel II.29. Nilai Rata-Rata Maksimum dan Minimum Setiap Unsur Pelayanan dalam pengukuran IKM Tahun 2019 ..... II-39
Tabel.II.30. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-42
Tabel II.31. Angka Partisipasi Murni di Kabuapten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-43
Tabel II.32. Angka Kelulusan Menurut Jenjang di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 II-43
Tabel II.33. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-44
Tabel II.34. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-44
Tabel II.35. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 ..... II-45
Tabel II.36. Keberadaan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-46
Tabel II.37. Jumlah Angka Kematian Bayi II-47
Tabel II.38. Jumlah Angka Kematian Balita II-47
Tabel II.39. Jumlah Angka Kematian Ibu II-47
Tabel II.40. Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 . II-48
Tabel II.41. Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per Seribu Balita Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel II.42. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan penduduk Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel II.43. Penyebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Paser 2018-2020 ..... II-50
Tabel II.44 Kategori Akreditas Puskesmas di Kabupaten Paser 2016-2019 ..... II-50
Tabel II.45. Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-52
Tabel II.46. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020 ..... II-52
Tabel II.47. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016 - 2020 ..... II-53
Tabel II.48. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Paser Berdasarkan Kecamatan, 2020 . II-53

Tabel II.49. Cakupan Keluarga Sehat di Kabupaten Paser Berdasarkan Indikator Penilaian Pada Tahun 2020 ..... II-54
Tabel II.50. Indeks Konektivitas pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser II-55
Tabel II.51. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser II-56
Tabel II.52. Koefisien Kondisi Jalan pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser II-57
Tabel II.53. Total Indeks Konektivitas pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser..... II-58
Tabel II.54. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-58
Tabel II.55. Persentase Kondisi Jalan Desa Strategis Tahun 2020..... II-59
Tabel II.56. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020 ..... II-59
Tabel II.57. Persentase Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016-2020..... II-60
Tabel II.58. Persentase Kondisi Jalan Nasional Tahun 2016-2020..... II-60
Tabel II.59. Persentase Kondisi Jalan Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota II-60
Tabel II.60. Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2020 Di Kabupaten Paser II-61
Tabel II.61. Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2019-2020 Kabupaten Paser II-62
Tabel II.62. Data Debit Sungai Utama di Kabupaten Paser II-63
Tabel II.63. Arah Pembangunan Sumber Air Baku terpilih pada 5 Tahun Kedepan II-63
Tabel II.64. Pembagian Zonasi Pelayanan SPAM Kabupaten Paser..... II-64
Tabel II.65. Persentase Akses Air Minum Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2020. II-66
Tabel II.66. Persentase Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-67
Tabel II.67. Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Minum di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 ..... II-68
Tabel II.68. Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Paser II-72
Tabel II.69. Persentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2020..... II-76
Tabel II.70 Persentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman dan BABS Kabupaten Paser Tahun 2020..... II-76
Tabel II.71. Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020... II-77
Tabel II.72. Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tana Paser Tahun 2016-2018..... II-79
Tabel II.73. Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Berpotensi Kumuh di Kawasan Perkotaan Tana Paser Tahun 2017-2020 (Ha) II-80
Tabel II.74. Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser II-80
Tabel II.75. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020..... II-81

Tabel II.76. Capaian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 (unit) II-82
Tabel II.77. Persentase Rumah tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-82
Tabel II.78. Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Paser II-83
Tabel II.79. Jenis Kriminalitas Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel II.80. Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Paser Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel II.81. Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2016-2020 ..... II-85
Tabel II.82. Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2020 ..... II-86
Tabel II.83. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) II-87
Tabel II.84. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama Tahun 2020 ..... II-88
Tabel II.85. Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser 2016-2020 ..... II-88
Tabel II.86. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser II-89
Tabel II.87. Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Paser 2016-2020 ..... II-90
Tabel II.88. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser Tahun 2017-2020 II-91
Tabel II.89. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 II-91
Tabel II.90. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 2016-2020 .... II-92
Tabel II.91. Skor PPH Kabupaten Paser dan Provinsi Kaltim Tahun 2017-2020 ..... II-93
Tabel II.92. Ketersediaan pangan Utama (Beras/Padi) di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-94
Tabel II.93. Pengandaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Fasilitas Umum Tahun 2017-2020 ..... II-96
Tabel II.94. Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Paser Berupa Tanah Tahun 2016-2020 ..... II-97
Tabel II.95. Kondisi Penyelesaian Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten Paser s.d Agustus Tahun 2020 ..... II-98
Tabel II.96. Indeks Pencemaran Air Sungai II-100
Tabel II.97. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Paser II-102
Tabel II.98. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Paser II-102
Tabel II.99. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Km^2) Di Kabupaten Paser II-102
Tabel II.100. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi Kaltim dan Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-103
Tabel II.101. Jenis Ancaman Bahaya di Kabupaten Paser II-103

Tabel II.102. Desa Potensi Terdampak Banjir II-104
Tabel II.103. Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-105
Tabel II.104. Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-106
Tabel II.105. Data Penduduk Kabupaten Paser Menurut Status Perkawinan Muslim II-107
Tabel II.106. Jumlah Desa menurut Kategori di Kabupaten Paser, 2020. ..... II-108
Tabel II.107. Persentase Penduduk Perempuan Umur 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan di Kab Paser Tahun 2016 – 2020 ..... II-109
Tabel II.108. Capaian Kinerja Keluarga Berencana di Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-109
Tabel II.109. Panjang Jalan dengan Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km), 2019 ..... II-111
Tabel II.110. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Pada Satlantas Polres Paser Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2016-2020 ..... II-111
Tabel II.111. Jumlah Armada dan Panjang Trayek Tahun 2020 ..... II-112
Tabel II.112. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2016-2020 ..... II-113
Tabel II.113. Jumlah Kejadian Kecelakaan II-113
Tabel II.114. Kondisi Rambu Lalu lintas, Eksisting, Panjang Marka Jalan Tahun 2020 ..... II-114
Tabel II.115. Jumlah Bongkar dan Muat di Pelabuhan Kabupaten Paser (Ton/M3) 2017-2020 ..... II-115
Tabel II.116. Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2020 ..... II-119
Tabel II.117. Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM di Kabupaten Paser 2016–2020 ..... II-123
Tabel II.118. Jumlah Koperasi dan Jumlah UKM di Kabupaten Paser 2015– 2019 ..... II-123
Tabel II.119. Jumlah Investor 2016 – 2020 ..... II-124
Tabel II.120. Jumlah Nilai Investasi 2016– 2020 ..... II-124
Tabel II.121. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Di Kabupaten Paser Tahun 2019 ..... II-125
Tabel II.122. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) Di Kabupaten Paser Tahun 2019 ..... II-125
Tabel II.123. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-125
Tabel II.124. Perkembangan Kegiatan Kepemudaan, 2018-2020 ..... II-126
Tabel II.125. Perkembangan Bidang Olah raga di Kabupaten Paser, 2017-2020 ..... II-126
Tabel II.126. Dokumen Statistik Di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 ..... II-127
Tabel II.127. Kinerja Persandian Kabupaten Paser II-127
Tabel II.128. Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser, 2020 ..... II-128

Tabel II.129. Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Paser Tahun 2016 -2020 ..... II-129
Tabel II.130. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2016-2020 ..... II-130
TabeI II.131. Hasil Penilaian Kearsipan Kabupaten Paser II-131
Tabel II.132. Produksi Ikan Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2019 ..... II-132
Tabel II.133. Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2016-2019 ..... II-132
Tabel II.134. Data Kunjungan Wisatawan dalam 3 tahun terakhir di Propinsi Kalimantan Timur II-133
Tabel II.135. Jumlah Pengunjung 11 Wisata Unggulan Tahun 2016 – 2020 ..... II-134
Tabel II.136. Kontribusi Subsektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2017- 2019 ..... II-135
Tabel II.137. Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser 2015 -2019 ..... II-137
Tabel II.138. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2019*) II-137
Tabel II.139. Perkembangan Luas Areal Komoditas Hortikultura Di Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020 ..... II-139
Tabel II.140. Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura Di Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020 ..... II-139
Tabel II.141. Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun 2019 ..... II-139
Tabel II.142. Jumlah Populasi dan Produksi Ternak Yang Dipotong Tahun 2015-2018 II-141
Tabel II.143. Luas Kebakaran Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Kebun bibit (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014 - 2018 ..... II-142
Tabel II.144. Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang di Kabupaten Paser Pada Tahun 2016 - 2020 ..... II-143
Tabel II.145. Distribusi PDRB kategori Industri Pengolahan II-144
Tabel II.146. Jumlah Pemukiman, Jumlah KK dan Jumlah Rumah Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 1972-2003 ..... II-145
Tabel II.147. Capaian Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Paser II-146
Tabel II.148. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Paser II-149
Tabel II.149. Kapabilitas APIP Kabupaten Paser Tahun 2018-2020 ..... II-149
Tabel II.150. Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020 ..... II-150
Tabel II.151. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016-2020 ..... II-151
Tabel II.152. Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016-2020 ..... II-151

Tabel II.153. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016-2020 ..... II-152
Tabel II.154. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Paser Tahun 2019 ..... II-154
Tabel II.155. Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020 ..... II-154
Tabel II.156. Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Golongan dan Jabatan tahun 2020 ..... II-155
Tabel II.157. Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Di Kabupaten Paser Tahun 2016– 2020 ..... II-156
Tabel II.158. Jumlah Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Paser (Rp)Tahun 2015-2018 ..... II-157
Tabel II.159. Progres Evaluasi RDTR Kecamatan Tahun 2019 ..... II-157
Tabel II.160. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah II-158
Tabel II.161 Jumlah Bank di Kabupaten Paser Tahun 2014 – 2018 ..... II-159
Tabel II.162 Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2016-2020 ..... II-160
Tabel II.163. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-160
Tabel II.164. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2018 ..... II-161
Tabel II.165. Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016 -2020 ..... II-162
Tabel III.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 ..... III-2
Tabel III.2. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... III-4
Tabel III.3. Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... III-4
Tabel III.4. Perkembangan Realisasi PAD Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... III-5
Tabel III.5. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... III-6
Tabel III.6. Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016 -2020 ..... III-6
Tabel III.7. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... III-7
Tabel III.8. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser III-8

Tabel III.9. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 ..... III-9
Tabel III.10. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Paser 2016 – 2020 ..... III-11
Tabel III.11. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Paser III-14
Tabel III.12. Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2020 . III-16
Tabel III.13. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2015-2018 ..... III-21
Tabel III.14. Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016– 2020 ..... III-26
Tabel III.15. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Paser 2022-2026 (Rp) III-27
Tabel III.16. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser III-28
Tabel III.17. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026 ..... III-29
Tabel III.18. Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Paser 2016 – 2020 ..... III-30
Tabel III.19. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Paser 2017–2020 ..... III-31
Tabel III.20. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser 2022-2026 ..... III-35
Tabel III.21. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Paser III-38
Tabel III.22. Proyeksi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Paser III-38
Tabel IV.1. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur IV-5
Tabel IV.2. Permasalahan Lingkungan Hidup IV-8
Tabel IV.3. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia IV-15
Tabel IV.4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan IV-28
Tabel IV.5. Permasalahan Pembangunan Ekonomi IV-33
Tabel IV.6. Capaian TPB Kabupaten Paser terhadap Target Nasional IV-40
Tabel IV.7. Indikator TPB/SDG's Yang Sudah dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional IV-44
Tabel IV.8. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat IV-49
Tabel IV.9. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser dengan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara IV-50

Tabel V.1. Penekanan Prioritas Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Paser 2005-2025 ..... V-1
Tabel V.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 1 ..... V-7
Tabel V.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 2 ..... V-8
Tabel V.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 3 ..... V-9
Tabel V.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 4 ..... V-10
Tabel VI.1. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 1 ..... VI-1
Tabel VI.2. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 2 ..... VI-3
Tabel VI.3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 3 ..... VI-5
Tabel VI.4. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 4 ..... VI-7
Tabel VI.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ..... VI-9
Tabel VI.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah VI-10
Tabel VI.7. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 1 ..... VI-16
Tabel VI.8. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 2 ..... VI-21
Tabel VI.9. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 3 ..... VI-27
Tabel VI.10. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 4 ..... VI-33
Tabel VII.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Paser VII-2
Tabel VII.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Paser VII-4
Tabel VIII.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 VIII-2
Tabel VIII.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ..... VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Tahapan Penyusunan RPJMD I-5
Gambar I.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah I-5
Gambar I.2. Integrasi KLHS RPJMD Dalam Penyusunan RPJMD I-8
Gambar II.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser II-3
Gambar II.2. Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm) II-7
Gambar II.3. Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..... II-15
Gambar II.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-22
Gambar II.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Dengan Batu Bara dan Tanpa Batu Bara Tahun 2016-2020 ..... II-22
Gambar II.6. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Paser, Kabupaten PPU dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (Juta Rupiah) II-24
Gambar II.7. Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 (%) II-25
Gambar II.8. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, 2016-2020 (%) II-26
Gambar II.9. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 (Rp/Kapita/bulan) II-27
Gambar II.10. Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Paser, Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah/Kapita/bulan) II-28
Gambar II.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-28
Gambar II.12. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Paser terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-29
Gambar II.13. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur 2020 ..... II-29
Gambar II.14. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Paser 2016-2020 ..... II-30
Gambar II.15. Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Paser terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-31
Gambar II.16. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) II-31
Gambar II.17. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2016-2020 ..... II-35
Gambar II.18. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Paser Tahun 2016-2019 ..... II-38
Gambar II.19. Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-41

Gambar II.20. Angka Kriminalitas Kab. Paser Tahun 2016-2020 ..... II-84
Gambar II.21. Perbandingan Perkembangan IPM Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Paser, 2017-2020 ..... II-90
Gambar II.22. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya II-99
Gambar II.23. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama II-101
Gambar II.24. Kerusakan Lahan II-101
Gambar II.25. Matrik Skala Tingkat Bahaya II-104
Gambar II.26. Indeks SPBE Kabupaten Paser II-116
Gambar II.27. Fase Penerapan E-Government Pemerintah Kabupaten Paser II-117
Gambar II.28. Kondisi Jaringan Internet II-118
Gambar II.29. Ketersedian LAN di Perangkat Daerah Kabupaten Paser II-119
Gambar II.30. Kondisi Sistem Informasi II-120
Gambar II.31. Clustering Sistem Informasi II-121
Gambar II.32. Kondisi SDM dengan kualifikasi basic IT (operator & Office) II-121
Gambar II.33. Kondisi SDM dengan kualifikasi advance IT II-122
Gambar II.34. Komposisi Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Paser Tahun 2019 (%) II-136
Gambar II.35. Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Paser Tahun 2016-2019 (Persen), ... II-136
Gambar II.36. Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada PDRB Kabupaten Paser (Persen), 2015-2019 ..... II-143
Gambar II.37. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Kabupaten Paser (Persen), 2016-2020 ..... II-145
Gambar II.38. Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Paser 2016-2020 ..... II-147
Gambar II.39. Perolehan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 ..... II-148
Gambar II.40. APBD Kabupaten Paser Periode 2016-2020 ..... II-153
Gambar III.1. Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah III-5
Gambar III.2. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah III-34
Gambar IV.1. Diagram Permasalahan Pembangunan Infrastruktur IV-2
Gambar IV.2. Diagram Permasalahan Lingkungan Hidup IV-6
Gambar IV.3. Diagram Permasalahan Pembangunan Sumberdaya Manusia IV-9
Gambar IV.4. Diagram Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan IV-17
Gambar IV.5. Diagram Permasalahan Perekonomian IV-29
Gambar IV.6. Komposisi Capaian TPB Kabupaten Paser IV-42

Gambar IV.7. Rincian Capaian TPB Kabupaten Paser Menurut Tujuan IV-43
Gambar IV.8. Sektor-sektor yang Diprediksi akan Kalah dan Menang dalam Jangka Pendek akibat COVID-19 ..... IV-48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Analisis SWOT untuk Sasaran 1.1. Misi 1 (Ekonomi)	Lamp-1
Lampiran 2	Analisis SWOT untuk Sasaran 1.2. Misi 1 (Pariwisata)	Lamp-2
Lampiran 3	Analisis SWOT untuk Sasaran 2.1., 2.2. dan 2.3. untuk Misi 2	Lamp-3
Lampiran 4	Analisis SWOT untuk Sasaran 3.1., dan 3.2. untuk Misi 3	Lamp-4
Lampiran 5	Analisis SWOT untuk Sasaran 4.1., 4.2. dan 4.3. untuk Misi 4	Lamp-5
Lampiran 6	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 1 Tujuan 1	Lamp-6
Lampiran 7	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 2 Tujuan 2	Lamp-7
Lampiran 8	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 3 Tujuan 3	Lamp-8
Lampiran 9	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 4 Tujuan 4	Lamp-9
Lampiran 10.	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	Lamp-10
Lampiran 11.	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Paser Terhadap Prioritas Nasional	Lamp-11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah terbentuknya Kabupaten Paser, diawali dengan berdirinya Kabupaten Paser sebagai daerah otonomi Kalimantan Timur yang pengesahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Paser. Sebelum Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Paser berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C-17/15/3 yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959.

Lahirnya UU Nomor 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 memberikan momentum yang sangat penting yakni terlepasnya kewedanaan Batu Besar dari wilayah daerah Swatantra Tingkat II Pasir dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan ke dalam Wilayah Kalimantan Timur dan pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakanlah serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, H. Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur, A.P.T. Pranoto di Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Melalui perjuangan Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi dan Wakil H.M. Hatta Garit, Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007.

Tantangan dan kendala yang dihadapi Kabupaten Paser selama 5-10 tahun terakhir ini adalah masih rendahnya ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, air bersih dan energi, di sektor pendidikan sebagian besar masyarakat hanya memiliki pendidikan tertinggi setingkat SD, SMP dan SMA, di sektor kesehatan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, di sektor perekonomian Kabupaten Paser masihbertumpu pada sektor pertambangan batubara, dimana sektor ini merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui, disamping juga belum berkembangnya sektor perekonomian lainnya seperti pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan lain-lain.

Beberapa prestasi Kabupaten Paser adalah mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama pada tahun 2019, mendapatkan penghargaan sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) garapan Kementerian Sosial RI, mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dari BPK-RI sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut. mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik 1 se-Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 dan mendapatkan

penghargaan dalam Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Terbaik I se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten / Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernurmenjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota palinglambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota dilantik. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, isu strategis internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, yang diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, merupakan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025. RPJMD nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

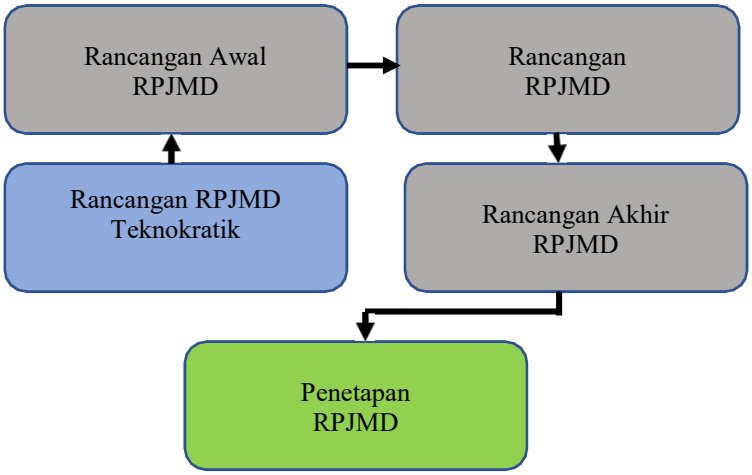
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahdua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005 -2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013-2035;

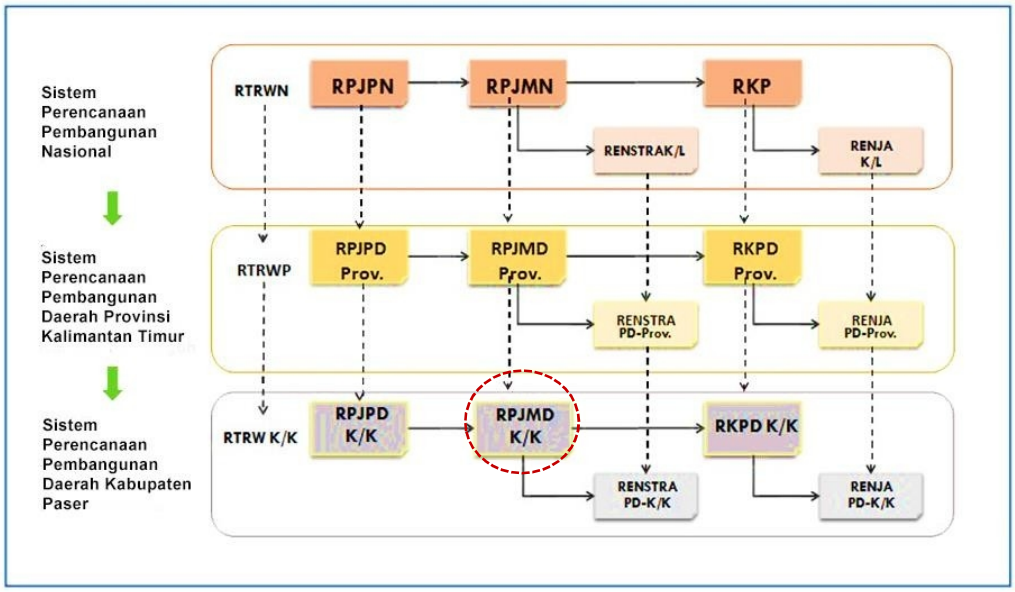
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPJMD memiliki hubungan/ keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar I.1 dan Gambar I.2 berikut ini:



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Gambar I.1
Tahapan Penyusunan RPJMD



Sumber : UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 25 Tahun 2004

Gambar I.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari gambar I.1 dan I.2 tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Rancangan RPJMD Teknokratik merupakan tahapan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang pada ujung kegiatan merupakan penetapan RPJMD (Gambar I.1).
2. Gambar I.2 dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Paser 2005-2025 pada RPJMD tahap keempat.

3. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama periode Tahun 2021-2026. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Paser dituangkan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
4. RKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan RPJMD dari tahun ke tahun. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah.
5. Penyusunan RPJMD didasarkan pada RTRW. RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser (RTRWK). Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memperhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
6. Penyusunan RPJMD Kabupaten Paser juga berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Paser memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional dalam rangka untuk sinkronisasi kebijakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Selama periode 2020-2024 pembangunan akan difokuskan pada 5 aspek yaitu:
    a. Pembangunan SDM;
    b. Pembangunan infrastruktur;
    c. Penyederhanaan regulasi;
    d. Penyederhaan birokrasi;
    e. Transformasi ekonomi.

    Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 agenda pembangunan nasional meliputi:
    a. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
    b. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
    c. SDM berkualitas dan berdaya saing
    d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
    e. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

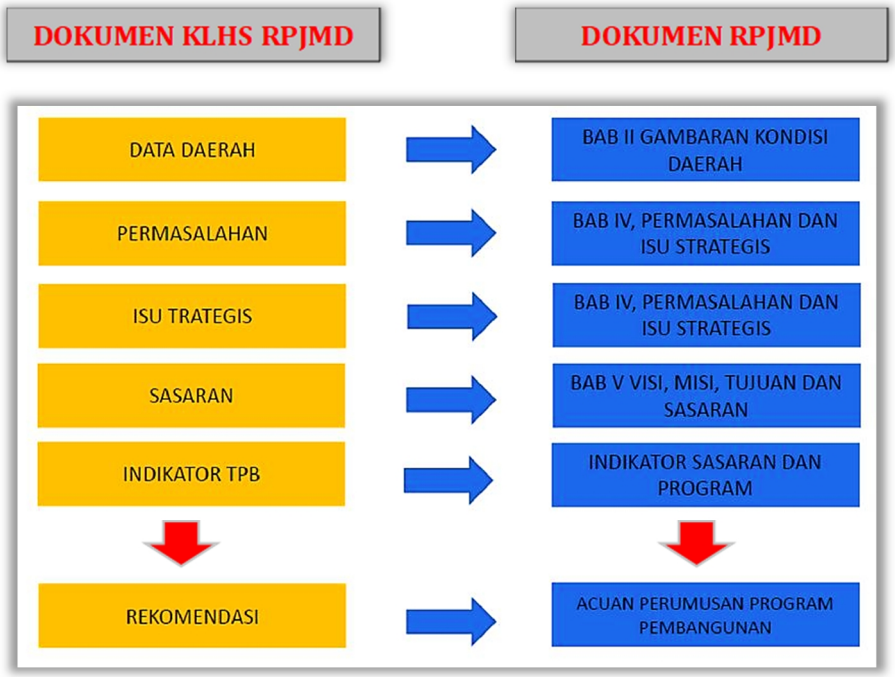
f. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
g. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Apabila dibandingkan dengan RPJMN periode sebelumnya (2015-2019), dalam periode tahun 2020-2024 terdapat penyempurnaan fokus pembangunan. Pada RPJMN periode 2015-2019 pembangunan difokuskan pada 3 hal yaitu insfrastruktur, SDM, dan deregulasi ekonomi, kemudian pada RPJMN periode 2020-2024 disempurnakan dengan menambahkan dua lagi fokus pembangunan yaitu penyederhanaan regulasi dan penyederhaan birokrasi.

Strategi Penyederhanaan regulasi dilakukan melalui omnibus *law*, yaitu penggabungan beberapa peraturan yang terkait dalam satu peraturan dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih dan menghasilkan regulasi yang berorentasi tujuan dengan mengutamakan kualitas. Penyederhaan birokrasi dilakukan melalui penyederhaan prosedur, penyelenggaraan *e-government*, serta reformasi birokrasi pelayanan publik. Penyederhaan birokrasi tersebut dilakukan untuk mendukung investasi, memangkas prosedur birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi.

Dalam penyusunan agenda pembangunan tersebut, pemerintah telah mempertimbangkan lingkungan, isu-isu strategis, kerangka ekonomi, batasan pembangunan, pengarusutamaan, serta proyek prioritas strategis. Faktor-fakor tersebut dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan arah kebijakan dan strategi dalam mencapai visi Presiden 2020-2024 "**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**"

7. Selain itu, RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 juga mengacu pada Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2025. Strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Paser dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kabupaten Paser ke depan dibangun dengan kerangka konsep pembanguan berkelanjutan. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Paser selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu; mulai dari aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan); dan langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).



Gambar I.3
Integrasi KLHS RPJMD Dalam Penyusunan RPJMD

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan organisasi perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 1 periode yang akan datang, sehingga secara nyata dan bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Paser.

Adapun tujuan dari RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
2. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan program-program prioritas.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2021-2026.
4. Sebagai tolok ukur dalam melaksanakan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser dan Organisasi Perangkat Daerah, beserta evaluasinya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan
- 6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 6.3 Program Pembangunan Daerah

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

7.2 Program Perangkat Daerah

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Paser secara geografis terletak pada 0°48'29.44''-2°37'24.21'' Lintang Selatan dan 115°37'0,77'' - 118°1'19,82'' Bujur Timur. Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603, 94 Km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
2. Sebelah Timur Laut	:	Berbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
4. Sebelah Tenggara	:	Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Prov. Kalimantan Selatan)
5. Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
6. Sebelah Barat Daya	:	Berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan)
7. Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
8. Sebelah Barat Laut	:	Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

Selat Makassar yang berada di bagian timur Kabupaten Paser memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser).

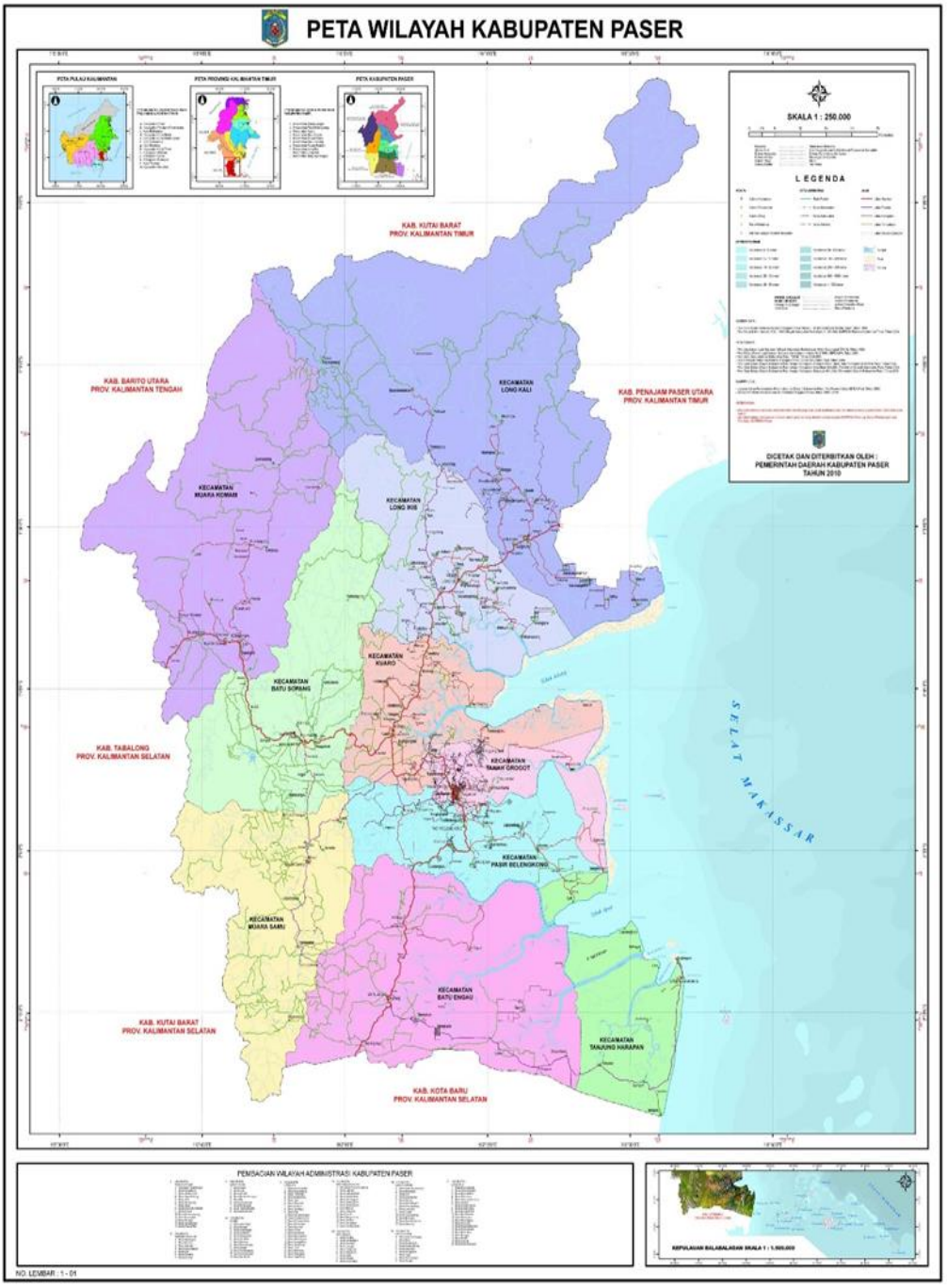
Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 139 Desa dan 5 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1.
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser

No.	Kecamatan	Daratan (Km_2)	Perairan (Km_2)	Jumlah (Km^2)	Persentase (%)
1	Pasir Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
2	Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
3	Batu Engau	1.501,61	5,65	1.507,26	12,99
4	Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
5	Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
6	Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
7	Batu Sopang	1.111,38	0,00	1.111,38	9,58
8	Muara Komam	1.753,40	0,00	1.753,40	15,11
9	Long Ikis	1.138,37	65,85	1.204,22	10,38
10	Long Kali	2.250,44	134,95	2.385,39	20,56
Jumlah		**10.851,18**	**752,76**	**11.603,94**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 Km_2 atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km_2 atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5% dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makasar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.



Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Gambar II.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser

Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu tiga atau empat jam. Lihat Tabel berikut ini :

Tabel II.2.
Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot – Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot – Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot – Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot – Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	66/57	Laut/Darat
5	Tanah Grogot – Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot – Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot – Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot – Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot – Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot – Long Kali	77	Darat

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Kecamatan Tanah Grogot yang merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Paser berjarak kurang lebih 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

a. Topografi

Dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah :

1) Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayo sebagian batas topografi;

2) Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten,

terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim. Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel II.3. di bawah ini :

Tabel. II.3.

Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser

No	Kemiringan lereng (%)	Kawasan
1	Lereng 0-2 %	Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar
2	Lereng 2-15 %	Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot
3	Lereng 15-40 %	Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis
4	Lereng > 40 %	Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau perbukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

b. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari beberapa jenis tanah:

1) Tanah Aluvial/Gambut, jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas ± 182.250 Ha;
2) Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke selatan di bagian barat Kecamatan Pasir Belengkong dan selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas ± 517.850 ha;
3) Tanah Campuran/Kompleks, yaitu jenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol ± 32.750ha, Podzolik/Litosol ± 74.000ha dan Organosol/ Gambut ± 56.000 ha, Podsolik ± 422.000 ha dan Regosol/Gleysol/Mediteran 108.400 Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.

c. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai. Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, Kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. II.4.
Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	6
2	Muara Samu	8
3	Batu Engau	35
4	Tanjung Harapan	15
5	Pasir Belengkong	14
6	Tanah Grogot	12
7	Kuaro	41
8	Long Ikis	19
9	Muara Komam	17
10	Long Kali	17
Jumlah		**184**

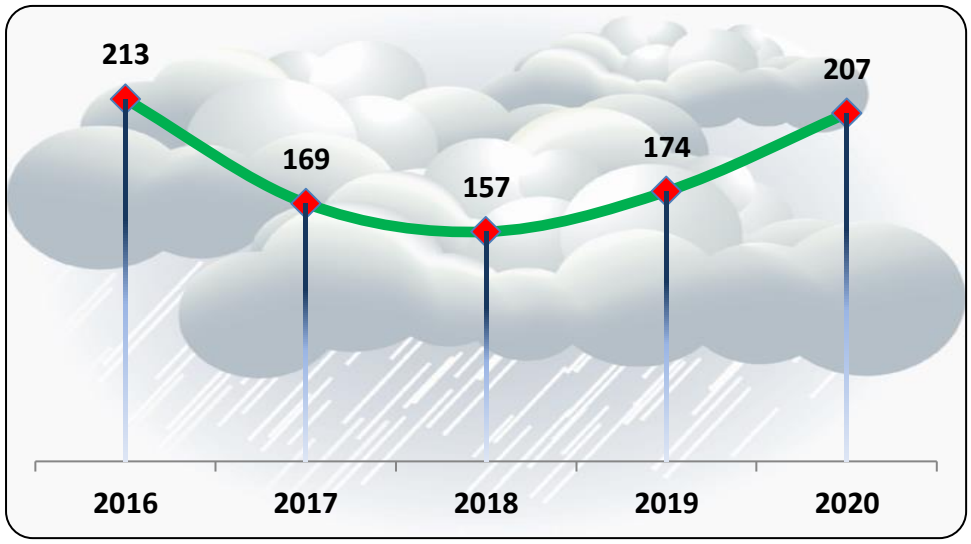
Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2020

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan (irigasi) juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman. Data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk

mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan, serta kemungkinan adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

d. Klimatologi

Kabupaten Paser beriklim tropis basah dengan suhu rataan sepanjang tahun adalah sekitar 26°C, sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 170 mm per tahun. Didukung kondisi topografi yang beragam kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2020, rata-rata curah hujan adalah 207 mm, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2019 yakni 174 mm. Adapun pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata- rata curah hujan cenderung berfluktuasi.



Sumber : Data sektoral Dinas Pertanian Kab. Paser, 2021

Gambar II.2.
Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm)

Selain dapat menggambarkan karakter cuaca, curah hujan menentukan kekuatan sumber daya air daerah terutama kemampuan untuk mengelola sektor pertanian. Di kecamatan yang memiliki rata-rata curah hujan yang kurang, misalnya di Kecamatan Pasir Belengkong dapat dicarikan alternatif saluran irigasi yang mampu menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian.

e. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi:

1) Kawasan Lindung, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat ;

2) Kawasan Sempadan Pantai, kawasan ini sepanjang ± 191,93 km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;

3) Kawasan Sempadan Sungai, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di kiri kanan sungai besar dan ± 50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaat secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Adapun Penggunaan lahan untuk budidaya sesuai potensi daerah adalah sebagai berikut:

1) **Kawasan pertanian tanaman pangan**. Dimana kawasan ini utamanya ditanami dengan padi sawah, padi ladang dan palawija. Keberadaan sawah irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang. Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditi padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan areal pengembangan mencapai kurang lebih 12.204 hektar. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

Tabel II.5.
Luas Lahan Padi dan Palawija di Kabupaten Paser Tahun 2020

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan
1	Padi Sawah	9.233
2	Padi Ladang	2.971
3	Jagung	1.063
4	Ubi Kayu	105
5	Ubi Jalar	22
6	Kacang Tanah	59
7	Kacang Kedele	13
8	Kacang Hijau	16
	Jumlah	**13.482**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

Secara umum, luas lahan produksi padi dan palawija pada Tahun 2020 mencapai 13.482 Ha.

2) **Kawasan Perikanan**. Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan. Kaitanya dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air.

Tabel. II.6.
Luas Budidaya Tambak dan Kolam Di kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Budidaya Perikanan	Luas Budidaya (Ha)
1	Tambak	31.750
2	Kolam	706

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser 2021

Pada tahun 2020 luas budidaya tambak sebesar 31.750 Ha, sedangkan luas budidaya Kolam sebesar 706 Ha.

3) **Kawasan Perkebunan** seluas ± 201.168,42 ha tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang dan Muara Komam.

Tabel II.7.
Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Paser Tahun 2019-2020

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	
	2019	2020
Kelapa sawit	182.723,72	183.575,12
Karet	13.749,50	13.843,00
Kelapa dalam	2.442,50	2.442,50
Kopi	876,30	876,30
Lada	92,00	97,00
Kakao	125,00	125,00
Lainnya	210,50	209,50
Jumlah	**200,219.52**	**201,168.42**

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2021

Sampai sekarang kelapa sawit masih menjadi Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser bahkan mencapai 91 persen dari total areal perkebunan.

Tabel II.8.
Luas Areal Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)
1	Kelapa sawit	73.927,00
2	Karet	14.222,75
3	Kelapa dalam	2.698,00
4	Kopi	654,75
5	Lada	87,00
6	Kakao	76,50
7	Lainnya	260,25
	Jumlah	**91.926,25**

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2021

Total area perkebunan yang dikelola masyarakat sebanyak 91.926,25 Ha, sekitar 80 persen diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit. Karena perawatan yang relatif mudah dan nilai ekonomi yang tinggi, kelapa sawit marak dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

4) **Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan**

Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus juga sebagian dimanfaatkan sebagai sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

Tabel II.9.
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Tahun 2020

Fungsi Hutan	Luas Kawasan (Ha)
Hutan Konservasi	
i. Cagar Alam	102.361,00
ii. Taman Hutan Raya	3.445,37
Kawasan Budidaya Kehutanan	
i. Hutan Lindung	118.957,00
ii. Hutan Produksi Tetap	240.256,00
iii. Hutan Produksi Terbatas	180.036,00
iv. Hutan Produksi Yang dapat dikonversi (HPK)	9.698,00
Kawasan Budidaya Non Kehutanan	
i. Areal Penggunaan Lain	481.175,00

Sumber : Perda Kab. Paser No.9 Tahun 2015 tentang RTRW Kab. Paser tahun 2015-2035

a) Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara dengan luas 240.256 ha;

b) Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, kawasan memiliki luas 180.036 ha;

c) Kawasan Areal Penggunaan Lain, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 481.175 ha.

5) **Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan**

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas 71.000,00 Ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan

Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batu bara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebagian yakni 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung.

6) **Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata**

Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan-kawasan tersebut di atas.

f. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi.

Aktivitas manusia dikaitkan dengan kondisi demografis, barang material, energi. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan.

Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan selat Makasar, yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

g. Kawasan Rawan Bencana

Perlidungan terhadap resiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan.

Tabel II.10.
Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan Tanjung Harapan
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara komam, Pasir Belengkong dan Tanjung harapan
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau

Sumber : RTRW Kabupaten Paser, 2015

2.1.2. Demografi

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan perencanaan pembangunan daerah.

a. Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 2,09 persen. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 285.894 jiwa dan berkurang menjadi 275.452 jiwa pada Tahun 2020. Selama lima tahun terakhir dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2020 adalah 108.98 artinya bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 109 orang penduduk laki-laki. Lebih lanjutnya dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)	RJK (%)
2016	142.377	125.884	268.261	2,27	113,10
2017	145.430	128.776	274.206	2,22	112,93
2018	148.493	131.482	279.975	2,10	112,94
2019	151.533	134.361	285.894	2,11	112,78
2020	143.647	131.805	275.452	1,75	108,98

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

Penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah-wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sedang sisanya tersebar secara tidak merata di 9 kecamatan lainnya.

Struktur penduduk Kabupaten Paser ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya akan bendampak negatif, jika lapangan usaha yang ada ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Paser akibat kelahiran cenderung menurun dari tahun ke tahun, sebaliknya angka migrasi cenderung meningkat. Migrasi penduduk ke Kabupaten Paser terjadi karena posisi Kabupaten Paser yang strategis yakni berada di jalur perlintasan antar provinsi, daya tarik lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertambangan dan terbukanya banyak peluang usaha mikro kecil. Hal ini nampak dari pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu pertumbuhan penduduk ini juga dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi. Jumlah penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk berstatus kawin yang 41 persen diantaranya tidak pernah menggunakan atau tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Di samping itu fertilitas juga dapat dipengaruhi oleh usia pernikahan, semakin muda usia pernikahan maka semakin panjang usia subur dan semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk melahirkan anak. Pernikahan pada usia dini ini juga berpotensi menimbulkan gangguan fisik pada organ reproduksi dan gangguan psikologis.

Pernikahan pada usia dini masih menjadi persoalan di Kabupaten Paser yakni masih terdapat penduduk perempuan yang menikah pada usia 16 tahun ke bawah. Pernikahan usia dini biasanya disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan pengaruh media serta kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah.

Faktor ekonomi biasanya terjadi pada keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga terpaksa menikahkan anaknya pada usia dini agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan orang tua cenderung pasrah dan tidak terlalu memikirkan dampak yang akan dialami sang anak. Faktor media masa yakni mudahnya akses internet memungkinkan para remaja membuka situs- situs berbau pornografi sehingga memicu hubungan seks diluar nikah. Permasalahan-permasalahan tersebut juga dipicu karena belum terpadunya program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, minimnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

b. Struktur Penduduk

Sampai saat ini Kabupaten Paser memiliki karakteristik piramida penduduk melebar (Piramida muda) yang berarti kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, disisi lain menanggung rasio ketergantungan (*dependency ratio*) usia tidak produktif yang tinggi pula.

Tabel.II.12.
Persentase Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Tahun	Umur (Tahun)			Jumlah	RBK
	0 - 14	15 - 64	65+		
2016	28.84	68.13	3.03	100 %	46.77
2017	28.47	68.33	3.20	100 %	46.36
2018	25.50	70.91	3.71	100 %	46.00
2019	29.93	67.47	2.60	100 %	48.21
2020	24.58	71.05	4.36	100 %	40.74

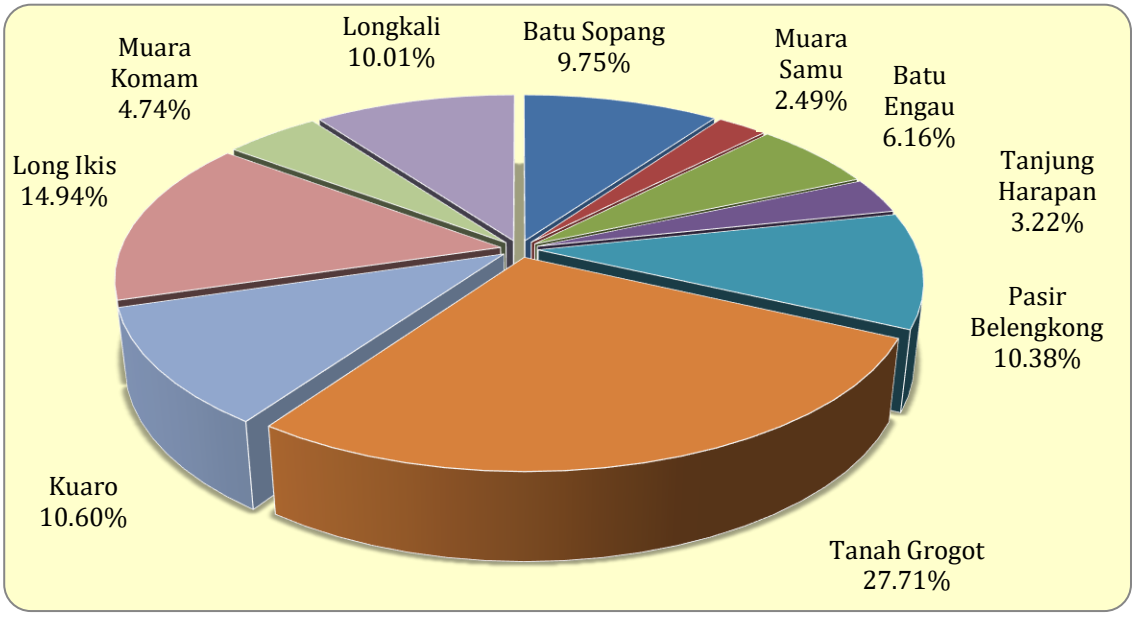
Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan untuk menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Paser memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja di semua sektor.

Dari sisi rasio ketergantungan *(dependency ratio)* pada tahun 2017, 100 kelompok umur produktif (15-64 tahun) Kabupaten Paser menanggung kurang lebih 40,78 penduduk tidak produktif (0-14 dan 65+ Tahun). Sedangkan pada tahun 2018 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk mengalami peningkatan menjadi 41,19. Namun keseluruhan angka ketergantungan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut tetap wajib diperhatikan untuk memproyeksikan kemampuan penduduk produktif. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah dengan percepatan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi persiapan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian diikuti penyiapan lapangan kerja yang memadai.

c. Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini, distribusi penduduk di Kabupaten Paser masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan konsentrasi penduduk yang terpusat di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 28 Persen dari total jumlah penduduk. Padahal dilihat dari luas wilayah, Tanah Grogot merupakan daerah dengan luas daerah terkecil, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2020

Gambar II.3.
Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2020

Seperti halnya pola pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara otomatis berpengaruh pada naiknya kepadatan penduduk di Kabupaten Paser secara umum. Pada tahun 2020, kepadatan secara gradual sebesar 23,74 penduduk tiap Km2. Paradoks ekstrim pada distribusi penduduk tersebut terlihat dengan padatnya

penduduk di kawasan Ibu Kota Kabupaten Paser, yaitu Kecamatan Tanah Grogot yang mencapai 227,49 penduduk/Km2 dibandingkan dengan Kecamatan Muara Komam yang hanya memiliki kepadatan 7,45 penduduk/Km2.

Tabel.II.13.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Paser Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya Penduduk	Rata-Rata Penduduk tiap Km^2
1	Batu Sopang	1,111.38	26,870	24.18
2	Muara Samu	855.25	6,860	8.02
3	Batu Engau	714.05	16,970	11.26
4	Tanjung Harapan	1,507.26	8,860	12.41
5	Pasir Belengkong	990.11	28,600	28.89
6	Tanah Grogot	335.58	76,340	227.49
7	Kuaro	747.30	29,190	39.06
8	Long Ikis	1,204.22	41,150	34.17
9	Muara Komam	1,753.39	13,060	7.45
10	Longkali	2,385.39	27,580	11.56
	Jumlah	**11,603.94**	**275,452**	**23.74**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan beberapa faktor, dimana sebagian besar penduduk banyak mengelompok pada daerah-daerah yang memberikan kesempatan kerja lebih banyak, dan memiliki fasilitas publik yang lebih tersedia, serta memiliki potensi wilayah yang cukup memadai. Kondisi penyebaran ini tidak menguntungkan bagi pemerataan pembangunan daerah. Dengan adanya perbedaan kepadatan, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersediannya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat daerah-daerah yang mempunyai aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata- rata

penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Tabel berikut menyajikan PDRB ADHK dan PDRB HDHB.

Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Sejak Tahun 2016 Nilai PDRB ADHK 2010 terus mengalami peningkatan. PDRB ADHK 2010 dengan batubara memiliki sumbangan terbesar dalam perekonian Kabupaten Paser, Tahun 2020 PDRB Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 35,72 trilyun rupiah menjadi sebesar 34,7 trilyun rupiah sementara tanpa pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 9,5 trilyun rupiah menjadi 9,4 triliun rupiah pada tahun 2020, penurunan PDRB Kabupaten Paser tahun 2020 disebabkan dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian Kabupaten Paser.

Dari PDRB ADHK maupun ADHB dapat diamati besarnya peran pertambangan dan penggalian dalam perekonomi Kabupaten Paser. Besarnya peran pertambangan dan penggalian itu mampu untuk meningkatkan atau menurunkan PDRB secara sangat signifikan.

Tabel II.14.
PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.801,17	3.792,74	3.791,29	3 874,42	3 822,16
B	Pertambangan dan Penggalian	24.156,96	24.261,13	25.178,47	26.169,45	25.247,23
C	Industri Pengolahan	1.396,40	1.521,86	1 600,74	1 670,86	1 624,48
D	Pengadaan Listrik dan Gasa	8,46	8,44	8,43	8,58	9,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,14	6,42	6,59	7,04	7,21
F	Konstruksi	685,84	720,85	785,32	867,90	833,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.117,91	1.186,12	1.259,17	1.315,69	1 330,88
H	Transportasi dan Pergudangan	140,28	145,80	153,89	160,02	159,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,11	86,87	92,05	95,91	93,72
J	Informasi dan Komunikasi	238,34	253,74	263,77	280,72	306,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	111,96	113,47	120,00	124,41	126,76
L	Real Estat	102,53	103,91	108,42	109,55	110,79
M,N	Jasa Perusahaan	14,93	15,09	15,66	15,94	15,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351,28	340,03	356,39	371,27	348,73
P	Jasa Pendidikan	362,38	388,75	417,08	440,18	457,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,63	129,92	138,89	146,32	175,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	58,20	61,92	65,91	69,07	67,70
PDRB ADHK KAB. PASER		**32.755,52**	**33.137,65**	**34 362,05**	**35 727,32**	**34 736,71**
PDRB ADHK TANPA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		**8.598,55**	**8.876,52**	**9.183,58**	**9.557,87**	**9.489.48**

Sumber : BPS 2021

Dilihat dari sektor yang dominan, hingga Tahun 2020, tiga sektor yang mempunyai nominal terbesar dalam PDRB Kabupaten Paser, adalah sektor Pertanian, Pertambangan dan Industri Pengolahan. Sektor Pertanian masih didominasi oleh perkebunan tahunan yaitu kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit masih menghasilkan tren positif dalam hal nominal PDRB. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian didominiasi oleh batubara. Industri pengolahan di Kabupaten Paser didominasi oleh industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO).

Tabel II.15.
PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,703.65	4,962.54	4,899.32	5,007.50	5 407,89
B	Pertambangan dan Penggalian	26,468.85	32,123.23	35 754,03	34,991.50	29 456,65
C	Industri Pengolahan	1,797.03	2,160.65	2 155,34	2,249.15	2 532,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.74	9.88	10.11	10.39	11,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.63	8.42	8.86	9.59	9,82
F	Konstruksi	878.20	965.16	1,144.15	1,338.36	1 334,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,397.72	1,554.11	1,710.34	1,852.64	1 911,99
H	Transportasi dan Pergudangan	178.44	192.54	211.11	223.42	227,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110.63	121.17	133.57	144.18	142,41
J	Informasi dan Komunikasi	249.47	274.08	291.81	314.62	343,49
K	Jasa Keuangan	152.35	160.07	175.15	185.19	188,99
L	Real Estate	125.36	131.59	139.65	143.08	145,38
M,N	Jasa Perusahaan	22.44	23.73	24.93	25.49	24,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473.96	472.15	509.64	544.81	515,87
P	Jasa Pendidikan	466.66	517.30	579.92	644.31	700,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.61	180.77	200.79	219.72	272,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	84.96	96.86	105.41	113.41	111,55
PDRB ADHB KAB. PASER		**37,289.69**	**43,954.25**	**48,054.12**	**48,017.35**	**43 337,24**
PDRB ADHB Tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian		**10.820,85**	**11.831,02**	**12.300,09**	**13.025,85**	**13.880,58**
PDRB Kategori Pertambangan Dan Penggalian		**26.46885**	**32.123,23**	**35.754,02**	**34.991,50**	**29.456,65**

Sumber : BPS 2020

PDRB ADHB Kabupaten Paser dengan batubara pada Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, sedangkan PDRB ADHB Kabupaten Paser tanpa batubara dari Tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha pertambangan dan penggalian sangat mendominasi perekonomian Kabupaten Paser.

b. Struktur Ekonomi

Sebagaimana diketahui lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberi konstribusi paling dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Paser, sehingga pengaruhnya sangat dominan terhadap kinerja ekonomi kabupaten Paser secara keseluruhan.

Berdasarkan nilai tambah yang tercipta pada masing-masing sektor dan subsektor ekonomi, dapat ditentukan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur

ini menunjukkan sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang kurang berkembang dalam wilayah tersebut. Dalam jangka waktu yang tidak panjang dan dalam kondisi normal, biasanya struktur perekonomian suatu wilayah tidak mengalami pergeseran yang signifikan.

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2020, peranan tertinggi masih dipegang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, namun peranannya menurun dari 72,87 persen Tahun 2019 menjadi 67,97 persen Tahun 2020. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada urutan kedua dalam memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser Tahun 2020, yakni sebesar 12,48 persen. Industri Pengolahan menempati peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 5,84 persen di Tahun 2020. Secara lebih detail, tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel II.16.
Distribusi PDRB Kabupaten Paser ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,61	11,29	10,20	10,43	12,48
B	Pertambangan dan Penggalian	70,98	73,08	74,40	72,87	67,97
C	Industri Pengolahan	4,82	4,92	4,49	4,68	5,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,36	2,20	2,38	2,79	3,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,75	3,54	3,56	3,86	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	0,48	0,44	0,44	0,47	0,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,28	0,28	0,30	0,33
J	Informasi dan Komunikasi	0,67	0,62	0,61	0,66	0,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,36	0,36	0,39	0,44
L	Real Estat	0,34	0,30	0,29	0,30	0,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,27	1,07	1,06	1,13	1,19
P	Jasa Pendidikan	1,25	1,18	1,21	1,34	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,41	0,42	0,46	0,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,23	0,22	0,22	0,24	0,26
	Produk Domestik Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2020
**) angka sementara **) angka sangat sementara*

Sedangkan untuk struktur ekonomi Kabupaten Paser tanpa sektor Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2019, peranan tertinggi dipegang oleh

sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,05%, selanjutnya sektor Industri Pengolahan berada pada urutan kedua dalam memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser Tahun 2019 sebesar 17,31%, serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 14,49 persen di Tahun 2019.

Tabel II.17.
Distribusi PDRB Kabupaten Paser ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 Tanpa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

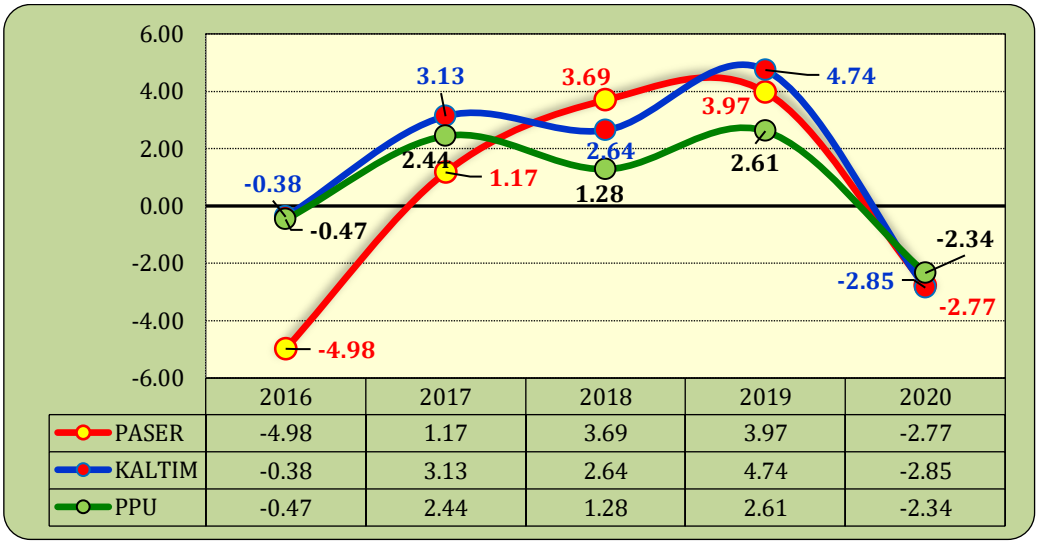
Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43.47	41.95	39.83	38.44	38.96
C	Industri Pengolahan	16.61	18.26	17.52	17.27	18.24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
F	Konstruksi	8.12	8.16	9.30	10.27	9.61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.92	13.14	13.91	14.22	13.77
H	Transportasi dan Pergudangan	1.65	1.63	1.72	1.72	1.64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.02	1.02	1.09	1.11	1.03
J	Informasi dan Komunikasi	2.31	2.32	2.37	2.42	2.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.41	1.35	1.42	1.42	1.36
L	Real Estat	1.16	1.11	1.14	1.10	1.05
M,N	Jasa Perusahaan	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.38	3.99	4.14	4.18	3.72
P	Jasa Pendidikan	4.31	4.37	4.71	4.95	5.05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.51	1.53	1.63	1.69	1.96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.79	0.82	0.86	0.87	0.80
	Produk Domestik Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2021
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Paser, relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan propinsi Kaltim maupun kabupaten tetangga, PPU. Fluktusai yang tinggi itu sejalan dengan kuatnya batubara dalam perekonomian Paser. Tahun 2016 terjadi penurunan harga batu bara yang cukup signifikan sehingga perekonomian Paser turun sangat jauhdibandingkan propinsi Kaltim. Ketika harga batubara meningkat maka

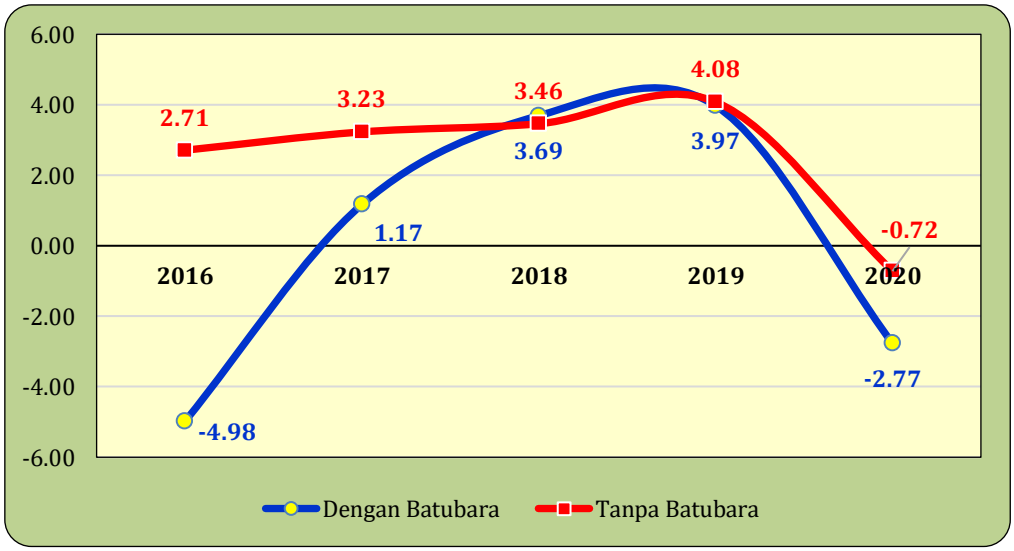
perekonomian Paser meningkat lebih cepat dari pada Propinsi, namun kembali turun ketika harga batubara kembali turun. Perekonomian daerah yang bergantung kepada pasar duia seperti ini sangat tidak menguntungkan, apalagi produk yang dijual adalah produk mentah seperti batubara yang juga tidak berkelanjutan.



	2016	2017	2018	2019	2020
PASER	-4.98	1.17	3.69	3.97	-2.77
KALTIM	-0.38	3.13	2.64	4.74	-2.85
PPU	-0.47	2.44	1.28	2.61	-2.34

Sumber: BPS Paser 2021, dan BPS Kaltim 2021

Gambar II.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021

Gambar II.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser
Dengan Batu Bara dan Tanpa Batu Bara Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser dengan Batubara dan tanpa Batu Bara selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2019, sedangkan pada tahun 2020

mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser dilihat dari masing-masing lapangan usaha sebagaimana Laju PDRB AHK 2010 menurut lapangan usaha sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.18.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Paser (%) 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,90	-0,22	-0,04	2,19	-1,35
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,45	0,43	3,78	3,94	-3.52
C	Industri Pengolahan	-0,79	8,98	5,18	4,38	-2,78
D	Pengadaan Listrik dan Gasa	8,47	-0,23	-0,12	1,82	7,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,79	4,52	2,71	6,85	2,31
F	Konstruksi	-5,76	5,11	8,94	10,52	-3,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,97	6,10	6,16	4,49	1,15
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,57	3,93	5,55	3,99	-0,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	5,79	5,96	4,19	-2,28
J	Informasi dan Komunikasi	5,61	6,46	3,95	6,43	9,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	1,35	5,75	3,67	1,89
L	Real Estat	-0,83	1,93	3,74	1,04	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	-3,40	1,06	3,77	1,81	-4,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,96	-3,20	4,81	4,17	-6,07
P	Jasa Pendidikan	3,66	7,28	7,29	5,54	3,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,47	7,70	6,91	5,35	20,09
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,72	6,39	6,45	4,79	-1,98
Pertumbuhan PDRB Dengan Batubara		**-4,98**	**1,17**	**3,69**	**3,97**	**-2,77**
Pertumbuhan PDRB Tanpa Batubara		**2,71**	**3,23**	**3,46**	**4,08**	**-0,72**

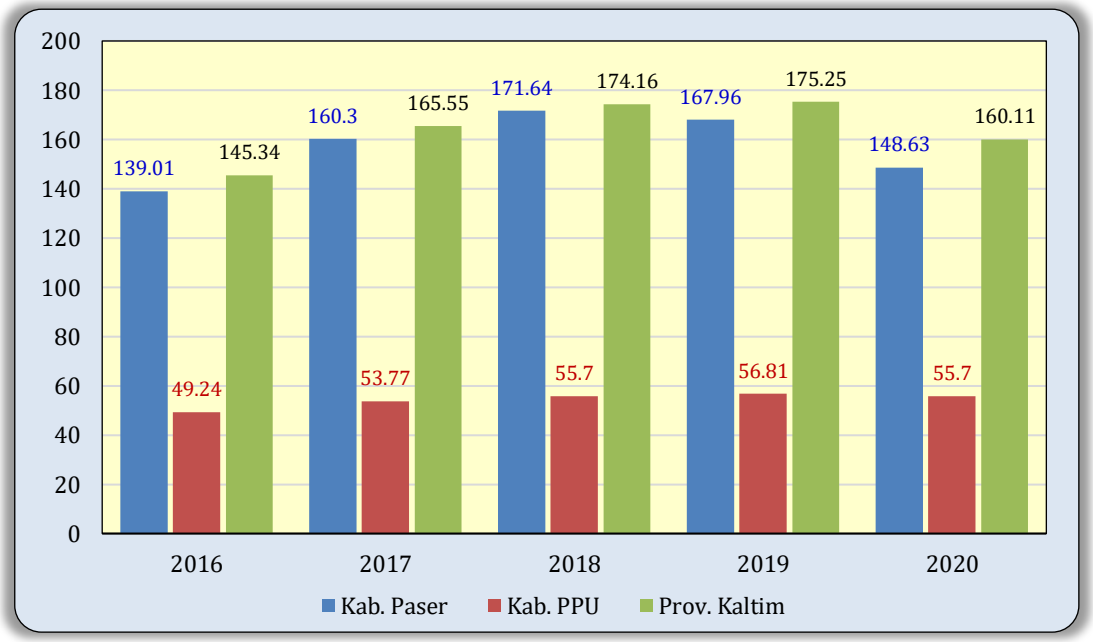
Sumber : BPS Paser 2021

Pertumbuhan ekonomi tanpa batubara menunjukkan kecenderungan laju pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi dengan batubara, hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha selain sector batubara layak untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena sebagian besar merupakan sector yang dapat diperbaharui. Jika ditelaah lebih lanjut, kinerja ekonomi kabupaten Paser Tahun 2020 dari sisi lapangan usaha ternyata kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi (20,09%) dibanding kategori lainnya. Diikuti kategori Informasi dan Komunikasi (9,08%), serta kategori Pengadaan Listrik dan Gas (7,85%).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tanpa Batu Bara dari tahun 2016-2019 relative stabil dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi Covid-19.

d. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Paser mengalami penurunan sejak Tahun 2019 menjadi sebesar 167,969 juta rupiah dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 148,63 juta rupiah. Sedangkan jika PDRB perkapita Kabupaten Paser dibandingkan dengan PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara maka pertumbuhan kenaikan PDRB Kabupaten PPU diatas Kabupaten Paser.



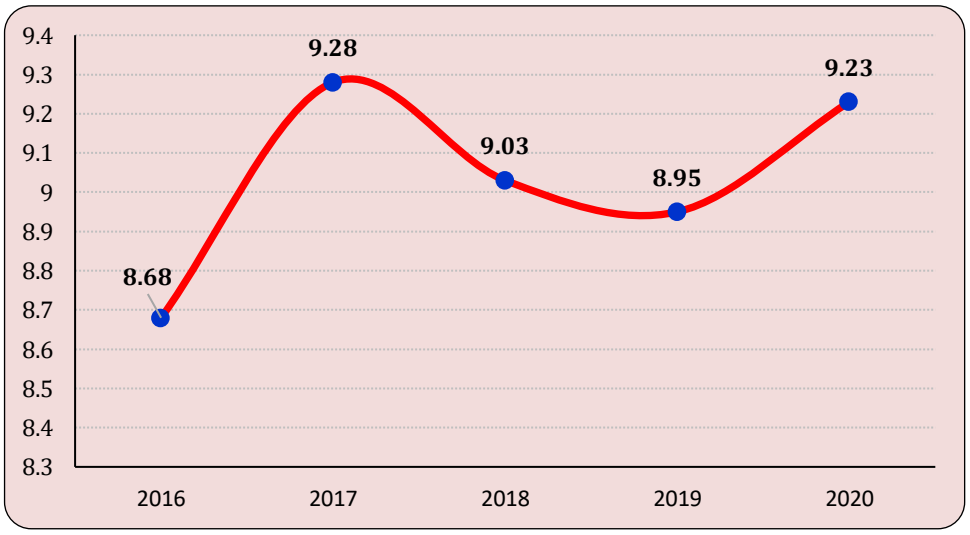
Sumber : BPS Kaltim, 2021

Gambar II.6.
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Paser, Kabupaten PPU dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Perlu diingat bahwa secara riil pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan batubara tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dilihat angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan sub sektor pertambangan batubara. Pada Tahun 2019 Angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan komponen sub sektor pertambangan batubara hanya berkisar sebesar 53 Juta Rupiah, sedangkan dengan batubara pendapatan perkapita berkisar sebesar 168 juta Rupiah. Angka ini sesungguhnya mencerminkan ketidakmerataan kesejahteraan penduduk Paser, penduduk yang bekerja di pertambangan menikmati kesejahteraan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor selain tambang.

e. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin Kabupaten Paser cenderung mengalami peningkatan pada Tahun 2017, kemudian mengalami penurunan yang melambat hingga tahun 2019 kemudian kembali meningkat pada tahun 2020. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarat sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.



Sumber : BPS Paser 2021,

Gambar II.7.
Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 (%)

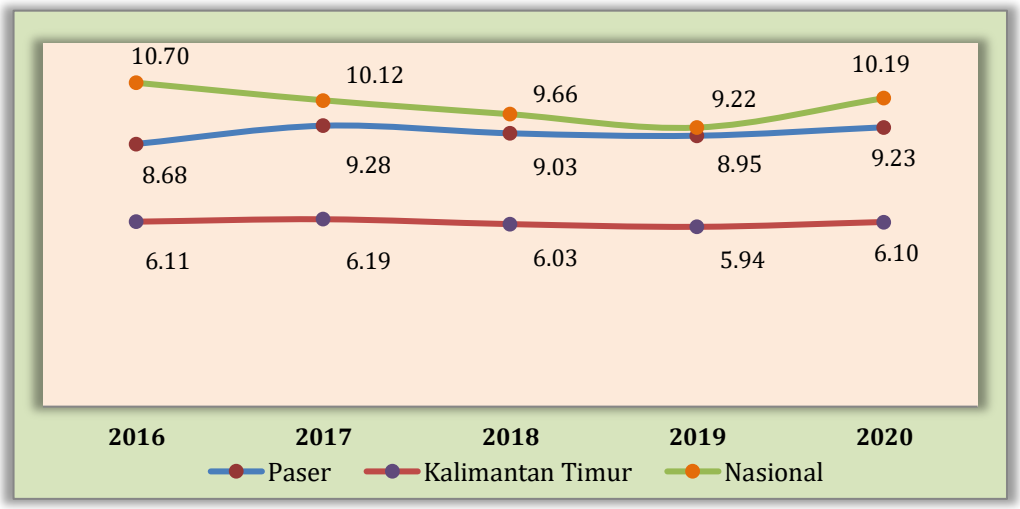
Tingkat kemiskinan Kabupaten Paser merupakan tertinggi keempat di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Paser lebih rendah dari Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat, namun masih lebih tinggi dari 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel II.19.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020 (%)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	**8,68**	**9,28**	**9,03**	**8,95**	**9,23**
Kutai Barat	8,65	8,72	9,15	9,09	9,29
Kutai Kartanegara	7,63	7,57	7,41	7,2	7,31
Kutai Timur	9,16	9,29	9,22	9,48	9,55
Berau	5,37	5,41	5,04	5,04	5,19
PPU	7,49	7,63	7,4	7,18	7,36
Mahakam Ulu	10,65	11,29	11,62	11,25	11,44
Balikpapan	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57
Samarinda	4,72	4,77	4,59	4,59	4,76
Bontang	5,18	5,16	4,67	4,22	4,38
Kalimantan Timur	**6,11**	**6,19**	**6,03**	**5,94**	**6,10**

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Paser masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan lebih rendah dengan rata-rata nasional. Pada periode 2016-2020 nampak terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Paser.



Sumber : BPS Kalimantan Timur, BPS RI, 2021 (diolah)

Gambar II.8.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, 2016-2020 (%)

Selain itu jika dibandingkan dengan daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Paser pada periode 2016-2020, maka nampak tingkat kemiskinan Kabupaten Paser lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Barito Utara.

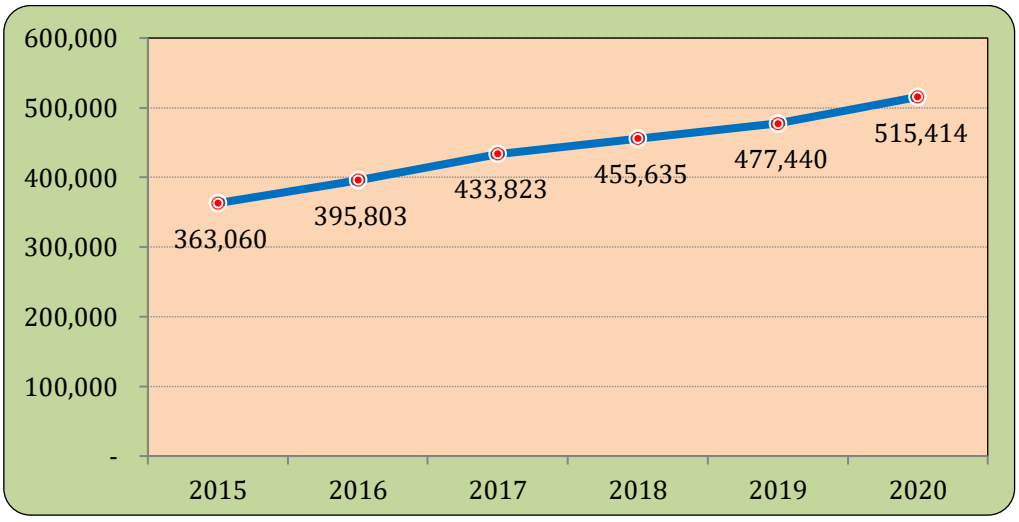
Tabel II.20.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser dengan Kabupaten Tetangga, 2016-2020(%)

KABUPATEN	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	8,68	9,28	9,03	8,95	9,23
Penajam Paser Utara	7,49	7,63	7,4	7,18	7,36
Kotabaru	4,56	4,38	4,52	4,49	4,22
Tabalong	6,35	6,09	5,95	6,01	5,72
Balangan	5,67	5,68	5,59	5,55	5,32
Barito Utara	5,38	5,21	5,00	4,95	5,17

Sumber : BPS Kaltim, BPS Kalsel , BPS Kalteng 2021 (diolah)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

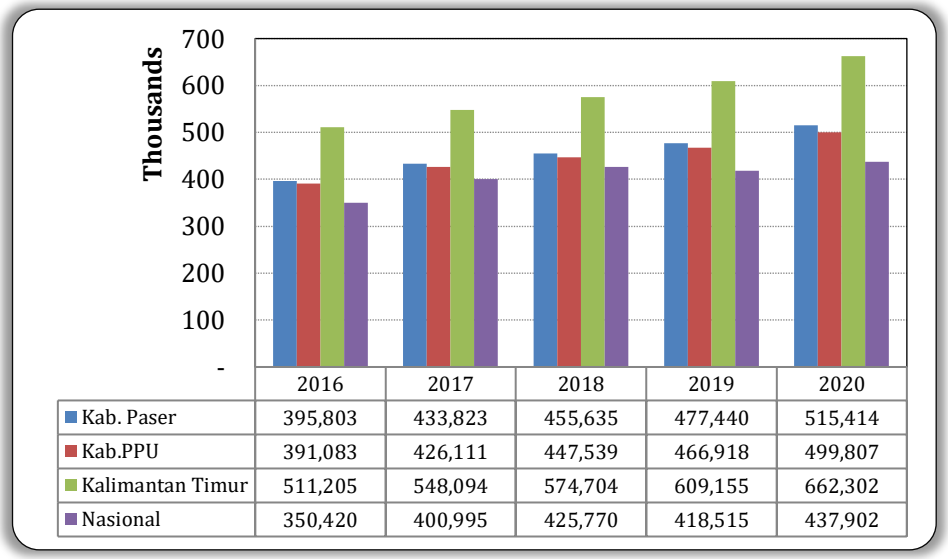
Garis Kemiskinan Kabupaten Paser selalu mengalami kenaikan sepanjang periode 2016-2020, Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kabupaten Paser sebesar Rp.363.060 /kapita/bulan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 menjadi Rp 515.414/kapita/bulan. Selengkapnya pada tabel berikut ini:



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2020

Gambar II.9
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 (Rp/kapita/bulan)

Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, maka posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung tetap yakni berada di atas rata-rata garis kemiskinan Kabupaten PPU dan rata-rata nasional dan di bawah rata-rata garis kemiskinan provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya data perbandingan perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

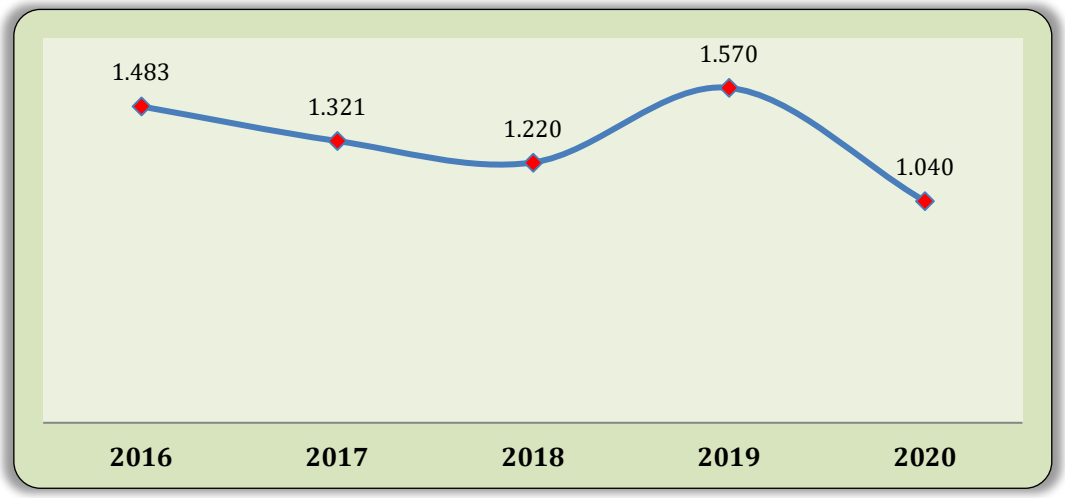


	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Paser	395,803	433,823	455,635	477,440	515,414
Kab.PPU	391,083	426,111	447,539	466,918	499,807
Kalimantan Timur	511,205	548,094	574,704	609,155	662,302
Nasional	350,420	400,995	425,770	418,515	437,902

Sumber: BPS Kalimantan Timur, BPS RI, 2021 (diolah)

Gambar II.10
Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Paser, Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2016-2020 (Ribu rupiah/Kapita/Bulan)

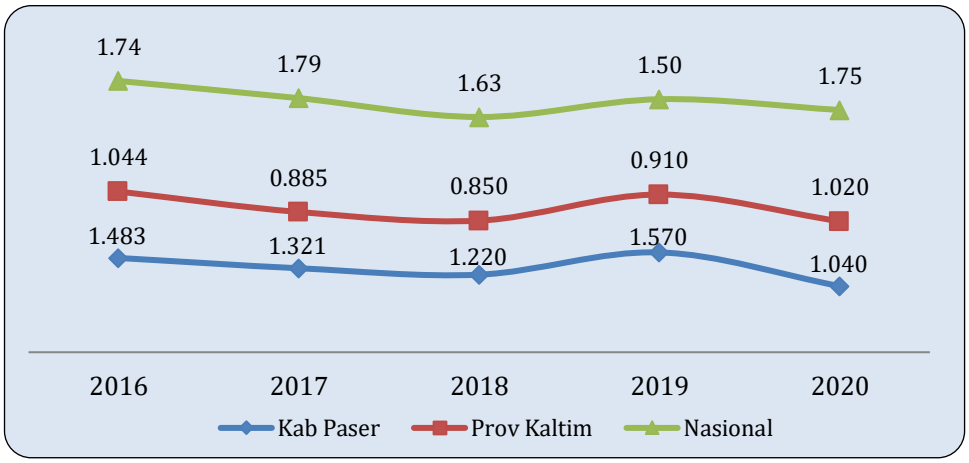
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Paser pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 1,48 pada tahun 2016 menjadi 1,04 pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016-2020 (diolah)

Gambar II.11
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

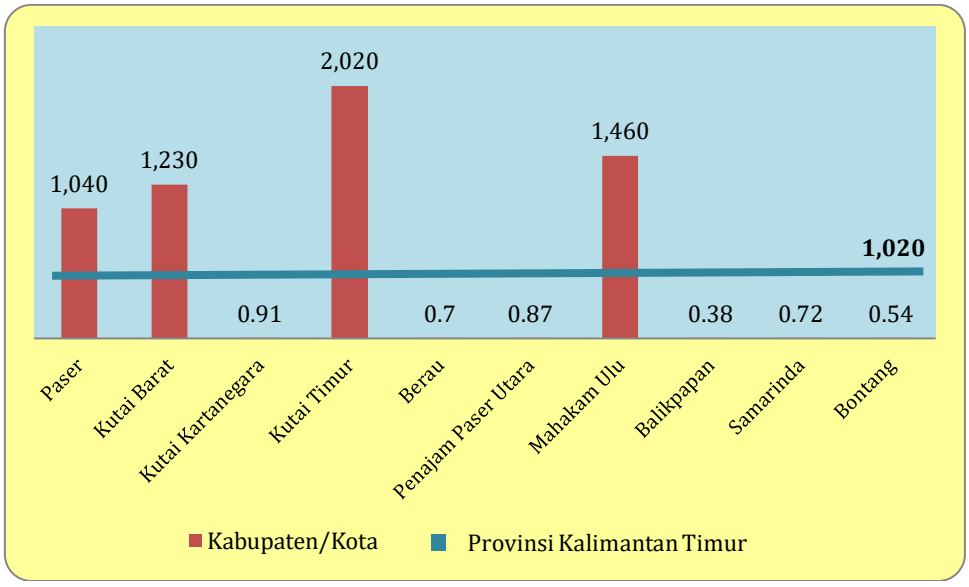
Sedangkan perkembangan relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Paser terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional pada lima tahun terakhir (2016-2020) nampak lebih lambat. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Paser pada tahun 2020 sebesar 1,040 berada sedikit di atas rata-rata provinsi Kalimantan Timur (1,020) dan lebih rendah dari rata-rata nasional (1,75).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016-2020 (diolah)

Gambar II.12
Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Paser terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sedangkan posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Paser dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur lebih rendah dari Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Hulu dan Kabupaten Kutai Barat, namun masih lebih tinggi dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

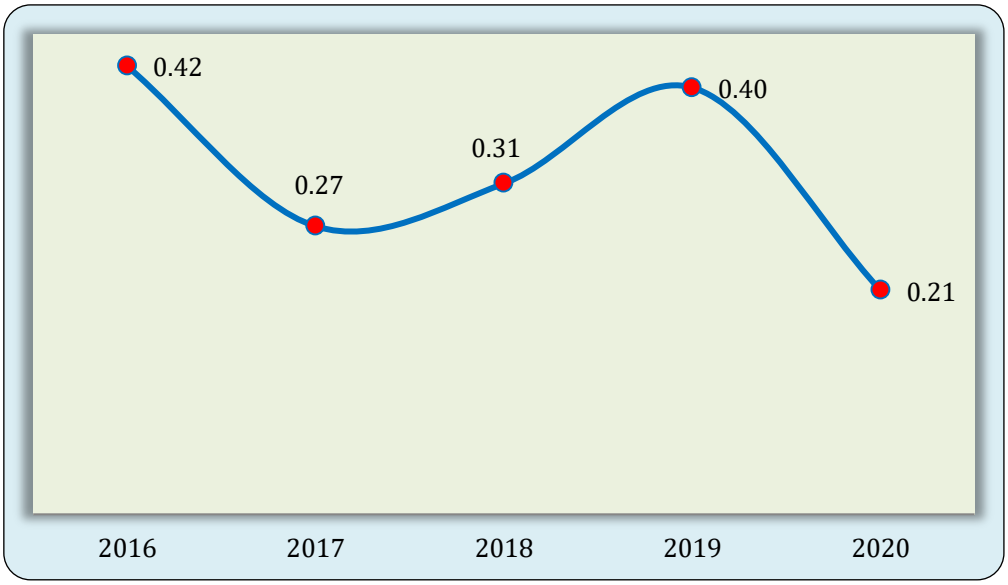


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016-2020 (diolah)

Gambar II.13
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

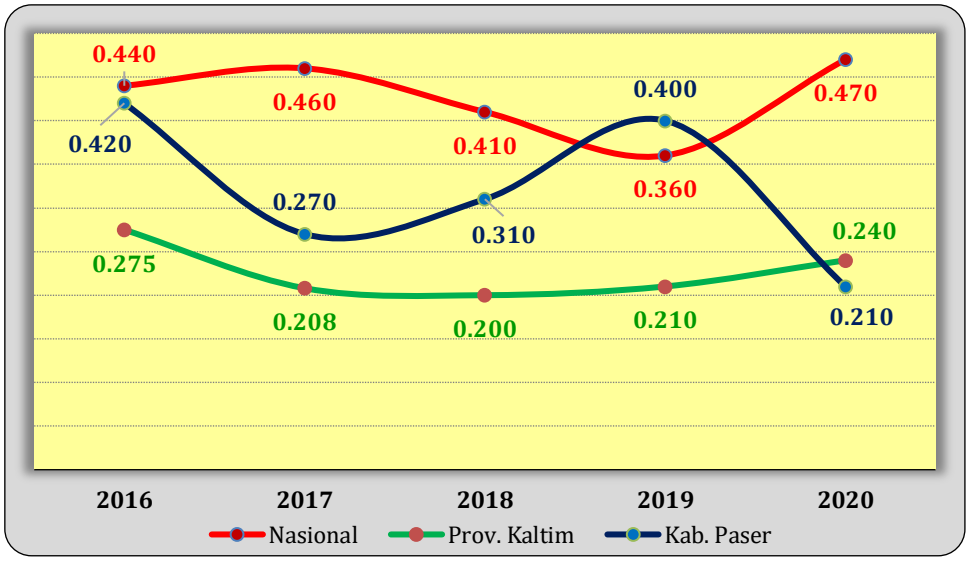
Berdasarkan data BPS (2020), Perkembangan indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Paser 2016-2020 cenderung menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2028 dan 2019, namun kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 0,21. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016-2020 (diolah)

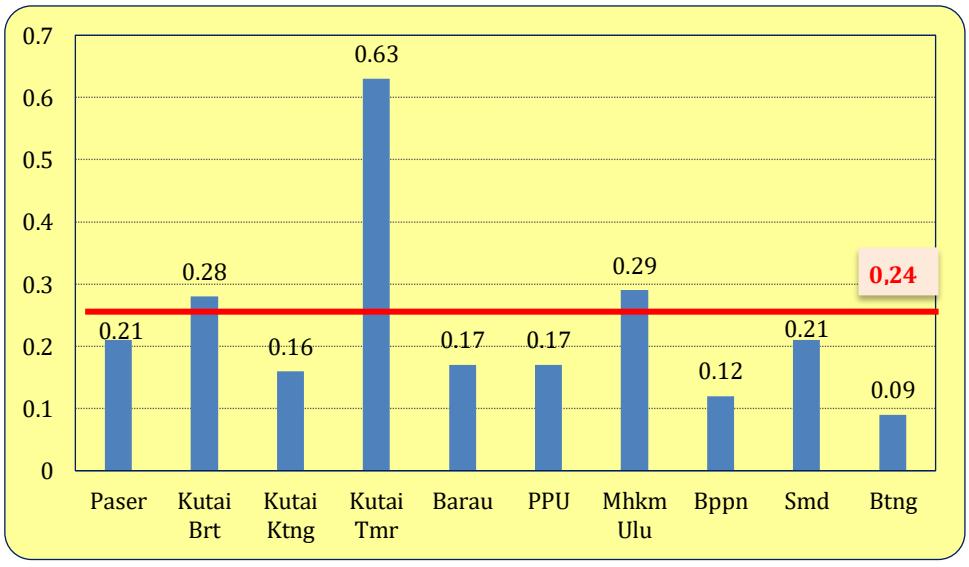
Gambar II.14
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Paser 2016-2020

Selain itu, perlu juga dilihat posisi relatif indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Paser 2016-2020 terhadap provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Berdasarkan data BPS (2020) capaian posisi relatif keparahan kemiskinan Kabupaten Paser 2016-2020 mengalami perkembangan yang baik. Pada tahun 2016 posisi relatif keparahan kemiskinan Kabupaten Paser (0,42) lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (0,275) dan sedikit lebih rendah dari rata-rata Nasional (0,44). Namun hingga tahun 2020 mengalami perbaikan menjadi 0,21 lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (0,24) dan rata-rata Nasional (0,47). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.15
Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Paser terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Meskipun indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Paser pada tahun 2020 lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (0,24) dan rata-rata Nasional (0,47), namun secara regional jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur capaian posisi relatif indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Paser masih lebih rendah dibandingkan Kota Bontang (0.09), Kota Balikpapan (0,120, Kabupaten Kutai Kartanegara (0,16), Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser Utara (0,17), dan lebih tinggi dari Kabupaten Mahakam Hulu (0,29) dan Kabupaten Kutai Barat (0,63). Namun kondisi perkembangan penurunan tingkat keparahan kemiskinan juga cenderung mengalami perlambatan sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Paser.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar II.16
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

f. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Mengingat sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan dokumen ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Tahun 2020, tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 0.67% dibawah tingkat inflasi Kalimantan Timur dan tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,25%.

Tabel II.21.
Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Inflasi Kab. Paser (Data Inflasi Kota Balikpapan)	4.13	2.45	3.13	2.92	0,67
Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur	3.39	3.15	3.24	2.04	0,80
Tingkat Inflasi Indonesia	3.02	3.61	3.13	2,84	1,70

Sumber : BPS Provinsi Kaltim, 2021

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. di Kabupaten Paser tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,52%, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat pengengguran terbuka pada tahun 2019, yaitu sebesar 4,38%.

Tabel II.22.
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (Jiwa)	-	122.162	135.854	137.737	142.568
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	-	62,15	66,84	66,17	67,88
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	-	5,54	4,84	4,38	4,52
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)	-	94,46	95,16	95,62	95,48

Sumber : BPS Paser

Tabel II.23
Perkembangan dan Perbandingan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan Nasional 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (Jiwa)					
Kabupaten Paser	-	122.162	135.854	137.737	142.568
Kalimantan Timur	1.717.892	1.654.964	1.731.909	1.800.441	1.817.680
Indonesia (juta)	125.44	128.06	133.35	135.86	138.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)					
Kabupaten Paser	-	62,15	66,84	66,17	67,88
Kalimantan Timur	67,79	63,75	64,55	65,96	65,50
Indonesia	66,34	69,02	67,31	67,53	67,77
Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (%)					
Kabupaten Paser	-	5,54	4,84	4,38	4,52
Kalimantan Timur	7,95	6,91	6,41	5,94	6,87
Indonesia	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)					
Kabupaten Paser	-	94,46	95,16	95,62	95,48
Kalimantan Timur	92,05	93,09	93,59	94,06	93,13
Indonesia	94,39	94,50	94,70	94,77	92,93

Sumber : BPS Pusat, 2021, dan BPS Kaltim, 2021

Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara actual siap memberikan konstribusi terhadap produksi barang dan jasa. Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Paser setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlah Angkatan kerja 142.568 jiwa atau sebesar 7,84% Angkatan kerja Kalimantan Timur berada di Kabupaten Paser. Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (TPAK) Kabupaten Paser Tahun 2020 sebesar 67,88% di atas TPAK Provinsi dan nasional, mencerminkan bahwa dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Paser, sebanyak 67 orang berpartisipasi aktif di pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser Tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser sebesar 4,52% hal ini mencerminkan setiap 100 angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang pengangguran.

h. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan

pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "indeks gini" dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Secara umum Indeks Gini Kabupaten Paser memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin "tidak merata" dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap "wajar" pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.24.
Indeks Gini Kabupaten Paser dan Provinsi Kaltim
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Gini Paser	0,264	0,277	0,299	0,262	0,290
2	Indeks Gini Kaltim	0,328	0,333	0,342	0,335	0,335
3	Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

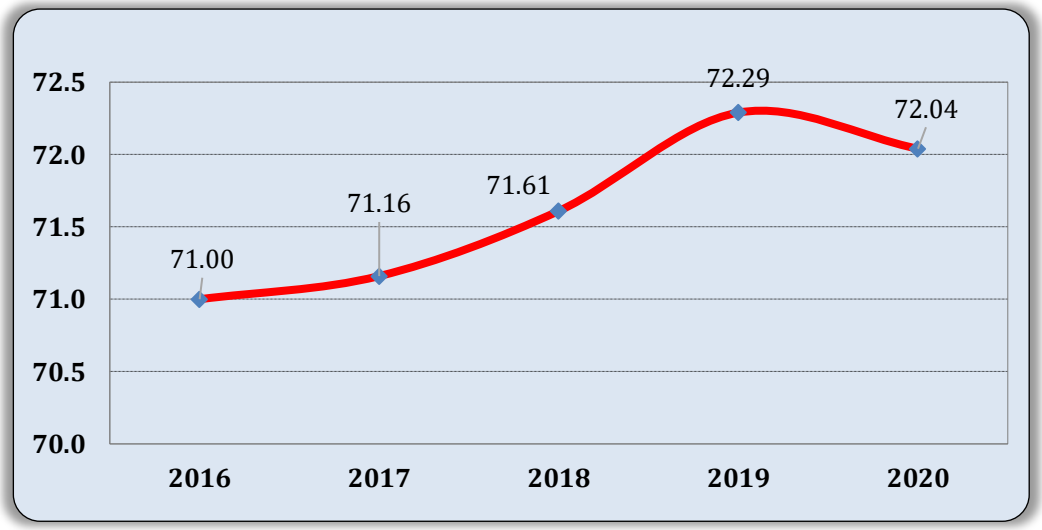
Sumber : BPS Kaltim, 2021

Indeks Gini Kabupaten Paser memiliki kecenderungan yang lebih baik dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur, dimana indeksnya mendekati angka 0, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Paser masih lebih baik jika dibandingkan dengan rata- rata indeks Gini Kalimantan Timur.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang luas sehingga berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat untuk melihat pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah karena dalam batas-batas tertentu IPM mewakili tujuan dari pembangunan manusia.

IPM yang memiliki komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dianggap mampu menggambarkan kualitas manusia atau tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Sehingga semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.



Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2021

Gambar II.17.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2016-2020

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser mengalami trend perlambatan selama periode 2016-2020, yakni berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur dan berada di atas IPM Nasional, pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada Tahun 2016.

Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Paser 2016 - 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,43% per tahun, sementara Provinsi tumbuh sebesar 0,50% per tahun dan nasional tumbuh sebesar 0,62% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan IPM Kabupaten Paser lebih lambat dibandingkan dengan Kaltim.

Oleh karena itu upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimalisasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran per kapita melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perkembangan data komponen pembentuk IPM Kabupaten Paser, Propinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.25.
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

Komponen	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
Angka Harapan Hidup	72.02	73.68	70, 90	72.05	73.70	71,06	72.28	73,96	71,20	72,52	74,22	71,34	72,62	74,33	71,47
Rata-Rata Lama Sekolah	8.19	9,24	7,95	8.20	9,36	8,10	8.22	9,48	8,17	8,54	9,70	8,34	8,55	9,77	8,48
Angka Hrpn Lama Sekolah	12.96	13,35	12,72	12.98	13,49	12,85	12.99	13,67	12,91	13,00	13,69	12,95	13,10	13,72	12,98
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.171	11.335	10.420	10.280	11.612	10.664	10.605	11.917	11.059	10.767	12.359	11,299	10.344	11.728	11.013
IPM	**71.00**	**74,59**	**70,18**	**71.16**	**75,12**	**70,81**	**71.61**	**75,83**	**71,39**	**72,29**	**76,61**	**71,92**	**72,04**	**76,24**	**71,94**

Sumber: BPS, 2019

Tabel II.26.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2016-2020

Komponen	Tahun					Rata rata pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Harapan Hidup	72.02	72.05	72.28	72.52	72.62	0,15
Rata-Rata Lama Sekolah	8.19	8.20	8.22	8,54	8,55	0,09
Angka Harapan Lama Sekolah	12.96	12.98	12.99	13,00	13,10	0,03
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.171	10.280	10.605	10.767	10.344	2,19
IPM	**71.00**	**71.16**	**71.61**	**72.29**	**72.04**	**0,43**

Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2019

Tabel II.25 menunjukkan bahwa komponen indikator pembentukan IPM selama periode 2016 - 2021, dimana pertumbuhan sangat lambat terjadi pada 3 komponen yakni Rata Rata Lama Sekolah hanya tumbuh 0,09% per tahun, Angka Harapan Lama Sekolah tumbuh 0,04% per tahun serta Angka Harapan Hidup tumbuh 0,15% per tahun. Sementara itu pengeluaran per kapita mampu tumbuh sebesar 0,04% per tahun. Sehingga secara keseluruhan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 0,62% pertahun.

Pada Tahun 2020 Angka Harapan Lama sekolah penduduk Kabupaten Paser sebesar 13,10 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Paser rata-rata memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,10 tahun semenjak dilahirkan. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Paser hingga tahun 2020 (13,10) sedangkan pencapaian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser (8,55) masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yakni 9,77 tahun dan lebih baik dibandingkan Nasional 8,48 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal harus terus

menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Paser ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 9 tahun.

Selama periode 2016-2020 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Paser terus meningkat dari 72,02 tahun pada Tahun 2016 menjadi 72,62 tahun pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,15% per tahun. Meskipun pencapaian AHH (72,62 tahun) di Kabupaten Paser pada Tahun 2018 berada di atas Nasional (71,47 tahun) namun masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Kalimantan Timur (74,33 tahun) dan berada di posisi keenam dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan angka harapan hidup perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Paser ke depan.

Munculnya pandemi Covid 19 di awal tahun 2020 memberikan beban dandampak yang bear bagi pembangunan kesehatan. Saat ini pembangunan bidang kesehatan difokuskan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Melalui Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan

Dari tabel di atas juga didapatkan informasi bahwa di antara empat indikator pembentukan IPM, indikator yang paling berpengaruh positif adalah Umur Harapan Hidup, sementara yang pengaruhnya paling rendah adalah angka harapan lama sekolah dan Pengeluaran per Kapita. Oleh karena itu program peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Paser.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

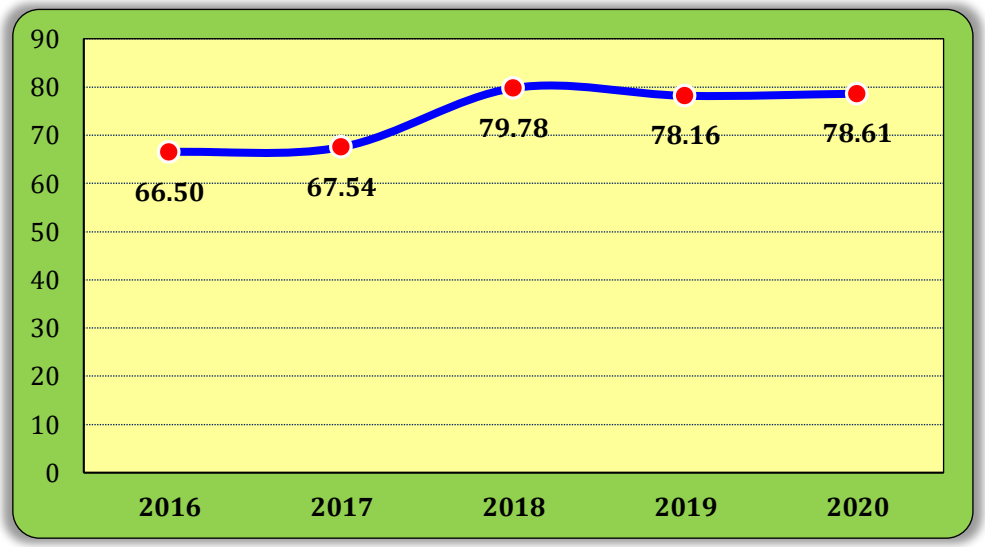
Tabel II.27
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2016 s.d 2020 di Kabupaten Paser

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	7,90	7,86	7,75	7,69	7,72
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	1,01	1,06	1,05	2,11	2,11
3.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	0,24	0,27	0,30	0,31	0,34
4.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Paser (2021) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser (2021)

2.3. Aspek Pelayanan Umum

dan urusan pilihan termasuk urusan penunjang pemerintahan yang menjadi jangkauan pelayanan dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Paser. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Paser adalah indeks kepuasan masyarakat. Survei kepusaan masyarakat di Kabupaten Paser dilaksanakan oleh perangkat daerah pemangku pelayanan umum. Namun belum semua perangkat daerah tersebut konsisten melaksanakan survey setiap tahun. Rata-rata perangkat daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat setiap tahunnya adalah 6 sampai 10 perangkat daerah. Dari data yang terhimpun, hasil penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah melalui survei kepuasan masyarakat di tingkat perangkat daerah menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas pelayanan publik jika dilihat dari hasil IKM 78,16 tahun 2019 menjadi 78,61 di tahun 2020 walaupun masih dalam kategori baik. Trend grafik IKM Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : Data Diolah, 2021

Gambar II. 18.
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Dari hasil IKM tersebut disimpulkan terdapat 6 perangkat daerah dengan kinerja unit pelayanan yang Baik , yaitu Dinas Sosial Kabupaten Paser, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot. Terdapat 1 PD berhasil meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sedangkan 4 perangkat daerah lainnya dengan kinerja unit pelayanan pelayanan Kurang Baik, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Dinas Pehubungan (UPT. PKB), RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser dan Puskemas Tanah Grogot.

Tabel II.28.
Indeks Kepuasan Masyarakat 10 Perangkat Daerah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2019

No	Perangkat Daerah	2017	2018	2019	Kinerja Unit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser	-	71,90	74,712	Kurang Baik
2	Dinas Sosial Kabupaten Paser	-	-	82,556	Baik
3	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Paser	-	-	80,309	Baik
4	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser	-	68,90	81,363	Baik
5	Dinas Perhubungan (UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor) Kabupaten Paser	-	-	76,424	Kurang Baik
6	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser	-	-	77,783	Baik
7	RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser	63,72	78,00	73,016	Kurang Baik
8	Kecamatan Tanah Grogot	70,75	84,78	80,568	Baik
9	Kelurahan Tanah Grogot	71,05	83,21	83,824	Baik
10	Puskesmas Tanah Grogot	65,60	80,42	75,536	Kurang Baik

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan IKM di beberapa perangkat daerah tersebut, masih ada aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu waktu pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan, kondisi sarana dan prasarana, kepastian biaya/tarif pelayanan dan produk layanan. Masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan kesehatan yang ada, hal ini terlihat terjadi penurunan tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan pemerintah daerah yaitu pelayanan rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Berikut ini adalah hasil olahan nilai maksimum dan minimum dari nilai rata-rata setiap unsur dilengkapi keterangan Perangkat Daerah (PD).

Tabel II.29.
Nilai Rata-Rata Maksimum dan Minimum Setiap Unsur Pelayanan dalam pengukuran IKM Tahun 2019

No.	Unsur Pelayanan	Max	Keterangan	Min	Keterangan
U1	Persyaratan	3,233	Kelurahan	2,950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
U2	Prosedur	3,280	Kelurahan	2,936	RSUD Panglima Sebaya
U3	Waktu Pelayanan	3,153	Kelurahan	2,192	RSUD Panglima Sebaya

No.	Unsur Pelayanan	Max	Keterangan	Min	Keterangan
U4	Biaya Tarif	3,953	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,770	Dinas Perhubungan (UPT. PKB)
U5	Produk Layanan	3,240	Dinas Sosial	2,868	RSUD Panglima Sebaya
U6	Kompetensi Pelaksana	3,300	Dinas Tenaga Kerja	2,940	RSUD Panglima Sebaya
U7	Perilaku Pelaksana	3,510	Dinas Sosial	3,032	RSUD Panglima Sebaya
U8	Sarana dan Prasarana	3,120	Kelurahan	2,572	RSUD Panglima Sebaya
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,673	Kelurahan	2,407	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2020

Hasil analisa menunjukkan hasil yang sama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser terdapat hubungan yang kuat dan berbanding lurus antara kompetensi pelaksana dengan perilaku pelaksana, artinya semakin kompeten pelaksana maka semakin sopan dan ramah pelaksana dalam memberikan pelayanan. Selain itu, pada Kecamatan Tanah Grogot terdapat hubungan yang kuat dan berbanding lurus antara produk layanan dengan kompetensi pelaksana, artinya semakin sesuai produk layanan yang diberikan maka semakin kompeten kemampuan petugas dalam pelayanan. Sedangkan hubungan antar unsur lainnya pada setiap perangkat daerah yaitu hubungannya rendah, sangat rendah bahkan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Paser yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan umum diantaranya mahalnya biaya pendidikan di Paser, adanya keluhan penyelenggaraan pendidikan di beberapa kecamatan, keluhan pengangkutan sampah, keluhan penyediaan air bersih, keluhan penyediaan layanan kesehatan dan keluhan pengelolaan jalan kota menunjukkan bahwa harus ada langkah perbaikan serius untuk meningkatkan pelayanan publik.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

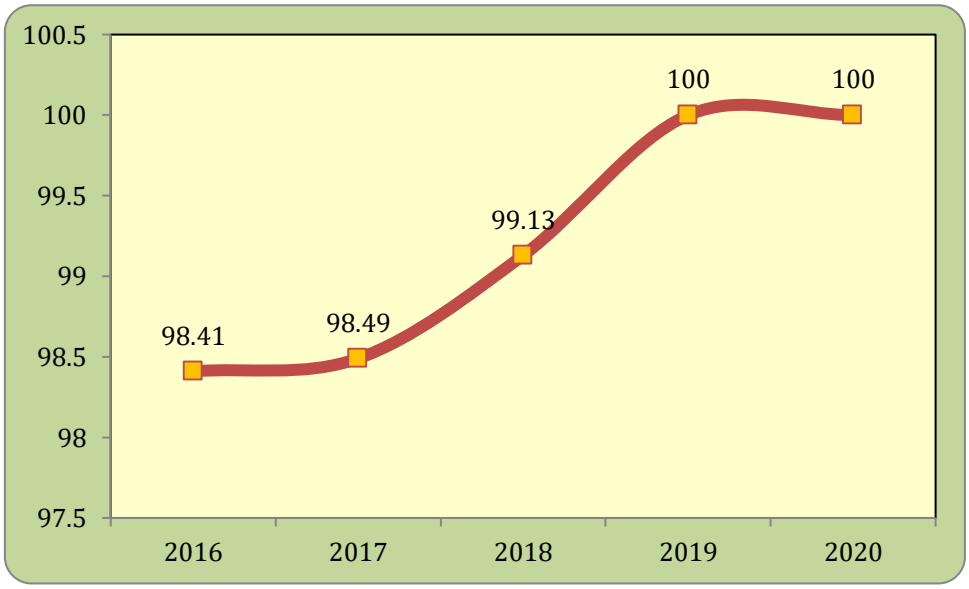
Pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Paser terkait dengan kualitas

sumberdaya manusia dan kesejateraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi.

Angka melek huruf di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Tahun 2016 capaian angka melek huruf Kabupaten Paser tercatat sebesar 98,41% kemudian berturut-turut meningkat menjadi 98.49% ditahun 2017, 99,13% di tahun 2018 dan kemudian mengkat kembali menjadi 100% ditahun 2019 dan 2020. Berikut adalah perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020:



Sumber : BPS Kabupaten Paser 2021

Gambar II.19.
Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan

tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK Kabupaten Paser tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel II.30.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No.	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	111,01	111,26	105,23	108,62	110,33
2.	SMP/MTSn	99,25	89,42	93,04	94,56	96,52
3.	SMA/SMK/MA	92,56	92,33	99,25	97,55	97,55

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, 2021

Dari tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI pada tahun tahun 2019 yakni 108,62% mengalami peningkatan menjadi 110.33% pada tahun 2020 hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,71%. Nilai APK masih lebih dari 100% hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. APK tingkat SMP/MTSn pada tahun 2019 adalah 94,56% sedangkan pada tahun 2020 adalah 96,52% hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,96%. APK tingat SMA/SMK/MA pada tahun 2019 dan 2020 adalah sama sebesar 97,55%. Sedangkan rata-rata APK selama 5 tahun terakhir (tahun 2016 sampai dengan tahun 2020) naik dari 100.24% menjadi 101,47% atau naik sebesar 1,22%, hal ini ini berarti adanya peningkatan partisipasi penduduk terhadap pendidikan.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Paser:

Tabel.II.31.
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No.	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	97,30	99,93	97,96	97,74	97,74
2.	SMP/MTSn	81,91	78,48	78,53	81,66	81,66
3.	SMA/SMK/MA	67,97	65,16	62,24	62,80	62,80

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI pada tahun 2020 sebesar 97,74%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 91,39%. Sedangkan angka APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 81,66% juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 56,38%. APM tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2019 dan 2020 adalah sama sebesar 62,80%. Nilai APM paling tinggi terletak pada jenjang pendidikan SD/MI sedangkan nilai APM paling rendah ada pada jenjang SMA/SMK/MA. Dan secara umum dapat dilihat dari tabel di atas bahwa APM di Kabupaten Paser masih belum mencapai 100%.

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.32.
Angka Kelulusan Menurut Jenjang di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Angka Kelulusan Sekolah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	99,26	98,25	94,99	98,18	100
2.	SMP/MTs	97,18	98,30	99,13	99,21	100
3.	SMA/SMK/MA	99,20	90,83	100	100	100
	Rata-rata	**98,55**	**95,79**	**98,04**	**99,13**	**100**

Sumber : Dinas pendidikan Kabupaten Paser, 2021

Tabel di atas menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase kelulusan rata-rata di semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan yaitu dari 99,13% pada tahun 2019 menjadi 100.00% pada tahun 2020, atau naik sebesar 0,87%.

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.33.
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0.010	0.1	0,20	0,92	0,94
2	SMP/MTs	0.072	0.2	1,50	1,18	2,28
3	SMA/SMK/MA	0.072	1.0	-	-	-
Rata-rata		**0,051**	**0.43**	**0,85**	**1,05**	**1.61**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, 2021

Ditinjau dari keberlanjutan sekolah, rata-rata angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir (dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020) menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,051 menjadi 1.61.

f. Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) atau menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah.Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Pada tahun 2019, APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 95,65%, sedangkan pada tahun 2020 APS usia 7 -12 sebesar 99,75%, terjadi peningkatan sebesar 4.10%. Sementara itu pada tahun 2019 APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 99,36% mengalami penurunan menjadi 99,15% pada tahun 2020 atau terjadi penurunan sebesar 0,21%.

Tabel II.34.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No	Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	7-12 Tahun	100,00	99,93	99,22	95,65	99,75
2	13-15 Tahun	95,78	97,69	99,06	99,36	99,15
3	16-18 Tahun	82,33	75,43	77,97	-	76,39

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser 2021

g. Rasio jumlah Sekolah, Murid dan Guru

Dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan sarana dan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan potensi jumlah penduduk usia sekolah yang ada merupakan hal pokok yang harus menjadi perhatian. Selanjutnya data Jumlah sekolah, murid dan guru dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.35.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI/SDLB**					
1.1	Jumlah SD	233	237	237	237	234
1.2	Murid	34.810	35.349	35.104	35.297	35.810
1.3	Guru	2.394	2.252	2.307	2.513	2.577
1.4	Rasio Murid Guru	14,54	15,70	15,21	14,30	13,90
1.5	Rasio Murid Sekolah	149,40	149,15	148,11	150,32	153,03
2	**SLTP/MTS/SMPLB**					
2.1	Jumlah SLTP	84	93	94	94	93
2.2	Murid	14.252	14.385	14.301	14.161	14.335
2.3	Guru	1.073	1.067	1.078	1.191	1.234
2.4	Rasio Murid Guru	13,28	13,48	13,26	11,89	11,62
2.5	Rasio Murid Sekolah	169,67	154,68	152,13	150,64	154,14
3	**SLTA/SMK/MA**					
3.1	Jumlah SLTA	40	42	43	44	42
3.2	Murid	10.502	11.211	11.501	11.973	12.130
3.3	Guru	886	872	863	943	936
3.4	Rasio Murid Guru	11,85	12,86	13,32	12,69	12,96
3.5	Rasio Murid Sekolah	262,55	266,93	267,46	272,11	288,81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser 2021

Pada semua jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA jumlah murid mengalami kenaikan yang signifikan terutama sejak diprioritaskan program wajib belajar 9 tahun, yaitu dari tahun 2019 masing-masing sebanyak 35.297, 14.161 dan 11.973 murid menjadi 35.810, 14.335 dan 12.130 murid pada tahun 2020. Sebaliknya jumlah guru mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan kecuali tingkat SMA, hal ini menyebabkan tingkat rasio guru dan murid tingkat SMA menjadi agak tinggi pada tahun 2020.

Kualitas pendidik dapat dilihat dari aspek kualifikasi dan kompetensi.. Sedangkan dari aspek kompetensi, persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi sangat rendah pada semua jenjang pendidikan baik SD dan SMP. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik ini mempengaruhi kemampuan inovasi dan kreatifitas dalam mengajar.

Rendahnya kompetensi guru di Kabupaten Paser disebabkan karena ketidaksesuaian disiplin ilmu guru dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, masih rendahnya minat guru dalam mengembangkan diri untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar.

h. Fasilitas Pendidikan

Kemajuan dunia pendidikan pada suatu wilayah tidak lepas dari campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan adalah peningkatan jumlah sekolah dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2021, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan adalah sekolah dasar 234 unit, SLTP 93 unit, SLTA 41 unit, dan Perguruan Tinggi 4 unit. Keberadaan fasilitas pendidikan itu tersebar secara tidak merata antar kecamatan. Tanah Grogot sebagai ibu kota memiliki fasilitas pendidikan terbanyak, sedangkan kecamatan dengan fasilitas terrendah adalah Muara Samu.

Tabel II.36
Keberadaan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	KECAMATAN	SD SEDERAJAT			SMP SEDERAJAT			SMA SEDERAJAT			SMK			PT			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
1	Kec. Batu Sopang	13	3	16	4	1	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	23
2	Kec. Tanjung Harapan	7	0	7	6	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14
3	Kec. Paser Belengkong	25	3	28	8	2	10	1	2	3	0	0	0	0	0	0	41
4	Kec. Tanah Grogot	34	7	41	13	10	23	4	6	10	4	2	6	1	3	4	84
5	Kec. Kuaro	25	3	28	7	2	9	1	2	3	0	1	1	0	0	0	41
6	Kec. Long Ikis	36	4	40	9	2	11	2	1	3	0	2	2	0	0	0	56
7	Kec. Muara Komam	19	0	19	5	0	5	1	1	2	0	1	1	0	0	0	27
8	Kec. Long Kali	30	4	34	8	6	14	1	1	2	0	2	2	0	0	0	52
9	Kec. Muara Samu	9	0	9	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12
10	Kec. Batu Engau	12	0	12	8	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	22
	TOTAL	**210**	**24**	**234**	**70**	**23**	**93**	**15**	**14**	**29**	**4**	**8**	**12**	**1**	**3**	**4**	**372**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Paser, 2020

2.3.1.2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Angka kematian bayi pada tahun 2016 sebesar 66 kasus, pada tahun 2017 terjadi penurunan kasus kematian bayi sebesar 40 kasus sedangkan pada tahun 2020 kembali turun menjadi49 kasus.. Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh gangguan pranatal, saluran napas, diare, gangguan sistem syaraf, tetanus dan infeksi lainnya.

Tabel II.37.
Jumlah Angka Kematian Bayi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kematian Bayi	66	40	62	65	49

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

b. Angka Kematian Balita (AKB)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), capaian Angka Kematian Balita (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Angka kematian balita pada tahun 2016 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan kasus kematian balita menjadi 51 kasus pada tahun 2017, 66 kasus pada tahun 2018 dan 70 kasus pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus kematian balita sebesar 55 kasus.

Tabel II.38.
Jumlah Angka Kematian Balita

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kematian Balita	11	51	66	70	55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Paser dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dari 9 kasus pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 12 kasus pada tahun 2017, kembali turun menjadi 7 kasus pada tahun 2018, dan masing-masing 5 kasus pada tahun 2019 dan tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir, program pencegahan kejadian kasus kematian ibu melahirkan perlu terus menerus ditingkatkan.

Tabel II.39.
Jumlah Angka Kematian Ibu

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kematian Ibu	9	12	7	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

Persoalan kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2016-2020 umumnya disebabkan oleh karena tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masih rendah mengenai masalah kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan semasa kehamilan, pendarahan, ekslapsi, lambat dirujuk, dan persalinan belum sepenuhnya ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan. Selain itu kondisi geografis yang sangat luas dan sulit menyebabkan kurang atau sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

d. Status Gizi Balita

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Tabel II.40.
Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase balita dengan gizi buruk	4,1%	12,1%	0,08%	0,07%	0,05%
2	Persentase balita dengan gizi kurang	17,5%	18,4%	12,40%	12,40%	7,85%
3	Persentase Balita Stunting	24,6%	31,8%	27,54%	21,8%	14,18%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

Berdasarkan data di atas perkembangan status gizi buruk di Kabupaten Paser tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dari 4,1% pada tahun 2016 menjadi 0,05% pada tahun 2020, balita dengan status gizi kurang turun dari 17,5% pada tahun 2016 turun menjadi 7,85% pada tahun 2020. Sedangkan persentase balita stunting cukup fluktuatif dimana pada tahun 2016 persentase balita stunting sebesar 24,6%, naik menjadi 31,8% pada tahun 2017 kemudian cenderung turun menjadi 27,54% pada tahun 2018, 21,8% pada tahun 2019 dan 14,18 pada tahun 2020.

Meskipun terjadi penurunan balita stunting namun penurunan stunting tetap harus diprioritaskan dan untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak karena stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal dan berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa serta menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit.

e. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, jumlah posyandu di Kabupaten Paser menunjukkan tren yang agak stagnan yakni 356 unit. Pada tahun 2019, jumlah posyandu di Kabupaten Paser meningkat menjadi 361 unit dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 370 unit. Dari 370 posyandu pada tahun 2020 melayani 24,328

balita. Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita dengan demikian rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Paser pada tahun 2020 adalah 15,21 atau sudah memadai dalam melayani balita.

Meskipun rasio posyandu sudah ideal, namun perlu untuk meningkatkan partisipasi kader dalam rangka mendukung kesadaran masyarakat untuk datang dalam kegiatan pemantauan tingkat status gizi anak, ibu hamil dan menyusui di posyandu.

Tabel II.41.
Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per Seribu Balita Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	356	356	356	361	370
Jumlah Balita	27.033	27.099	29.401	30.012	24.328
Rasio Posyandu per Seribu balita	13,17	13,14	12,11	12,30	15,21

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser, 2021

f. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Paser dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 128 unit dengan rasio sebesar 0,0005. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 2.016 penduduk.

Tabel II.42.
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk *)	248.037	254.503	258.022	285.894	275.452
Jumlah Puskesmas	17	18	19	19	19
Jumlah Puskesmas Pembantu	108	109	109	109	109
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	125	127	128	128	128
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,0005	0,0004	0,0005	0,0005	0,0005

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

Fasilitas kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemerataan jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan yang ada. Letak lokasi persebaran dan jumlah fasilitas

kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu baik faktor geografis maupun non geografis. Tabel berikut ini menunjukkan sebaran sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Paser pada tahun 2018-2020.

Tabel II.43.
Penyebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Paser 2018-2020

Kecamatan	2018			2019			2020		
	RS	PKM	Klinik	RS	PKM	Klinik	RS	PKM	Klinik
Batu Sopang	0	1	13	0	1	12	0	1	11
Muara Samu	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Batu Engau	0	1	2	1	1	2	1	1	2
Tanjung Harapan	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Pasir Belengkong	0	3	2	0	3	2	0	3	3
Tanah Grogot	2	3	2	2	3	3	2	3	4
Kuaro	0	2	0	0	2	0	1	2	1
Long Ikis	0	3	5	0	3	5	6	3	6
Muara Komam	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Long Kali	0	3	2	0	3	2	0	3	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2021

Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi. Dengan implementasi standar akredaitasi akan menjamin manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis telah dilakukan secara berkesinambungan.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Paser adalah sebanyak 19 puskesmas, dimana terdiri dari 10 puskesmas rawat inap dan 9 puskesmas non rawat inap yang tersebar di 10 kecamatan. Hingga Tahun 2019, seluruh Puskesmas sudah terakreditasi yakni 1 puskesmas dengan kategori Dasar, 17 puskesmas dengan kategori Madya dan 1 puskesmas dengan kategori Utama. Pada 2020 tidak dilakukan penilaian akreditasi Puskesmas karena kendala pandemi Covid-19

Tabel II.44.
Kategori Akreditas Puskesmas di Kabupaten Paser 2016-2019

No	Nama Puskesmas	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Long Ikis	Dasar			Madya
2	Kuaro	Madya			Utama
3	Tanah Grogot		Madya		
4	LongKali		Madya		
5	Mendik		Madya		
6	Pasir Belengkong		Madya		
7	Padang Pengrapat		Madya		

No	Nama Puskesmas	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
8	Suliliran baru		Madya		
9	Muser		Madya		
10	Batu Kajang			Madya	
11	Muara Komam			Madya	
12	Kerang			Madya	
13	Suatang Baru			Madya	
14	Tanjung Aru			Madya	
15	Krayan			Dasar	
16	Long Gelang			Madya	
17	Lolo			Madya	
18	Sebakung Taka				Madya
19	Senaken				Madya

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

g. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2020, jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Paser sebanyak 70 orang atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebanyak 60 dokter. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser sebesar 25,45. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di Kabupaten Paser melayani 3.935 penduduk.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Paser tahun 2020 adalah sebanyak 32 orang meningkat dari tahun 2019 sebanyak 28 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser tahun 2020 adalah sebesar 11,6. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di Kabupaten Paser melayani 8.607 penduduk.

Jumlah dokter gigi di Kabupaten Paser tahun 2020 sebanyak 21 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 20 orang. Rasio dokter gigi di Kabupaten Paser tahun 2020 per 100.000 penduduk sebesar 7,2.

Tabel II.45.
Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	248,037	254,503	258,022	285.894	275.452*
Dokter Umum	49	55	41	60	70
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	20	22	14,64	21,05	25,45
Dokter Spesialis	16	25	28	28	32
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	6	10	10	9,8	11,6
Dokter Gigi	19	19	16	20	21
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	8	7	5,71	7,01	7,2

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021 *)Hasil sensus penduduk 2020*

h. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Paser pada tahun 2020 sebanyak 19 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas pada tahun 2018 tidak tersedia data. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 109 puskesmas pembantu yang tersebar di 144 desa/kelurahan.

Tabel II.46.
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	17	18	19	19	19
Jumlah Kecamatan	10	10	10	10	10
Jumlah Kunjungan Puskesmas	367.712	413.906	-	-	-
Jumlah Puskesmas Pembantu	108	109	109	109	109
Jumlah Desa/ Kelurahan	144	144	144	144	144

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser, 2021

i. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Paser tahun 2020 mencapai 93%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kabupaten

Paser ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel II.47.
Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	5.365	5.159	4.725	5.978	5.235
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	6.197	5.915	5.978	5.204	5.978
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,70	87,20	79,12	87,10	93,00

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2021

Derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pelayanan kesehatan, tetapi yang lebih dominan justru adalah kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat mendukung peningkatan derajat kesehatan yakni melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk mengetahui tingkat PHBS masyarakat dilakukan melalui Pengukuran Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Tabel II.48.
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Paser berdasarkan Kecamatan, 2020

Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat
Batu Sopang	0,217
Muara Samu	0,031
Batu Engau	0,071
Tanjung Harapan	0,046
Pasir Belengkong	0,191
Tanah Grogot	0,239
Kuaro	0,161
Long Ikis	0,132
Muara Komam	0,104
Long Kali	0,136
Kabupaten Paser	**0,174**

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2020

Data di atas menunjukkan bahwa Nilai IKS Kabupaten Paser adalah 0,174 atau Tidak Sehat. Kecamatan yang memiliki nilai IKS tertinggi adalah Kecamatan Tanah Grogot (0,239) sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Muara Samu (0,31).

Tabel II.49.
Cakupan Keluarga Sehat Di Kabupaten Paser
Berdasarkan Indikator Penilaian Pada Tahun 2020

No	Indikator	Cakupan (%)
1	Keluarga mengikuti program KB	52,00
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	84,99
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	88,80
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	80,25
5	Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan	75,87
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	41,95
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	24,78
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	41,79
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	47,67
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	51,25
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	78,83
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	88,63

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2020

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa terdapat 6 indikator yang memiliki capaian berhasil dan terdapat 6 indikator yang kurang berhasil dan menjadi prioritas masalah untuk diselesaikan yakni: Penanganan penderita hipertensi, Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Pencegahan dan pengobatan TB paru, Kampanye anti rokok, Peningkatan cakupan JKN, Peningkatan cakupan layanan KB.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Paser. Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa aspek.

a. Konektivitas Antar Wilayah

Infrastruktur wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong produktivitas penduduk. Jaringan jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam pengembangan wilayah, jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Konektivitas antar wilayah dapat dilihat dari kekuatan interaksi antar wilayah yang dihitung menggunakan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah dan

semakin kompleks jaringan jalan. Berdasarkan Teori Grafik (K.J. Kansky) menyatakan bahwa daerah yang dihubungkan oleh jaringan jalan yang kompleks berarti memiliki pola interaksi keruangan yang tinggi. Indeks konektivitas dihitung menggunakan perbandingan jumlah jaringan jalan dengan jumlah kota dalam suatu wilayah.

$$\alpha = \frac{e}{v}$$

α = indek konektivitas
e = jumlah jaringan jalan
v = jumlah kota dalam suatu wilayah

Masih kurangnya jumlah jaringan jalan dan rendahnya kualitas jalan di berbagai daerah sangat berpengaruh terhadap konektifitas dan aksesibilitas wilayah tersebut, di lihat dari bagaimana kemudahan masyarakat dalam menjangkau suatu wilayah yang tentu saja berpengaruh terhadap waktu, biaya dan usaha. Kondisi Jalan Kabupaten Paser saat ini secara keseluruhan dikatagorikan tidak Mantap, karena kundisi jalan rusak masih jauh lebih besar dari pada kondisi jalan yang baik. Selain Jalan kondisi Jembatan rusak juga masih banyak dikeluhkan warga masyarakat di berbagai wilayah.

Tabel II. 50
Indeks Konektivitas pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Jaringan Jalan	Jumlah Desa	Indeks Konektivitas
1	Tanah Grogot	26	16	1.63
2	Pasir Belengkong	13	15	0.87
3	Kuaro	13	13	1.00
4	Long Ikis	24	26	0.92
5	Long Kali	25	23	1.09
6	Batu Sopang	8	9	0.89
7	Muara Komam	12	13	0.92
8	Muara Samu	11	9	1.22
9	Batu Engau	12	13	0.92
10	Tanjung Harapan	5	7	0.71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020

Berdasarkan tabel II.50 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tanah Grogot yang merupakan ibu kota kabupaten memiliki indeks konektivitas paling tinggi dan Kecamatan tanjung harapan yang merupakan daerah paling ujung memiliki indeks konektivitas paling rendah.

Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas suatu wilayah yang akan berdampak terhadap pembangunan/perkembangan wilayah tersebut. Untuk menghitung konektivitas wilayah perlu diperhitungkan juga terkait kondisi jalan tersebut. Untuk menghitung koefisien kondisi jalan, makin tinggi nilai koefisien maka makin baik kondisi jalan tersebut, dengan memberikan nilai bobot pada masing-masing kondisi jalan sebagai berikut :

a) Kondisi Baik = 1,00
b) Kondisi Sedang = 0,75
c) Kondisi Rusak Ringan = 0.50
d) Kondisi Rusak Berat = 0,25

Tabel II.51.
Persentase Kondisi Jalan Kabupaten pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)
1	Tanah Grogot	179.75	20.17	32.91	38.69	8.23
2	Pasir Belengkong	126.99	9.94	29,92	50.42	9.72
3	Kuaro	70.30	10.04	45,98	41.42	2.57
4	Long Ikis	89.34	39.90	33,45	26.65	-
5	Long Kali	191.52	7.95	28,36	61.34	2.35
6	Batu Sopang	72.78	10.85	18,82	69.52	0.81
7	Muara Komam	111.98	13.21	23,04	63.75	-
8	Muara Samu	25.05	-	14,15	85.05	0.80
9	Batu Engau	103.08	3.96	7,70	88.34	-
10	Tanjung Harapan	34.39	-	7,42	92.00	0.58
	JUMLAH	**1,005.19**	**13.29**	**26.58**	**56.70**	**3,43**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien kondisi jalan di masing-masing kecamatan, dari hasil analisa dapat dilihat bahwa kondisi jalan yang paling baik adalah di Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai koefisien kondisi jalan sebesar 0,66 dan yang paling rusak ada di kecamatan Muara Samu dengan nilai koefisien kondisi jalan sebesar 0,40. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52
Koefisien Kondisi Jalan pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)	Koef. Kondisi Jalan
1	Tanah Grogot	20.17	32.91	38.69	8.23	0.66
2	Pasir Belengkong	9.94	29.92	50.42	9.72	0.60
3	Kuaro	10.04	45.98	41.42	2.57	0.66
4	Long Ikis	39.90	33.45	26.65	-	0.78
5	Long Kali	7.95	28.36	61.34	2.35	0.60
6	Batu Sopang	10.85	18.82	69.52	0.81	0.60
7	Muara Komam	13.21	23.04	63.75	-	0.62
8	Muara Samu	-	14.15	85.05	0.80	0.40
9	Batu Engau	3.96	7.70	88.34	-	0.54
10	Tanjung Harapan	-	7.42	92.00	0.58	0.52
	JUMLAH	**13.29**	**26.58**	**56.70**	**3.43**	
	BOBOT NILAI	**1.00**	**0.75**	**0.50**	**0.25**	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020

Total Indeks Konektivitas dihitung dengan cara mengalikan Indeks Konektifitas dengan Koefisien Kondisi Jalan pada tabel di atas. Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh Kecamatan Tanah Grogot mempunyai nilai paling tinggi yaitu sebesar 1,08 dan Kecamatan Tanjung Harapan memperoleh nilai paling rendah sebesar 0,37. Hasil perhitungan indeks konektivitas menunjukkan bahwa Kecamatan Tanah Grogot memiliki indeks konektivitas tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain, sebagian besar wilayah Kecamatan Tanah Grogot telah memiliki konektivitas antar desa dan pembangunan infrastruktur diwilayah tersebut lebih tinggi dbandingkan dengan wilayah lainnya, sedangkan Kecamatan Tanjung Harapan memiliki indeks konektivitas yang paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, tidak semua wilayah di Kecamatan Tanjung Harapan memiliki jaringan jalan yang menghubungkan antar desa dan ada beberapa desa yang hanya dapat ditempuh melalui transportasi air.

Tabel II.53
Total Indeks Konektivitas pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser

NO	Kecamatan	Indeks Konektivitas	Koef. Kondisi Jalan	Total Indeks
1	Tanah Grogot	1.63	0.66	1.08
2	Pasir Belengkong	0.87	0.60	0.49
3	Kuaro	1.00	0.66	0.66
4	Long Ikis	0.92	0.78	0.50
5	Long Kali	1.09	0.60	0.72
6	Batu Sopang	0.89	0.60	0.58
7	Muara Komam	0.92	0.62	0.53
8	Muara Samu	1.22	0.40	0.52
9	Batu Engau	0.92	0.54	0.66
10	Tanjung Harapan	0.71	0.52	0.37

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020

b. Jalan dan Jembatan

Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Paser yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah 23,48% dan pada tahun 2020 mencapai angka 39,87%. Terdapat kenaikan kondisi jalan mantap karena telah dilakukan banyak perbaikan namun masih jauh dibawah rata-rata kondisi jalan mantap provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 58,68%.

Tabel II.54.
Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

NO.	KONDISI JALAN	2016	2017	2018	2019	2020
	PANJANG JALAN (KM)	**1005,19**	**1005,19**	**1005.19**	**1005.19**	**1005.19**
1	BAIK	26.24%	24.97%	15.90%	20.61%	13.29%
2	SEDANG	34.96%	19.25%	2.21%	2.87%	26.58%
3	RUSAK RINGAN	23.69%	29.19%	30.77%	37.69%	56.70%
4	RUSAK BERAT	15.11%	26.59%	51.12%	38.83%	3.43%
	JUMLAH	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020

Selain Jalan status Kabupaten terdapat juga ruas jalan desa strategis dengan panjang jalan 205,91 Km dengan rincian tipe perkerasan Aspal sepanjang 33,127 Km, perkerasan Beton 6,954 Km, Kerikil 141,138 Km dan Tanah 24,688 Km, dengan Persentase kondisi Baik sebesar 6,76%, Kondisi sedang sebesar 2,2%, kondisi rusak ringan sebesar 50,12% dan kondisi rusak berat 40,91%.

Tabel II.55.

Persentase Kondisi Jalan Desa Strategis Tahun 2020

NO.	KONDISI JALAN	2020
	PANJANG JALAN (KM)	**205.91**
1	BAIK	6.76%
2	SEDANG	2.20%
3	RUSAK RINGAN	50.12%
4	RUSAK BERAT	40.91%
	JUMLAH	**100.00%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Penjumlahan panjang jalan dengan sesuai Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 620/88/2016 tanggal 15 Maret 2016, Tentang Penetapan Nama-Nama Jalan dalam Kabupaten Paser dan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 620/KEP-173/2020 tanggal 28 Februari 2020, Tentang Data Ruas Jalan Desa Strategis di Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2020-2024, menghasilkan kondisi jalan mantap sebesar 34,62% dan jalan tidak mantap sebesar 65,38%.

Tabel II.56

Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020

NO.	KONDISI JALAN	SK Status Jalan Kabupaten (Km)	SK Status Jalan Desa Strategis (Km)	Jumlah	Persentase (%)
1	BAIK	133.57	13.92	147.49	12.18
2	SEDANG	267.21	4.54	271.74	22.44
3	RUSAK RINGAN	569.97	103.21	673.18	55.58
4	RUSAK BERAT	34.44	84.25	118.68	9.80
	JUMLAH	**1,005.19**	**205.91**	**1,211.10**	**100.00**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622/K.294/2018 tentang Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya sebagai jalan kolektor primer-2, jalan kolektor primer-3, jalan kolektor primer-4, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder di Provinsi Kalimantan Timur, maka status Jalan Provinsi di Kabupaten Paser sepanjang 14, 45 Km, pada tahun 2020 kondisi jalan baik sepanjang 3 Km, kondisi jalan sedang sepanjang 6,35 Km, kondisi jalan rusak ringan sepanjang 3,5 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 1,6 Km sehingga status jalan provinsi dengan kondisi mantap sebesar 64,71% dan kondisi jalan tidak mantap sebesar 35,29%.

Tabel II.57
Persentase Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016-2020

NO.	KONDISIJALAN	2016	2017	2018	2019	2020
	PANJANGJALAN(KM)	**242.43**	**242.43**	**14.45**	**14.45**	**14.45**
1	BAIK	18.03%	17.20%	29.20%	20.76%	20.76%
2	SEDANG	31.06%	14.06%	7.82%	43.94%	43.94%
3	RUSAKRINGAN	37.22%	24.30%	-	24.22%	24.22%
4	RUSAKBERAT	13.69%	44.44%	62.98%	11.07%	11.07%
	JUMLAH	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Sumber: *Data Dasar Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2016-2017*
Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2018-2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), maka Jalan Nasional di Kabupaten Paser sepanjang 223,69 Km, pada tahun 2020 kondisi jalan baik sepanjang 21,89 Km, kondisi jalan sedang sepanjang 179,12 Km, kondisi jalan rusak ringan sepanjang 22,48 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 0,2 Km sehingga status jalan provinsi dengan kondisi mantap sebesar 89,86% dan kondisi jalan tidak mantap sebesar 10,14%.

Tabel II.58
Persentase Kondisi Jalan Nasional Tahun 2016-2020

NO.	KONDISI JALAN	2016	2017	2018	2019	2020
	PANJANG JALAN (KM)	**223.69**	**223.69**	**223.69**	**223.69**	**223.69**
1	BAIK	58.02%	58.02%	5.38%	0.00%	9.79%
2	SEDANG	33.38%	33.38%	93.75%	99.58%	80.08%
3	RUSAK RINGAN	8.60%	8.60%	0.75%	0.42%	10.05%
4	RUSAK BERAT	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.09%
	JUMLAH	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Data Dasar Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2016-2017
Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2018-2021

Tabel II.59
Persentase Kondisi Jalan Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Paser	15.90%	2.21%	30.77%	51.12%	100.00%
2	Kutai Barat	15.27%	9.28%	28.07%	47.38%	100.00%
3	Kutai Kartanegara	48.79%	20.94%	16.59%	13.67%	100.00%
4	Kutai Timur	14.27%	43.72%	22.97%	19.04%	100.00%
5	Berau	32.46%	32.92%	24.65%	9.98%	100.00%

NO.	KABUPATEN/KOTA	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
6	Penajam Paser Utara	34.97%	42.05%	11.05%	11.93%	100.00%
7	Mahakam Ulu	0.00%	6.86%	24.29%	68.84%	100.00%
8	Balikpapan	66.16%	30.15%	1.63%	2.06%	100.00%
9	Samarinda	50.73%	24.35%	5.76%	19.16%	100.00%
10	Bontang	55.13%	40.61%	2.89%	1.36%	100.00%
	Kalimantan Timur	**33.37%**	**25.31%**	**16.87%**	**24.45%**	**100.00%**

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Secara keseluruhan kondisi jalan di Paser jauh lebih buruk dari kabupaten/kota lainnya, hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Paser yang cukup luas dan penduduknya sangat tersebar, sehingga memerlukan penanganan dan anggaran yang lebih besar, sedangkan kondisi keuangan di Kabupaten Paser cukup terbatas.

Kondisi sarana Jembatan sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas yang menentukan tingkat pembangunan infrastruktur wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut.

Tabel II.60

Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2020 Di Kabupaten Paser

No.	KECAMATAN	JUMLAH (Buah)	KONDISI					
			BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tanah Grogot	180	151	83.88	6	3.33	23	12.77
2	Paser Belengkong	161	125	77.63	13	8.07	23	14.28
3	Kuaro	109	82	75.22	21	19.26	6	5.50
4	Longikis	122	108	88.52	4	3.27	10	8.19
5	Longkali	162	109	67.28	26	16.04	27	16.66
6	Batu Sopang	24	16	66.66	-	-	8	33.33
7	Muara Komam	144	98	68.05	9	6.25	37	25.69
8	Muara Samu	19	14	73.68	1	5.26	4	21.05
9	Batu Engau	95	85	89.47	1	1.05	9	9.47
10	Tanjung Harapan	19	8	42.10	4	21.05	7	36.84
	JUMLAH	**1.035**	**796**		**85**		**154**	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

c. Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2018 menunjukan jumlah angka 1:21,91 pada tahun 2019 menjadi 1:16,74 meningkat karena adanya normalisasi, rehabilitasi, dan pembangunan saluran irigasi yang sebagian besar bersumber dari anggaran bantuan keuangan provinsi dan penurunan jumlah lahan persawahan. Rasio tersebut didapat dari hasil perhitungan panjang saluran irigasi (km) dibagi dengan luas lahan sawah (Ha). Sampai dengan tahun 2018

panjang saluran irigasi 758,74 km yang terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 164,864 km, irigasi skunder 516,382 km, dan tersier sepanjang 77,050 km, dengan luas lahan sawah seluas 16.622 Ha, dan luas lahan sawah pada tahun 2019 seluas 12.702 Ha.

Tabel II.61.

Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2019-2020 Kabupaten Paser

No.	Jaringan Irigasi	Panjang (M)	2019				2020			
			Baik	Sedang / Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah (%)	Baik	Sedang / Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah (%)
1	Primer	164,864.00	54.05	45.95	0.00	100.00	88.73	11.27	-	100.00
2	Sekunder	516,832.00	68.15	21.35	10.50	100.00	74.82	18.02	7.17	100.00
3	Tertier	77,050.00	0.00	62.62	37.38	100.00	44.00	40.62	15.38	100.00
	JUMLAH	**758,746.00**	**60.87**	**26.41**	**12.72**	**100.00**	74.71	18.85	6.45	**100.00**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2020

Kondisi jaringan tersier relatif lebih buruk dibandingkan jaringan lainnya, hal ini disebabkan kurangnya sinergitas antara dinas terkait, dimana untuk Jaringan irigasi primer dan sekunder dikerjakan oleh Dinas PU dan Tata Ruang, sedangkan Jaringan irigasi Tersier merupakan kewenangan Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, disamping itu karena kurangnya ketersediaan anggaran.

d. Potensi Air Baku

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Kabupaten Paser memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Adang–Kuaro, DAS Kandilo, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang.

1) DAS bagian hulu Kabupaten Paser yaitu DAS Kandilo seluas 3.416,1 Km^2 yang tersebar di Kacamatan Muara Komam, Kecamatan Batu Sopang, dan Muara Samu.
2) DAS bagian tengah Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuaro, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian tengah Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.
3) DAS bagian hilir Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuaro, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian hilir Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali

Tabel II.62
Data Debit Sungai Utama di Kabupaten Paser

No	Wilayah Pelayanan	Koordinat	Dalam (m)		Lebar (m)		Debit (m^3/det)		
			Aktual	Fluk-tuasi	Aktual	Fluk-tuasi	Max	Min	Rata Rata
1	**Sungai Kandilo Hilir**	S: 01° 56' 33,7 " E:116° 10' 52,2"	3,00	6,85	102,00	102,00	**22,45**	**16,9**	**19,685**
2	**Sungai Kandilo Hulu (Batu Sopang)**	S: 01 49' 45,7" E: 115 57' 19,6"					**5.5**	**1,6**	**3,575**
3	**Sungai Telake**	S: 01° 31' 13,5" E: 116° 19' 16,8"							**2,183**
4	**Sungai Lombok**	S: 01° 37' 08,13" E: 116° 09' 08,03"							**0,30**
5	**Sungai Muru**	S: 01° 49' 53,1" E: 116° 04' 55,1"	0,75	3,50	17,50	24,00			**0,997**
6	**Sungai Komam**	S: 01° 40' 34,35" E: 115° 48' 00,23"	0,45	3,25	17,00	22,00			**0,727**
7	**Sungai Setiu**	S: 01 49' 45,7" E: 115 57' 19,6	0,50	3,50	12,00	20,00			**0,588**
8	**Sungai Kerang**	S: 02° 14' 50,36" E: 116° 03' 54,84"							**1,834**

Sumber: Kompilasi data Studi Evaliasi Lingkungan DAS Kandilo & Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Paser 2017

Tabel II.63
Arah Pembangunan Sumber Air Baku Terpilih pada 5 Tahun Kedepan

No	Wilayah Pelayanan	Sumber Air Baku		Keterangan
		Eksisting	Pengembangan	Koordinat
1	Tanah Grogot	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo	S: 01° 56' 33,7 " E:116° 10' 52,2"
2	Pasir Belengkong	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo	S: 01° 56' 26,8" E: 116° 10' 52,0"
3	Longkali	Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 1°31'8.96" E :116°19'16.44"
4	Longikis	Sungai Lombok Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 01° 37' 10,5" E: 116° 09' 08,8"
5	Kuaro	Sungai Muru Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 01° 49' 53,1" E: 116° 04' 55,1"
6	Muara Komam	Sungai Komam	Sungai Komam	S: 01° 40' 34,35" E: 115° 48' 00,23"
7	Batu Kajang	Sungai Kandilo	Sungai Setiu	S: 01° 49' 45,7" E: 115° 57' 19,6"
8	Batu Engau	Sungai Kerang	Sungai Kerang	S: 02° 14' 50,00" E: 116° 03' 55,00"
9	Muara Samu	-	Sungai Muser/Samu	S: 02° 01' 12,30" E: 115° 56' 04,60"
10	Tanjung harapan	-	Air Tanah (Sumur Bor)	S: 02° 15' 43,60" E: 116° 31' 49,65"

Sumber : PDAM Tirto Kandilo & Analisis Konsultan, 2020

Tabel. II.64

Pembagian Zonasi Pelayanan SPAM Kabupaten Paser

EKSISTING			RENCANA PENGEMBANGAN		
Zona	**Perkotaan & IKK**	**Cakupan Wilayah**	**Zona**	**Perkotaan & IKK**	**Penambahan Cakupan Wilayah**
I	Perkotaan Tanah Grogot	Kecamatan Tanah Grogot: Kel tanah Grogot, Ds Tepian Batang, Ds Janju, Ds Sempulang, Ds Tapis, Ds Padang Pangrapat, Ds Jone, Ds Senaken, Ds Tanah Priuk, Rantau Panjang	I	Perkotaan Tanah Grogot	Ds Sungai Tuak, Ds Pondong Baru
II	IKK Long Kali	Kelurahan Long Kali, Ds Putang	II	Perkotaan Long Ikis, Long Kali dan Kuaro	Ds Mendik, Ds Mendik Makmur, Ds Mendik Bakti, Ds Mendik Karya, Ds Bente Tualan.
III	IKK Longikis	Kelurahan Longikis, Ds Semuntai, Ds Lombok, Ds pait, Ds Tajur, Ds Krayan bahagia, Ds Jemparing, Ds Atang Pait.			Ds Sawit Jaya , Ds Krayan Makmur.
IV	IKK Kuaro	Kelurahan Kuaro, Ds Klempangsari, Ds Modang, Ds sandelei			Ds rangan, Ds Lolo
V	IKK Pasir Balengkong	Ds.Sangkuriman, Ds Damit, Ds Olongpinang, Ds Bekoso, Ds pasir balengkong, Desa Suatang kateban , Ds Suliran Baru,	III	IKK Pasir Balengkong	Ds Suatang, Ds Suliliran Ds Suliliran Baru, Ds Suatang Baru, Ds Lempesu, Ds Pulau Rantau (T Grogot), Ds Pepara (T Grogot), Ds Sungai Tuak (T Grogot)
VI	IKK Batu Sopang	Ds Batu Sopang,	IV	IKK Batu Sopang	Ds Songka (Batukajang), Ds Sungai Terik, Ds Kasungai,
VII	IKK Muara Komam	Kel Muara Koman, Ds batubutok, Ds Selerong	V	IKK Muara Komam	IKK Muara Komam
VIII	IKK Batu Engau	Ds Kerang	VI	IKK Batu Engau	Ds Tampakan, Ds Mengkudu, Ds Kerangdayo
			VII	Muara Samu	Ds Muser , Ds Biu . Ds Libur Dinding
			VIII	Tanjung Harapan	Ds Tanjung Aru

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2021

e. Masalah Banjir dan Genangan

Potensi terjadinya di Kabupaten Paser terjadi di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Batu Engau, dan Tanjung Harapan.

Faktor penyebab kondisi banjir pada masing-masing kecamatan berbeda-beda, khusus pada kecamatan Tanah Grogot, secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah :

1) Sedimentasi

Pengaruh sedimentasi terhadap terjadinya banjir di daerah perkotaan saat ini

adalah berkurangnya kapasitas saluran drainase yang ada sehingga pada saat aliran limpasan permukaan mencapai kondisi puncak (peak), saluran tersebut tidak mampu menampung beban aliran yang ada sehingga aliran akan meluap.

2) Kapasitas Saluran Eksisting Tidak Memadai

Saat ini beberapa ruas saluran drainase yang ada (eksisting) sudah tidak memadai atau tidak cukup menampung limpasan aliran permukaan yang terjadi. Hal ini diakibatkan selain terjadinya sedimentasi di dalam saluran, juga diakibatkan karena perencanaan saluran drainase yang ada terutama saluran sekunder dan primer dibuat secara sepotong-potong atau per bagian sesuai dengan kebutuhan daerah layanannya. Selain itu permasalahan sosial dari penduduk setempat seperti pemukiman atau pembangunan gedung yang tidak memperhatikan kondisi daya tampung saluran mengakibatkan terganggunya aliran pada saluran yang ada.

3) Pengaruh Pasang Air Laut

Seperti diketahui bahwa kota Tanah Grogot merupakan daerah yang dekat dengan pesisir pantai bagian timur, sehingga terdapat pengaruh pasang air laut terhadap pembuangan aliran drainase atau sungai yang ada. Pengaruh pasang air laut pada system drainase kota Tanah Grogot tidaklah begitu besar, mengingat jarak laut dengan kota yang cukup jauh.

4) Pemanfaatan Tata Guna Lahan

Pengaruh terhadap terjadinya banjir atau genangan akibat pemanfaatan tata guna lahan di wilayah perkotaan adalah, tidak tersedianya daerah resapan air hujan. Dengan semakin luasnya daerah pengembangan atau pembangunan di wilayah perkotaan maka semakin besar pula presentasi lahan yang tertutup bangunan sehingga koefisien pengalir untuk aliran permukaan semakin besar yang akan memperbesar aliran debit yang terjadi.

5) Penambahan Volume Air Limbah Domestik

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan maka akan semakin meningkat pula volume pembuangan limbah domestik. Mengingat di kota Tanah Grogot pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, pembuangan limbah domestik masih bercampur dengan saluran drainase perkotaan (belum ada saluran limbah tersendiri), sehingga beban yang harus ditanggung oleh saluran drainase yang ada semakin besar di tambah dengan hambatan-hambatan aliran dalam saluran akibat banyaknya sampah, yang mengakibatkan air meluap dan menggenangi daerah setempat.

Untuk daerah Kecamatan Tanah Grogot terdapat beberapa titik genangan dengan luasan, lama genangan dan tinggi genangan yang berbeda-beda, secara rata-rata luas genangan yang terjadi di kecamatan tanah grogot < 10 Ha, dengan tingi genangan rata-rata < 30 Cm dan sebagian tinggi rata-rata 30-50 cm, lama Genangan rata-rata < 2 Jam dan sebagian wilayah lama genangan 2-5 jam.

Secara detail Instansi terkait di Kabupaten Paser belum memiliki data-data banjir pada masing-masing Kecamatan dan Desa terdampak seperti luas genangan, tinggi genangan dan lama genangan serta permasalahan dan solusinya.

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan menyusun rencana teknis pengendali banjir.

e. Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Paser memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air minum perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola oleh masyarakat (program Pamsimas). Sementara sistem air minum non perpipaan diperoleh dengan menggunakan air sungai, sumur gali dan mobil tangki yang dikelola oleh masyarakat. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih dilakukan oleh hampir semua masyarakat Kabupaten Paser khususnya yang belum teraliri dari jaringan SPAM perpipaan, termasuk masyarakat yang tinggal didaerah dekat dengan sungai, kondisi air sungai yang keruh pada musim hujan menjadikan warga masih menangkap air hujan.

Akses air minum Kabupaten Paser selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Tahun 2019 mencapai 62,91% dan pada Tahun 2020 meningkat hingga 66,88%, dengan rincian di kawasan perkotaan terlayani 80,78% dan di kawasan perdesaan terlayani 58,70%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlayani akses air minum khususnya diwilayah pedesaan. Perkembangan persentase akses air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.65

Persentase Akses Air Minum Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Akses Air Minum Perkotaan	71,10	73,60	77,93	80,78
2	Akses Air Minum Pedesaan	49,59	52,21	54,06	58,70
Akses Air Minum Kabupaten Paser		**57,57**	**60,14**	**62,91**	**66,88**

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2021

Saat ini akses air minum Kabupaten Paser telah mencapai 66,88% dengan rincian akses air minum jaringan perpipaan sebesar 47,88% sedangkan akses air minum bukan jaringan perpipaan baru mencapai 19,00%. Dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Paser hanya 1 (satu) kecamatan yang belum dilayani oleh jaringan perpipaan yaitu kecamatan Tanjung Harapan. Adapun untuk wilayah yang sudah dilayani dengan jaringan PDAM juga masih belum sepenuhnya dapat terlayani 100% pelayanan dikarenakan karena secara jarak ataupun geografis

belum terjangkau dengan jaringan perpipaan PDAM. Untuk saat ini pelayanan sarana air minum di layani oleh SPAM-SPAM pedesaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Pamsimas ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti memanfaatkan sumur-sumur gali dan mata air yang untuk kebutuhan perorangan ataupun dikelola bersama untuk satu desa.

Selain itu ada beberapa wilayah seperti di kecamatan Muara Samu dan beberapa wilayah di kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam disediakan dengan pembuatan sistem pengolahan skala pedesaan dan juga sumur-sumur bor yang diusahakan oleh PT. Kideco, yang pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing masyarakat. Capaian persentase akses air minum jarigan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan PDAM (JP PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan Non PDAM (JP Non PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Total Jumlah Jiwa Terlayani Air Minum (JP dan BJP)	Persentase Akses Air Minum Layak (%)	Persentase Akses Air Minum Perpipaan (%)	Persentase Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (%)
1	Kabupaten Paser	111.418	21.403	52.710	185.531	66,88	47,88	19,00

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2021

Kebutuhan pelayanan air minum diwilayah perkotaan dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser, dimana PDAM ini mempunyai pelayanan perkotaan dan beberapa unit pelayanan. Unit adalah satuan Kerja PDAM yang terdapat di Kecamatan dimana didalamya terdapat manajemen dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sendiri, seluruhnya berjumlah 9 (Sembilan) unit yang terletak di ibukota kecamatan, antara lain :

a) PDAM Perkotaan Tanah Grogot : Kap. IPA 200 Lt/dt
b) PDAM Unit Pelayanan Pasir Belengkong : Kap. IPA 70 Lt/dt
c) PDAM Unit Pelayanan Batu Sopang : Kap. IPA 15 Lt/dt
d) PDAM Unit Pelayanan Long Kali : Kap. IPA 10 Lt/dt
e) PDAM Unit Pelayanan Long Ikis : Kap. IPA 45 Lt/dt
f) PDAM Unit Pelayanan Kuaro : Kap. IPA 40 Lt/dt
g) PDAM Unit Pelayanan Muara Komam : Kap. IPA 10 Lt/dt
h) PDAM Unit Pelayanan Batu Engau : Kap. IPA 10 Lt/dt
i) PDAM Unit Pelayanan Muara Samu : Kap. IPA 10 Lt/dt

Kebutuhan air minum di wilayah pedesaan sebagian besar belum dilayani oleh PDAM, untuk pemenuhan air bersih telah dibangun sarana dan prasarana air bersih perdesaan di beberapa desa yang dikelola oleh desa dan warga baik berupa sumur bor, bangunan penangkap mata air dan hidran umum.

Tabel II.67.
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik Dan Sumber Air Minum di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

No	Sumber Air Minum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Kemasan/ Isi Ulang	44,46	46,5	48,51	-	0
2	Leding	21,41	18,84	17,82	45,73	34,29
3	Sumur Bor/Pompa	0,66	0,19	3,67	1,37	5,58
4	Sumur/Mata Air Terlindung	9,00	9,00	10,00	16,26	12,43
5	Sumur/Mata Air Tak Terlindung	15,24	8,30	5,56	13,36	26,97
6	Lainnya	9,23	17,17	14,44	23,28	20,73
Jumlah		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan air minum, sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan air kemasan/isi ulang dan ledeng (PDAM), dimana Tahun 2020 mencapai 34,29%, sedangkan lainnya memakai sumur bor, sumur/mata air terlindungi dan tak terlindungi.

f. Penataan Ruang

1) Kebijakan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

a) Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki;
b) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan;
d) Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
f) Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan;
g) Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser; dan
h) Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya;

2) Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki disusun dengan strategi:

a) Mengembangkan sistem pusat kegiatan PKW, PKL, PPK dan PPL;
b) Memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan;
c) Mengembangkan aksesibilitas wilayah;
d) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dengan perdesaan;

Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah disusun dengan strategi:

a) Menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
b) Menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
c) Mengintegrasikan sistem transportasi Kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
d) Mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan - perkotaan;
e) Mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang; dan
f) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata;

3) Struktur Tata Ruang

Wilayah pengembangan di Kabupaten Paser dibagi ke dalam Wilayah Pembangunan (WP) yang disusun berdasarkan kesamaan fungsi kawasan dalam wilayah Kabupaten Paser. Pembagian WP juga dimaksudkan untuk membagi fokus pengembangan sehingga impuls pembangunan dapat tersebar secara merata ke seluruh wilayah. Berdasarkan karakteristik aktivitas dan pola distribusi lokasi pusat-pusat pemukiman, maka Kabupaten Paser dibagi menjadi 3 (tiga) WP yaitu :

a) WP Utara;
b) WP Tengah; dan
c) WP Selatan.

Pembagian WP didasarkan pada Konsep Pengembangan Wilayah dengan Pola Ring-Radial. Pertimbangan homogenitas wilayah ke dalam tiga WP dengan memperhatikan aspek pertumbuhan dan pemerataan. Pendekatan pembagian memperhatikan perbandingan secara proporsional antara sifat kawasan, yaitu pesisir, dataran tengah, dan pegunungan/pedalaman, sehingga setiap WP dibagi lagi ke dalam Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu :

a) SWP Pesisir.
b) SWP Tengah.
c) SWP Pegunungan/Pedalaman.

Masing-masing WP mempunyai oulet berupa pelabuhan di SWP pesisir.

a) Wilayah Pembangunan Utara

WP Utara merupakan pusat aktivitas dengan peran sebagai nodal penyebar pertumbuhan pada wilayah utara Kabupaten Paser, dengan dominasi fungsi sebagai nodal transportasi, kawasan konservasi, kawasan pemukiman dan kawasan industri dan pertambangan. WP Utara ini terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Long Ikis dan Long Kali. WP Utara juga diarahkan untuk menjadi pusat pemukiman yang terintegrasi untuk mendorong perkembangan Kabupaten Paser dengan menjadi pusat pelayanan bagi wilayah utara. Adapun rencana pengembangan fungsinya adalah sebagai berikut :

(1) Fungsi pelayanan umum/perkantoran, perdagangan dan jasa dikembangkan di pusatpusat pelayanan umum dengan skala pelayanan tingkat kecamatan;
(2) Fungsi industri, yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata;
(3) Fungsi permukiman, yang dikembangkan pada setiap pusat-pusat pemukiman, baik skala besar yang mengaglomerasi di dekat pusat aktivitas maupun pusat-pusat pemukiman skala kecil yang menyebar di dua kecamatan;
(4) Fungsi pertambangan, yang dikembangkan adalah pertambangan skala besar dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi;
(5) Fungsi pertanian, yang dikembangkan pada bagian Utara dengan komoditas padi, komoditas campuran dikembangkan pada daerah yang sesuai untuk lahan pertanian;
(6) Fungsi fasilitas sosial dan umum, dikembangkan pada pusat-pusat pemukiman dan skala pelayanan kecamatan; dan
(7) Fungsi lindung dan kawasan resapan air diarahkan pada dua kecamatan tetap dipertahankan keberadaannya.

b) Wilayah Pembangunan Tengah

WP Tengah merupakan pusat aktivitas terbangun yang terdiri dari Kecamatan Batu Sopang, Muara Komam, Kuaro, Tanah Grogot, dan Pasir Belengkong. WP ini merupakan pusat perkembangan Kabupaten Paser dengan akses yang intensif dan keterkaitan fisik yang dibentuk oleh satu-satunya koridor jalan yang ada di Kabupaten Paser. Adapun rencana pengembangan fungsinya adalah sebagai berikut :

(1) Fungsi pelayanan umum/perkantoran, perdagangan dan jasa dikembangkan di pusatpusat pelayanan umum dengan skala pelayanan tingkat kecamatan;
(2) Fungsi industri, yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata;

(3) Fungsi permukiman, yang dikembangkan pada setiap pusat-pusat pemukiman, baik skala besar yang mengaglomerasi di dekat pusat aktivitas maupun pusat-pusat pemukiman skala kecil yang menyebar di dua kecamatan;
(4) Fungsi pertambangan, yang dikembangkan adalah pertambangan skala besar dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi;
(5) Fungsi pertanian, yang dikembangkan pada bagian Utara dengan komoditas padi, komoditas campuran dikembangkan pada daerah yang sesuai untuk lahan pertanian;
(6) Fungsi fasilitas sosial dan umum, dikembangkan pada pusat-pusat pemukiman dan skala pelayanan kecamatan; dan
(7) Fungsi lindung dan kawasan resapan air diarahkan pada dua kecamatan tetap dipertahankan keberadaannya.

c) Wilayah Pembangunan Selatan

WP Selatan merupakan pusat pemukiman skala kecil yang sporadis melingkupi wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, Batu Engau, dan Muara Samu. Ketiga kecamatan ini memiliki potensi tambang dan perkebunan. Oleh karenanya, WP ini perlu didorong perkembangannya untuk menjadi kawasan eksploitasi sumberdaya alam tambang dan perkebunan, pesisir, hutan dan transportasi, namun tetap dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan iklim makro kawasan. Adapun rencana pengembangan fungsinya adalah sebagai berikut :

(1) Fungsi pelayanan umum-sosial, perdagangan/jasa dan perkantoran dengan tingkat pelayanan kecamatan di pusatkan pada Kerang, Muser, dan Tanjung Aru;
(2) Fungsi permukiman, yang dikembangkan di pusat kecamatan dan pelabuhan;
(3) Fungsi pertanian berupa budidaya hortikultura, perkebunan, dan palawija di daerah yang sesuai peruntukan lahannya di semua wilayah kecamatan;
(4) Fungsi transportasi, dengan pola jaringan transportasi darat dan sungai yang menghubungkan pusat-pusat kawasan perbatasan;
(5) Fungsi pertambangan, berupa eksploitasi batu bara dan galian C yang hampir merata pada seluruh wilayah; dan
(6) Fungsi lindung dan kawasan resapan air diarahkan pada 3 (tiga) kecamatan tetap dipertahankan keberadaannya.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
a) Sistem pusat permukiman; terdiri atas:
(1) Sistem perkotaan; dan
(2) Sistem perdesaan;

b) Sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri atas:
   (1) Sistem prasarana utama; terdiri:
      (a) Sistem jaringan transportasi darat;
      (b) Sistem jaringan perkeretaapian;
      (c) Sistem jaringan transportasi laut; dan
      (d) Sistem jaringan transportasi udara;
   (2) Sistem prasarana lainnya.
      (a) Sistem jaringan energi;
      (b) Sistem jaringan terestrial;
      (c) Sistem jaringan sumber daya air; dan
      (d) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Tabel. II.68
Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Paser

Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan	Fungsi	Hirarki
PKN	-	-	-
PKW	Perkotaan Tana Paser	Pusat pemerintahan skala wilayah Pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala wilayah Pusat perdagangan dan jasa skala wilayah Simpul transportasi nasional dan antar wilayah Pusat permukiman Pelayanan lainnya dengan skala regional antar Kabupaten	I
PKL	perkotaan Long Kali di Kecamatan Long Kali. perkotaan Long Ikis di Kecamatan Long Ikis; perkotaan Kuaro di Kecamatan Kuaro; perkotaan Muara Komam di Kecamatan Muara Komam; dan perkotaan Batu Kajang di Kecamatan Batu Sopang.	Pusat pemerintahan skala kabupaten Pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kabupaten Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten Kota persinggahan Pusat produksi dan pemasaran hasil SDA Pusat permukiman Pelayanan lainnya dengan skala kabupaten	II
PPK	perkotaan Pasir Belengkong di Kecamatan Pasir Belengkong; perkotaan Kerang di Kecamatan Batu Engau; perkotaan Muser di Kecamatan Muara Samu; dan perkotaan Tanjung Aru di Kecamatan Tanjung Harapan.	Pusat pemerintahan skala lokal Pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala lokal Pusat perdagangan dan jasa skala lokal Pusat produksi dan pemasaran hasil SDA dan hasil laut Pusat permukiman Pusat budaya Pelayanan lainnya dengan skala lokal	III

Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan	Fungsi	Hirarki
PPL	Desa Sebakung Taka, Mendik (Kec. Long Kali); Desa Bukit Seloka, Belimbing, Tiwei (Kec. Long Ikis); Desa Rantau Atas (Kec. Muara Samu); Desa Muara Payang, Muara Kuaro (Kec. Muara Komam); Desa Suliliran Baru, Kersik Bura, Olong Pinang (Kec. Pasir Belengkong); Desa Mengkudu (Kec. Batu Engau); dan Desa Lori (Kec. Tanjung Harapan).	Pusat pemerintahan skala lokal Pusat pelayanan umum skala lokal Pusat perdagangan dan jasa skala lokal Pusat produksi dan pemasaran hasil SDA Pusat permukiman	IV

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2035

4) Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi :

a) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
b) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
c) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
d) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

a) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
c) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
d) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

a) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
b) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
c) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
d) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/ kota yang berbatasan; dan

e) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Penentuan kawasan lindung dan budidaya harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebutuhan pengembangan wilayah dengan menitikberatkan pada keberlanjutan pembangunan. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

a) Kawasan Lindung
   (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   (2) kawasan perlindungan setempat;
   (3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
   (4) kawasan rawan bencana alam;
   (5) kawasan lindung geologi; dan
   (6) kawasan lindung lainnya.

b) Kawasan Budidaya.
   (1) kawasan peruntukkan hutan produksi;
   (2) kawasan peruntukkan pertanian;
   (3) kawasan peruntukkan perikanan;
   (4) kawasan peruntukkan pertambangan;
   (5) kawasan peruntukkan industri;
   (6) kawasan peruntukkan pariwisata;
   (7) kawasan peruntukkan permukiman; dan
   (8) kawasan peruntukan lainnya.

5) Kawasan Strategis

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain adalah pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten, pemerintah daerah kabupaten melaksanakan :

a) Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
b) Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
c) Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

a) Fungsi, Dasar Penetapan, dan Kriteria Kawasan Strategis Kawasan strategis kabupaten berfungsi :

(1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
(2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
(3) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
(4) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
(5) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

b) Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kabupaten Paser

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, maka di wilayah Kabupaten Paser ditetapkan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Industri Pertanian di Wilayah Kabupaten Paser. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan. Selain itu, kegiatan di sektor peternakan dan perikanan juga berpotensi untuk dikembangkan, sehingga di masa yang akan datang Kabupaten Paser diprediksi dapat menjadi pusat industri penghasil produk pangan di KalimantanTimur.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.

a. Sanitasi

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain. Akses sanitasi layak di Kabupaten Paser saat ini masih tergolong rendah, dimana Tahun 2019 mencapai 69,78% dan Tahun 2020 menurun menjadi 67,13%. Penurunan akses tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan laju pembangunan sanitasi. Rendahnya akses sanitasi

menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki sarana jamban yang layak, terutama untuk daerah- daerah pedesaan yang masih sangat bergantung pada keberadaan sungai, sebagian besar belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sehingga masyarakat melakukan kebiasaan BAB (Buang Air Besar) langsung ke sungai/danau, kolam/sawah, dan kebun. Hal tersebut tentu dapat mencemari tanah dan mencemari sumber air minum warga.

Tabel II.69.
Persentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten Paser
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)	41,7	53,8	69,78	67,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021, Website Monev STBM,2021

Pada Tahun 2020 akses sanitasi layak Kabupaten Paser sebesar 67,13% yang dapat dilihat dari jumlah akses jamban sehat permanen, jumlah akses jamban sehat semi permanan, jumlah akses jamban sharing, dan jumlah akses IPAL/IPLT/Septictank Komunal. Sedangkan untuk akses aman baru mencapai 0,71% dan yang masih BABS (tanpa akses) mencapai 6,92%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kemampuan untuk membuat tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi perumahan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar perlu mendapat perhatian pemerintah agar perumahan warga memenuhi standar kesehatan dasar.

Tabel II.70
Persentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman dan BABS
Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sharing (JSH)	Jumlah KK dengan Akses Aman Air Limbah (IPAL/IPLT/ Septictank Komunal)	Jumlah KK dengan Akses Tangki Septik Layak	Jumlah KK yang BABS	Persentase Akses Jamban (Sanitasi Layak) (%)	Persentase Akses Sanitasi Aman (%)	Persentase BABS (Tanpa Akses) (%)	Persentase Akses Sanitasi Dasar (%)
1	Kabupaten Paser	43.391	13.486	3.668	646	61.191	6.309	67,13	0,71	6,92	25,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021, Website Monev STBM,2021

Permasalahan sanitasi lainnya adalah saat ini di Kabupaten Paser belum tersedia fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL sehingga secara umum belum dapat melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengelolaan limbah cair. Tetapi untuk

pengelolaan limbah cair rumah tangga berupa buangan manusia (black water) telah ada mobil Penyedot Tinja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cakupan pelayanan yang masih terbatas yaitu untuk wilayah perkotaan saja dan hanya dilayani dengan 1 buah mobil penyedotan tinja. Untuk pengolahan limbah tinja Kabupaten Paser telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di Desa Janju, sehingga limbah yang dibuang telah dilakukan pengolahan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan pada lokasi tersebut.

b. Persampahan

Sampah merupakan limbah padat yang timbul dari aktivitas manusia baik di rumah, kantor, pasar, tempat umum, dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat. Semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat akan membuat semakin tinggi tingkat konsumsi dan berdampak pada semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk dan aktifitas kabupaten yang semakin meningkat juga akan meningkatkan jumlah timbulan sampah.

Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Paser merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pemukiman (rumah tangga), kegiatan pasar dan daerah komersial (pertokoan),kegiatan perkantoran, kegiatan dari fasilitas umum, penyapuan jalan, dan lain-lain. Sumber sampah tersebut didominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dengan mayoritas merupakan sampah basah atau sampah organik.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkunngan Hidup persentase sampah terkelola pada Tahun 2020 baru mencapai 39,97 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 106.053 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Paser masih rendah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.71
Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk terlayani (jiwa)	99,159	101,399	105,101	165.884	167.385
2	Sampah yang dihasilkan (ton/hari)	131,15	134,13	137,10	114,61	108,57
3	Sampah yang dapat dikelola (ton/hari)	49,58	50,70	52,55	66,35	66,95
4	Sampah yang tidak dapat dikelola (ton/hari)	81,57	83,43	84,55	48,25	41,62
5	Persentase sampah terkelola	37,80	37,80	38,33	57,90	61,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pengelolaan persampahan Kabupaten Paser saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan baru dapat melayani kawasan ibukota kabupaten dan 6 (enam) kawasan ibukota kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali. Untuk ibu kota kecamatan yang dilayani hanya pada kawasan komersil dan fasilitas umum. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik untuk pewadahan, pengumpulan, TPS, armada angkutan sampai pada kemampuan dan ketersediaan TPA serta kondisi geografis Kabupaten Paser.

Sampah yang berasal dari sumber dikumpulkan di setiap rumah tangga dengan wadah tertentu, baik dengan plastik maupun pewadahan yang lain. Selanjutnya sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang dilakukan baik oleh masyarakat langsung maupun oleh petugas pengumpul dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya sampah dari TPS diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di TPA sampah tidak semuanya dibuang/ ditimbun, untuk jenis sampah organik sampah diolah menjadi bahan berguna melalui kegiatan pengomposan.

Untuk daerah perkotaan Tanah Grogot pengelolaan persampahan dikelola bersama oleh masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana setiap hari telah ada pelayanan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang berlokasi di Desa Janju. Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan yang jauh dari lokasi TPA pengelolaannya dilakukan dengan mengumpulkan sampah pada kontainer yang ditempatkannya pada lokasi tertentu dan selanjutnya diangkut ke TPA Desa Janju setiap 2x seminggu. Pengelolaan sampah di Kabupaten Paser tidak semua dilakukan dengan cara pembuangan sampah ke TPS dan diangkut ke TPA. Di beberapa kecamatan masih ada rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara ditimbun, dibakar dan dibuang ke kali/sungai terutama untuk Kecamatan Muara Samu, Batu Engau dan Tanjung Harapan. Hal ini dikarenakan tidak sampainya jangkauan pelayanan pengangkutan sampah ke kecamatan tersebut, mengingat lokasi TPA yang sangat jauh yaitu berada di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Batu Sopang.

c. Drainase

Pada saat ini sistem drainase di Kabupaten Paser masih kurang baik, pada musim hujan sering terjadi genangan pada sebagian wilayah kabupaten terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif rendah. Genangan yang terjadi, baik di jalan maupun di lingkungan permukiman, disebabkan oleh hujan bersifat sementara dengan durasi yang bervariasi. Genangan yang ada memang belum menimbulkan dampak kerugian materil yang signifikan, namun dirasakan cukup mengganggu aktifitas masyarakat disekitarnya.

Penyebab dari genangan tersebut antara lain luapan dari saluran yang sudah penuh dan tidak mampu menampung debit air yang lewat, kondisi saluran yang tersumbat akibat banyaknya sedimen dan sampah dalam saluran dan lubang drainase

tersumbat. Untuk itu penanganan genangan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan normalisasi, dan pembangunan saluran baru atau melakukan rehabilitasi saluran yang ada agar kapasitasnya dapat menampung air hujan yang ada, melakukan pemeliharaan rutin pada semua saluran dan bangunan drainase yang ada.

d. Kawasan Kumuh Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di wilayah perkotaan Tana Paser dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 653/KEP-392/2015 Tahun 2015 dengan luasan kawasan kumuh di wilayah perkotaan Tana Paser adalah 10,68 Ha.

Pada umumnya permasalahan kawasan kumuh perkotaan Tana Paser adalah kurang tersedianya drainase dan jalan yang memadai serta jarak antar rumah yang sangat rapat sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan penanganan terhadap lokasi kumuh yang telah ditetapkan tersebut, sehingga luasan kumuh perkotaan Tana Paser menjadi 0 hektar di tahun 2018. Capaian penanganan kawasan permukiman kumuh Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.72
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tana Paser Tahun 2016-2018

DESA/ KELURAHAN	RT/RW SK KUMUH	LUASAN KUMUH (Ha)			
		2015	2016	2017	2018
TANAH GROGOT	RT 07/RW 06	2	0,5	0	0
	RT 15/ RW 06	1,7	0,7	0	0
	RT 14/RW 06	1,8	0,5	0,5	0
	RT 07/RW 03	0,58	0,58	0,58	0
	RT 15/RW 02	1,2	1,2	1,2	0
SENAKEN	RT 02	2,8	2,8	0	0
TANAH PERIUK	RT 07	0,6	0,6	0	0
TOTAL		**10,68**	**6,88**	**2,28**	**0**

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2021

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan verifikasi dan delineasi pada kawasan kumuh perkotaan Tana Paser, berdasarkan hasil verifikasi tersebut terdapat penambahan luasan kawasan kumuh perkotaan dimana berdasarkan SK Bupati tahun 2015 seluas 10,68 Ha dan berdasarkan hasil verifikasi luasan kawasan kumuh dan berpotensi kumuh yang harus ditangani seluas 493 Ha. Untuk mengurangi kawasan kumuh tersebut Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan upaya penanganan hingga Tahun 2020 luasan kawasan kumuh dan berpotensi kumuh telah berkurang menjadi 62,53 Ha. Capaian penanganan kawasan kumuh dan berpotensi kumuh yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.73
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Berpotensi Kumuh di Kawasan Perkotaan Tana Paser Tahun 2017-2020 (Ha)

Indikator	Kondisi Awal	2017	2018	2019	2020
Luasan kawasan kumuh dan kawasan berpotensi kumuh	493	453,65	211,64	87,63	62,53

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2021

Permasalahan kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Paser belum sepenuhnya tuntas karena masih terdapat kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan lainnya yang belum tertangani, oleh karena itu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser dengan ruang lingkup wilayah kawasan perkotaan yang berada di 10 (sepuluh) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kabupaten Paser.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser No. 653/KEP-116/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Kabupaten Paser, luasan kumuh sebesar 224,52 Ha yang tersebar pada 10 (Sepuluh) Ibukota Kecamatan, dengan luasan tertinggi berada pada Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 95,15 Ha atau sebesar 42,37% dari total luasan kumuh. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Tanah Grogot merupakan Ibukota Kabupaten Paser dengan permukiman padat penduduk. Luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.74
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser

No	Nama Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase (%)
1	Batu Sopang	20,46	9,11
2	Muara Komam	11,91	5,30
3	Kuaro	7,72	3,43
4	Long Ikis	12,50	5,56

No	Nama Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase (%)
5	Long Kali	21,60	9,62
6	Tanah Grogot	95,15	42,37
7	Pasir Belengkong	1,00	0,44
8	Batu Engau	24,48	10,90
9	Muara Samu	10,65	4,74
10	Tanjung Harapan	19,05	8,48
	Total Luas	**224,52**	**100,00**

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2021

e. Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak layak untuk tempat tinggal disebabkan oleh kondisi rumahnya yang tidak sehat atau berada di kawasan permukiman kumuh maupun rumah yang bisa membahayakan kehidupan penghuninya karena tidak memenuhi standar konstruksi. Konsep rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, kualitas air yang memadai, pencahayaan atau penerangan yang cukup, dapur bersih dan pembuangan asap lancar, konstruksi bangunan yang memenuhi standard, dan mempunyai sanitasi yang baik.

Saat ini jumlah backlog dan rumah tidak layak huni Kabupaten Paser masih tinggi, dimana angka backlog kepemilikan pada Tahun 2020 masih mencapai 13.057 unit sedangkan jumlah rumah tidak layak huni Tahun 2020 sebanyak 8.470 unit. Permasalahan Backlog dan rumah tidak layak huni merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Paser, tingginya angka backlog diakibatkan oleh tingkat pendapatan masyarakat untuk bisa memiliki rumah layak huni masih rendah.

Tabel II.75
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Backlog Kepemilikan	10.165	9.879	9.687	9.562	13.057
2	Backlog Penghunian	6.524	6.135	5.762	6.446	4.691
3	Rumah Tidak Layak Huni	13.332	12.709	10.943	9.676	8.470

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, 2021

Berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni periode Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa selama kurum waktu 5 tahun telah ada penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Hal ini dikarenakan adanya beberapa program yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pembangunan rumah

layak huni. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah (pra sejahtera). Tujuan bantuan stimulan ini adalah supaya rumah warga yang tidak layak huni bisa dibangun menjadi rumah yang layak huni dengan lingkungan yang sehat serta aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan rumah tidak layak huni Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.76
Capaian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 (Unit)

No	KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020	SUMBER PENDANAAN
1	Pembangunan Rumah Layak Huni	31	54	140	161	108	APBD, APBN, DAK
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni/ Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	612	569	1626	1107	1098	APBD, APBN, DAK
	Total	**643**	**623**	**1.766**	**1.268**	**1.206**	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 mencapai 81,26% sedangkan 18,74% dengan status sewa/kontrak, bebas sewa dan lainnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan status tempat tinggal. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase status kepemilikan tempat tinggal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.77
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Milik sendiri	85,11	81,52	79,18	81,96	81,26
2	Kontrak /Sewa	9,13	9,86	10,75	0,00	
3	Bebas sewa	2,6	6,11	7,48	0,00	
4	Lainnya	3,16	2,51	2,58	18,04	18,74
	Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2021
**) Tahun 2019 dan 2020 yang termasuk lainnya adalah kontrak/sewa, bebas sewa dan lainnya*

f. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10%terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Luasan RTH di Kabupaten Paser sebesar 638.171 m2 dengan rincian RTH Publik baru mencapai 335.206 m2. Luas RTH tersebut tentunya masih belum dapat memenuhi proporsi RTH Publik minimal sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Untuk lebih jelasnya luasan RTH dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.78
Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Paser

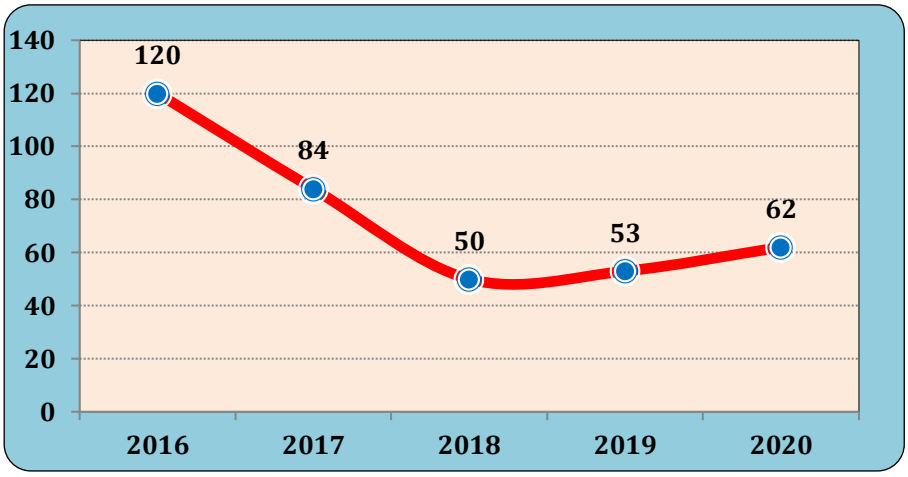
No	Jenis RTH	Luas (m2)
1	RTH Publik	335.206
2	Taman Median dan Daerah Milik Jalan	10.465
3	RTH Private	171.900
4	RTH Tempat Pemakaman Umum	120.600
	Total Luas	**638.171**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, 2021

2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Trend angka kriminalitas di Kabupaten Paser dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Gambar II.20.
Angka Kriminalitas Kab. Paser Tahun 2016-2020

Dilihat dari grafik di atas, berdasarkan analisis trend, kecenderungan angka kriminalitas (*crime rate*) dari seluruh jenis kriminalitas di Kabupaten Paser dari tahun 2016 s/d 2020 menunjukkan trend menurun atau dengan kata lain rasa aman pada masyarakat terjaga meskipun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan. Pola ataupun jenis tindak kejahatan yang mendominasi di Kabupaten Paser adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba, dan pencurian. Hal ini juga memberikan gambaran kondisi sosial kemasyarakatan yang rentan akan perubahan dari pola kejahatan konvensional. Namun demikian untuk jenis kasus narkoba mengalami peningkatan antara 10 - 13% setiap tahunnya, hampir sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kaum pemuda. Sementara itu kasus pencurian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 54% jika dibandingkan dengan tahun 2018, dan terjadi penurunan sebesar 4% pada tahun 2020.. Begitu pula kasus penganiayaan juga mengalami peningkatan sebesar 22% pada tahun 2019 dan meningkat kembali sebesar 42% pada tahun 2020. Berikut tabel jenis kriminalitas di Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel II.79.
Jenis Kriminalitas Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus narkoba	53	72	87	63	NA
2	Jumlah kasus pembunuhan	2	4	2	1	1
3	Jumlah Kejahatan seksual	16	12	15	16	21
4	Jumlah kasus penganiayaan	18	16	9	11	17
5	Jumlah Kasus pencurian	174	131	44	68	64
6	Jumlah kasus penipuan	16	4	3	3	5
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	-
Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun		**323**	**231**	**139**	**152**	**172**
Jumlah Penduduk		**268.261**	**274.206**	**279.975**	**285.894**	**275.452**
Angka Kriminalitas		**120**	**84**	**50**	**53**	**62**

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2021

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel II.80.
Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Paser Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penegakan Perda		100	100	100	100
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	56,61	70,96	78,86	78,86	79.07
3	Rasio personil Satpol PP per 10.000 pddk	30/10.000 pddk	42/10.000 pddk	39/10.000 pddk	39/10.000 pddk	39/10.000 pddk
4	Potensi Kasus Konflik SARA/ Demo			18 kejadian	4 kejadian	1 kejadian
5	Kegiatan Pembinaan LSM /Ormas	1	1	1	2	1
6.	Respon Time Rate					

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2021

Potensi kejadian yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Paser masih cukup besar, jika dilihat dalam kurun waktu 2018-2020 masih terdapat kejadian konflik berpotensi SARA/Demo Masyarakat walaupun jumlahnya menurun dan yang terkait langsung dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) terdapat 1 kejadian pada tahun 2018, 2 kejadian di tahun 2019, dan 1 kejadian di 2020.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2020 jumlah gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Paser mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019 jumlah pelanggaran kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Paser ada sebanyak 246 kejadian dan tahun 2020 turun menjadi 172 kejadian.

Tabel II.81.
Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2016-2020

Tahun	Kejadian	Diselesaikan
2020	172	136
2019	246	194
2018	246	194
2017	310	220
2016	438	285

Sumber : Data Polres Paser, 2021

Dari tabel diatas, terlihat bahwa masih banyak kasus pelanggaran atau gangguan terhadap kamtibmas yang belum diselesaikan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kasus yang belum terselesaikan tersebut merupakan kasus pencurian, dimana kasus pencurian

merupakan kasus yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Paser. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali kasus pencurian yang tidak dapat diungkap karena kurangnya bukti pendukung sehingga tidak cukup untuk dilakukan penuntutan, sehingga hal ini mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan.

Jumlah anggota Linmas terlatih di Kabupaten Paser pada tahun 2016 s/d 2019 adalah sebanyak 2.038 orang, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penambahan dan jumlahnya menjadi sebanyak 2.888 orang.

Tabel II.82.
Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1	Batu Sopang	209
2	Muara Samu	137
3	Tanjung Harapan	131
4	Batu Engau	231
5	Pasir Belengkong	293
6	Tanah Grogot	499
7	Kuaro	273
8	Long Ikis	473
9	Muara Komam	205
10	Long Kali	387
11	Cadangan Kabupaten	50
2020		**2.888**
2019		**2.038**
2018		**2.472**
2017		**2.038**
2016		**2.038**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2020

2.3.1.6. Sosial

Layanan urusan wajib sosial terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sehingga, sebagai tolak ukur untuk menentukan strategi dalam hal memenuhi kewajiban tersebut, seharusnya diketahui data mengenai jumlah sarana sosial seperti panti asuan, panti jompo dan panti rehabilitasi, serta jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial. Kategori PMKS di Kabupaten Paser terdiri dari Balita terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan korban bencana alam.

Tabel II.83.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kategori PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Anak balita terlantar	Jiwa	92	62	35	NA	27
2. Anak terlantar	Jiwa	470	420	458	NA	339
3. Lansia terlantar	Jiwa	1.124	1.176	1.059	NA	921
4. Penyandang cacat (disabilitas)	Jiwa	530	518	548	NA	801
5. Gelandangan dan Pengemis	Jiwa	NA	NA	NA	NA	9
6. Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	485	485	485	118	118
7. Korban bencana	Jiwa	259	312	925	464	6918
a. Korban bencana alam	Jiwa	259	312	925	100	1412
b. Korban bencana Sosial	Jiwa	0	0	0	364	5506

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Paser, 2021

Berdasarkan data PMKS di atas yang paling meningkat jika dibandingkan dari tahun 2019 ke 2020 adalah Korban Bencana yang meningkat dari 464 jiwa pada tahun 2019 menjadi 6.918 jiwa pada tahun 2020. Peningkatan ini terdiri dari Korban Bencana Alam (banjir, puting beliung, tanah longsor dan lain-lain) dari 100 jiwa menjadi 1.412 jiwa. Sedangkan korban bencana sosial pada tahun 2020 meningkat menjadi 5.506.

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan selain bidang ketenagakerjaan yaitu demografi, ekonomi dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja. Tantangan kajian ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah mempertemukan ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.

Dilihat dari struktur penduduk produktif, komposisi penduduk angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 142.568 orang (67,88 persen) dan bukan angkatan kerja sebanyak 67.452 orang (32,12 persen). Sebagian besar penduduk 95,48 persen dari penduduk angkatan kerja kegiatan utamanya adalah bekerja, tetapi masih ada 4,52 persen yang mencari pekerjaan.

Tabel II.84.
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jumlah	%
Angkatan Kerja	**142.568**	**67,88**
• Bekerja	136.131	95,48
• Pengangguran	6.437	4.52
Bukan Angkatan Kerja	**67.452**	**32,12**
• Sekolah	16.515	24,48
• Mengurus Rumah Tangga	44.926	66,61
• Lainnya	6.011	8,91
Jumlah	**210.020**	**100,00**

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Paser 2021

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Paser mencapai 67,88% pada tahun 2020, sedangkan tingkat pengangguran penduduk usia kerja mencapai 4,52%, hal ini dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada tahun 2020.

Tabel II.85.
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (Jiwa)	-	122.162	135.854	137.737	142.568
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	-	62,15	66,84	66,17	67,88
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	-	5,54	4,84	4,38	4,52
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)	-	94,46	95,16	95,62	95,48

Sumber : BPS Paser, 2021

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser, bukan berarti sektor tersebut juga berkontribusi secara dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 35,59% pada tahun 2018. Pada sisi yang lain, persentase sektor pertambangan dan penggalian hanya menunjukkan angka 11,30% pada tahun 2018, dimana sektor pertambangan dan penggalian ini penyerapan tenaga kerjanya masih di bawah sektor jasa kemasyarakatan dan perdagangan, yaitu masing-masing sebesar 21,63% dan 19, 53%.

Tabel II.86.
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin (orang)		Total	%
	Lk	Pr		
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	32.858	8.320	41.178	35,59
Pertambangan dan penggalian	12.735	341	13.076	11,30
Industri Pengolahan	3.355	633	3.988	3,45
Listrik, gas dan air	549	-	549	0,47
Bangunan	2.609	-	2.609	2,26
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	9.805	12.785	22.590	19,53
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	5.087	167	5.254	4,54
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	1.116	308	1.424	1,23
Jasa kemasyarakatan	14.062	10.964	25.026	21,63
JUMLAH	**82.176**	**33.518**	**115.694**	**100,00**

Sumber : *Disnakertrans Kabupaten Paser 2020*

Dengan demikian, pertanian masih menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Paser walaupun sumbangannya terhadap PDRB masih rendah. Di samping pertanian, sektor jasa dan perdagangan juga cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurunnya daya serap sektor pertambangan dan penggalian dan meningkatnya daya serap sektor lainnya mengindikasikan bahwa sektor lain diluar pertambangan dan penggalian secara perlahan-lahan mengalami penguatan daya serap tenaga kerja.

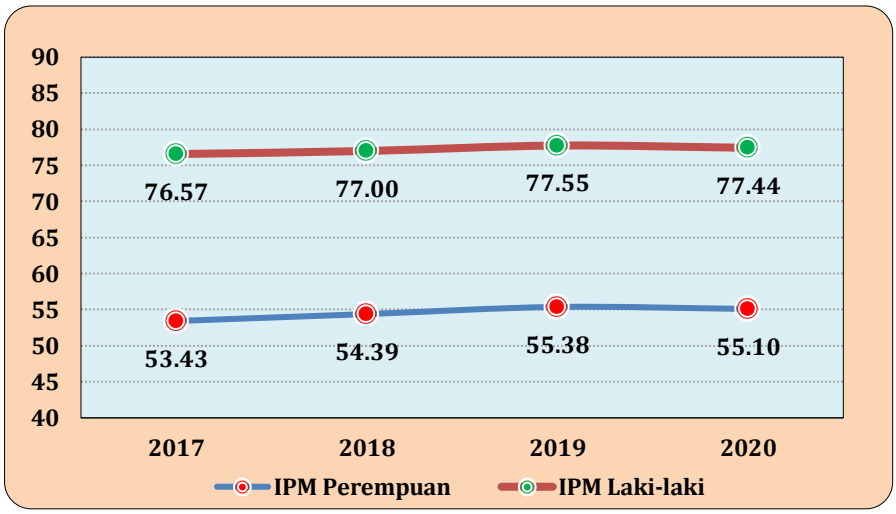
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender menjadi salah satu dari 17 tujuan SDGs. Isu ini tercantum dalam tujuan ke-5 yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan. Dalam tujuan ini, SDGs berusaha memastikan agar masalah-masalah yang terjadi pada perempuan seperti diskriminasi gender, kekerasan seksual dan eksploitasi dapat dihentikan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. Disparitas gender masih terjadi di dalam proses pembangunan manusia di Kabupaten Paser. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar II.17 yang

memperlihatkan bahwa selama periode 2017–2020, nilai IPM perempuan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM laki-laki.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.21
Perbandingan Perkembangan IPM Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Paser, 2017-2020

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

Tabel II.87.
Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Paser 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	69,78	70,64	71,41	71,15
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	62,07	62,76	66,20	65,66

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Ketimpangan pembangunan antar kelompok jenis kelamin mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Tabel II.88.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup Perempuan (tahun)	73,92	74,15	74,39	74,66
Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan (tahun)	13,43	13,44	13,45	13,46
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (tahun)	7,78	7,79	8,12	8,13
Pengeluaran per Kapita Perempuan (ribu rupiah/thn)	2.733	2.869	2.968	2.902
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**69,78**	**70,64**	**71,41**	**71,15**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan IPG Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2017-2020 cenderung fluktuatif, dimana Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2020 mencapai 71,15, dimana Angka Harapan Hidup perempuan 74,66 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah 13,46 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah 8,13 tahun menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Kabupaten Paser tidak tamat SMP.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Menurut ukuran ini semakin tinggi tingkat keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan politik semakin berdaya perermpuan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.89.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	-	16,67	16,67	20,00	20,00
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	-	41,18	45,01	46,89	43,59
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	-	23,06	23,27	23,44	23,74
Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Paser	**-**	**62,07**	**62,76**	**66,20**	**65,66**
Indeks Pemberdayaan Gender Kaltim	**56,93**	**56,64**	**57,53**	**65,65**	**65,54**
Indeks Pemberdayaan Gender Nasional	**71,39**	**71,74**	**72,10**	**75,24**	**75,57**

Sumber: BPS Kaltim, 2020

IDG Kabupaten Paser mengalami peningkatan dalam kurun 2016-2019 dan menurun pada tahun 2020 mencapai angka 65,66. Angka ini menurun 0,54% dibanding tahun 2019. Melambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh satu komponen yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni komponen perempuan sebagai Tenaga Profesional turun dari 46,89% pada tahun 2019 menjadi 43,59% pada tahun 2020. Meski

demikian, komponen Sumbangan Pendapatan Perempuan mengalami peningkatan dari 23,44% pada tahun 2019 menjadi 23,74% pada tahun 2020.

Untuk menunjukkan aspek pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kualifikasi sumberdaya manusianya atau dari tingkat pendidikan. Pada tingkat SD, APM perempuan di tahun 2018 sejumlah 100%, sedangkan APM Laki-laki sejumlah 96,37%. Pada tingkat SMP, APM perempuan di tahun 2018 sejumlah 78,47%, sedangkan APM Laki-laki sejumlah 78,61%. Untuk tingkat SMP, jumlah partisipasi sekolahnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tingkat SD. Pada tingkat SMA, APM perempuan di tahun 2018 sejumlah 70,12%, sedangkan APM Laki-laki sejumlah 54,19%.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan perempuan adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Berdasarkan data pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser pada Tahun 2017 bahwa status pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Paser tahun 2017 mayoritas sebagai buruh/ karyawan/ pekerja dibayar (51,39 persen). Jika dilihat dari jenis kelaminnya mayoritas status pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah sebagai buruh/karyawan/pekerja dibayar dengan jumlah masing-masing untuk laki-laki sebanyak 44.613 orang (75%) dan untuk perempuan sebanyak 14.694 orang (25%).

Tabel II.90.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 2016-2020

Jenis Kelamin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki Laki	60,36	70,26	70,15	70,20	83,94
Perempuan	39,64	29,74	29,85	29,80	49,69

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Paser, 2021

Secara umum partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung meningkat tetapi angka tersebut masih berada di bawah partisipasi angkatan kerja laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menemui hambatan untuk masuk ke pasar kerja dibanding dengan laki-laki. Sistem budaya yang terbentuk dalam masyarakat mempengaruhi cara pandang dan kedudukan perempuan sebagai tenaga kerja. Perempuan yang bekerja dianggap hanya untuk membantu mencari nafkah sehingga apabila dalam suatu kondisi suami-istri sama-sama bekerja.

Angka partisipasi perempuan dalam kategori pendidikan sekolah SD-SMA ternyata tidak diikuti dengan jumlah partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja. Padahal ukuran kesetaraan sebetulnya tidak hanya selesai dilihat dari angka partisipasi sekolahnya namun juga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang salah satunya direpresentasikan dalam partisipasi pada angkatan kerja. Sedangkan angka partisipasi perempuan di ranah politik (Anggota DPRD) justru sangat rendah. Di periode tahun 2014 hingga 2018 perbandingan perempuan dan laki-laki hanya 17%. Angka ini tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti sebab pada pemilu legislatif yang terakhir

yakni tahun 2019 hingga 2023 perbandingannya hanya 20%.

Sedangkan upaya untuk perlindungan anak masih sangat perlu perhatian lebih intensif. Hingga saat ini masih terdapat balita dan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan. Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum menyediakan panti asuhan anak yang dapat merehabilitasi kasus anak dan balita terlantar.

2.3.2.3. Pangan

a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan atau sering disebut dengan Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP). PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri atas kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa.

Angka PPH Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan walau belum mencapai angka 100%. Dari data yang tersedia yaitu tahun 2020 Kabupaten Paser capaian skor PPH sebesar 97,59%. Jika dibandingkan dengan skor PPH Provinsi Kaltim, skor PPH Kabupaten Paser lebih rendah. Pada tahun 2020 skor PPH Provinsi Kaltim sebesar 98,58%. Peningkatan Skor PPH Provinsi Kaltim hanya berkisar 0,08% saja, sedangkan Skor PPH di Kabupaten Paser mencapai 0,22%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.91.
Skor PPH Kabupaten Paser dan Provinsi Kaltim Tahun 2017 -2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Skor PPH Kabupaten Paser	90,80	91,70	97,37	97,59
Skor PPH Provinsi Kaltim	98,16	98,42	98,50	98,58

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

b. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan. Perlu disadari bhawa keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki

kerawanan produksi.

Tiga komponen utama ketahanan pangan yang didefinisikan oleh World Health Organization (WHO), yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Perlu diakui bahwa pemenuhan pangan sebagai hak dasar masih merupakan salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Paser. Permasalahan tersebut terlihat dari pertumbuhan permintaan pangan yang relatif lebih cepat daripada pertumbuhan penyediaan. Permintaan yang meningkat disebabkan dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera.

Data pada tabel berikut menunjukkan bahwa hampir separuh kebutuhan pangan utama harus dipenuhi dari luar Paser.

Tabel II.92.
Ketersediaan pangan Utama (Beras/Padi)
di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No	JENIS PANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Beras Lokal (Ton)	26.744	26.744	20.040	30.882	33.514
2	Produksi Beras luar daerah (Ton)	30.743	39.166	25.900	37.454	27.453
3	Kebutuhan beras masyarakat (Ton)	30.313	30.985	31.638	25.445	27.212

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Berdasarkan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser tahun 2016, kondisi ketahanan pangan digambarkan pada peta FSVA pada 144 desa di 10 kecamatan, didapatkan hasil analisis FSVA menunjukkan bahwa masih banyak desa rawan pangan di Kabupaten Paser dengan skala prioritas yaitu prioritas 1 ada 20 desa, prioritas 2 ada 38 desa, prioritas 3 ada 19 desa, prioritas 4 ada 62 desa, prioritas 5 ada 4 desa dan 1 desa masuk dalam prioritas 6. Dengan melihat kondisi tersebut maka perlunya perbaikan ketahanan pangan di Kabupaten Paser. Namun penyediadaan ketahanan pangan menjadi ketergantungan kepada sektor pertanian lainnya, seperti pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta sektor perikanan.

c. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Salah satu kelebihan CPPD adalah apabila terjadi bencana alam atau sosial dalam skala kecil dan bersifat lokal, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

Telah diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 23 bahwa untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional, yaitu : Cadangan Pangan Pemerintah; Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan Cadangan Pangan Masyarakat. Selanjutnya Sesuai PP No 17 Tahun 2015 Pasal 5 dan 13 bahwa Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya oleh Kepala Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Kabupaten Paser telah mengalokasikan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten Paser dari tahun 2016 sampai dengna tahun 2020 sebanyak 103,32 Ton beras. Dan telah diasalurkan ke beberapa daerah rawan pangan dan daerah bencana yang terjadi di Kabupaten Paser. Selanjutnya program ini akan dilanjutkan dan dituangkan pada dokumen perencanaan baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan Program ini.

2.3.2.4. Pertanahan

Kewenangan di bidang pertanahan adalah urusan pemerintah pusat. wewenang tersebut diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang merupakan tugas pembantuan. Namun ada 9 hal yang menjadi urusan pemerintah daerah hal ini diatur dalam PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pertanahan dan urusan pertanahan yang didesentralisasikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu meliputi pemberian izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin membuka tanah, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Saat ini untuk pelaksanaan 9 kewenangan tersebut dilaksanakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Paser dan untuk pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka mengakomodir pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan pemerintah maupun

untuk kepentingan umum yang masuk dalam tiga kewenangan yaitu penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum. Pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum selama tahun 2017–2020 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel II.93
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Fasilitas Umum Tahun 2017 – 2020

No.	Tahun	Luas (m^2)	Lokasi	Peruntukan
1.	2017	5.833,0	- Kelurahan Long Kali	- Gedung Serbaguna kecamatan
		400,0	- Desa Rantau Atas	- Menara selular
		400,0	- Desa Muara Payang	- Menara selular
2.	2018	5.838,0	- Kelurahan Long Kali	- Gedung Serbaguna kecamatan
		1.320,0	- Desa Semuntai	- Pengadaan Tanah SD Semuntai
		942,4	- Desa Janju	- Pelebaran jalan negara
3.	2019	766,9	- Desa Sungai Tuak	- Perluasan Tanah SD 025
		9.592,0	- Desa Tepian Batang	- Perluasan Tanah SMP 12
		3.200,0	- Desa Tepian Batang	- Perluasan kompleks perkantoran
		20.470,0	- Keluahan long ikis	- Pengadaan Lahan Stadion Mini
		20.000,0	- Desa muser	- Pengadaan Lahan TPA sampah
4.	2020	14.170,0	- Desa Suatang	- Pengadaan Tanah untuk Relokasi SDN 007 Kec. Pasir Belengkong
		120,0	- Desa Jone	- Pembebasan Lahan Tanah untuk jalan masuk Perumahan Jone 2

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Dalam pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa tanah garapan, Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa yang dalam kegiatannya memfasilitasi permasalahan sengketa lahan antar masyarakat dengan masyarakat dan antara korporasi dengan masyarakat dengan jumlah permasalahan sebanyak 31 kasus.

Untuk pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Pemerintah Kabupaten Paser perlu dilakukan beberapa pembenahan terkait kebijakan dalam urusan pertanahan terutama dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah-tanah oleh masyarakat atau pemberian izin membuka tanah yang harus disesuaikan pola ruang. Guna mendukung program tersebut saat ini Pemerintah Kabupaten Paser sedang menyiapkan regulasi yang akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan juga kebutuhan yang ada di daerah, sehingga regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Paser.

Tabel II.94.
Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Paser Berupa Tanah Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Aset Tanah	1707	1728	1738	1761	1761
2	Persentase Sertifikasi Tanah Milik Daerah	9,14	0	10	0	13
3	Jumlah Persil Bidang Tanah Diusulkan Sertifikasi	54	0	0	4	34
4	Persentase Aset Tetap Tanah tumpang tindih/dikuasai pihak ketiga	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Sumber : BKAD, 2021

Jumlah Aset Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 1.748 persil tanah dan baru 229 persil tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atau 13% yang memiliki sertifikat dari jumlah inventaris aset tanah. Hal ini disebabkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penyelesaian proses sertifikat tanah, anatar lain: proses pengadaan tanah tidak tuntas sampai proses balik nama hak atas tanah, waktu proses pengurusan tanah yang cenderung lama dan melebihi tahun anggaran berjalan dan adanya gugatan dari ahli waris atau keluarga pemilik tanah. Sampai dengan tahun 2020 juga masih terdapat aset tanah yang menjadi sengketa dan masih dalam penyelesaian proses hukum sebanyak 7 persil tanah. Namun disisi lain dengan adanya Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kabupaten Paser di fasilitasi oleh KPK (Tim Korsupgah Wilayah Kalimantan Timur) telah melaksanakan perjanjian kerjasama atau MoU dengan BPN dalam percepatan penyelesaian sertifikasi aset tanah daerah.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

a. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, daerah diamanatkan untuk melaksanakan seluruh proses penataan ruang di daerah sebagaimana merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada Proses Perencanaan Tata Ruang, hasil pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan produk rencana tata ruang yang ada hingga tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel II.95.
Kondisi Penyelesaian Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten Paser s.d Agustus Tahun 2020

No.	Jenis Produk Rencana Tata Ruang Daerah	Jumlah Produk RTR	Materi Teknis	Produk Hukum Daerah (Perda)
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Perda Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015	1	1	1
2	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	11	6	0
3	Rencana Kawasan Strategis	5	0	0

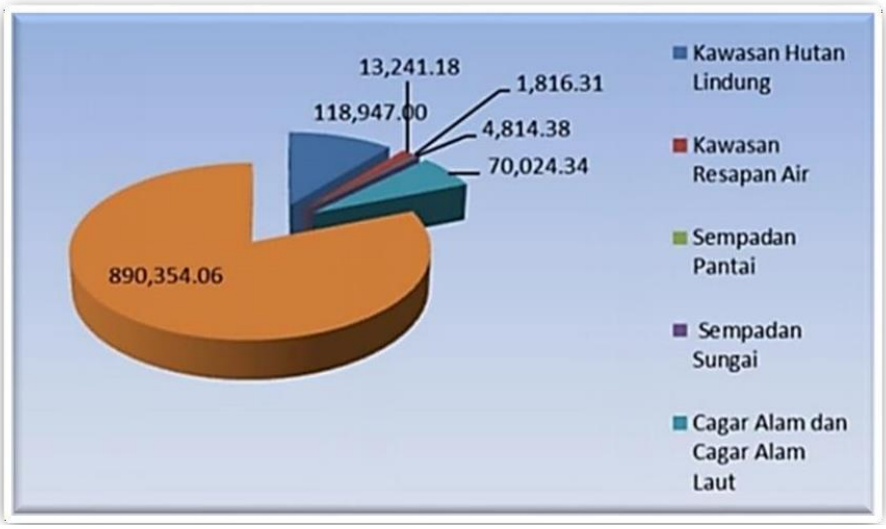
Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2020

Sedangkan pada kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan telah dilakukan koordinasi meski hingga saat ini masih berada pada tahapan materi teknis dan pendukungnya, kondisi tersebut diantaranya pada penyusunan :

1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (Review Tahun 2017) dan proses KLHS Tahun 2018;
2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuaro (Penyusunan Tahun 2018);
3) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batu Sopang (Review Tahun 2018);
4) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasir Belengkong (Penyusunan Tahun 2012);
5) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Ikis (Penyusunan Tahun 2012);
6) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Kali (Penyusunan Tahun 2013).

Adapun masalah yang menghambat penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah dikarenakan peraturan sebagai pedoman penyusunan yang seringkali direvisi, sehingga penyusunan RDTR harus meng-*update* peraturan dimaksud, mekanisme validasi peta yang diperoleh dari LAPAN dan disetujui oleh BIG memakan waktu yang sangat lama, di samping itu juga anggaran perangkat daerah yang terbatas

Secara umum sumberdaya lahan Kabupaten Paser terbagi menjadi kawasan hutan lindung seluas 118.947,00 ha, kawasan resapan air seluas 13.241,18 ha, sempadan pantai seluas 1.816,31 ha, sempadan sungai seluas 4.814,38 ha, cagar alam dan cagar alam laut seluas 70.024,34 ha dan sisanya untuk penggunaan lain seluas 890.354,06 ha.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2018

Gambar II.22.
Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator dari kualitas lingkungan suatu daerah, hal ini dapat dilihat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Untuk mendukung pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal diperlukan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah. Akibat dari penurunan kualitas lingkungan juga menjadi salah satu penyebab dari bencana alam yang terjadi.

1) Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Namun ada beberapa titik sungai yang mengalami pencemaran baik masuk kategori ringan, sedang maupun berat.

Tabel II.96.
Indeks Pencemaran Air Sungai

No	Sungai	IP	Kategori
1	Sungai Muara Kuoaro	2,397534816	ringan
2	Sungai tulus (Kandilo)	0,829513689	memenuhi
3	Jembatan Gantung Batu Butok	1,877580235	ringan
4	Sungai Songka	4,428413436	ringan
5	Sungai Kasungai (Kandilo)	0,893773415	memenuhi
6	Jembatan Batu Kajang (Kandilo)	11,36233826	berat
7	Sungai Setiu	0,941888699	memenuhi
8	Sungai Legai (Jmbtan Gantung)	2,683002315	ringan
9	Jembatan Hauling Kideco	5,189130643	sedang
10	Sungai Samu (Desa Muser)	11,23946277	berat
11	Sungai Samurangau (Kandilo)	3,914952876	ringan
12	Sungai Biu (Jembatan)	5,375149659	sedang
13	Jembatan Biu (Kandilo)	2,906597849	ringan
14	Sungai Luan (Kandilo)	4,962189144	ringan
15	Sungai Kerang	4,953695293	ringan
16	Sungai Tabru	0,80392464	memenuhi
17	Sungai Apar Besar	0,966270678	memenuhi
18	Sungai Suliliran	4,508046171	ringan
19	Sungai Bekoso	3,228105933	ringan
20	Intake PDAM	3,601210741	ringan
21	Sungai Belengkong	3,022910152	ringan
22	Sungai Kandilo Pasar Senaken	2,894506623	ringan
23	Sungai Seratai Tanah Priuk	1,640541062	ringan
24	Sungai Seratai Lolo	0,821154466	memenuhi
25	Sungai Muru	4,829263561	ringan
26	Sungai Pekasau	1,587968663	ringan
27	Sungai Soi	11,25565602	berat
28	Sungai Lombok	4,861447218	ringan
29	Sungai Sakurau	11,2497834	berat
30	Sungai Telake	4,671063673	ringan
31	Sungai Sebakung	0,930094162	memenuhi
32	Sungai Seratau Km 4	0,797891667	memenuhi

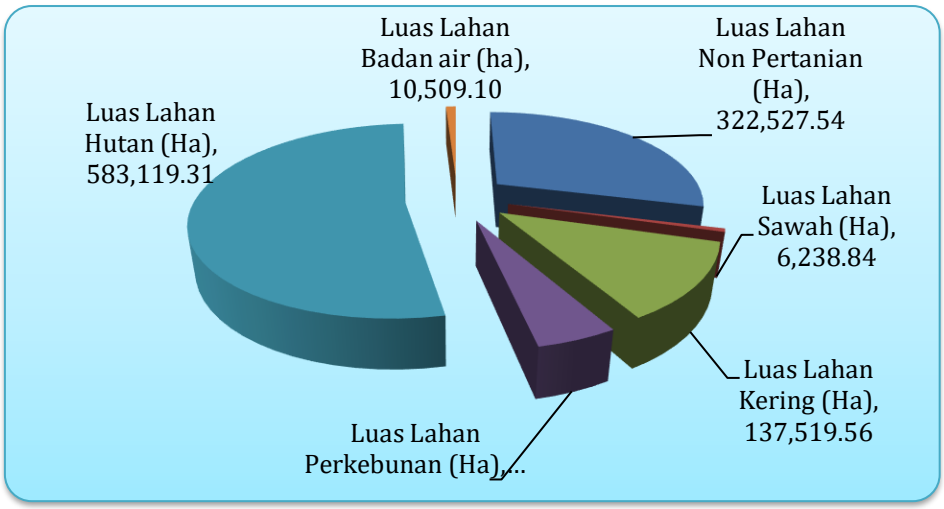
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2020

2) Indeks Kualitas Udara

Udara merupakan sumber daya alam yang paling berpengaruh bagi kehidupan mahluk hidup di bumi, sehingga harus dijaga dan dipelihara kelestarian karena tanpa udara, makhluk hidup bisa kehilangan kehidupannya. Dengan semakin meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi manusia, semisal bidang industri dan transportasi, maka secara logis semakin meningkat pula zat-zat polutan yang dikeluarkan kegiatan industri maupun transportasi tersebut. Keberadaan zat-zat polutan di udara ini tentu akan berpengaruh terhadap proses-proses fisik dan kimia yang terjadi di udara.

3) Indeks Tutupan Lahan.

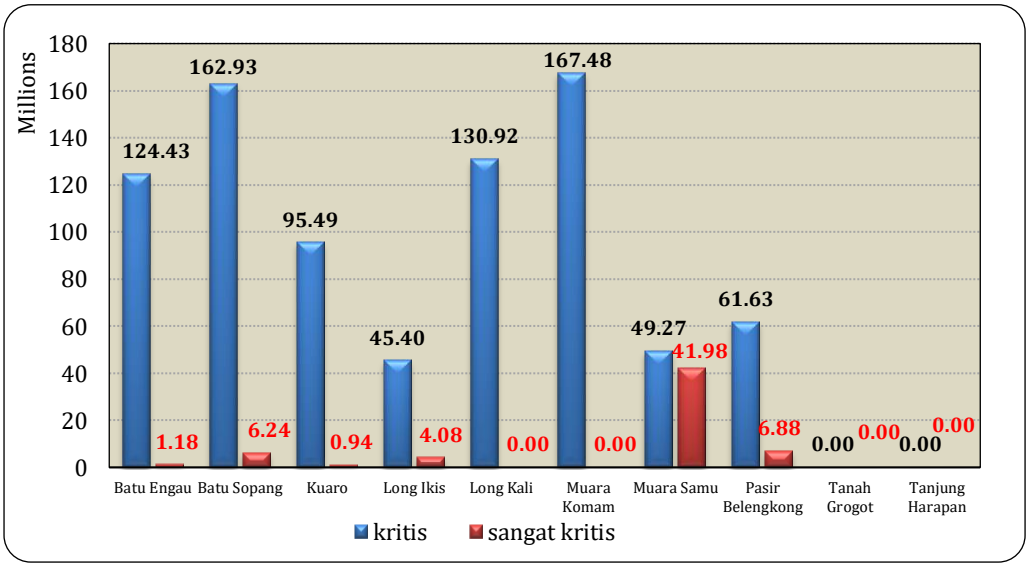
Perubahan lahan sebagai konsekuensi dari peningkatan kebutuhan akan ruang, memiliki berbagai bentuk. Namun umumnya yang menjadi sorotan adalah perubahan dari bentukan alami menjadi buatan. Hal ini dikarenakan terdapat dampak lingkungan yang menyertainya. Contohnya adalah deforestasi, yang mengubah bentukan hutan menjadi area pertanian atau perkotaan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.23.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Luas lahan kritis terbesar pada tahun 2020 adalah sebesar 22.129,4 Ha, terletak di Kecamatan Batu Sopang, sedangkan untuk lahan sangat kritis terbesar ada di Kecamatan Muara Samu sebesar 4.267,9 Ha terletak di Kecamatan Muara Samu. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingakan dari tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.24.
Kerusakan Lahan

Adapun beberapa sumber penyebab lahan kritis adalah sebagai berikut :

a) Perkebunan, pemukiman dan lahan terbuka bekas tambang batubara;
b) Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan dan lahan terbuka bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
c) Perkebunan, pertanian, pemukiman dan kebakaran lahan;
d) Perkebunan;
e) Eks penebangan hutan pada era kayu;
f) Pembukaan lahan untuk pertambangan;
g) Kawasan dengan kondisi alamiah tanah berupa pegunungan kapur atau dengan solum rendah

Tabel II.97.
Indeks Kualitas Udara (IKU) Di Kabupaten Paser

Parameter	Rerata Pemantauan	Index
NO2	5,4260	400,135656250
SO2	7,2375	200,361875000
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)		0,248765625
	INDEKS KUALITAS UDARA	**91,74**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2020

Tabel II.98.
Indeks Kualitas Air (IKA) Di Kabupaten Paser

Status Kualitas Air	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	8	25	70	17,5
Ringan	18	56,25	50	28,125
Sedang	2	6,25	30	1,875
Berat	4	12,5	10	1,25
Total	32			48,75
		INDEKS KUALITAS AIR		**48,75**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2020

Tabel II.99
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Km2) Di Kabupaten Paser

Luas Wilayah	Hutan	Belukar	Tutupan Hutan	ITH
1.113.606,07	525.077,46	136.375,15	0,54	72,558797
		INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN		**72,558797**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2020

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel II.100.
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Uraian	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	Nasional	87,21	53,53	60,74	**70,27**
2	Kalimantan Timur	89,06	53,70	79,76	**75,25**
3	Paser	91,74	48,75	72,56	**71,17**

Sumber : IKLH 2020

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Paser masih di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Timur dan IKLH Nasional.

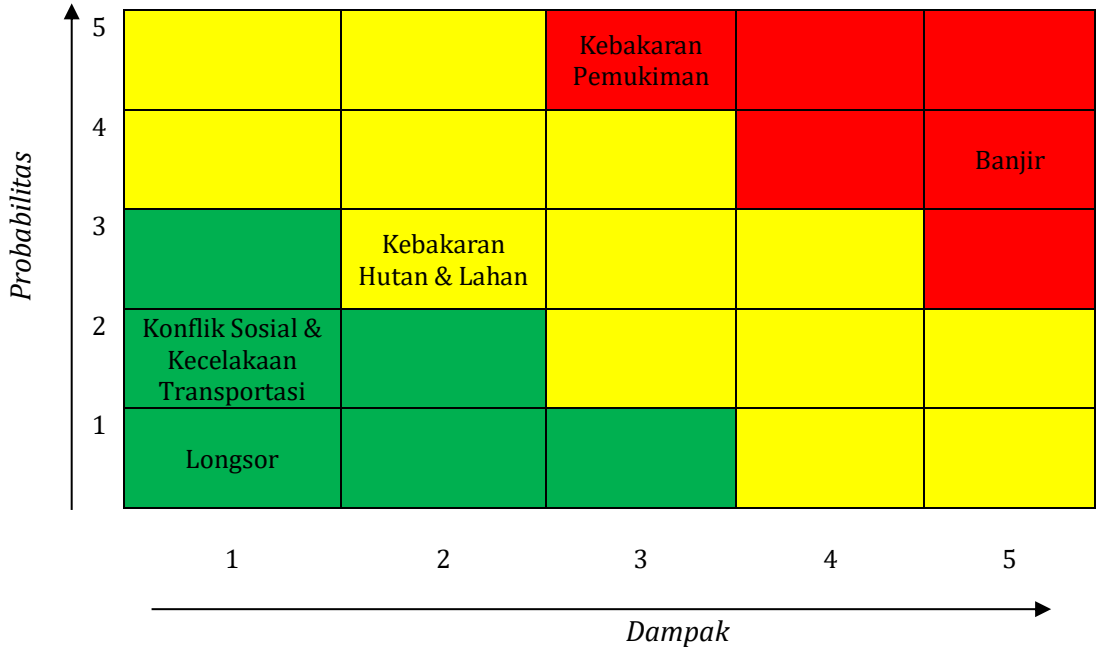
c. Kebencanaan

Identifikasi ancaman kebencanaan yang berpotensi melanda di Kabupaten Paser berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, tanah longsor, kecelakaan transportasi dan konflik sosial. Penilaian risiko didasari dengan dua penilaian ancaman yaitu dengan menilai probability yaitu kemungkinan terjadinya bencana dan dampak kerugian atau kerusakan ditimbulkan. Dari instrumen tersebut, dapat dihitung probabilitas dan dampak dengan mengasumsikan bencana yang terjadi di Kabupaten Paser dengan dan tabel matriks sebagai berikut:

Tabel II.101.
Jenis Ancaman Bahaya di Kabupaten Paser

Jenis Ancaman Bahaya	Probabilitas	Dampak
Kebakaran Pemukiman	5	3
Banjir	4	5
Kebakaran Hutan Dan Lahan	3	2
Tanah Longsor	1	1
Konflik Sosial	2	1
Kecelakaan Transportasi	2	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Paser, 2020



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.25.
Matrik Skala Tingkat Bahaya

Dari matrik tingkat bahaya di atas dapat disimpulkan bahwa bencana di wilayah Kabupaten Paser yang mempunyai probabilitas dan dampak risiko yang besar adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran pemukiman. Berikut tabel desa yang potensi terdampak banjir dan rekap bencana yang terjadi di Kabupaten Paser tahun 2020.

Tabel. II.102.
Desa Potensi Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Desa
1	Long Kali	10
2	Long Ikis	3
3	Muara Samu	2
4	Muara Komam	2
5	Pasir Belengkong	6
6	Tanah Grogot	1
Jumlah		**24**

Sumber: : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, 2020

Tabel II.103
Rekapitulasi Bencana Di Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Jenis Bencana	Jumlah
1.	Orang Tenggelam	7
2.	Kebakaran Rumah	7
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	2
4.	Gelombang Pasang	-
5.	Gempa Bumi	-
6.	Banjir	22
7.	Tanah Longsor	-
8.	Pohon Tumbang	4
9.	Orang Hilang dan Evakuasi Mayat	6
10.	Kekeringan	-
11.	Kebakaran Kios	1
12.	Gagal Teknologi	-
13.	Evakuasi Kecelakaan Kerja	-
14.	Penyemprotan Virus Covid-19	112
	Jumlah	**161**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, 2020

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Capil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas pemerintah dalam menjamin hak warga untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan atau warga negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat melalui data berikut ini.

Tabel II.104.
Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	95,45	96,33	98,33	96,49	97,81
2	Kepemilikan akta lahir per 1000 penduduk	412,7	479,9	506,3	513,7	524,3
3	Rasio pasangan berakte nikah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Paser, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pencapaian terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat di Kabupaten Paser telah mencapai persentasi yang cukup tinggi. Hal ini tentunya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan, sehingga proses penyediaan KTP dapat dilaksanakan dengan optimal.

Selain itu, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah terkait dengan masih rendahnya rasio kepemilikan akta lahir masyarakat di Kabupaten Paser. Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta lahir penduduk masih di kisaran 524,3 dari 1000 penduduk pada tahun 2020, artinya masih ada separuh masyarakat di Kabupaten Paser yang belum memiliki akta kelahiran. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan di setiap tahun, akan tetapi peningkatannya masih belum signifikan dari total seluruh penduduk di Kabupaten Paser.

Data yang diperoleh pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser terkait dengan rasio kepemilikan akte kelahiran tersebut merupakan data yang dihimpun dari penduduk yang melakukan proses pembuatan akte kelahiran terhitung mulai tahun 2011. Sedangkan penduduk yang telah melakukan proses pembuatan akte kelahiran sebelum tahun 2011, tidak terdata pada Dinas. Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan yang secara khusus dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kepemilikan akte kelahiran penduduk di seluruh Kabupaten Paser. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dipertimbangkan strategi yang diperlukan dalam rangka mendapatkan data yang lebih komprehensif terkait dengan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk di Kabupaten Paser.

Selain itu, penyebab lain dari rendahnya tingkat kepemilikan akte kelahiran penduduk di Kabupaten Paser adalah disebabkan masih tingginya angka penduduk yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah:

Tabel II.105.
Data Penduduk Kabupaten Paser Menurut Status Perkawinan Muslim

No	Nama Kecamatan	Status Kawin						Total
		Tercatat			Tidak Tercatat			
		L	P	Total	L	P	Total	
1	Batu Sopang	2.189	2.144	4.333	2.189	2.144	4.333	8.666
2	Tanjung Harapan	682	641	1.323	1.656	1.648	3.304	4.627
3	Paser Belengkong	2.561	2.486	5.047	4.573	4.482	9.055	14.102
4	Tanah Grogot	8.197	7.638	15.835	10.041	10.323	20.364	36.199
5	Kuaro	2.558	2.487	5.045	4.526	4.530	9.056	14.101
6	Long Ikis	4.282	4.152	8.434	5.238	5.152	10.390	18.824
7	Muara Komam	992	975	1.967	2.228	2.248	4.476	6.443
8	Long Kali	2.649	2.537	5.186	3.735	3.708	7.443	12.629
9	Batu Engau	1.561	1.479	3.040	2.782	2.670	5.452	8.492
10	Muara Samu	548	524	1.072	833	801	1.634	2.706
	Jumlah	**26.219**	**25.063**	**51.282**	**37.801**	**37.706**	**75.507**	**126.789**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Paser, 2020

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk yang belum mencatatkan perkawinannya, sehingga pada saat mereka memiliki anak, sebagian besar anak yang lahir tersebut kesulitan untuk melakukan pengurusan akte kelahiran.

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk konteks Kabupaten Paser, bagian ini memaparkan data mengenai jumlah program pemberdayaan masyarakat. Data tersebut berdampak pada penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.

Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dAan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan atau ketidakberdayaan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa.

Pembangunan di Bidang ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu melalui : (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat; (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa; (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; (5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Membangun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan harus dilakukan dengan mengubah paradigma “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”. Hal ini berarti ada aset desa yang harus digali, dikembangkan, dan menjadi energi sosial yang

sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu menumbuhkembangkan budaya dan nilai- nilai sosial desa seperti kegotongroyongan, kerelawanan, kesetiakawanan, keswadayaan masyarakat menuju kemandirian desa.

Tabel II.106.
Jumlah Desa menurut Kategori di Kabupaten Paser, 2020

Kategori	Jumlah	%
Sangat Tertinggal	5	3,60
Tertinggal	47	33,80
Berkembang	77	55,40
Maju	9	6,47
Mandiri	1	0,73
Jumlah	**139**	**100,00**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian desa pada tahun 2020 di Kabupaten Paser masih rendah. Jumlah desa mandiri hanya 1 desa (0,72%), desa maju 9 desa (6,47%), desa berkembang 77 desa (55,4%), desa tertinggal 47 desa (33,8%) dan desa sangat tertinggal 5 desa (3,6%). Masih rendahnya tingkat kemandirian desa disebabkan karena belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan, masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi perdesaan, serta masih rendahnya konektifitas antar wilayah.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana (KB), disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Lahirnya program keluarga berencana antara lain bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran. Program seperti ini masih sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak bermakna, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk. Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan karena pada selang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar. Perempuan yang usianya berada

pada periode ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangga. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Tabel II.107.
Persentase Penduduk Perempuan Umur 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan di Kab Paser Tahun 2016 – 2020

Status Perkawinan	2016	2017	2018	2019	2020
Belum Kawin	29,02	29,10	27,06	30,06	NA
Kawin	63,52	63,47	65,31	12,41	NA
Cerai	7,47	7,44	7,64	57,53	NA
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser, 2020

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk perempuan 10 tahun ke atas menurut status perkawinan menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang berstatus kawin cenderung turun yaitu sebesar 12,41 persen (tahun 2019), sedangkan yang berstatus cerai naik sebesar 57,53%.

Tabel II.108.
Capaian Kinerja Keluarga Berencana di Kabupaten Paser Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Fasilitas kesehatan KB	28
2	Kader KB	288
3	Jejaring Faskes KB	154
4	Jumlah Pasangan usia subur	45.084
5	Peserta KB Aktif	32.280
	- IUD	1.878
	- MOW	603
	- MOP	22
	- Kondom	1.241
	- Inplant	2.893
	- Suntikan	16.507
	- PIL	9.136

Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Paser, 2021

Dari sisi penggunaan alat kontrasepsi, pada tahun 2018 terdapat 59,33% PUS yang menggunakan alat kontrasepsi KB dan sisanya tidak menggunakan alat kontrasepsi KB karena sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan, takut efek samping serta pandangan agama.

2.3.2.9. Perhubungan

a. Transportasi

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah, daya saing, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

Mencermati dinamika perkembangan yang terjadi, maka perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global. Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas wilayah dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level kabupaten berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Pelayanan perhubungan di Kabupaten Paser sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja pembangunan bidang perhubungan selama lima tahun terakhir dan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi sekarang, sasaran maupun target yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD dan RKPD, perlu digaris bawahi bahwa secara umum target *output* bisa tercapai, namun secara *outcome* masih perlu mendapat perhatian apakah dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat maupun terhadap aspek keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu memahami kondisi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pelayanan transportasi terhadap capaian pembangunan infrastruktur transportasi kabupaten Paser yang meliputi:

1) Transportasi Darat

Transportasi darat memiliki potensi yang besar dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi. Untuk angkutan barang peran pokok transportasi darat

adalah sebagai pengumpan *(feeder)* terhadap sistem transportasi di Kabupaten Paser. Arah pengembangan transportasi darat harus selaras dan terintegrasi dengan arah pengembangan moda transportasi lainnya. Berikut data Prasarana dan sarana transportasi darat di Kabupaten Paser.

Tabel.II.109.
Panjang Jalan dengan Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km), 2019

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
1	Batu Sopang	23,60	12,02	36,13	71,75
2	Muara Samu	8,30	2,22	14,47	24,99
3	Batu Engau	4,60	49,90	48,54	103,04
4	Tanjung Harapan	-	7,76	26,62	34,38
5	Pasir Balengkong	51,50	4,96	70,46	126,92
6	Tanah Grogot	132,30	5,73	44,17	182,20
7	Kuaro	30,50	4,34	32,35	67,19
8	Long Ikis	47,60	20,70	37,85	106,15
9	Muara Komam	8,90	13,60	89,37	111,87
10	Long Kali	26,40	30,70	119,60	176,70
	Paser	**333,70**	**151,93**	**519,56**	**1005,19**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Paser, 2021

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Berikut jumlah kendaraan bermotor :

Tabel II.110.
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Pada Satlantas Polres Paser Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah(Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepeda Motor	8.657	8.657	61.295	8.347	5.683
2	Mobil Penumpang					
	a. Umum	-	-	61	61	7
	b. Tidak Umum	637	637	761	761	301
	c. Dinas	21	21	17	17	4
3	Mobil Barang					
	a. Umum	-	-	122	465	20
	b. Tidak Umum	689	689	465	122	376
	c. Dinas	3	3	17	17	2

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah(Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Bus / Micro Bus					
	a. Umum	-	-	-	18	8
	b. Tidak Umum	9	9	170	15	-
	c. Dinas	-	-	-	3	-
5	Kendaraan Roda Tiga					
	a. Umum	-	-	-	-	-
	b. Tidak Umum	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kab. Paser, 2021

Data di atas terhadap tingkat pelayanan angkutan lebih cenderung tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini pelayanan angkutan keprintisan untuk mendukung konektivitas wilayah, khususnya wilayah pedalaman masih belum optimal, antara lain belum seluruh kecamatan dilayani angkutan umum. Berikut jumlah armada dan panjang trayek.

Tabel II.111.
Jumlah Armada dan Panjang Trayek Tahun 2020

Kode Trayek	Panjang Trayek (km)	Jumlah Armada (Unit)				Tarif (Rp)
		Bus Besar	Bus Sedang	Bus Kecil	Mobil Penumpang Umum	
Angkutan Perkotaan		-	-	-	18	6.000,-
Angkutan Perdesaan						
Tanah Grogot – Kerang		-	-	-	19	35.000,-
Tanah Grogot – Payo Klato		-	-	-	18	10.000,-
Tanah Grogot – Bekoso		-	-	-	7	10.000,-
Tanah Grogot – Pondong		-	-	-	8	11.000,-
Tanah Grogot – Muara Komam		-	-	-	11	50.000,-
Tanah Grogot – Lori		-	-	-	13	40.000,-
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP) Tanah Grogot - Penajam						
Tanah Grogot - Penajam (MPU)	147	-	-	-	114	60.000,-
Tanah Grogot - Penajam (Bus)	147	9	-	1		50.000,-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, 2021

Standar keselamatan dan keamanan transportasi darat meliputi kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana keselamatan. Berikut jumlah kendaraan bermotor wajib uji.

Tabel II.112.
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2016-2020.

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang Umum	238	239	239	239	239
2	Bus					
	Umum	50	50	50	50	3
	Tidak Umum	183	183	203	233	254
3	Mobil Barang					
	Umum	346	346	346	346	346
	Tidak Umum	8.062	8.550	9.054	9.551	9.300
4	Tempelan/Gandengan Tidak Umum	2	2	2	2	2
Jumlah		**8.881**	**9.370**	**9.894**	**10.421**	**9.905**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, 2021.

Bila disandingkan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Satlantas Polres Paser (Tabel.II.110) dengan data jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (Tabel.II.112) ada perbedaan, dimana kendaraan bermotor yang berada di wilayah hukum Polres Paser namun terdaftar diwilayah lain atau berasal dari luar daerah Kabupaten Paser diwajibkan untuk melakukan uji kendaraan bermotornya di UPT PKB terdekat guna menjamin kelayakan dan keselamatan transportasi, selain itu juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas juga perlu menjadi perhatian bersama terhadap tingkat resiko kecelakaan. Berikut jumlah kejadian kecelakaan.

Tabel II.113.
Jumlah Kejadian Kecelakaan

No.	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban				Faktor Penyebab utama kecelakaan
				Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan	Total	
1	2016	85	85	56	9	86	151	Manusia (84,65%) Alam (1,48%) Kendaraan (4,88%) Prasarana Jalan (8,99%)
2	2017	103	103	52	4	95	151	Manusia (84,65%) Alam (1,48%) Kendaraan (4,88%) Prasarana Jalan (8,99%)
3	2018	68	68	34	6	97	137	Manusia (68,10%) Alam (1,33%) Kendaraan (12,04%) Prasarana Jalan (1,86%)

No.	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban				Faktor Penyebab utama kecelakaan
				Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan	Total	
4	2019	71	71	28	7	78	106	Manusia(85,00%) Alam(9,00%) Kendaraan(4,32%) Prasarana Jalan(1,68%)
5	2020	41	41	32	3	33	68	Manusia(70%) Alam(10%) Kendaraan(7,32%) Prasarana Jalan(12,68%)

Sumber : Satlantas. Polres Paser, 2021

Faktor penyebab utama kecelakaan sebagian besar oleh faktor manusia walaupun dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan angka kecelakaan, namun faktor prasarana jalan masih berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan di kabupaten Paser. Berikut rambu lalu lintas dan panjang marka jalan.

Tabel II.114.

Konsisi Rambu Lalu lintas, Eksisting, Panjang Marka Jalan Tahun 2020

No.	Status	Perkiraan Jumlah Rambu yang Dibutuhkan	Rambu Eksisting			Perkiraan Panjang Jalan yang membutuhkan Marka (m)	Panjang Jalan yang sudah dilegkapi marka	
			Jumlah	Baik	Rusak		Marka Tepi	Marka Tengah
1	Jalan Nasional	68	208	168	40	294.034,65	7.681,45	12.877,9
2	Jalan Provinsi	12	78	72	6	25.200	0	0
3	Jalan Kab/Kota	470	432	400	32	141.271.550	7.636,300	3.818.150
	Jumlah	**550**	**718**	**640**	**78**	**141.590.784,65**	**7.643.981,45**	**3.831.027,9**

Sumber : Dishub. Kab. Paser 20121

2) Transportasi Pelayaran

Transportasi sungai, danau dan angkutan penyeberangan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah kabupaten Paser, dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Keefektifan terhadap operasional pelayaran akan menurunkan biaya operasional yang memberikan dampak yang besar bagi konsumen maupun penyedia layanan transportasi itu sendiri. Beberapa wilayah kecamatan dan pesisir yang belum semua terjangkau oleh angkutan darat bagi angkutan penumpang dan barang menjadi alternatif terhadap distribusi perekonomian masyarakat kabupaten paser. Berikut jumlah bongkar muat barang di pelabuhan Kabupaten Paser.

Tabel II.115
Jumlah Bongkar dan Muat di Pelabuhan kabupaten Paser (Ton/M3) 2017-2020

No.	Barang	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
1	Solar	340.663	0	402.993	0	374.008	0	401.873	-
2	Pupuk	36.709	0	62.804	0	26.453	0	22.911	-
3	Alat Berat	9.265	8.398	9.835	6.434	4.972	7.244	5.790	4.561
4	Semen	9.120	1 396	8.067	2 000	1.580	0	-	-
5	AN	19.809	0	29.774	0	33.970	0	28.092	-
6	Sirtu	30.302	17.816	37.005	10.675	20.847	0	10.428	-
7	Container	0	0	0	0	0	0	-	-
8	Aspal	0	0	0	0	0	0	-	-
9	GC	0	0	0	0	0	0	-	-
10	Karnel								
	Eksport	0	0	0	0	0	0	-	-
	Domestik	1.841	24.002	0	123.301	0	55.236	-	15.840
11	CPO								
	Eksport	0	0	0	0	0	0	-	-
	Domestik	0	326.293	6.400	389.798	0	438.360	-	402.158
12	Batu Bara								
	Eksport	0	21.040.635	0	24.099.461	0	23.490.020	-	11.768.493
	Domestik	0	10.661.828	0	11.518.769	0	12.200.188	-	22.413.176
13	Penumpang	0	0	402.993	0	0	0	-	-
14	Import Aspal	1.935	0	0	0	0	0	-	-
15	Cangkang	0	9.745	0	7.270	0	18.212	-	30.943
16	Kayu								
	Bulat	0	192.565	0	25.581	0	0	-	-
	Olahan	0	3.470	0	18.353	0	5.579	-	
17	Nikel								
	Eksport	0	0	0	0	0	0	-	
	Domestik	0	0	0	0	0	0	-	
18	Konstruksi	0	0	1.258	0	0	0	-	
19	Batu Split	0	0	21.943	46.851	16.311	48.275	18.081	13.019
20	Pasir	0	0	11.855	0	3.102	0	4.487	
21	GN	0	0	240	0	0	0	-	
22	Bibit Karet	0	0		30.600	0	0	-	
23	Lowbad				5	0	0	-	
24	CPKO				4.551	0	0	-	
25	Rotan				94	0	0	-	
	Jumlah	**449.644**	**32.286.148**	**582.174**	**36.283.743**	**481.243**	**36.263.114**	**491.662**	**34.649.162**

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2021

Data di atas menunjukkan trend muat lebih besar dari pada bongkar melalui sarana tranportasi laut atau sungai. Bahan baku maupun barang hasil produksi dari satu wilayah dapat dipasarkan kewilayah lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Paser.

3) Transportasi Udara

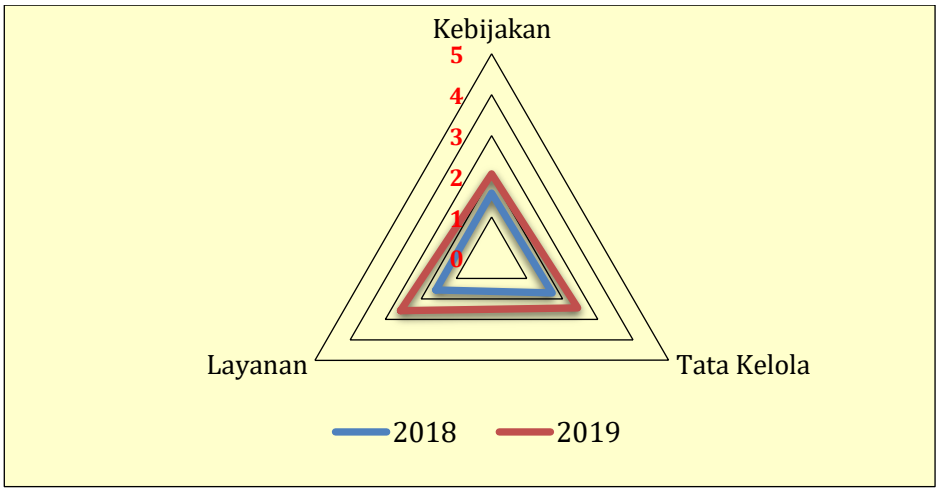
Transportasi udara sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik yang dapat melayani angkutan penumpang dan barang relatif terbatas khususnya barang bernilai tinggi dan membutuhkan waktu cepat, dan dapat melakukan penetrasi sampai keseluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Jaringan prasarana transportasi udara yang bersifat nasional terdiri dari simpul yang berwujud Bandar Udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara. Bandar udara dibedakan berdasarkan fungsi, penggunaan, klasifikasi, status dan penyelenggaraannya serta kegiatannya.

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perhubungan telah berupaya untuk mengembangkan moda transportasi udara, namun hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut pembangunan Bandara yang sempat tertunda dalam beberapa tahun belakangan ini terkait dengan berbagai permasalahan dan regulasi yang sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kabupaten Paser telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui **http://www.paserkab.go.id/.** Ragam informasi terkait Paser dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga.

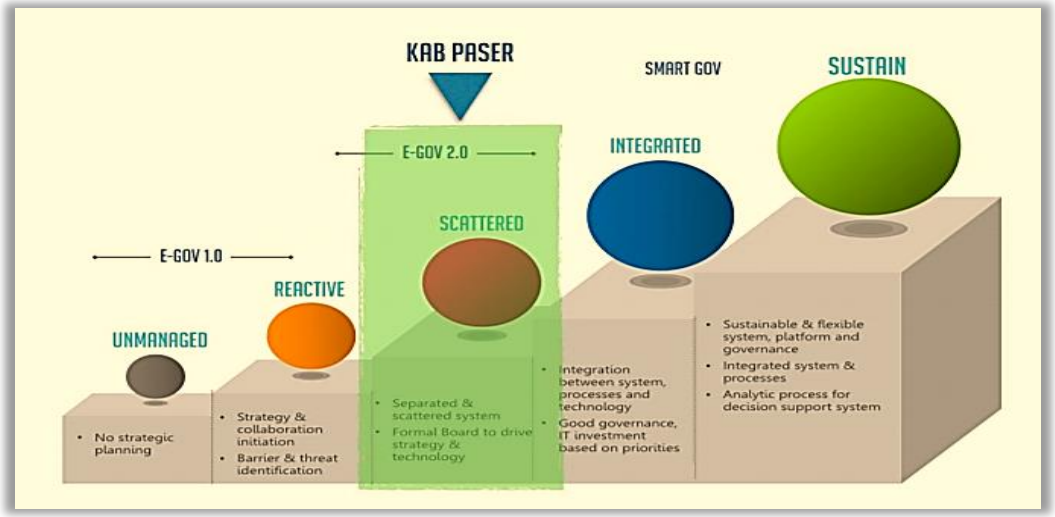
Capaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Paser pada awal penilaian di Tahun 2018 adalah 1,63 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 1,69 seperti digambarkan pada grafik di bawah ini :



Sumber : Diskominfo Statistik dan Persandian, 2021

Gambar II.26.
Indeks SPBE Kabupaten Paser

Dari berbagai kondisi yang telah disampaikan sebelumnya, status penerapan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Paser dapat disimpulkan berada di fase "*scattered*".



Sumber: Diskominfostaper Kabupaten Paser, 2021.

Gambar II.27.
Fase Penerapan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Paser

Hal ini masih jauh dari kondisi ideal dari yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan di masa depan khususnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah dimana E-Government sudah mencapai fase " smart governance ". Tujuan pengembangan e-Government sesuai dengan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai berikut :

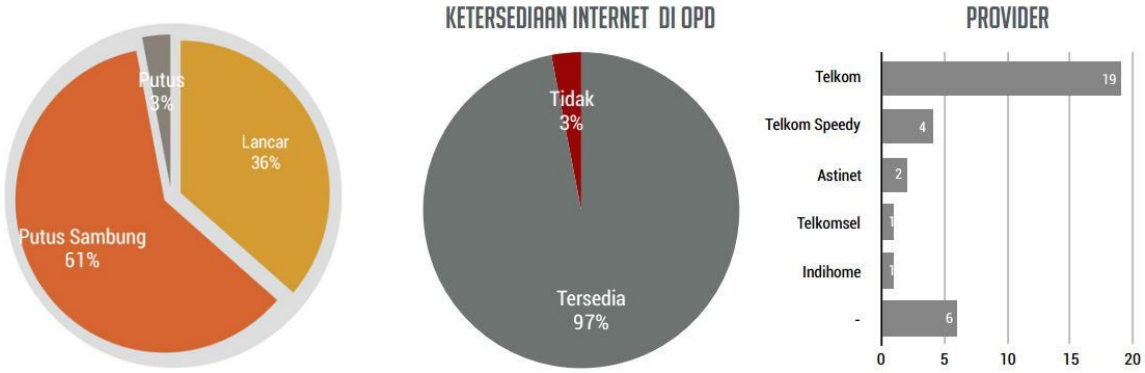
a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan membangun infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti Sistem informasi rumah sakit, sistem pelayanan kependudukan, sistem pelayanan administrasi terpadu, website dan lain-lain.
b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan penerapan sistem perizinan terpadu, sistem informasi potensi daerah, sistem informasi investasi dan lain-lain
c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan penerapan sistem aspirasi publik berbasis web dan mobile.
d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah

daerah otonom. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan dan penerapan sistem e-office, sistem informasi kepegawaian, sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan, integrasi sistem dan dashboard.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Paser dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan smart governance dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain infrastruktur TIK, layanan sistem informasi dan sumber daya TIK. Berikut kondisi ketiga faktor tersebut di Kabupaten Paser.

a. Infrastruktur TIK

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Paser sudah dirasa cukup besar. Pemerintah Kabupaten Paser menangkap kebutuhan ini dengan menginisiasi dimulainya pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Paser. Namun fasilitas infrastruktur jaringan internet dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser masih perlu perbaikan. Berikut kondisi jaringan internet di Kabupaten Paser.



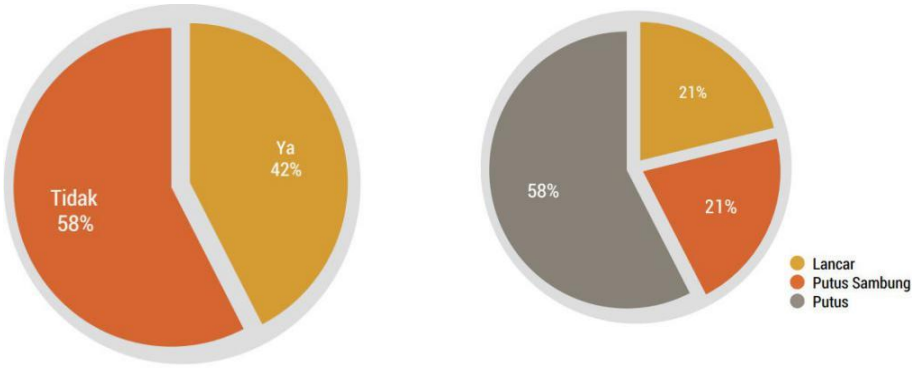
Sumber : Perbup Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan E-Gov

Gambar II.28.
Kondisi Jaringan Internet

Hampir seluruh unit kerja telah memiliki koneksi internet dan sebagian besar unit kerja menggunakan provider internet yang berasal dari PT. TELKOM. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (61%) performa internet masih putus nyambung. Padahal, ketersediaan jaringan internet yang handal merupakan salah satu komponen yang pasti digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, baik untuk kolaborasi internal antar unit kerja maupun pelayanan masyarakat termasuk jaringan lokal atau LAN (*Local Area Network*). Ketersediaan LAN ini akan

memberikan efisiensi dalam proses kerja di internal unit kerja. mempercepat proses pertukaran file (*file sharing*), mempermudah proses penggunaan perangkat pendukung secara bersama-sama dan terintegrasi serta akan mempermudah proses pengadaan dan pengelolaan koneksi internet pada masing masing perangkat yang dituju.

Namun belum semua ruang di perangkat daerah telah tersambung dengan jaringan LAN. Berdasarkan data yang ada baru 42% unit kerja yang telah memiliki koneksi LAN antar ruang, sedangkan 58% belum terkoneksi LAN. Sementara itu unit kerja yang telah tersambung LAN kondisi jaringannya juga belum stabil yaitu putus sambung (21%) dan putus (21%), hanya 58% unit kerja yang menyatakan bahwa jaringan LANnya berjalan dengan lancar. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi jaringan di Kabupaten Paser belum stabil dan belum terintegrasi.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.29.
Ketersedian LAN di Perangkat Daerah Kabupaten Paser

Kemudian dari sisi infrastruktur pendukung jaringan komunikasi, masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang belum mendapatkan layanan jaringan yang memadai (blankspot).

Tabel II.116
Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jaringan Seluler			
			1G	2G	3G	4G
1	Tanah Grogot	16	-	2	-	14
2	Pasir Balengkong	16	-	5	6	5
3	Kuaro	13	-	-	-	13
4	Long Ikis	26	-	8	11	7
5	Long Kali	23	2	6	6	9
6	Muara Komam	12	2	7	2	1
7	Batu Sopang	9	1	1	3	4

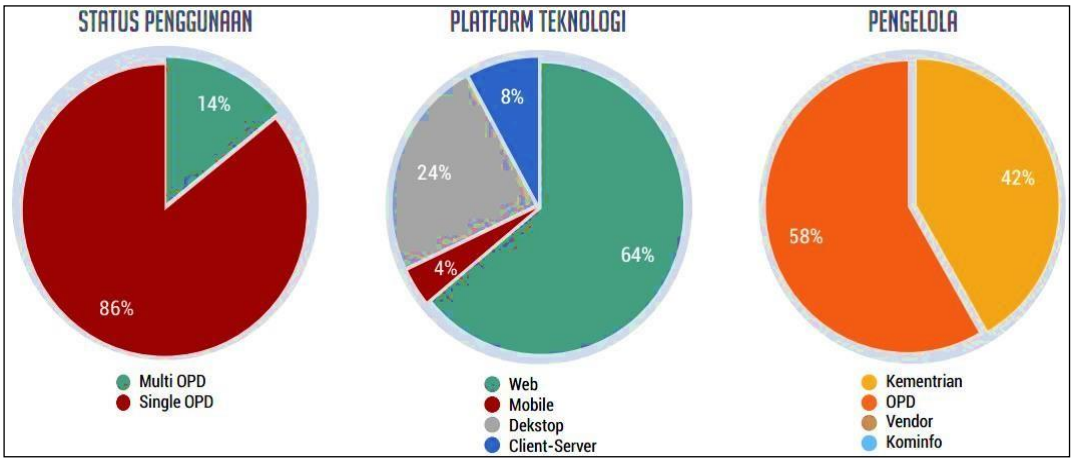
No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jaringan Seluler			
			1G	2G	3G	4G
8	Muara Samu	9	-	5	1	3
9	Batu Engau	13	-	8	2	3
10	Tanjung Harapan	7	1	4	1	1
	Jumlah	**144**	**6**	**46**	**32**	**60**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat desa-desa dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Paser yang mendapatkan jaringan 1G dan 2G. Jaringan 1G dan 2G dikategorikan **Blankspot**, karena belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan lemah signal digunakan untuk telepon, SMS, MMS di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi, karena belum dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada wilayah desa yang masih blankspot tersebut.

b. Layanan Sistem Informasi

Tingkat penggunaan sistem informasi sudah cukup baik, dari 42 jenis aplikasi, 86% sistem informasi yang tersedia dan yang dibangun digunakan oleh unit kerja tunggal, sebesar 14% digunakan antar Perangkat Daerah.



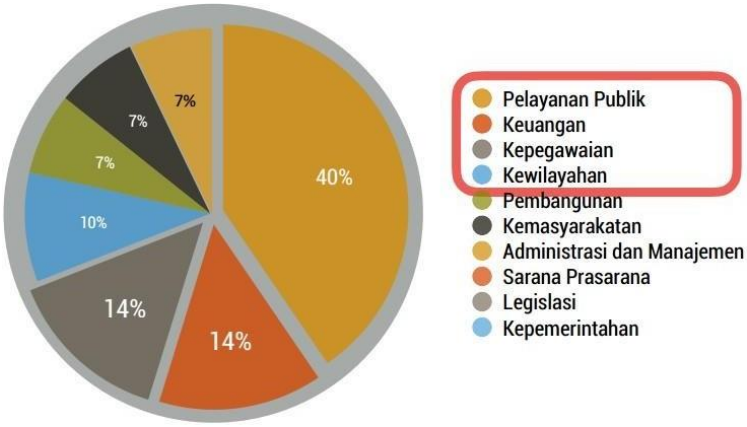
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.30.
Kondisi Sistem Informasi

Platform teknologi yang digunakan oleh sistem informasi yang tersedia, gambarannya dapat ditunjukan sesuai dengan grafik diatas. Mayoritas (64%) sistem informasi yang tersedia menggunakan teknologi berbasis web (web base), 24% menggunakan teknologi berbasis desktop (desktop base), 8% berbasis *client-server*, dan 4% berbasis *mobile*.

Berdasarkan kepemilikan aplikasi, 58% aplikasi yang tersedia dan sudah dijalankan, dikelola oleh Perangkat Daerah, 42% merupakan aplikasi yang diberikan

oleh kementerian (pemerintah pusat).

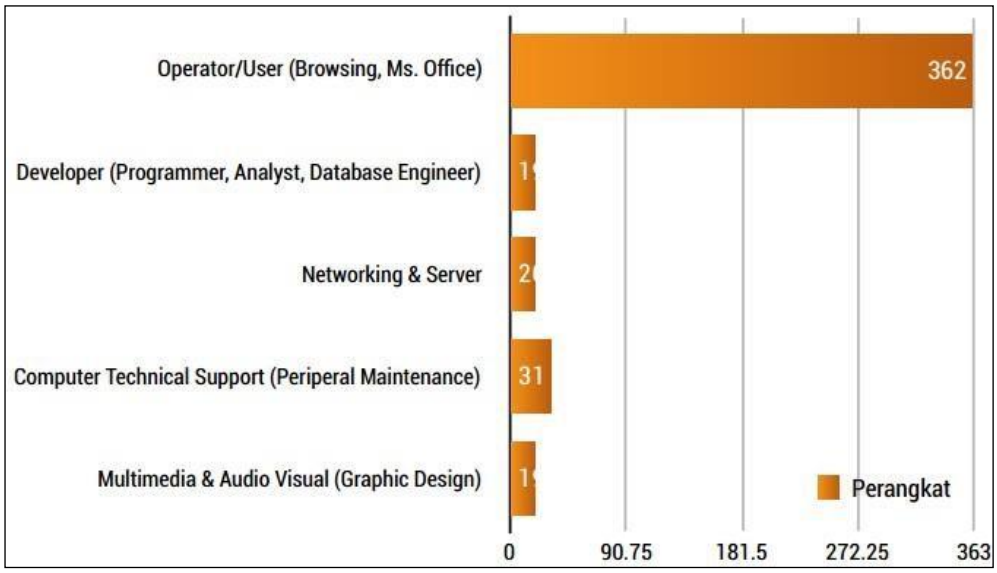


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.31.
Clustering Sistem Informasi

c. Sumber Daya Manusia TIK

Gambaran kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Paser tersaji pada gambar berikut.



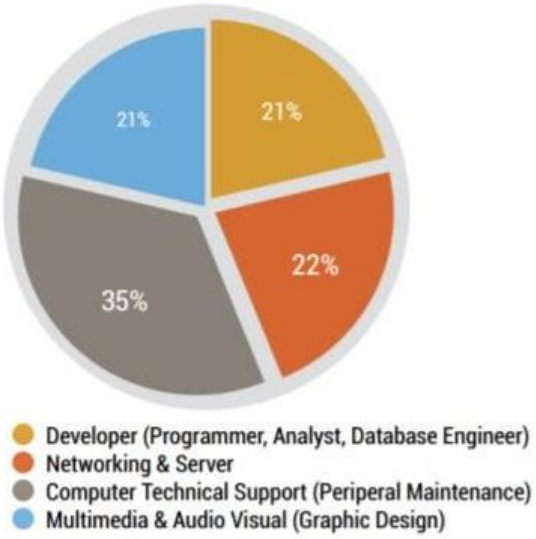
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.32.
Kondisi SDM dengan kualifikasi basic IT (operator & Office)

Grafik di atas menyajikan bahwa sebagian besar (362 orang) memiliki kualifikasi basic IT atau kemampuan dasar Perangkat lunak perkantoran (*Word, Excel, Power Point*), diikuti oleh teknisi peripheral (31 orang), ahli jaringan dan server (20 orang), serta ahli multimedia dan developer (masing-masing 19 orang). Dari sisi

kualitas dan kualifikasi SDM ber basic IT sangat diperlukan untuk dapat mengelola TIK menjadi penentu keberlangsungan layanan TIK di tingkat Perangkat Daerah.

Selanjutnya, jika diamati lebih jauh mengenai SDM dengan kualifikasi *advance* (memiliki kemampuan development), maka proporsinya dapat di lihat seperti grafik di bawah. Dari grafik, dapat ditafsirkan bahwa peta persebaran kualifikasi SDM TI cukup berimbang. Mayoritas (35%) adalah yang memiliki kemampuan *peripheral maintenance*, 22% memiliki kemampuan *networking*, sedangkan yang memiliki kemampuan developer (*programmer, analyst, database engineer*), dan graphic design, masing-masing sebanyak 21%. seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.33.
Kondisi SDM dengan kualifikasi advance IT

2.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bagian dari wujud ekonomi riil masyarakat Paser. Oleh sebab itu, guna menentukan strategi pengembangan yang tepat, perlu diketahui mengenai jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Paser. Kinerja bidang koperasi dapat dilihat dari pertambahan jumlah koperasi dan jumlah anggotanya. Dalam kurun waktu 2016-2019 jumlah koperasi di kabupaten Paser terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 presentase koperasi aktif menurun menjadi 56,33 persen. Menurunnya presentase koperasi aktif ini akibat dari banyaknya program yang tidak berlanjut, mitra kerja yang tidak lagi beroperasi karena pandemic covid-19 dan pengurus koperasi tidak lagi aktif. Berbeda halnya dengan keberadaan UMKM dimana tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 40.534 jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7.882, drastisnya peningkatan UMKM ini akibat dari adanya program Bantuan Produktif Usaha Mikro.

Selain itu, sebagai bagian dari pemberdayaan, perlu juga dilihat sejauh mana Koperasi dan UKM mendapat kemudahan modal. Iklim usaha yang semakin membaik

tampak dengan semakin banyaknya jumlah UKM.

Tabel II.117.
Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM di Kabupaten Paser 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif	72,0	78,44	78,52	79,32	56,33
2	Jumlah UMKM	13.736	14.398	14.638	7.882	40.534

Sumber : Dinas Perindagkop, 2021

Tabel II.118.
Jumlah Koperasi dan Jumlah UKM di Kabupaten Paser 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Aktif	214	243	221	225	234
	Koperasi Tidak Aktif	64	58	61	61	61
	Koperasi RAT	111	109	132	119	97
	Volume Usaha (000)	23.021	23.021	23.021	23.021	26.255
	Jumlah SHU (000)				3.684.736	4.100.578
2	Jumlah UKM	5.666	13.726	13.726	14.638	3.038

Sumber : Statistik Dinas Perindagkop dan UKM, 2019

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Paser selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2017, namun peningkatan jumlah Koperasi tidak diimbangi dengan pengelolaan manajemen koperasi yang baik, salah satu indikator koperasi yang sehat adalah terlaksananya RAT setiap tahun. Data tahun 2015-2019, Rata-rata Koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahun adalah 20,67% dari semua jumlah koperasi yang ada.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Potensi perekonomian di Kabupaten Paser tidak hanya terfokus pada pertambangan (batu bara) tetapi juga perkebunan sawit. Kedua sector usaha tersebut padat modal dan menarik banyak investor baik yang berskala nasional maupun asing. Oleh sebab itu, tolok ukur dalam pengembangan investasi daerah dapat dilihat melalui jumlah investor berskala nasional PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) serta jumlah investasi di Kabupaten Paser.

Tabel II.119.
Jumlah Investor 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Investor
2016	16
2017	53
2018	62
2019	41
2020	56

Sumber : DPMPTSP, 2021

Iklim investasi yang membaik menyebabkan jumlah investor yang semakin banyak. Industri galian tambang non migas menyerap banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri, apalagi dengan dukungan kemudahan investasi yang diterapkan di Kabupaten Paser.

Tabel II.120.
Jumlah Nilai Investasi 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Asing (PMDN/PMA)
2016	528.512.696.470
2017	776.968.138.458
2018	7.935.089.676.690
2019	1.910.175.000.000
2020	657.970.000.000

Sumber : DPMPTSP, 2021

Jika dibandingkan dengan total nilai investasi dalam masyarakat yang tercatat dalam pembentukan Modal Tetap Bruto tahun 2018, nilai investasi PMAA dan PMDN tersebut mencapai angka 80,91%. Artinya hampir semua investasi dilakukan oleh investor formal yang tercatat, baik nasional maupun asing, angka ini emngirimkan pesan bahwa investasi yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah kecil dalam menyumbang gerak roda perekonomian.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, karena investasi berpengaruh pada kuantitas permodalan di suatu daerah, pembukaan lapangan kerja, permintaan dan penawaran, serta pengaruh lain yang berhubungan dengan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Daerah, DPMPTSP, Kabupaten Paser, pada tahun 2013 rata-rata Kabupaten Paser memiliki lama waktu perijinan selama 5 jam. Hal ini berlaku untuk 6 jenis perijinan, seperti SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO. Lima jam adalah waktu tergolong cepat jika berpijak kepada Standar Operasional Prosedur DPMPTSP. Cepatnya proses perijinan ini mengindikasikan bahwa proses perijinan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Paser.

Tabel II.121.
Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Di Kabupaten Paser Tahun 2019

Sub Sektor	Jumlah (Rp)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	281.075.300.000
Tanaman Pangan & Perkebunan	52.408.300.000
Industri Makanan	50.940.600.000
Pertambangan	159.713.000.000
Konstruksi	2.996.700.000
Hotel dan Restoran	4.800.000.000
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	27.987.400.000
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	10.653.400.000

Sumber : DPMPTSP, 2020

Tabel II.122.
Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)
Di Kabupaten Paser Tahun 2019

Sub Sektor	Jumlah (US$)
Kehutanan	31.700
Pertambangan	15.915.200

Sumber : DPMPTSP, 2020

Tabel II.123.
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Jenis Perda	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perda Yang Terkait Perijinan	12	12	12	12	12

Sumber : DPMPTSP, 2021

Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah perda yang terkait perijinan di Kabupaten Paser berjumlah tetap. Tidak ada kenaikan atau penurunan sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian jumlah Perda tentang perijinan dengan isu-isu strategis di bidang perijinan, sehingga Perda mampu mendukung aspek daya saing Kabupaten Paser dengan baik.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus masa depan daerah, pemuda memerlukan berbagai dukungan layanan dasar. Sampai tahun 2020, jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 10 organisasi yang aktif dalam pembangunan. Adapun perkembangan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Paser sebagai berikut :

Tabel II.124.
Perkembangan Kegiatan Kepemudaan, 2018-2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Peserta Kegiatan Jambore Pemuda Tk. Kabupaten (Orang)	30	30	30
Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Orang)	-	25	25
Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	15	25	25
Jumlah Peserta Jambore Pemuda Daerah Tingkat Propinsi (Orang)	6	6	6
Jumlah Peserta Paskibraka Seleksi Tingkat Nasional (Orang)	4	4	4
Jumlah Peserta Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional (Orang)	1	1	1
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan	8	10	10
Jumlah kelompok wirausaha pemuda pemula yang dibina	3	3	3

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2021

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Olahraga merupakan sarana pemersatu masyarakat karena sifatnya yang mampu menggugah kebersamaan. Wujud dukungan pemerintah terhadap layanan dasar kepemudaan dan olahraga salah satunya dengan program mercusuar pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang dibangun tidak jauh dari komplek kantor pemerintahan. Sampai tahun 2020, jumlah total lapangan olahraga yang dikelola oleh Disporapar Kabupaten Paser sebanyak 54 unit tersebar di beberapa desa di pelosok kabupaten. Adapun Perkembangan Olahraga di Kabupaten Paser Tahun 2017-2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.125.
Perkembangan Bidang Olah raga di Kabupaten Paser, 2017-2020

URAIAN	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga	210	221	231	231
Jumlah Gelanggang /Balai Remaja	2	2	2	2
Jumlah organisasi pemuda	33	34	34	34
Jumlah Tenaga dan pembina Keolahragaan	46	48	71	71
Apresiasi dan Penghargaan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang yang Berprestasi	0	48	0	0
Jumlah Sarana Olahraga	54	54	54	54

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2021

2.3.2.14. Statistik

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diperlukan data yang akurat supaya perencanaan pembangunan benar-benar terukur, efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan data statistik merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan juga untuk keperluan lainnya. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki dokumen statistik yang menyediakan data-data terkait pembangunan di Kabupaten Paser. Dokumen statistik tersebut disediakan oleh BPS Kabupaten Paser, yang biasa disebut "Paser dalam Angka" dan "PDRB Kabupaten Paser" Kedua buku tersebut tersedia setiap tahun. Sedangkan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi baru mulai dilaksanakan pada tahun 2019, seperti yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.126.
Dokumen Statistik Di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Data statistik Paser Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedia sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

2.3.2.15 Persandian

Fungsi persandian ialah mengatur, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia antara aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah dan hubungan persandian luar negeri memelihara keamanan serta mengadakan tindakan-tindakan pengamanan terhadap pemberitaan rahasia pemerintah yang disalurkan melalui perhubungan sandi.

Tabel II.127.
Kinerja Persandian Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	2,4	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2021

Fasilitas persandian di Kabupaten Paser tersedia sebagai inventaris alat sandi nasional (Badan Sandi Negara) dan prosedur pemakaian persandian negara ini diampu oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. Namun dari data jumlah permohonan pemakaian persandian dan alat sandi tersebut sampai dengan Tahun 2020 belum dimanfaatkan oleh perangkat daerah yang memfungsikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebelumnya fasilitas persandian tersebut berada di sekretariat

daerah dan dimanfaatkan oleh sekretariat daerah cq. bagian umum dalam melaksanakan tugas-tugas persandian dan komunikasi dengan kecamatan sampai dengan Tahun 2016. Pemanfaatan persandian ini berkurang disebabkan karena semakin maju dan berkembangnya teknologi komunikasi dan informatika yang menuntut bukan hanya pengamanan informasi saja tetapi berkembang pada pengamanan data dan informasi siber serta sosialisasi kebutuhan pengamanan informasi rahasia negara dan data siber. Selama tahun 2016-2020 dari 41 OPD di Kabupaten Paser hanya ada 2,4 % yang menggunakan persandian dalam komunikasi perangkat daerah.

2.3.2.16. Kebudayaan

Tantangan dalm upaya pelestarian kebudayaan khususnya kesenian tradisional semakin berat karena berkembangnya zaman serta adanya arus globalisasi pada masa sekarang ini. Perkembangan zaman serta adanya arus globalisasi ini mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pola kehidupan masyarakat, yang juga berpengaruh pada kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan daerah peninggalan leluhur sudah mulai terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari luar dan lambat laun kebudayaan daerah tersebut mulai ditinggalkan.

Aktifitas seni dan budaya di Kabupaten Paser masih belum berkembang optimal. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar-sanggar kesenian masih kurang aktif. Berbagai upaya dilakukan dalam melestarikan kesenian dan budaya lokal melalui inventarisasi kesenian lokal yang ada di Kabupaten Paser.

Tabel II.128.
Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser, 2020

No	Uraian	Jumlah
1.	Kesenian Lokal	25 jenis
2.	Tradisi Lisan	17 buah
3.	Adat Istiadat	7
4.	Ritus	7
5.	Teknologi Kesenian	10
6.	Kesenian Tradisional	21
7.	Permainan Tradisional	14
8.	Olahraga Tradisional	11
9.	Jumlah Buku/ Dokumen Resmi Berbahasa Paser Yang Diterbitkan	5
10.	Jumlah Objek Benda Kebudayaan	444
11.	Jumlah Lembaga Kebudayaan	97
12.	Jumlah Tenaga Kebudayaan	0
13.	Jumlah Sekolah yang mengajarkan Muatan Lokal Bahasa Paser	16
14.	Jumlah Tempat Promosi Kebudayaan	4
15.	Jumlah Pementasan Seni Budaya Dalam Setahun	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, 2021

Untuk dukungan terhadap layanan dasar kebudayaan, pemerintah daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan festival seni dan keolahragaan. Pemerintah mengadakan festival kebudayaan minimal setahun dua kali pada momentum peringatan

17 Agustus dan hari jadi Kabupaten Paser. Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal Kabupaten Paser dan menggelar pasar rakyat. Pementasan budaya tersebut yakni Festival budaya dilaksanakan dengan menampilkan pawai budaya, pertandingan olah raga dan permainan tradisional, dan Pentas budaya di Arena Seni Museum Sadurengas Sedangkan arena/tempat promosi budaya yang digunakan adalah Taman Putri Petung, Arena Seni Museum Sadurengas, Gentung Temiang, dan Gedung Awa Mangkuruku.

Setiap pagelaran festival tersebut selalu meriah dan mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Beragam kreasi kostum peserta serta aksi penari yang mengikuti parade mendapat sambutan luar biasa dari wisatawan dan masyarakat.

Kesenian lokal yang ada di Kabupaten Paser yang perlu terus menerus dilestarikan dan dikembang agar tidak punah. Di samping itu upaya pemerintah lainnya adalah melaksanakan pementasan kesenian. Namun demikian masih rendahnya frekuensi pementasan budaya kesenian minimnya tenaga kebudayaan serta sarana pementasan yang masih terpusat di ibukota kabupaten perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Paser.

2.3.2.17. Perpustakaan

Data yang dibutuhkan pada bagian ini adalah mengenai jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku di perpustakaan serta jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya. Data-data tersebut penting untuk diketahui karena jumlah pengunjung perpustakaan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pendidikan di masyarakat. Saat ini, jumlah perpustakaan sejumlah 306 unit termasuk perpustakaan desa yang dikelola daerah.

Tabel II.129.
Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Paser Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	296	306	306	306	306
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	11.869	9.035	14.863	13.900	2.682
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	9.885	10.014	10.349	12.520	12.892

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser 2021

Terdapat penurunan yang sangat drastis jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020, dari 13.900 pengunjung pada tahun 2019 menjadi 2.682 pengunjung pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan di awal tahun 2020, Covid-19 juga melanda Kabupaten Paser sehingga juga berdampak pada penurunan pengunjung Perpustakaan Daerah.

Padahal jika dilihat dari koleksi buku yang tersedia, terlihat bahwa ada penambahan buku yang cukup banyak pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rendahnya akses terhadap perpustakaan menjadi penyebab turunnya pengunjung perpustakaan, terutama bagi siswa sekolah dan penduduk yang ada di desa. Hal ini terlihat dari persentase sekolah yang memiliki perpustakaan hanya sebesar 39,24 persen. Begitu pula halnya dengan keberadaan perpustakaan desa yang hanya sebesar 64,75 persen. Lokasi perpustakaan yang memiliki koleksi buku cukup banyak sebagian besar hanya terdapat di perkotaan turut memberikan kontribusi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan.

Penurunan tersebut dimungkinkan terjadi, karena kurangnya minat dari masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa untuk membaca buku di perpustakaan. Padahal jika dilihat dari koleksi buku yang tersedia, terlihat bahwa ada penambahan pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, sehingga kedepan perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Paser untuk menumbuhkan motivasi siswa agar gemar untuk membaca. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak adanya pustakawan yang dapat mengelola katalog buku maupun kualitas variasi koleksinya.

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Paser baru dimulai sejak tahun 2017. Perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser yang telah mengelola arsip secara baku hingga tahun 2020 telah mencapai 36% dari seluruh perangkat daerah, terdapat peningkatan 2% apabila dibandingkan tahun 2019.

Tabel II.130.
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku	-	26	27	34	36

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, 2021

Pengelolaan arsip secara baku dapat dilakukan secara kontinu apabila sejumlah persyaratan dalam aspek pengelelolaan arsip tersedia, seperti petugas arsip (arsiparis) dan keterampilan petugas dalam mengelola arsip memadai. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya.

Secara kualitas pengelolaan arsip sendiri didasarkan pada Hasil penilaian terhadap LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Kabupaten Paser, kondisi pengelolaan arsip di Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.131.
Hasil Penilaian Kearsipan Kabupaten Paser

No	Aspek	STD	LAKE 2017		MTLH 2018		TOTAL NILAI	%
			NILAI	%	NILAI	%		
1	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1800	700	39	820	46	1520	84
2	Program Kearsipan	250	80	32	60	60	140	56
3	Pengolahan ArsipInaktif Dengan Retensi Sekurang Kurangnya 10 Tahun	100	80	80	0		80	80
4	Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Arsip	370	10	3	82	22	92	25
5	Pengolahan Arsip Statis	840	0	0	0	0	0	0
6	SDM Kearsipan	230	80	35	12	5	92	40
7	Kelembagaan	220	149	68	0	0	149	68
8	Prasarana dan Sarana Kearsipan	380	245	64	15	4	260	68
	Jumlah	**4190**	**1344**	**32**	**989**	**24**	**2333**	**56**

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, 2019

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, posisi penilaian terhadap kinerja manajemen pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser berada pada angka 56% di Tahun 2018 dengan kategori kurang, namun jika dilihat dari tahun sebelumnya terdapat peningkatan yang cukup menggembirakan dimana pada Tahun 2017 hanya meraih nilai 32%. Hal ini berarti masih terdapat beberapa aspek penilaian yang perlu menjadi perhatian dikarenakan nilainya yang masih rendah. Hal ini disebabkan belum dilakukan pengolahan arsip inaktif dengan rentensi minimal 10 tahun, belum berjalannya pengelolaan arsip statis dan kelembagaan pengelola arsip di setiap Perangkat Daerah yang belum menjalankan pengelolaan arsip secara baik.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam RPJMD, pembahasan tentang urusan pemerintahan pilihan ini berguna untuk menggambarkan pencapaian pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Fungsi Urusan perikanan yaitu untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nelayan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Peran sub sektor perikanan dalam PDRB cukup besar, tahun 2019 kontribusi sub sektor perikanan adalah 1,88%, relatif tidak berubah dari tahun ke tahun.

Dari tahun ke tahun produksi perikanan Kabupaten Paser menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama produksi perikanan laut. Sedangkan untuk produksi perikanan umum cenderung sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena produksi

perikanan laut sangat dipengaruhi oleh musim tangkap ikan. Sedangkan untuk perikanan tambak tidak dipengaruhi oleh musim tangkap ikan dan lebih cenderung dipengaruhi oleh system pengelolaan budidaya tambak tersebut.

Tabel II.132.
Produksi Ikan Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2019

Tahun	Perairan Laut (Ton)	Perairan Umum (Ton)
2019	10.884,30	69,20
2018	11.352,90	112,40
2017	10.825,40	112,30
2016	10.684,90	112,30

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Paser , 2020

Penurunan data produksi untuk perairan laut pada tahun 2019 dikarenakan faktor cuaca (alam) dan musim kemarau ditahun 2018 hingga awal tahun 2019 yaitu kemarau terpanjang dalam 5 tahun terakhir. Demikikan pula pada perairan umum, yang mengakibatkan rawa dan genangan air mengering sehingga kualitas air sungai menurun.

Untuk perikanan budidaya, kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air. Sedangkan untuk perikanan tangkap berada disepanjang pantai Kabupaten Paser.

Terjadi peningkatan produksi dari tahun ke tahun pada budidaya tambak, walau dari sisi luasan relatif tetap. Demikian pula pada budidaya air kolam. Namun jika dilihat dari produktivitas, maka dapat dikatakan kecil dan stagnan. Pada budidaya tambak produktivitas hanya sebesar 0,99 ton/ha dan pada budidaya kolam hanya sebesar 1,99 ton/ha.

Tabel II.133.
Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2016-2019

Tahun	Tambak		Kolam	
	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)
2019	15.766	15.726,55	120	239,73
2018	15.555	12.690,00	120	224,00
2017	15.555	11.912,50	120	157,20
2016	15.325	11.187,20	120	67,10

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Paser, 2020

Untuk pemenuhan kebutuhan protein ikan bagi masyarakat yaitu konsumsi ikan sebesar 18,8 kg per kapita per tahun. Jika dihitung kebutuhan masyarakat kabupaten Paser pada tahun 2020 dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 291.573 jiwa, maka kebutuhan akan ikan sebanyak 5.481 ton ikan.

2.3.3.2. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kemampuan masing-masing wilayah untuk dapat membangun Pariwisata yang berdasarkan pada prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antarsektor, antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan di Kalimantan Timur, dari 10 (sepuluh) Kabupaten /Kota, tingkat kunjungan wisatawan Kabupaten Paser adalah yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya dengan perkembangan yang fluktuatif. Data kunjungan wisatawan Kabupaten Paser selama tahun 2015-2017 sejumlah 62.881 kunjungan wisatawan atau 0,36% dari total jjumlah kunjungan wisatawan se Kalimantan Timur.

Berikut adalah data kunjungan wisata Kalimantan Timur selama tahun 2015-2017:

Tabel II.134

Data Kunjungan Wisatawan dalam 3 tahun terakhir di Propinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	Total
1	Balikpapan	2.253.843	2.361.038	2.703.112	7.317.993
2	Kukar	1.367.542	1.914.220	1.795.245	5.077.007
3	Samarinda	340..924	427.827	2.172.040	2.599.867
4	Berau	100.564	108.223	176.037	384.824
5	Bontang	55.387	5.605	187.899	248.891
6	PPU	28.017	43.734	82.655	154.406
7	Mahulu	19.017	28.400	46.130	93.547
8	Kutim	25.134	28.552	36.814	90.500
9	Kubar	24.464	28.689	27.818	80.971
10	Paser	17.355	17.769	27.757	62.881
	JUMLAH	**4.270.470**	**5.864.057**	**7.255.507**	**17.390.034**

Sumber : Riparda Paser, 2019

Rendahnya kunjungan wisata Kabupaten Paser disebabkan oleh belum tersedianya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sesuai karakter daya tarik wisata dan kebutuhan wisatawan, masih rendahnya promosi objek wisata serta rendahnya pengembangan destinasi dengan tema-tena tertentu yang dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Kabupaten Paser.

Sampai saat ini, destinasi wisata unggulan yang mulai dikembangkan diantaranya: Goa Losan, Goa Liang Mangku Langit, Goa Tengkorak, Goa Loyang, Doyam Turu, Doyam

Seriam, Danum Layong, Tahura Lati Petangis, Kemilau Laut Pondong, Museum Sadurengas dan Gunung Boga.

Berikut adalah data jumlah kunjungan wisatawan pada 11 objek wisata unggulan Kabupaten Paser:

Tabel II.135.

Jumlah Pengunjung 11 Wisata Unggulan Tahun 2016 – 2020

No	Nama Destinasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Museum Sadurengas	4.540	3.984	2.400	2480	843
2	Doyam Turu	600	700	200	44	66
3	Tahura Lati Petangis	3.300	3.900	2.800	1.293	0
4	Kemilau Laut Pondong	5.500	3.800	900	739	277
5	Doyam Seriam	540	750	56	27	39
6	Danum Layong	1.700	1.700	400	248	137
7	Goa Losan	600	400	200	72	72
8	Liang Mangku Langit	1.092	600	100	100	16
9	Goa Tengkorak	1.200	1.100	500	283	8
10	Goa Loyang	1.500	900	400	200	0
11	Gunung Boga	-	-	857	4.670	9.000
	JUMLAH	**20.572**	**17.834**	**8.813**	**10.156**	**10.458**

Sumber :Data Diolah ,2021

Dari tabel diatas destinasi wisata gunung boga merupakan destinasi wisata yang mulai dikembangkan pada tahun 2018 dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Paser yang berada di Desa Luan Kecamatan Muara Samu. Destinasi Wisata alam ini pada tahun 2020 masuk dalam nominasi Anugrah Pesona Indonesia (API) kategori dataran tinggi terpopuler, sebuah penghargaan yang di gagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Keberadaan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata antara lain; Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Propinsi/Kabupaten/Kota, Gabungan Industri Pariwisata Daerah (GIPI), Gabungan Pengusaha Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), termasuk keberadan Kadin secara umum sangat diperlukan untuk menunjang dan meningkatkan perkembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Paser.

Selain hal tersebut terdapat 16 kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk di Kabupaten Paser yang tersebar di seluruh kecamatan. Kesadaran akan pentingnya sektor pariwisata telah disadari oleh masyarakat Kabupaten Paser, dibuktikan dengan berdirinya kelompok-kelompok sadar wisata. Kehadiran kelompok sadar wisata didasari oleh tingginya motivasi masyarakat akan pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Paser. Kehadiran kelompok sadar wisata seyogyanya berbanding lurus dengan semakin meningkatkan kunjungan wisata, namun kunjungan wisata Kabupaten Paser jika dibandingkan jumlah kunjungan wisata Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur masih sangat rendah, hal ini disebabkan objek wisata yang dikembangkan oleh kelompok sadar wisata merupakan objek wisata alam yang secara aksesibilitas masih sulit

dijangkau dikarenakan fasilitas jalan meunju objek wisata masih menggunakan akses jalan desa.

2.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor. Sebagimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, tanpa sektor tambang, maka sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting di Paser (meliputi dari 10,11% PDRB). Peran penting pertanian disumbang oleh beberapa sub sektor sebagai berikut.

Tabel II.136.
Kontribusi Subsektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,65	0,63	0,66
Peternakan	0,73	0,72	0,78
Perkebunan	7,34	6,06	6,18
Perikanan	1,88	1,82	1,88
Kehutanan	0,69	0,63	0,61

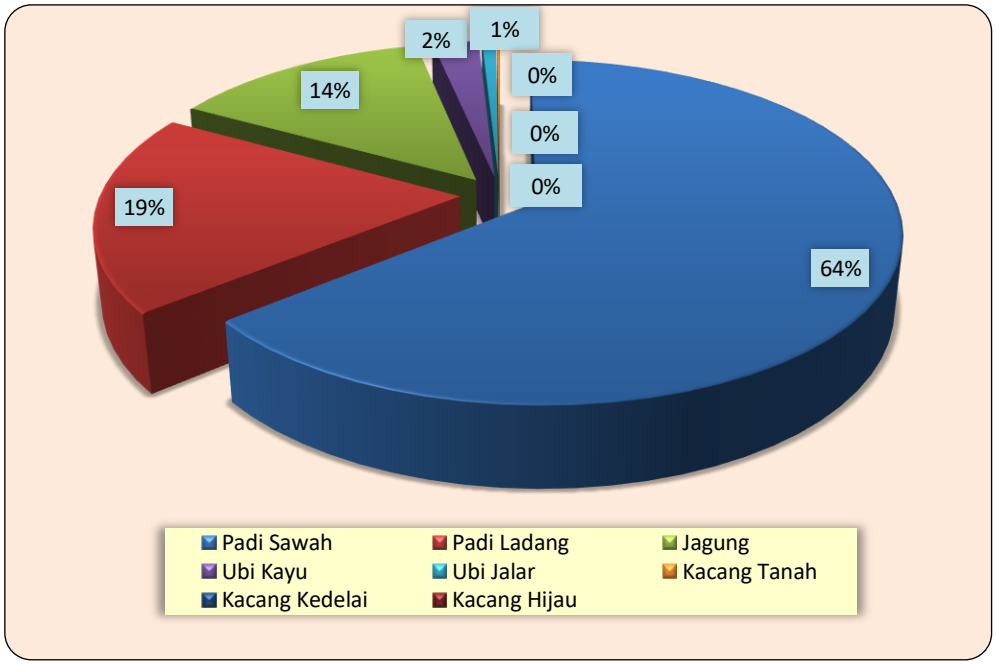
Sumber: BPS, 2020
*Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara*

Pada tabel di atas terlihat subsektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar dibanding subsektor lainnya, disusul subsektor perikanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikutura dan kehutanan

a. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia dan mampu menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok bagi manusia.

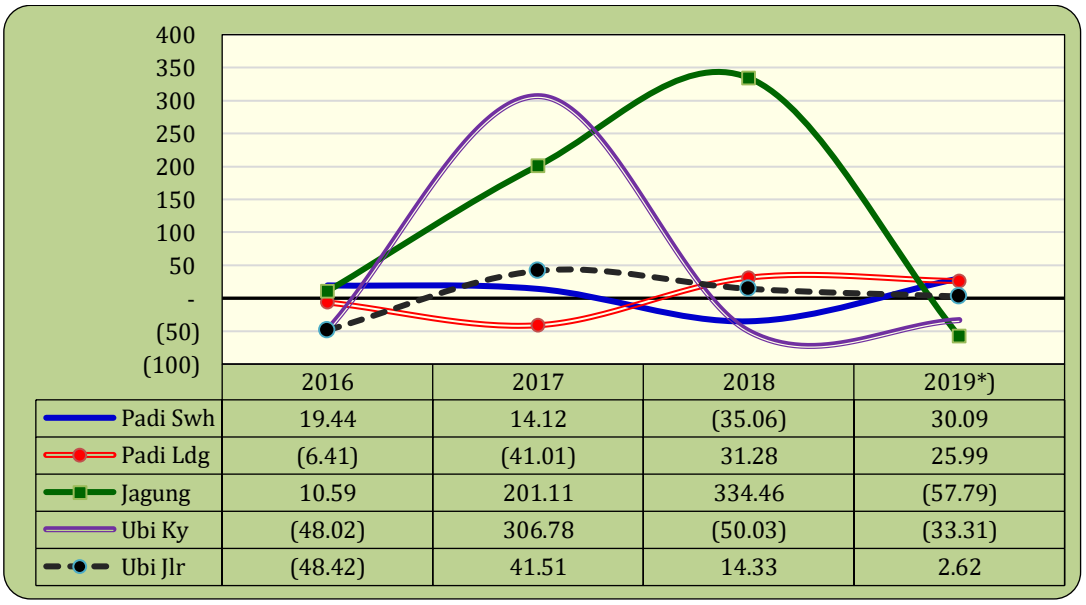
Tanaman pangan terbagi menjadi dua yaitu tanaman utama dan palawija. Tanaman utama yang biasanya ditanam oleh petani di Indonesia adalah tanaman padi (sawah dan ladang) jagung, ubi (kayu dan jalar), dan tanaman kacang-kacangan. Secara keseluruhan padi dan jagung merupakan komoditi utama untuk tanaman pangan, sementara komoditi lainnya perannya sangat kecil (lihat gambar II.30).



Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2020 diolah

Gambar II. 34.
Komposisi Produksi Tanaman Pangan
Di Kabupaten Paser Tahun 2019 (%)

Dilihat dari perkembangannya maka produksi tanaman pangan di Paser sangat fluktuatif bahkan cenderung menurun mengikuti perkembangan padi sawah yang merupakan kontributor terbesar. Gambar berikut menyajikan perkembangan 4 komoditi pangan utama di kabupaten Paser.



	2016	2017	2018	2019*)
Padi Swh	19.44	14.12	(35.06)	30.09
Padi Ldg	(6.41)	(41.01)	31.28	25.99
Jagung	10.59	201.11	334.46	(57.79)
Ubi Ky	(48.02)	306.78	(50.03)	(33.31)
Ubi Jlr	(48.42)	41.51	14.33	2.62

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2020 diolah

Gambar II.35.
Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan
Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2019 (Persen)

Fluktuasi produksi padi terjadi disebabkan faktor cuaca yaitu panjangnya musim kemarau. Lahan sawah di Kabupaten Paser merupakan lahan tadah hujan, belum tersedia sumber air irigasi, sehingga tergantung pada curah hujan sangat tinggi. Secara kewilayahan, 3 kecamatan utama penghasil padi sawah adalah Long Kali, Pasir belengkong dan tanah Grogot. Sementara itu kecamatan pengahsil utama padi ladang adalah Muara Komam, Muara Samu dan Batu Sopang. Namun demikin secara keseluruhan semua kecamatan di Paser mampu menghasilkan padi, namun jumlahnya berbeda beda. Selain disebabkan oleh factor cuaca fluktuasi produksi juga disebabkan oleh fluktuasi produktivitas tanam yang dihasilkan. Secara umum produktivitas padi di Paser masih relatif rendah dan fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan agar sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel II.137.

Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser 2015-2019

Tahun	Produktivitas Padi Sawah Per Hektar	Produktivitas Padi Ladang Per Hektar
2015	4,34	3,00
2016	4,65	2,64
2017	4,62	2,59
2018	4,27	2,93
2019*)	4.36	3,06

*Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2020 *) Angka Sementara (Asem) Daerah*

Jika dibandingkan produktivitas rata-rata antara Kabupaten Paser dan Provinsi Kaltim, maka produktivtas tanaman pangan di Kabupaten Paser masih tinggi.

Tabel II.138.

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2019*)

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produk si (Ton)	Produktivita s Kabupaten (Kw/Ha)	Produktivita s Provinsi (Kw/Ha)
1	Padi	11.076	9.663	39.438	40,81	36,41
2	Jagung	1.180	1.138	6.461	58,63	55,14
3	Ubi Kayu	93	77	1.159	150,55	263,59
4	Ubi Jalar	18	25	352	140,97	137,21
5	Kacang Tanah	40	42	56,3	13,41	11,02
6	Kacang Kedele	13	11	1,3	13,41	12,90
7	Kacang Hijau	6	7	7	10,00	7,00

*Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2020; *) Angka Sementara (Asem) Daerah*

Penyediaan produksi tanaman pangan yaitu padi dan palawija di Kabupaten Paser dapat dikatakan masih rendah dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat (lihat urusan pangan).

b. Hortikultura

Komoditi hortikultura jika dilihat dari jenis dan jumlahnya cukup banyak yaitu mulai komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan semusim berjumlah 26 komoditi, tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan berjumlah 25 komoditi, tanaman obat-obatan (biofarmaka) berjumlah 15 komoditi dan tanaman hias berjumlah 24 komoditi. Namun yang berkembang secara komersial di Kabupaten Paser hanya komoditi sayur-sayuran, buah-buahan dan biofarmaka. Lima komoditas utama untuk hortikultura adalah cabe, tomat, terong, kacang Panjang dan bawang merah. Adapun Data tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa baik produksi maupun produktivitas tanaman hortikultura ini mengalami penurunan. Pada tahun 2018 produksi tanaman hortikultura sayur-sayuran sebesar 1.309 Ton dan pada tahun 2019 sebesar 1.108 Ton atau menurun sebesar 201 Ton. Sementara itu untuk peroduktivitasnya, hanya tanaman kangnung dan sawi yang menunjukkan peningkatan, lainnya mengalami penurunan.

Produksi Tanaman hortikultura buah-buahan tercatat 21 jenis mulai dari belimbing sampai jengkol. Tahun 2018 produksi hortikultura buah buahan ini tercatat 14.078,2, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan produksinya yaitu sebanyak 521,8 tonm sehingga produksi tahun 2019 tinggal 13.556,4 ton. Penurunan ini disebabkan kemarau yang terjadi pada tahun 2018 hingga awal tahun 2019, yang mengakibatkan sebagian besar rata-rata hasil menurun dan produksi ikut menurun.

Kabupaten Paser banyak dibanjiri oleh buah dari luar Kabupaten Paser dengan produk yang baik dan harga lebih murah, hal ini membuat buah lokal tidak laku dan kurang berkembang. Sehingga pengembangan hortikultura perlu terus dilakukan.

Namun berdasarkan Permentan Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, maka Kabupaten Paser untuk komoditi Hortikultura ditetapkan menjadi kawasan pengembangan cabe dan bawang merah. Sedangkan jika melihat komoditi lainnya yang telah menjadi suatu kawasan hortikultura yaitu komoditi jeruk.

Adapun perkembangan komoditi unggulan komoditi hortikultura yang dikembangkan oleh petani di Kabupaten Paser dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel II.139.
Perkembangan Luas Areal Komoditas Hortikultura
Di Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020

No.	Jenis Komoditas	Satuan	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan			
			2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	Ha	3	29	11	12
2	Cabe	Ha	150	145	120	94
3	Jeruk Siam/Keprok	Pohon	20.021	20.866	36.058	39.261

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

Tabel II.140.
Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura
Di Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)			
		2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	20,5	102,2	5,9	10,7
2	Cabe	12,1	25,2	138,1	297,7
3	Jeruk Siam/Keprok	777,9	2.814,0	2.575,1	2696,5

c. Perkebunan

Perkembangan komoditi di Kabupaten Paser terus meningkat yang diikuti oleh perkembangan pabrik pengolahannya. Hanya saja pabrik pengolahannya hanya terbatas pada pengolahan bahan mentah belum pada industri olahan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jenis komoditas perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Paser yaitu kelapa sawit dan karet. Kedua komoditi tersebut produksinya cenderung meningkat setiap tahunnnya.

Tabel II.141.
Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun 2019

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata- Rata Produksi (Kg/Ha)	Tenaga Kerja Perkebunan (TKP)
		TBM	TM	TT/TR				
1	Kelapa Sawit	24.986	142.872	15.717	183.575	2.106.038	14.741	50.908
2	Karet	7.154	5.710	979	13.843	7.421	1.300	8.630
3	Kakao	6	115	3	124	24	210	231
4	Kelapa Dalam	99	2.032	312	2.443	984	484	4.524
5	Lada	24	62	10	96	13	210	254
6	Kopi	50	677	149	876	166	245	1.794

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata- Rata Produksi (Kg/Ha)	Tenaga Kerja Perkebunan (TKP)
		TBM	TM	TT/TR				
7	Aren	35	30	3	68	10	333	264
	Jumlah 2019	**32.387**	**151.587**	**17.191**	**201.165**	**2.114.711**	**13.950**	**66.948**
	2018	30.405	146.889	22.920	200.214	1.988.915	13.540	66.662
	2017	30.169	147.414	22.675	200.258	2.040.209	13.840	66.393
	2016	41.480	155.555	1.464	198.499	2.138.433	13.747	65.855
	2015	97.421	100.422	2.954	200.797	1.375.377	13.696	91.546

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Peningkatan perkembangan luasan dan peningkatan produksi kelapa sawit di Kabupaten Paser diiringi pula dengan pertumbuhan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Usaha tanaman perkebunan di Kabupaten Paser terbagi menjadi Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain: karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan lainnya yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Luas seluruh areal perkebunan di Kabupaten Paser mencapai 201.168,42 hektar, dengan perkebunan kelapa sawit menjadi perkebunan yang mendominasi luas areal perkebunan sebesar 91,25%.

Sampai dengan tahun 2019, produk unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Paser masih dikuasai oleh tanaman kelapa sawit dengan hasil produksi sebesar 1.987.340,35 ton, meningkat sebesar 0,38% dibandingkan dengan tahun 2018. Tanaman perkebunan lain yang juga merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Paser adalah tanaman karet, walaupun produksi karet pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,63 persen dibandingkan tahun 2018. Pemasaran hasil perkebunan rakyat Kabupaten paser sebagian besar diperdagangkan antar daerah. Tiap hasil komoditi perkebunan sudah memiliki saluran pemasaran tersendiri. Untuk komoditi karet, kopi, dan lada sebagian besar dibeli pedagang asal Kalimantan Selatan; untuk kelapa sebagian besar dijual ke Balikpapan, sedangkan kakao dibeli pedagang dari Sulawesi Selatan. Khusus untuk kelapa sawit rakyat, penyalurannya dilakukan melalui penampungan hasil panen oleh PTPN XIII, sebelum akhirnya masuk ke pasar.

Produksi yang dihasilkan dari komoditi kelapa sawit sangat besar, pada tabel produksi tahun 2019 sebesar 2.396.144 ton TBS. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Paser mendominasi seluruh produksi perkebunan lainnya. Komoditi lainnya yang cukup besar di Kabupaten Paser adalah karet. Produksi karet tahun 2019 sebesar 7.421 Ton lem.

Industri pengolahan di Kabupaten Paser didominasi oleh industri pengolahan minyak kelapa sawit yaitu CPO dan minyak mentah lainnya. Meningkatnya pembangunan pabrik kelapa sawit beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa

hasil perkebunan Kabupaten Paser cukup melimpah dan sangat dimungkinkan untuk dibangun industri hilir di wilayah Kabupaten Paser. Dengan terus bertambahnya pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

d. Peternakan

Peternakan di Kabupaten Paser terus berkembang, seiring dengan permintaan masyarakat akan produksi ternak, seperti daging dan telur. Ada beberapa jenis ternak yang sangat populer dalam masyarakat Kabupaten Paser, diantaranya sapi, kambing, ayam kampung, ayam buras dan itik. Jenis ternak di Kabupaten Paser dan jumlah populasinya serta produksinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.142.
Jumlah Populasi dan Produksi Ternak Yang Dipotong Tahun 2015-2018

Komoditi	2015		2016		2017		2018	
	Populasi (ekor)	Daging (Ton)	Populasi (ekor)	Daging (Ton)	Populasi (ekor)	Daging (Ton)	Populasi (ekor)	Daging (Ton)
Sapi	2.868	491,00	2.531	433,00	3.552	608,00	2.558	438,00
Kambing	499	7,50	261	3,90	691	10,36	1.238	18,57
Ayam Buras	457.000	685,50	1.227.201	1.840,80	460.622	690,93	476.106	714,16
Ayam Ras	1.967.589	3.285,87	1.911.684	3.192,53	1.999.589	3.339,31	2.649.742	4.425,07

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2020

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum jumlah populasi ternak di Kabupaten Paser cenderung fluktuatif dan terus meningkat. Selama tahun 2015-2018 populasi sapi di Kabupaten Paser terus meningkat, dengna peningkatan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3.552 ekor, namun pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 994 ekor atau 38,86%. Selanjutnya untuk ternak unggas terlihat peningkatan yang cukup tinggi yaitu pada ayam ras. Pada tahun 2018 peningkatan cukup tinggi dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 650.153 ekor atau sebesar 32,51%. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah menjadi penyebab fluktuatifnya produksi ternak, jika ada bantuan maka bertambah jumlah ternak yang diusahakan. Namun untuk ayam kampung, peternak banyak mengusahakan secara mandiri.

Sektor Peternakan di Kabupaten Paser terus berkembang, hal ini seiring permintaan daging ternak di Kabupaten oleh masyarakat cukup tinggi. Pengadaan ternak sapi, kambing dan ayam terus dilakukan pemerintah dengan cara pengembangan dan penumbuhan kelompok ternak. Berbagai program terus diusahakan, misalnya pengembangan integrasi sapi dengan tanaman sawit dan kemitraan ternak ayam ras antara pengusaha dan peternak. Melihat potensi daerah dan keinginan dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari usaha ternak maka sektor peternakan masih dapat berkembang, dengan cara peningkatan

kapasitas peternak, kapasitas tenaga medis ternak dan lembaganya serta teknik budidaya.

2.3.3.4. Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Dalam rangka menentukan strategi serta prioritas program rehabilitasi hutan pada masa mendatang, diperlukanlah data tentang kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser. Berikut merupakan sajian datanya:

Tabel II.143.
Luas Kebakaran Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Kebun bibit (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014 – 2018

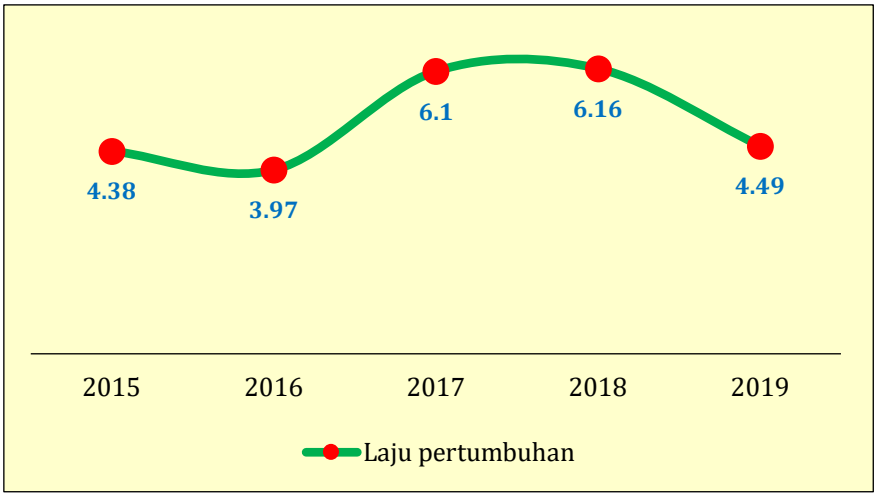
URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
Kebakaran Hutan (CA)	227,2	105,3	-	20,6	149,1
Rehabilitasi Lahan Luar Kawasan	1.101	-	-	-	-
Rehabilitasi Lahan Dalam Kawasan	-	-	-	-	-
Reklamasi Kawasan Hutan	-	-	-	40	-
Kebun Bibit	-	-	-	0,5	-

Sumber : DLH Kabupaten Paser, 2018

Isu kerusakan hutan di Kabupaten Paser selalu dihubungkan dengan perluasan area perkebunan sawit sebagai salah satu penyumbang PDRB terbesar. Apabila dibandingkan dengan wilayah perkebunan sawit di Indonesia, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser tergolong kecil. Namun sekecil apapun kerusakan hutan adalah sebuah permasalahan yang besar bagi lingkungan.

2.3.3.5. Perdagangan

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sekitar 3-4 persen. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 3,85 persen atau sekitar 1,85 triliun rupiah. Dimana sebagian besar merupakan sumbangan dari Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Laju pertumbuhan kategori ini mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019 dan cenderung melambat. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan kategori ini sebesar 4,49 persen, melambat dari tahun 2018 yang mencapai 6,16 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.36.
Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada PDRB Kabupaten Paser (Persen), 2015-2019

Untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai perdagangan, jumlah pedagang dan jumlah kelompok pedagang merupakan hal dasar yang harus diketahui, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pengembangan di 140ector perdagangan. Berikut adalah data tentang jumlah pedagang di Kabupaten Paser:

Tabel II.144.
Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang di Kabupaten Paser Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pedagang	Jumlah Kelompok Pedagang
2016	9.013	2
2017	9.825	2
2018	7.231	2
2019	7.997	2
2020	8.453	2

Sumber : Dinas Perindagkop, 2021

Jumlah pedagang di Kabupaten Paser dalam 3 tahun terakhir menunjukan adanya penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Paser mengalami penurunan, sehingga pedagang di dalamnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang cenderung belum membaik dalam satu tahun terakhir sebagai dampak kondisi perekonomian global, serta terjadinya kebakaran Pasar Induk Penyembolum di Desa Senaken.

Dibandingkan dengan jumlah pedagang yang cenderung menurun, jumlah kelompok pedagang di Kabupaten Paser menunjukan tren yang stabil. Dalam kurun waktu 3 tahun, dari 2016 hingga 2020 tidak ada penambahan jumlah kelompok pedagang.

Pada tahun 2016 hingga 2020 kelompok pedagang hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok pedagang pasar tradisional dan kelompok pedagang pasar modern.

2.3.3.6. Perindustrian

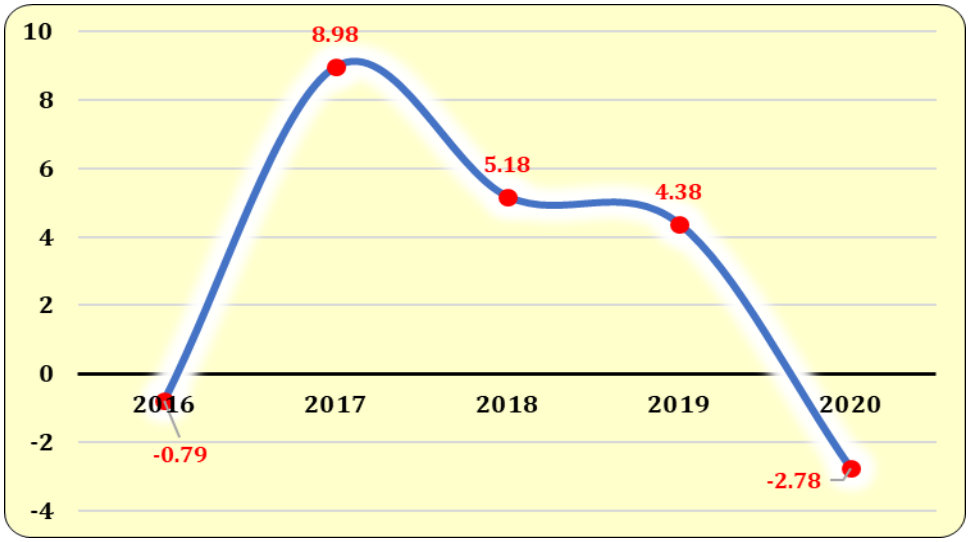
Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2019 adalah Industri Makanan dan Minuman. Secara nominal, Industri Pengolahan meningkat dari 2,13 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 2,22 triliun rupiah pada tahun 2019. Industri pengolahan di Paser merupakan sektor penting sebagai penunjuang sektor pertanian. Kontribusi sektor industry pengolahan dari tahun ke tahun masih menunjukan angka yang relatif stagnan bahkan mengalami penurunan yang cukup tajam jika menggunakan dasar PDRB tanpa tambang. Angka angka ini mengirimkan pesan mulai jenuhnya sektor perindustrian yang sebagain besar disumbang oleh industry pengolahan kelapa sawit.

Tabel II.145.
Distribusi PDRB kategori Industri Pengolahan

Tahun	PDRB dengan Pertambangan	PDRB tanpa Pertambangan
2016	4,82	16,60
2017	4,92	18,26
2018	4,49	17,56
2019	4,68	17,31
2020	5,84	

Sumber: Paser dalam Angka, 2021

Dari segi pertumbuhan, pertumbuhan kategori ini berfluktuasi dan tumbuh meningkat pada tahun 2019 dan 2020. Fluktuasi pertumbuhan itu berkaitan dengan fluktuasi harga CPO sebagai kontributor utama sektor industri pengolahan. Pada Tahun 2013 Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Paser hanya berjumlah 13 pabrik, dan pada tahun 2020 saat ini telah berjumlah 17 pabrik dengan kapasitas sebesar 870 ton/jam. Namun demikian pertumbuhan industry kepala sawit ini tidak diikuti dengan tumbuh dan berkembangnya industri kecil yang lain. Terdapat cukup banyak potensi industri kecil yang lansung berkaitan dengan penduduk, misalnya industri batik khas Paser juga industri kerajinan berbahan baku rotan atau anyaman pandan.



Sumber: BPS Kabupaten Paser 2021

Gambar II.37.
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Kabupaten Paser (Persen), 2016-2020

2.3.3.7. Transmigrasi

Transmigrasi Kabupaten Paser dimulai pada tahun 1972 di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 51 dan jumlah jiwa sebanyak 249 orang.

Adapun jumlah pemukiman, jumlah KK dan jumlah rumah Trnasmigrasi Kabupaten Paser dari Tahun 1972-2003 sebagai berikut:

Tabel II.146.
Jumlah Pemukiman, Jumlah KK dan Jumlah Rumah Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 1972-2003

Kecamatan	Jumlah Pemukiman	Jumlah KK	Jumlah Rumah (Unit)
Batu Sopang	1	119	119
Tanjung Harapan	0	0	0
Pasir Belengkongn	8	1.709	1.709
Tanah Grogot	3	945	945
Kuaro	7	2.168	2.168
Long Ikis	14	5.909	5.909
Muara Komam	5	1.060	1.060
Long Kali	9	2.061	2.061
Batu Engau	2	1.000	1.000
Muara Samu	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 tidak ada Transmigrasi di Kabupaten Paser, pada tahun 2018 Kabupaten Paser mendapatkan program pemerintah pusat

melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertujuan untuk melakukan pemerataan penduduk di seluruh Indonesia. Jumlah transmigrasi tahun 2018 sebanyak 40 KK yang terletak di Kecamatan Tanjung Harapan.

2.3.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

2.3.4.1. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Paser telah mengupayakan beberapa hal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya ialah disusunnya roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Paser. Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser memang masih lambat jika dilihat dari capaian indeks reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Paser.

Tabel II.147.
Capaian Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Paser

No	Komponen/Sub Komponen	Hasil PRB	
		Nilai 2019	Nilai 2020
1	Komponen Pengungkit	25.03	26.54
2	Komponen Hasil	28.63	29.27
	Indeks Reformasi Birokrasi	**53.66**	**55.81**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser,2021

Jika dilihat dari hasil penilaian mandiri di atas, reformasi birokrasi di Kabupaten Paser dapat dikatakan berjalan lambat, mengingat agenda reformasi birokrasi secara nasional pelaksanaannya sudah memasuki tahun akhir dari roadmap reformasi birokrasi 2015-2019. Sedangkan pada kondisi sampai dengan Tahun 2020 nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Paser masih berada pada kategori cukup. Ada beberapa faktor penyebab pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser berjalan lambat, diantaranya dapat dilihat dari komponen pengungkit/proses pada sub komponen penataan dan penguatan organisasi dan penatalaksana organisasi, penataan sistem manajemen SDM serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menunjukkan skor 40-60% dari nilai maksimal pengungkit/proses.

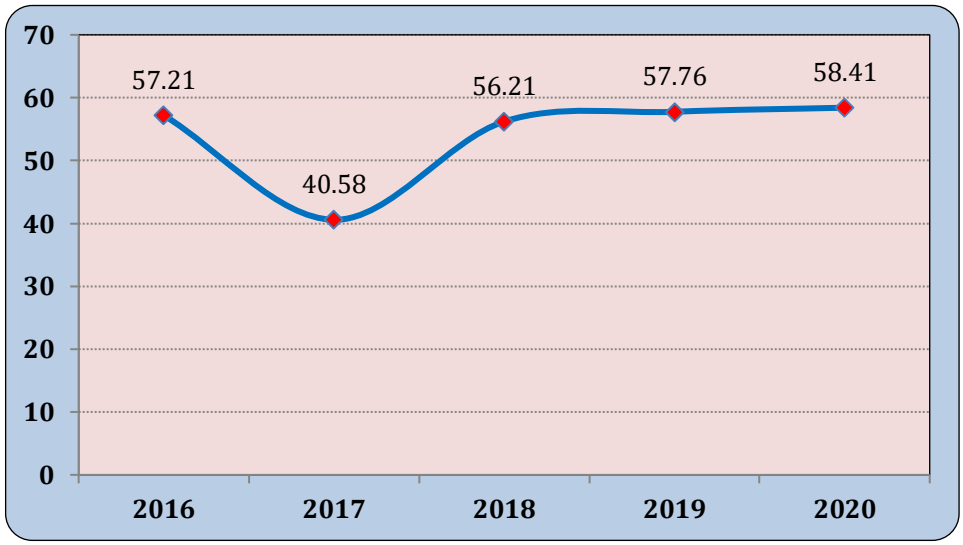
Perumpunan urusan kewenangan dalam struktur organisasi perangkat daerah sudah dilakukan dengan baik namun dalam penataan ukuran atau besar kelembagaan masih dirasa gemuk dan cenderung tumpang tindih, misal penanganan tugas bidang data dan statistik masih menjadi wacana perdebatan dalam perumusan beberapa uraian tugas dan fungsi perangkat daerah, apakah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ataukah melekat juga sebagian tugas tersebut pada Bappedalitbang.

Demikian pula halnya kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Masih ditemukan

ketatalaksana program /kegiatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur struktur organisasi Perangkat Daerah. Hal ini juga berimbas pada lemahnya SAKIP Perangkat Daerah dimana ketidakselarasan antara perjanjian kinerja dengan pengampu program kegiatan. Masih ditemukan pengampu 1 program oleh lebih dari 1 kepala bidang atau setingkat esselon III. Hal ini juga berdampak pada nilai SAKIP Kabupaten yang hingga Tahun 2020 masih tetap berada pada predikat CC. Di lain hal keberhasilan reformasi birokrasi juga sangat bergantung pada penguatan peran Inspektorat Kabupaten Paser dalam melakukan pengawasan intern perangkat daerah.

Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum PNS masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN. Pelaksanaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) masih harus terus ditambah guna menjamin aparatur bebas dari praktek-praktek KKN.

Penilaian evaluasi AKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2019 yaitu 57,76 dan pada tahun 2020 yaitu 58,41. hal ini merupakan capaian yang belum bisa dikatakan baik. Perkembangan capaian nilai AKIP Kabupaten Paser dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gafik di bawah ini:



Sumber : Bagian Organisasi, 2021

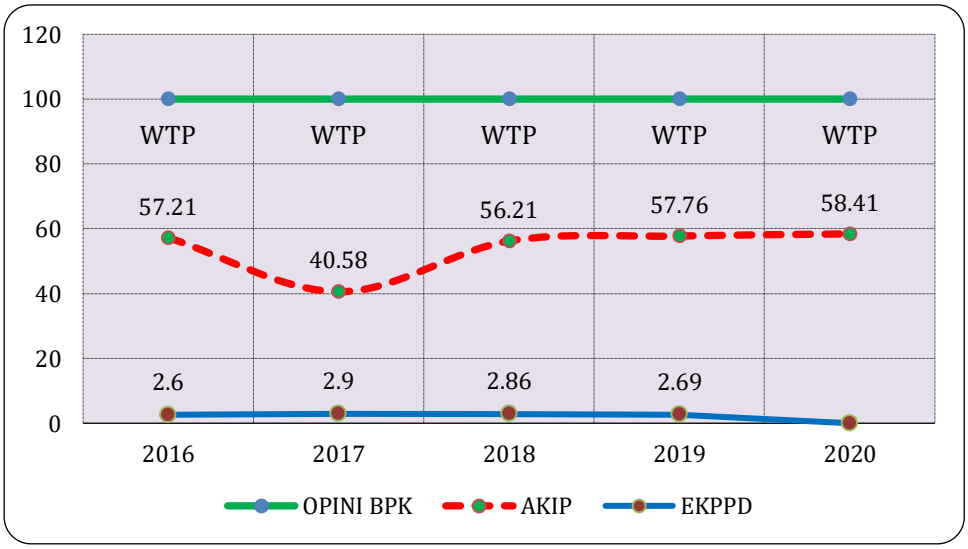
Gambar II.38
Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Paser 2016-2020

Beberapa penjelasan yang direkomendasikan terkait nilai capaian SAKIP Kabupaten Paser belum dapat meraih predikat "Baik" disebabkan *pertama:* masih ditemukan ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, RENSTRA dan dokumen perjanjian kinerja hingga level terendah. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi pada hasil/*outcome*, dengan kata lain keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. *Kedua:* monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian

target-target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada perangkat daerah hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektifitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal. *Ketiga:* program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena tidak relevan dengan kinerja yang ingin dicapai oleh daerah.

Dari sudut pandang penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat capaian nilai EKPPD tahun 2016-2020 dapat dikatakan baik dengan meraih predikat Tinggi atau Sangat Tinggi, dimana rata-rata nilai Kabupaten Paser berada pada skor 2,8. Namun capaian hasil EKPPD ini berbanding terbalik dengan capaian SAKIP Kabupaten Paser. Secara teknis metode pengujian antara SAKIP dengan LPPD tentu berbeda. LPPD berbasis dokumen penyelenggaraan urusan wajib/standar pelayanan minimal dalam konteks otonomi daerah sedangkan SAKIP melihat tingkat akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian seharusnya ada korelasi positif antara capaian nilai SAKIP dengan EKPPD.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Paser tahun 2016-2020 tidak semua berbanding lurus. Walaupun opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Paser yang selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan dikuti oleh capaian predikat nilai LPPD yang berada pada kriteria "Tinggi" hingga "Sangat Tinggi" namun tidak berbanding lurus dengan capaian AKIP Kabupaten Paser yang belum dapat memperoleh predikat "Baik". Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan asset dan pengelolaan pendapatan yang dinilai masih belum optimal menunjang belanja pada APBD. Berikut perkembangan perolehan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Paser tahun 2016-2020.



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Paser, 2021 data diolah

Gambar II.39.
Perolehan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

2.3.4.2. Administrasi Pengawasan

Peningkatan sistem pengawasan internal menjadi hal pokok sebagai tindakan pertama dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan tingkat maturitas SPIP Kabupaten Paser sudah cukup baik berada pada level 3 (Terdefinisi). Dengan kata lain Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh apakah tingkat maturitas sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif ataukah masih sebatas penyediaan dokumen pengendalian saja.

Tabel II.148.
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Paser

No.	Unsur-unsur SPIP	Bobot	Penilaian Tingkat Maturitas				
			Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
1	Lingkungan Pengendalian	30,00%	3,5000	1,0500	3,1250	0,9375	(0,1125)
2	Penilaian Risiko	20,00%	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
3	Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,4545	0,8636	3,0000	0,7500	(0,1136)
4	Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
5	Pemantauan	15,00%	3,0000	0,4500	3,0000	0,4500	-
	Jumlah	**100,00%**	**-**	**3,2636**		**3,0375**	**(0,2261)**
	Keterangan		**Level 3 (Terdefinisi)**				

Sumber : Inspektorat Kabupaten Paser, 2020

Untuk menjamin bahwa penilaian yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan sesudai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik maka dilakukan penilaian terhadap kapabilitas APIP. Data penilaian kapabilitas APIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.149
Kapabilitas APIP Kabupaten Paser Tahun 2018-2020

No.	Elemen	Level		
		2018	2019	2020
1	Peran dan layanan	2	3	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	2	3	3
3	Praktik profesional	2	3	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	2	3	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	2	3	3
6	Struktur tata kelola	2	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Paser, 2021

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dalam penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Inspektorat Kabupaten Paser, dimana pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Paser mencapai level 2, dan pada tahun 2019 dan 2020 mencapai level 3 (Integrated) untuk semua elemen penilaian. Hal ini mengindikasikan bahwa APIP di Kabupaten Paser

dinyatakan telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

2.3.4.3. Administrasi Perencanaan

Kualitas perencanaan di Kabupaten Paser dapat dinilai dari kinerja perencanaan pembangunan. Adapun kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Paser tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.150.
Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kesesuaian/ Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	87,7	87,1	88,71
2	Persentase Kesesuaian/ Konsistensi program RPJMD ke dalam APBD	100	100	92,6	96	95,82

Sumber : Bappelitbang, 2021 data diolah

Tingkat konsistensi dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Paser dengan APBD yaitu sebesar 95,82%, masih terdapat ketidakselarasan program kurang lebih 4,18% dari program yang tertuang dalam RPJMD. Inkonsistensi dokumen perencanaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1) Tahapan perencanaan yang dimulai dari penyusunan perencanaan sampai dengan evaluasi tidak dilakukan dengan baik. 2) Penyusunan rencana kegiatan tidak berorientasi pada tugas dan fungsi perangkat daerah, belum berorientasi pada capaian hasil/outcome sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tidak dapat direalisasikan. 3) Rendahnya kualitas SDM perencana karena rendahnya kompetensi aparatur perencana sehingga mempengaruhi konsistensi dokumen perencanaan. 4) E-government yang berupa aplikasi perencanaan belum dilaksanakan sehingga dokumen perencanaan yang disusun tidak terintegrasi dan terkoneksi. 5) Koordinasi secara intern dan ekstern dalam penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan dengan baik.

2.3.4.4. Keuangan

Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, dapat dilakukan dengan beberapa indikator yang berkaitan dengan kemampuan atau kapasitas fiskal di daerah, seperti rasio kemandirian, rasio kemampuan, rasio aktivitas, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian	=	PAD / Bantuan Pusat/Provinsi/Pinjaman

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser terhadap rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.151.
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	PAD (Realisasi)	Bantuan Pusat/Provinsi/ Pinjaman	Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian
2016	117.731.480.928	1.718.209.527.738	6,85	Kurang
2017	112.644.016.095	1.420.844.333.048	7,93	Kurang
2018	149.405.400.464	1.909.819.049.742	7,82	Kurang
2019	166.142.414.453	2.442.563.043.191	6,80	Kurang
2020	173.281.262.390	2.160.484.221.698	8,02	Kurang
		Rata-Rata	**7,48**	**Kurang**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021 Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Paser dalam kurun waktu terakhir adalah kurang. Hal ini dikarenakan masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan sehingga ketergantungan keuangan daerah dari bantuan pusat/provinsi masih besar.

b. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio efektifitas keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Efektifitas	=	Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser terhadap rasio efektifitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.152.
Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2016	102.867.446.621	117.731.480.928	114,45	Sangat Efektif
2017	109.816.256.591	112.644.016.095	102,57	Sangat Efektif
2018	147.354.078.710	149.405.400.464	101,39	Sangat Efektif
2019	167.013.658.185	166.142.414.453	99,48	Sangat Efektif
2020	136.428.440.931	173.281.262.390	127,01	Sangat Efektif
		Rata-Rata	**108,98**	**Sangat Efektif**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021 Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kriteria efektifitas keuangan daerah Kabupaten Paser dalam kurun waktu terakhir adalah sangat efektif. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam mengestimasikan atau menentukan target pendapatan telah disusun dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga dalam pencapaian realisasi dapat dipenuhi secara maksimal.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}}$$

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser terhadap rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.153.
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Belanja		Rasio Efisiensi	Kriteria
	Target	Realisasi		
2016	2.138.935.826.000	1.902.473.192.578	0,89	Efisien
2017	1.980.401.008.575	1.696.531.927.619	0,86	Efisien
2018	1.835.879.204.847	1.516.909.202.973	0,83	Efisien
2019	2.681.809.918.951	2.238.535.565.658	0,83	Efisien
2020	2.588.683.000.000	2.241.904.518.813	0,87	Efisien
Rata-Rata			**0,86**	**Efisien**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021 Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kriteria efisiensi keuangan daerah Kabupaten Paser dalam kurun waktu terakhir adalah efisien. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam tingkat capaian realisasi penyerapan anggaran belanja yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Paser berada pada tingkat efisiensi yang baik. Perangkat daerah mampu merealisasikan anggaran belanja secara lebih optimal.

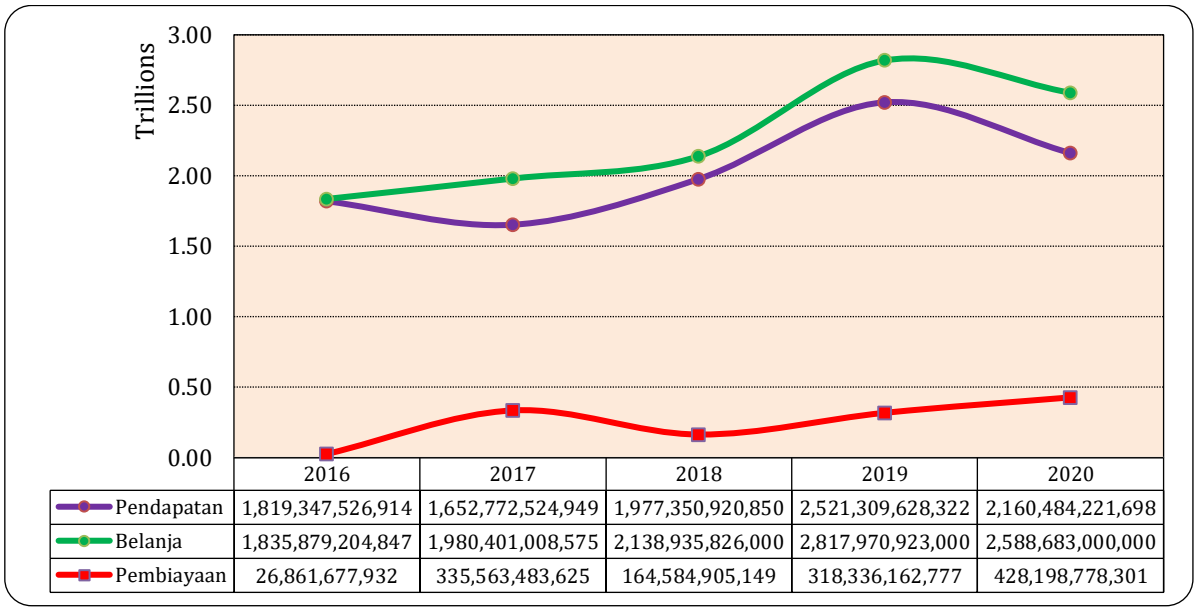
d. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah secara lengkap dibahas pada bab III. Secara umum rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menunjukkan angka positif dengan nilai 12,92%.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Paser adalah positif dengan nilai 12,92%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Paser mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pendapatan.

Secara umum untuk dapat mengetahui tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melihat perbandingan komposisi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan realisasinya. Begitu juga di Kabupaten Paser, data terkait komponen APBD secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	1,819,347,526,914	1,652,772,524,949	1,977,350,920,850	2,521,309,628,322	2,160,484,221,698
Belanja	1,835,879,204,847	1,980,401,008,575	2,138,935,826,000	2,817,970,923,000	2,588,683,000,000
Pembiayaan	26,861,677,932	335,563,483,625	164,584,905,149	318,336,162,777	428,198,778,301

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021 Data Diolah

Gambar II.40.
APBD Kabupaten Paser Periode 2016-2020

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini secara khusus disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran, sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil kepada Kabupaten Paser.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Paser meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Paser masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas.

Tata kelola keuangan daerah Paser masih menyisakan kendala. Walaupun opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Paser selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun dari sisi pengelolaan aset dan pendapatan masih belum optimal menunjang belanja pada APBD.

2.3.4.5. Kepegawaian

Peningkatan Sistem Manajemen ASN menjadi perhatian penting dalam mewujudkan sebuah birokrasi yang bersih dan efektif. Jika dilihat dari indeks profesionalitas ASN Kabupaten Paser menunjukkan bahwa manajemen ASN Kabupaten harus segera dibenahi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. II.154.
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Paser Tahun 2019

No	Dimensi Penilaian	Nilai	Indeks Profesionalitas ASN
1	Kualifikasi	11,64	41,36 (Sangat Rendah)
2	Kompetensi	9,79	
3	Kinerja	14,94	
4	Disiplin	4,99	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, 2020

Dari hasil penilaian terhadap profesionalitas aparatur di Kabupaten Paser dapat dilihat bahwa indeks profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabuaten Paser masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya penilaian terhadap keempat dimensi yang menjadi pokok penilaian yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Capaian tersebut menandakan bahwa proses manajemen SDM aparatur belum berjalan secara optimal. Penilaian ini bertolak belakang dengan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi khususnya pada komponen penataan sistem manajemen SDM, dimana mendapatkan penilaian yang sangat baik

Jika dilihat dari jenis kelamin, maka Pegawai Negeri Sipil dengan jenis kelamin laki-laki dari tahun 2016–2020 lebih banyak bila dibandingkan jumlah pegawai perempuan, terlihat dari tabel berikut ini

Tabel II.155.
Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020

Tahun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
2016	2.956	2.399	5.355
2017	2.668	2.183	4.851
2018	2.560	2.125	4.685
2019	2.514	2.194	4.708
2020	2.396	2.124	4.520

Sumber : BKPSDM Kabupaten Paser, 2021

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada (PNS) pada tahun 2020 mencapai 4.708 orang terbagi menjadi empat golongan mulai dari golongan I sampai dengan golongan IV. Jumlah PNS yang dirinci berdasarkan golongan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.156.
Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Golongan dan Jabatan tahun 2020

Golongan	Eselon					Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Golongan IV							
IV/E						0	0
IV/D		1				0	1
IV/C		28				6	34
IV/B		1	50	3		334	388
IV/A		2	97	47		558	704
Golongan III							
III/D			19	312		431	762
III/C			2	177		478	657
III/B				34		844	878
III/A				7		314	321
Golongan II							
II/D						317	317
II/C						378	378
II/B						153	153
II/A						58	58
Golongan I							
I/D						39	39
I/C						13	13
I/B						5	5
I/A							
Jumlah		**32**	**168**	**580**		**3.929**	**4708**
CPNS							
I							
II							
III							
IV							
Jumlah							

Sumber : BKPSDM Kabupaten Paser, 2021

Dari tabel diatas mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah golongan III, hal ini dikarenakan kebutuhan daerah terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tingkatan Strata satu (S1) sangat tinggi.

Secara keseluruhan manajamen SDM di Kabupaten Paser masih diperlukan perbaikan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS di Kabupaten Paser belum sepenuhnya berdasarkan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja. Proses rekrutmen CPNS di Kabupaten Paser baru dapat dilaksanakan sesuai formasi kebutuhan standar pelayanan minimal. Demikian halnya dalam manajemen karir PNS, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi serta penilaian kinerja dan disiplin PNS belum dikelola dengan baik. Sampai

saat ini penilaian kinerja belum menjadi komponen penilaian besaran tunjangan kinerja pegawai melainkan menggunakan standarisasi yang dibuat berdasarkan tingkat kedisiplinan/kehadiran pegawai.

2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Paser dapat dinilai dari kinerja Penelitian dan Pengembangan. Adapun Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Paser tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.157.
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan
Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	-	100	100	50	66,67
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	-	87,9	33	33	50
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	-	12,5	70,7	100	100
4	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	-	11	N/A	17,24	25,5

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2021

Kelitbangan pada Pemerintah Kabupaten Paser dibentuk baru pada tahun 2018 dengan nomenklatur setingkat Bidang dan melekat pada Struktur Organisasi Bappeda. Sebagai bidang yang baru tentu memerlukan banyak persiapan sebagai langkah awal dengan menyusun kebutuhan kelitbangan menyesuaikan prioritas dan arah pembangunan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Paser.

Sebagai urusan baru sampai dengan tahun 2020 dokumen kelitbangan yang mampu disusun sebanyak 6 dokumen kajian dan kesemuanya belum memiliki ketetapan kebijakan pelaksanaan dalam bentuk Perda atau Perbup. Pada tahun anggaran 2020 telah diusulkan penetapan kebijakan pelaksanaan kajian.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia (SDM).

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel berikut:

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Namun demikian jika dilihat dari komposisinay menunjukkan bahwa porsi belanja untuk mekanan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini merupkan indiskasi dari turunnya tingkat kesejahteraan. Penduduk yang semakin sejahtera akan membelanjakan uangnya lebih banyak untuk non makanan dibandingkan untuk makanan.

Tabel II.158.
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Paser (Rp) Tahun 2015-2018

No	Komponen Pengeluaran	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Makanan	433.493,64	536.183,82	552.687,00	626.572,21
2	Bukan makanan	473.866,94	498.465,87	448.218,00	582.377,18

Sumber: BPS Kab. Paser 2020, BPS Kaltim

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

a. Ketaatan terhadap tata ruang

Ketaatan terhadap tata ruang diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan.

Tabel II.159.
Progres Evaluasi RDTR Kecamatan Tahun 2019

No.	Jenis Produk Rencana Tata Ruang Daerah	Jumlah Produk RDTR	Produk Hukum Daerah (Perda)
1	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan	3	0
2	Jumlah Kecamatan	10	0
3	Rasio (1/2)	0,3	-

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2019

Ketaatan terhadap tata ruang juga dinilai dari kesesuaian indikator program meliputi:

1) Kesesuaian Program Utama
2) Kesesuaian Struktur Ruang
3) Kesesuaian Pola Ruang
4) Kesesuaian Kawasan Strategis Kabupaten

Tabel II.160.
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikasi Program	Ideal		Aktual		Kesesuaian (%)		Pemanfaatan Ruang
	Program	Lokasi	Program	Lokasi	Program	Lokasi	
Nilai Kesesuaian Program Utama	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00%
Nilai Kesesuaian Struktur Ruang	56	147	33	60	58.93	40.82	40.82%
Nilai Kesesuaian Pola Ruang	59	95	33	51	55.93	53.68	53.68%
Nilai Keseuaian Kawasan Strategis Kabupaten	12	78	5	31	41.67	39.74	39.74%
Total							**58.56%**

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2019

b. Luas wilayah produktif

Wilayah produktif Kabupaten Paser meliputi wilayah kawasan peruntukan hutan produksi, wilayah kawasan peruntukan pertanian, dan wilayah kawasan peruntukan perikanan, luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2035,

1) Kawasan peruntukkan hutan produksi terdiri atas:
   (a) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 180.036 Ha
   (b) Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 240.256 Ha
   (c) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 9.698 Ha
2) Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
   (a) Kawasan budidaya tanaman pangan seluas kurang lebih 34.787 Ha
   (b) Kawasan budidaya hortikultura seluas kurang lebih 14.109 Ha
   (c) Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 344.485 Ha
3) Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
   (a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas kurang lebih 123.067 Ha
   (b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas kurang lebih 5.346 Ha

c. Jenis dan Jumlah Bank dan cabang

Bank merupakan salah satu lembaga yang memberikan berbagai macam

layanan dibidang keuangan, seperti tabungan, deposito, kredit, transper, belanja pra bayar dan lain-lain.

Perkembangan perbankan dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Perkambangan perbankan Kabupaten Paser menunjukkan arah positif. Tahun 2018 jumlah Bank yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Paser sebanyak 10 bank yaitu BRI, BRI SYARIAH, Bank Kaltim, Bank Kaltim SYARIAH, BNI'46, BANK Danamon, BANK Mandiri, BANK Muamalat, BANK Mega dan Bank Tabungan Negara (BTN). Jenis layanan yang disediakan oleh bank-bank tersebut meliputi ; layanan tabungan, setoran ONH, Deposito, danlayanan Giro. Sedang jenis pinjaman yang diberikan meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit KUPEDES, dan Kredit Konsumsi.

Tabel II.161.
Jumlah Bank di Kabupaten Paser Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Bank
2014	9
2015	9
2016	9
2017	10
2018	10

Sumber : Pembangunan Daerah Paser Dalam Angka, 2019

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Adanya peningkatan angka kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 62 kasus dibandingkan dengan tahun 2019, sebagaimana yang telah dijelaskan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Paser belum sepenuhnya aman. Hal ini akan mempengaruhi iklim berinvestasi di Kabupaten Paser. Terlebih kasus kejahatan pencurian pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 55%. Kondisi ini semakin membuat para investor berpikir panjang untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Paser.

b. Jumlah Demonstrasi

Data pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat potensi konflik SARA/Demo di Kabupaten Paser pada tahun 2020 walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini mencerminkan bahwa daerah Kabupaten Paser belum sepenuhnya kondusif untuk iklim berinvestasi.

c. Jumlah dan Macam Retribusi Daerah

Tabel II.162.
Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Jasa Umum	6	6	8	8	8
Retribusi Jasa Usaha	11	11	11	11	11
Retribusi Perijinan Tertentu	5	4	4	4	4
Jumlah Retribusi	**22**	**21**	**23**	**23**	**23**

Sumber: SIPD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, 2021

Dari tahun 2018 hingga 2020 Kabupaten Paser memiliki 23 jenis retribusi. Retribusi tersebut berhubungan dengan iklim investasi. Kedua puluh tiga retribusi tersebut terdiri dari 8 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha dan 4 retribusi perijinan tertentu yang ditangai oleh DPMPTSP KabupatenPaser. Sejak tahun 2018 hanya 23 macam retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya. Belum ada indikasi bahwa jenis-jenis retribusi tersebut berpengaruh kurang baik terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir.

d. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Dari tahun 2014 hingga 2018, jumlah perda yang terkait perijinan di Kabupaten Paser berjumlah tetap. Tidak ada kenaikan atau penurunan sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian jumlah Perda tentang perijinan dengan isu-isu strategis di bidang perijinan, sehingga Perda mampu mendukung aspek daya saing Kabupaten Paser dengan baik.

Tabel II.163.
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Jenis Perda	2016	2016	2017	2018	2020
Jumlah Perda yang terkait perijinan	12	12	12	12	12

Sumber : DPMPTSP, 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator sebagai berikut:

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas pekerja yang bekerja pada seluruh lapangan usaha dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin

tinggi tingkat pendidikan diperkirakan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah.

Tabel II.164.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Sekolah	277	0,31	305	0,77	582	0,45
Tidak/Belum Tamat SD	8.605	9,64	5.948	14,95	14.553	11,28
SD/Ibtidaiyah	26.250	29,40	11.334	28,50	37.584	29,12
SMP Umum/Kejuruan/Sederajat	18.618	20,85	5.658	14,23	24.276	18,81
SMA Umum/Kejuruan/Sederajat	26.812	30,03	8.928	22,45	35.740	27,69
Program Diploma I/II/III	1.005	1,13	1 084	2,73	2.089	1,62
Program DIV/S1/S2/S3	7.719	8,65	6.517	16,39	14.236	11,03
Jumlah	**89.286**	**100,00**	**39.774**	**100,00**	**129.060**	**100,00**

Sumber : Sakernas 2018

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Paser tahun 2018 yang bekerja didominasi oleh lulusan SD/Sederajat (29,12%) dan SMA Umum /Kejuruan (27,69). Jika dilihat menurut jenis kelamin, pekerja laki-laki didominasi oleh lulusan SMA Umum/Kejuruan (30,03%), kemudian disusul lulusan SD/Sederajat (29,40%). Sedangkan pekerja perempuan didominasi oleh lulusan SD/Sederajat (28,50%), kemudian disusul lulusan SMA Umum/Kejuruan (22,45%).

Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas pekerja yang berada di daerah Kabupaten Paser berpendidikan rendah, hal tersebut mengakibatkan upah yang didapat kecil dan berdampak pada masyarakat menjadi miskin.

b. Rasio ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Paser tahun 2018 sebesar 48,21 persen. Dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 48 hingga 49 orang penduduk yang tidak produktif, yang mana 44 hingga 45 orang diantaranya berasal dari kelompok muda (usia di bawah 15 tahun) dan 4 orang lainnya berasal dari kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun). Salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka mengurangi besarnya angka beban ketergantungan adalah dengan menekan angka kelahiran (fertilitas) dan menghindari usia perkawinan muda

2.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada

lampiran I Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.165.

Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi								
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	240.561	246.068	248.037	254.503	258.022	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	-0,89	-4,96	1,13		
1.3	Laju Inflasi	%	7,43	6,26	4,13	2,45		Inflasi Bpp
1.4	PDRB Perkapita	Juta (Rp)/ tahun	153,22	146,05	138,99	160,02		
1.5	Indeks Gini		0,307	0,316	0,315	0,330		
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	21,47	20,45				
	- 40% Sedang	%	37,31	36,59				
	- 20% Tinggi	%	41,22	39,60				
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		-					
1.8	Persentase penduduk miskin	%	7,87	8,76	8,68	9,28	9,03	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	Kasus	285	220	194	150	136	
Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	**Pendidikan**							
1.1	Angka melek Huruf	%	98,23	98,70	98,41	98,49	99,13	
1.2	Angka Rata – Rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,99	8,12	8,19	8,20	8,22	
1.3	Angka Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,63	12,65	12,96	12,98	12,99	
1.4	APK SD	%	114,64	116,90	111,01	111,26	105,23	
1.5	APK SMP	%	88,43	83,82	99,25	89,42	93,04	
1.6	APK SMA	%	69,53	102,91	92,56	92,33	99,25	
1.7	APM SD/MI	%	98,55	96,70	97,30	99,93	97,96	
1.8	APM SMP/MTs	%	79,22	67,19	81,91	78,48	78,53	
1.9	APM SMA/SMK/MA	%	56,61	65,20	67,97	65,16	62,24	
2	**Kesehatan**							
2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,88	71,98	72,02	72,05	72,05	
2.2	Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	8	8	9	12	5	
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	76	80	66	40	63	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	5,6	5,6	4.1	12,1	0,08	
3	**Pertanahan**							

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Penduduk yang memiliki lahan	%	-	-	-	-	-	
Fokus Budaya dan Olahraga								
1	**Kebudayaan**							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit	14	14	14	70	78	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	-	-	-	-	1	
2	**Pemuda dan Olahraga**							
2.1	Jumlah Klub Olahraga	Unit	52	52	52	56	58	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	8	8	8	8	8	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
UrusanWajib Pelayanan Dasar								
1	**Pendidikan**							
1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun	%	99,49	98,98	100,00	99,93	99,22	
1.1.2	Rasio Murid terhadap Sekolah							
	- SD Negeri	%	-	145,80	143.23	143,10	137,42	
	- SD Swasta	%	-	183,88	89.23	217,13	227,0	
	- MI	%	-	203,18	201.92	217,69	232,15	
1.1.3	Rasio Murid terhadap guru							
	- SD Negeri& SD Swasta /MI Negeri dan Swasta	%	14,22	11,67	14,54	15,70	16,82	
1.1.4	Rasio Ketersediaan sekolah / Penduduk Usia Sekolah		56,57	56,84	56.92	132,45	216,08	
1.2	Pendidikan Menengah							
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah							
	- 13 – 15 Tahun	%	99,40	96,53	95,78	97,69	99,06	
	- 16 – 18 tahun	%	73,97	82,23	82,33	75,43	77,97	
1.2.2	Rasio Murid Terhadap Sekolah							
	- SMP Negeri	%	174,37	177,86	181.90	162,97	159,09	
	- SMP Swasta	%	72,67	82,78	87.78	85,00	77,82	
	- MTs	%	-	16,94	171.29	173,18	181,82	
	- SMA Negeri	%	404,25	269,00	350.69	350,92	289,39	
	- SMA Swasta	%	108,08	76,00	78.00	70,80		
	- MA	%	-	110,00	113.92	115,83	145,83	
	- SMK	%	-	43,70	387.64	344,08	373,75	
1.2.3	Rasio Murid terhadap guru							
	- SMP Negeri	%	13,08	13,59	14.31	13,96	12,80	
	- SMP Swasta	%	6,61	7,37	10.53	10,49	8,92	
	- MTs	%	-	10,83	14.49	14,36	12,67	
	- SMA Negeri	%	10,25	13,12	14.11	13,87	14,97	
	- SMA Swasta	%	5,60	8,12	11.14	10,41		
	- MA	%	-	8,11	9.24	10,15	9,56	
	- SMK	%	-	15,65	13.32	13,64	14,33	
1.2.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah							
	- Menengah Pertama	%	45,50	46,17	39.12	45,78		

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Menengah Atas	%	24,10	25,00	9.41	20,39		
1.3	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0,14	0,2	0.010	0,1	0,20	
	- SMP/MTs	%	0,45	0,07	0.072	0,2	1,50	
	- SMA/SMK/MA	%	1,43	1,42	0.072	1,0	-	
1.4	Angka Kelulusan							
	- SD/MI	%	93,20	99,26	99.26	98,25	98,18	
	- SMP/MTs	%	90,17	97,18	97.18	98,30	99,21	
	- SMA/SMK/MA	%	98,07	98,62	99.20	90,83		
1.5	Guru yang memenuhi Kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	-	3.139	3,375	3.493	3.515	
2	**Kesehatan**							
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	3.084	3.155	2.953	2.571	3.294	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas + Puskesmas Pembantu	Orang	1.924	1.969	1.984	2.004	2.187	
2.3	Rasio Posyandu persatuan balita	Balita	15	15	10,21	10,21	10,21	
2.4	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Penduduk	0,2	0,2	2,95	0,39	0,30	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Kelahiran	5.113	5.381	5.365	5.159	4.725	
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	16,25	20,91	22,41	14,35	20,14	
2.7	Morbilitas (Angka Kesakitan)	%	9,41	8,46	9,65	8,36	9,46	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.1	Pajang Jalan	Km	1.472,34	1.472,34	1.472,34	1.472,34	1.472,34	
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	29,47	49,29	24.55	30.58	49.15	
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	M	57.000	236.740	388,93	441,33	566,84	
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sehat)	%		41,7	53,8	69,78	67,13	
3.5	Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	493	453,65	211,64	87,63	62,53	
3.6	Persentase rumah tangga dengan air minum layak	%	54,57	57,57	60,14	62,91	66,88	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
4.2	Persentase rumah tangga dengan air minum layak	%	54,57	57,57	60,14	62,91	66,88	
4.3	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	%		41,7	53,8	69,78	67,13	Dinkes
4.4	Persentase rumah tangga dengan penerangan listrik	%		85,75	83,75	82,69	74,86	PLN & Non PLN
4.5	Persentase rumah layak huni	%	80,23	81,15	84,62	86,60	88,30	DPKPP
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat**							
5.1	Banyaknya Gangguan Kamtibmas	Kejadian	438	310	246	163	172	
5.2	Jumlah Anggota Linmas	Orang	2.038	2.038	2.472	2.038	2.888	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	**Sosial**							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial						93,40	
6.2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat						75,50	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
6	**Tenaga Kerja**							
6.1	Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke atas) Menurut Jenis kelamin	Orang	L : 96.467	L: 98.811	L :102.591	L : 81.907	L : 82.176	
			P : 82.987	P : 84.945	P : 88.305	P : 33.491	P : 33.518	
6.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha	%	-	-	-	-		
	- Pertanian	%	44,12	44,63	44,63	35,68	35,59	
	- Pertambangan dan Penggalian	%	14,20	9,66	9,66	11,07	11,30	
	- Industri	%	4,65	2,14	2,14	3,46	3,45	
	- Kontruksi	%	2,05	3,61	3,61	2,26	2,26	
	- Listrik, gas dan air	%			-	-	0,47	
	- Perdagangan	%	17,41	19,55	19,55	19,58	19,53	
	- Transportasi dan Komunikasi	%	2,13	2,47	2,47	0,48	4,54	
	- Jasa	%	13,56	16,11	1,83	4,55	21,63	
	- Lainnya	%	1,87	1,83	16,11	1,23	1,23	
7	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
7.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Kab. Paser)	%	43,98	40,39	40,55	40,85	46,81	
7.2	Jumlah Tenaga kerja perempuan	orang	26,798	-	2.396	2.186	2.130	
7.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	35,82	41,70	-	39,65	45,30	
7.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	
8.	**Pangan**							
8.1	Produksi Padi dan Palawija	Ton	39.812	39.599	34.008	49.179		
9	**Pertanahan**							
9.1	Jumlah Bangunan Ber IMB	Unit	3.403	4.930	5.201	5.371	5.618	
10	**Lingkungan Hidup**							
10.1	Persentase Penduduk berakses air minum	%	6.03/24	6.22/25	6.52/25			
10.2	Indeks kualitas air sungai	Jumlah Titik Pemantauan/ Nilai	32 Titik / 28,46	32 Titik / 21,69	32 Titik / 16,49	32 Titik / 48,13	32 Titik / 48,75	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.3	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	4 Kasus 4 ditindak - lanjuti	7 Kasus 7 ditindak - lanjuti	10 Kasus 10 ditindak - lanjuti	12 Kasus 8 ditindak - lanjuti	16 Kasus 11 ditindak - lanjuti	
10.4	Persentase Penanganan sampah	%	37,80	37,80	38,33	57,90	61,67	
11	**Kependudukan dan Catatan Sipil**							
11.1	Kepemilikan KTP	Orang	79.229	161.382	162.288	171.654	186.047	
	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	84.818	92.253	102.368	122.145	127.282	
12	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**							
12.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang Aktif	Unit	139	139	139	139	139	
12.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	191	225	246	252	254	
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
13.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	69,69	73,72	78	78,27	69,00	
13.2	Banyaknya Peserta baru KB	Orang	6.429	4.460	6.376	7.714	5.980	
14	**Perhubungan**							
14.1	Status Jalan di Kabupaten Paser							PU
	- Desa	Km	379,75					
	- Kabupaten	Km	625,44	1.005,192	1.005,192	1.005,192	1.005,192	
	- Propinsi	Km	242,34	242,434	14,45	14,45	14,45	
	- Nasional	Km	223,69	223,69	223,69	223,69	223,69	
	- Non Status	Km	-	-	227,98	227,98	227,98	
15	**Komunikasi dan Informatika**							
15.1	Jenis Surat Kabar							
	- Nasional	Jenis	3	3	3	4	4	
	- Lokal	Jenis	5	6	6	6	6	
16.	**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah**							
16.1	Jumlah Koperasi	Unit	274	288	301	283	286	
16.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit	11.200	11.514	13.736	14.398	14.638	
17	**Penanaman Modal**							
17.1	Realisasi proyek PMDN	Juta (Rp)	469.577	419.296	318.630	607.326	7.935.089	
17.2	Realisasi proyek PMA	000 (US$)	352.667	107.025	607.326	288.696	89.097	
18	**Kepemudaan dan Olah raga**							
18.1	Jumlah Karang Taruna	Unit	26	26	26	36	38	
18.2	Jumlah GOR/ Sarana Olah raga	Unit	1	1	1	1	1	
19	**Statistik**							
19.1	Publikasi " Kabupaten/Kota Dalam Angka"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi "PDRB Kabupaten/Kota"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	**Kebudayaan**							
20.1	Jumlah event budaya	Event	3	1	2	3	3	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	10	10	10	120	120	
20.3	Jumlah Museum	Unit	1	1	1	1	1	
20.4	Jumlah tanaman budaya	Unit	1	1	1	-	-	
21	**Perpustakaan**							
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	274	288	296	296	296	
21.2	Jumlah Pengunjung	Orang	66.807	8.325	13.344	8.497	8.138	
21.3	Jumlah Koleksi Buku	Buku	49.345	98.690	49.545	49.545	70.505	
Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	**Pariwisata**							
1.1	Jumlah Wisata Nusantara dan Mancanegara	Orang	15.624	19.512	20.572	24.562	27.070	
1.2	Kontribusi Subsektor Jasa/ Pariwisata terhadap PDRB	%	-	-				
2	**Pertanian**							
2.1	Produksi Padi	Ton	36.803	36,291	32.479	41.726		
2.2	Produksi padi atau bahan utama lainnya per Ha	Kw	4,08	3,87	3,97	4,22		
2.3	Kontribusi Sektor peternakan, pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	12.61	11,29	10.20	10.43	12.48	
2.4	Kontribusi Subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,25	0,28	0,29	0,29		
3	**Kehutanan**							
3.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,72	0,78	0,84	0,72		
4	**Perdagangan**							
	Kontribusi Subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	2,98	3,34	3,75	3,48		
	Net Ekspor ADHB	Miliar Rp	24.261,41	25.793,99	24.401,76	23.378,50		
	Net Ekspor ADHK	Miliar Rp	22.541,06	23.736,64	23.504,66	22.315,07		
	Neraca Perdagangan Luar Negeri	000 US	-	-	-			
5	**Perindustrian**							
5.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4.82	4.92	4.49	4,68	5.84	
5.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB	%	4.82	4.92	4.49	4,68	5.84	
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
1.1	Rata – rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/ Bulan	860.035	907.361	1.034.650	1.000.905	1.208.889	
	Rata – rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/ Bulan	432.967,60	433.494	536.184	552.687	626.512	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rata-rata pengeluaran konsumsi Non makanan per kapita	Rp/ Bulan	427.067,13	473.867	498.466	448.218	582.377	
	PDRB Per Kapita	Juta/Rp	153,22	146,05	138,99	160,02		
	Pendapatan regional per kapita	Juta/Rp	-	-	-	-		
	Jumlah Koperasi	Unit	274	288	301	283	286	
2	**Pertanian**							
2.1	Nilai tukar petani	%	-	-	-	-	-	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	**Perhubungan**							
1.1	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	M	121	130	111	115	119	
2	**Penataan Ruang**							
2.1	Ketaataan terhadap RTRW	%	-	-	-	53,52	53,62	
2.2	Luas wilayah industri		-	-	-	-		
2.3	Luas wilayah perkotaan		-	-	59.586,761			
3.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
3.1	Jumlah Kantor Perbankan	Unit	9	9	9	10	10	
3.2	Jumlah Akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	27	27	30	32	32	
3.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	41	41	41	41	113	
4	**Lingkungan Hidup**							
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	67,78	67,83	73,96	71,02		
5	**Komunikasi dan Informatika**							
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	-	107,579,674	111,598,372	107.602.448	112.435.994	
5.2	Jumlah Pelanggan Listrik	Pelanggan	-	32,847	36.220	39.825	44.296	
Fokus Iklim Berinvestasi								
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
1.1	Jumlah Nilai Investasi(PMDN/PMA)	Juta Rp	822.244	526.348	528.512	776.968		
	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,00	71,16	71,61	72,29	72,04	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		58,90	64,58	-	62,07	62,76	
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		68,58	68,66	-	69,78	70,64	71,41
1.4	Rasio Ketergantungan	%	49,61	47,74	46,77	46,36	48,21	45,71

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas- azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif. Transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD.

Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek non fisik maupun fisik.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Menganalisis kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan *(policy)*, perencanaan *(planning)* dan penganggaran *(budgeting)*antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Paser dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 hampir selalu melebihi target anggaran, kecuali di tahun 2017 target anggaran pendapatan tidak terpenuhi, yaitu hanya mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 92,78%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, hal ini disebabkan oleh beberapa komponen pembentuk pendapatan daerah yang tidak memenuhi target

anggaran, antara lain retribusi daerah, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak, danbahkan dari dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Walaupun realisasi pendapatan hampir selalu melebihi target anggaran, namun kapasitas pendapatan daerah masih tergantung pada dana perimbangan. Artinya Kabupaten Paser masih seperti daerah lain pada umumnya di Indonesia, yaitu ketika dana transfer dari pemerintah pusat menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. Ketergantungan pada dana transfer tersebut terutama berasal dari dana bagi hasil bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Paser masih merasakan keberlimpahan hasil sumber daya alam batu bara. Namun sebagaimana kewaspadaan berbagai elemen di Paser, maka kondisi tersebut perlu dicarikan alternatif sumber pendapatan. Mengingat batu bara merupakan sumber daya yang memiliki limitasi waktu proses eksploitasi atau tidak terbarukan, sekaligus bersifat rentan terhadap berbagai kondisi global.

Adapun perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada tabel III.1.

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2016	1.819.347.526.914,68	1.835.941.008.666,55	100,91%	16.593.481.751,87
2017	1.652.772.524.949,72	1.533.488.349.143,54	92,78%	(119.284.175.806,18)
2018	1.977.350.920.850,21	2.059.224.450.206,35	104,14%	81.873.529.356,14
2019	2.521.309.628.322,00	2.648.283.348.438,05	105,04%	126.973.720.116,05
2020	2.160.484.221.698,23	2.404.053.511.907,13	111,27%	243.569.290.208,90
Jumlah	**10.131.264.822.734,80**	**10.480.990.668.361,60**	**103,45%**	**349.725.845.626,78**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Total target Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser selama periode tahun 2016-2020 sebesar Rp. 10.131 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 10.480 triliun lebih atau sebesar 103,45%. Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel III.2.

Dari data dibawah terlihat bahwa selama kurun waktu 2016-2020, realisasi PAD meningkat dari Rp.117.731.480.928,28 pada tahun 2016, menjadi Rp.173.315.327.565,13 pada tahun 2020. Pada kurun waktu yang sama, dana perimbangan meningkat dari Rp.1.361.945.793.868,00 pada tahun 2016, menjadi Rp.1.513.531.810.485,00 pada tahun 2020 peningkatan ini disebabkan adanya penyaluran kurang bayar dana bagi hasil bukan pajak dari tahun 2012 sampai dengan

tahun 2017. Untuk pendapatan lain-lain yang sah, juga mengalami peningkatan dari Rp.356.263.733.870,27 menjadi Rp.717.206.373.857,00 pada tahun 2020 peningkatan ini disebabkan adanya penyaluran kurang bayar dana bagi hasil bukan pajak dari provinsi tahun 2018.

Berbicara kemandirian daerah yang dikaitkan dengan kemampuan dalam menghasilkan sumber pendapatan asli daerah, maka Kabupaten Paser masih harus berupaya lebih keras. PAD belum menunjukkan angka signifikan sebagai komponen penyusun pendapatan daerah. Bahkanbeberapa komponennya, termasuk dari hasil kerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) mengalami angka pertumbuhan minus. Hal ini menjadi agenda penting untuk dilaksanakan perbaikan kinerja dan intensifikasi hasil BUMD, agar lebih signifikan menjadi penyumbang PAD dalam komponen hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.

Sedangkan dalam komponen retribusi daerah, juga masih perlu upaya peningkatan. Upaya peningkatan tersebut berhubungan dengan kualitas layanan objek retribusi itu sendiri. Sebagai contoh di bidang pariwisata, retribusi dari usaha pariwisata yang dijalankan pemerintah daerahmasih minim. Ini disebabkan oleh tingkat kesulitan akses menuju destinasi wisata sekaligus kualitas destinasi yang belum memiliki daya saing. Selain peningkatan kualitas, potensi peningkatan retribusi tetap terbuka lebar dengan masih aktifnya berbagai objek retribusi, antara lain terminal dan dermaga.

Komponen PAD yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi adalah pajak daerah. Namun kedepan terdapat hal penting yang patut diperhatikan dalam komponen ini,terutama terkait dengan penarikan beberapa kewenangan daerah kabupaten/kota menjadi kewenanganprovinsi sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang ditarik ke provinsi adalah penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Padahal selama ini kewenangan tersebut menjadi salah satu sumber pajak Kabupaten Paser yang menyusun pendapatan asli daerah paling signifikan. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada tabel III.3. dan Gambar III.1. berikut ini:

Tabel III.2
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

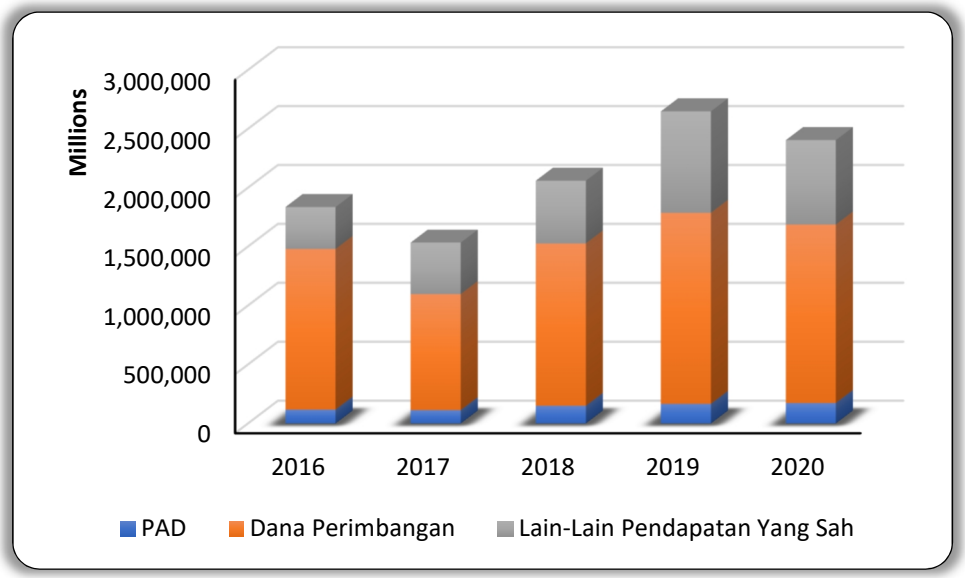
Tahun	PAD			Dana Perimbangan			Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2016	102.867.446.621,41	117.731.480.928,28	114,45	1.378.673.848.469,00	1.361.945.793.868,00	98,79%	337.806.231.824,27	356.263.733.870,27	105,46%
2017	109.816.256.591,72	112.644.016.095,42	102,57%	1.104.696.204.842,00	984.388.323.021,00	89,11%	438.260.063.516,00	436.456.010.027,12	99,59%
2018	147.354.078.710,84	149.405.400.464,48	101,39%	1.294.651.469.828,37	1.377.083.776.270,00	106,37%	535.345.372.311,00	532.735.273.471,87	99,51%
2019	167.013.658.185,73	166.152.866.582,05	99,48%	1.472.162.698.028,00	1.620.239.684.963,00	110,06%	882.133.272.108,27	861.890.796.893,00	97,71%
2020	136.428.440.931,23	173.315.327.565,13	127,04%	1.305.164.518.523,00	1.513.531.810.485,00	115,96%	718.891.262.240,00	717.206.373.857,00	99,77%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Tabel III.3
Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Tahun	PAD		Dana Perimbangan		Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
2016	117.731.480.928,28	6,41	1.361.945.793.868,00	74,18	356.263.733.870,27	19,40
2017	112.644.016.095,42	7,35	984.388.323.021,00	64,19	436.456.010.027,12	28,46
2018	149.405.400.464,48	7,26	1.377.083.776.270,00	66,87	532.735.273.471,87	25,87
2019	166.152.866.582,05	6,27	1.620.239.684.963,00	61,18	861.890.796.893,00	32,55
2020	173.315.327.565,13	7,21	1.513.531.810.485,00	62,96	717.206.373.857,00	29,83

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Gambar III.1.
Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen pendapatan Daerah

Dari gambar diatas, terlihat pula bahwa komponen Dana Perimbangan masih sangat dominan dalam Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, yaitu mencapai 60-70% setiap tahunnya, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, berkisar antara 20-32%. Secara rinci realisasi pendapatan daerah per komponen sumber penerimaan selama kurun waktu 2016- 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah ; terdiri dari Pajak Daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Realisasi selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel III.4. di bawah ini:

Tabel III.4.
Perkembangan Realisasi PAD Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Daerah	18.734.271.474,21	27.417.173.249,03	33.764.533.647,38	48.875.114.199,17	33.268.971.828,26
2	Retribusi Daerah	7.455.744.729,00	7.464.071.845,30	8.476.539.155,50	9.563.179.543,25	9.527.589.970,21
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.411.420.451,09	7.057.781.470,67	8.517.034.518,84	6.765.981.706,68	4.164.142.133,44
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.130.044.273,98	70.704.989.530,42	98.647.293.142,76	100.948.652.096,95	126.354.623.633,22
	JUMLAH PAD	**117.731.480.928,28**	**112.644.016.095,42**	**149.405.400.464,48**	**166.152.927.546,05**	**173.315.327.565,13**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

b. Dana Perimbangan; terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Realisasi dana perimbangan selama kurun waktu2016-2020 sebagaimana terlihat pada tabel III.5. berikut:

Tabel III.5.
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan
Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.373.446.147,00	66.380.113.925,00	77.700.447.420,00	76.869.212.060,00	53.464.617.730,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber DayaAlam)	809.494.259.125,00	384.546.300.352,00	761.308.544.258,00	956.235.783.502,00	913.747.477.204,00
3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	385.289.924.000,00	384.005.124.000,00	386.808.566.963,00	410.681.304.000,00	382.202.549.000,00
4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	90.788.164.596,00	149.456.784.744,00	151.266.217.629,00	176.453.385.401,00	164.117.166.54900
	JUMLAH PAD	**1.361.945.793.868,00**	**984.388.323.021,00**	**1.377.083.776.270,00**	**1.620.239.684.963,00**	**1.513.531.810.485,00**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

c. Lain-lain Pendapatan Daerah; terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi, dan lain-lain pendapatan. Secara rinci realisasinya dapat dilihat pada tabel III.6. berikut:

Tabel III.6
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya	138.089.883.000,00	176.595.753.000,00	207.297.046.000,00	264.547.365.628,00	169.578.622.255,00
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	130.830.312.046,00	117.545.744.000,00	132.676.336.600,00	121.075.068.600,00	168.512.263.258,00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	84.343.538.824,27	104.051.250.000,00	155.200.000.000,00	433.700.924.000,00	331.188.663.240,00
4	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	38.263.263.027,12	37.561.890.871,87	42.567.438.665,00	47.926.825.100,00
	JUMLAH PAD	**356.263.733.870,27**	**436.456.010.027,12**	**532.735.273.471,87**	**861.890.796.893,00**	**717.206.373.857,00**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Dari keseluruhan komponen dan sumber pendapatan daerah, komponen dana perimbangan merupakan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber terbesar dari komponen ini adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SumberDaya Alam). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Paser sebagai berikut ini:

Tabel III.7.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertum-buhan
PENDAPATAN	**1.835.941.008.666,55**	**1.533.488.349.143,54**	**2.059.224.450.206,35**	**2.648.283.348.438,05**	**2.404.053.511.907,13**	**0,31**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**117.731.480.928,28**	**112.644.016.095,42**	**149.405.400.464,48**	**166.152.866.582,05**	**173.315.327.565,13**	**0,47**
Pajak Daerah	18.734.271.474,21	27.417.173.249,03	33.764.533.647,38	48.875.114.199,17	33.268.971.828,26	0,78
Retribusi Daerah	7.455.744.729,00	7.464.071.845,30	8.476.539.155,50	9.563.179.543,25	9.527.589.970,21	0,28
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkn	5.411.420.451,09	7.057.781.470,67	8.517.034.518,84	6.765.981.706,68	4.164.142.133,44	(0,23)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.130.044.273,98	70.704.989.530,42	98.647.293.142,76	100.948.591.132,95	126.354.623.633,22	0,47
DANA PERIMBANGAN	**1.361.945.793.868,00**	**984.388.323.021,00**	**1.377.083.776.270,00**	**1.620.239.684.963,00**	**1.513.531.810.485,00**	**0,11**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.373.446.147,00	66.380.113.925,00	77.700.447.420,00	76.869.212.060,00	53.464.617.732,00	(0,30)
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	809.494.259.125,00	384.546.300.352,00	761.308.544.258,00	956.235.783.502,00	913.747.477.204,00	0,13
Pendapatan Dana Alokasi Umum	385.289.924.000,00	384.005.124.000,00	386.808.566.963,00	410.681.304.000,00	382.202.549.000,00	(0,01)
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	90.788.164.596,00	149.456.784.744,00	151.266.217.629,00	176.453.385.401,00	164.117.166.549,00	0,81
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**356.263.733.870,27**	**436.456.010.027,12**	**532.735.273.471,87**	**861.890.796.893,00**	**717.206.373.857,00**	**1,01**
Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	38.263.263.027,12	37.561.890.871,87	42.567.438.665,00	47.926.825.100,00	14,98
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	138.089.883.000,00	176.595.753.000,00	207.297.046.000,00	264.547.365.628,00	169.578.622.255,00	0,23
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	130.830.312.046,00	117.545.744.000,00	132.676.336.600,00	121.075.068.600,00	168.512.263.258,00	0,29
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	84.343.538.824,27	104.051.250.000,00	155.200.000.000,00	433.700.924.000,00	331.188.663.244,00	2,93

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

Tabel III.8.
Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Paser

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**PENDAPATAN**	**-0.05**	**-0.16**	**0.34**	**0.29**	**-0.09**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**0.12**	**-0.04**	**0.33**	**0.11**	**0.04**
1.1.1	Pajak Daerah	-0.24	0.46	0.23	0.45	-0.32
1.1.2	Retribusi Daerah	-0.11	0.00	0.14	0.13	0.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-0.15	0.30	0.21	-0.21	-0.38
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.32	-0.18	0.40	0.02	0.25
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**0.08**	**-0.28**	**0.40**	**0.18**	**-0.07**
1.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-0.05	-0.13	0.17	-0.01	-0.30
1.2.2	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber DayaAlam)	-0.12	-0.52	0.98	0.26	-0.04
1.2.3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	0.48	0.00	0.01	0.06	-0.07
1.2.4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	12.22	0.65	0.01	0.17	-0.07
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-0.38**	**0.23**	**0.22**	**0.62**	**-0.17**
1.3.1	Pendapatan Hibah		11.75	-0.02	0.13	0.13
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-0.48	0.28	0.17	0.28	-0.36
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.07	-0.10	0.13	-0.09	0.39
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-0.54	0.23	0.49	1.79	-0.24

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2020

3.1.1.2. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kalimantan Timur, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, selama kurun waktu 2016-2020, belanja daerah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam tabel III.9.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis sebagai berikut.

a. Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran

Tabel III.9.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Jumlah (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**53,31**	**46,11**	**45,03**	**36,98**	**42,65**
1	Belanja Pegawai	40,86	31,85	31,29	24,37	25,9
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
4	Belanja Hibah	0,53	1,39	1,52	1,66	3,08
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0,12	
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kab./Kota dan Pemerintah Desa	-	0,18	0,11	0,17	0,16
7	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi /Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	11,91	12,63	11,70	10,42	11,01
8	Belanja Belanja Tak Terduga	0,01	0,06	0,40	0,24	2,49
B	**Belanja Langsung**	**46,69**	**53,89**	**54,97**	**63,02**	**57,35**
1	Pegawai	8,17	7,71	7,67	6,46	7,07
2	Barang Jasa	17,06	19,20	19,44	21,76	25,87
3	Modal	21,46	26,98	27,86	34,80	24,41
	Total Belanja	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Tabel III.9. menunjukkan terjadi kenaikan belanja langsung setiap tahunnya dari angka 46,69% dan pada tahun 2016 menjadi angka 63,02%pasa tahun 2019, artinya terdapat kenaikan sebesar 16,33% dari tahun 2016. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan belanja langsung sebesar 57,35%. Atau menurun sebesar 5,67% Jika dibandingkan pada tahun 2019. Penurunan belanja pegawai menunjukkan makin meningkatnya efisiensi Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola realisasi belanja bagi pegawai daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari

rendahnya proporsi belanja pegawai di Kabupaten Paser rata-rata masih berada pada kisaran angka 5%. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai di Kabupaten Paser ini bisa disebabkan oleh makin efisiennya pemberian honorarium pegawai. Penurunan ini juga menunjukkan kinerja yang baik bagi pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola keuangan daerah untuk realisasi belanja pegawai. Untuk proporsi pada belanja barang dan jasa terjadi kenaikan belanja pada tahun 2019 sebesar 25,87%. Disisi lain, kenaikan proporsi belanja modal pada tahun 2019 sebesar 13,34% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 34,80%. Pada sektor belanja tidak langsung, terjadi penurunan pada tahun anggaran 2019 sebesar 16,33% dibandingkan dengan tahun 2016 dan mengalami kenaikan lagi sekitar 5,7% pada tahun 2020.

b. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pada Tabel III.10 menyajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparaturyang menunjukkan terjadi penurunan pada alokasi belanja tidak langsung yaitu dari angka 58,09% pada tahun 2016 menurun 25,82% pada tahun 2020. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja langsung terjadi kenaikan dari tahun 2016 sebesar 41,91% menjadi 53,58% pada tahun 2020. Kenaikan belanja pegawai ini menunjukkan makin meningkatnya efisiensi Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola realisasi belanja bagi pegawai daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya proporsi belanja pegawai di Kabupaten Paser masih berada pada kisaran angka 5%. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai di Kabupaten Paser ini bisa disebabkan oleh makin efisiennya pemberian honor pegawai dan moratorium (penghentian sementara) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdampak pada *rightsizing* struktur pegawai. Disamping itu juga terjadi penurunan proporsi pada belanja barang dan jasa. Penurunan ini juga menunjukkan kinerja yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola keuangan daerah untuk realisasi belanja pegawai.

Tabel III.10.

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Paser 2016 – 2020

No.	Uraian	Jumlah									
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
A.	**Belanja Tidak Langsung**	619.753.605.186,00	58,09	540.406.243.080,00	48,23	595.006.708.042,74	47,97	610.053.719.902,00	37,44	580.204.355.895,00	25,52
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	328.363.146.885,00	30,78	299.047.145.696,00	26,69	300.650.161.623,74	24,24	312.240.648.129,00	19,16	318.927.976.299,00	19,95
2	Belanja Tambahan Penghasilan	287.696.665.135,00	26,97	235.008.104.393,00	20,98	282.239.650.033,00	22,76	285.648.931.602,00	17,53	249.376.573.212,00	0,85
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.647.999.997,00	0,25	5.077.449.996,00	0,45	10.826.557.996,00	0,87	10.243.272.798,00	0,63	10.667.072.396,00	0,1
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.045.793.169,00	0,10	1.273.542.995,00	0,11	1.290.338.390,00	0,10	1.920.867.373,00	0,12	1.232.733.988,00	0,85
B	**Belanja Langsung**	447.063.318.277,40	41,91	580.011.416.795,50	51,77	645.320.671.338,82	52,03	1.019.326.687.145,32	62,56	669.684.425.373,47	53,58
1	Belanja Honorarium PNS	20.356.014.873,00	1,91	15.696.452.996,00	1,40	18.508.586.628,00	1,49	18.981.821.621,00	1,16	18.763.500.560,00	1,5
2	Belanja Uang Lembur	2.130.760.000,00	0,20	1.820.415.000,00	0,16	2.150.229.000,00	0,17	2.284.846.500,00	0,14	2.025.816.600,00	0,16
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.080.081.000,00	0,10	414.718.750,00	0,04	973.782.000,00	0,08	670.000.000,00	0,04	502.880.000,00	0,04
4	Belanja Kursus, Pelatihan Tekhnis, Sosialisasi dan Bimbingan	8.331.384.042,00	0,78	5.186.372.675,00	0,46	7.898.617.254,00	0,64	13.790.526.324,00	0,85	2.395.056.694,00	0,19
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	24.621.976.574,00	2,31	25.847.922.318,00	2,31	3.667.295.587,00	0,30	3.633.725.563,00	0,22	5.532.643.215,00	0,44

No.	Uraian	Jumlah									
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	321.553.360,00	0,03	128.330.000,00	0,01	10.936.000,00	0,00	72.549.750,00	0,00	9.794.301.900,00	0,78
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	848.717.500,00	0,08	382.425.000,00	0,03	287.563.000,00	0,02	593.444.600,00	0,04	254.895.000,00	0,02
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu	1.385.192.500,00	0,13	820.464.500,00	0,07	1.314.888.350,00	0,11	1.113.176.840,00	0,07	455.259.000,00	0,04
9	Belanja Perjalanan Dinas	62.465.354.370,40	5,86	71.910.258.430,50	6,42	80.493.484.592,96	6,49	106.792.898.889,00	6,55	58.629.551.648,00	4,69
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeler, Peralatan dan	325.522.284.058,00	30,51	457.804.057.126,00	40,86	530.015.288.926,86	42,73	871.393.697.058,32	53,48	571.330.520.756,47	45,71
	Total	1.066.816.923.463,40		1.120.417.659.875,50		1.240.327.379.381,56		1.629.380.407.047,32		1.249.888.781.268,47	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser 2016 -2021

c. pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud seperti dalam tabel berikut:

Tabel III.11.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Paser

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**568.061.122.987,26**	**587.723.897.402,89**	**602.449.581.805,98**	**594.321.913.700,00**	**651,343,403,987.00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	360.051.399.276,65	353.894.087.194,33	349.274.153.798,98	312.240.648.129,00	318,927,976,299.00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.747.500.000,00	7.277.500.000,00	11.324.288.000,00	10.243.272.798,00	10,667,072,396.00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	3.129.547.747,00	3.090.000.000,00	3.488.517.000,00	3,665,020,100.00
5	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	204.022.067.541,61	221.157.919.966,56	229.792.668.567,00	260.429.748.400,00	246,883,799,070.00
6	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.045.793.169,00	1.273.542.995,00	1.290.338.390,00	1.920.867.373,00	1,232,733,988.00
7	Belanja Tidak Terduga	194.363.000,00	991.299.500,00	7.678.133.050,00	5.998.860.000,00	69,966,802,134.00
B	**Belanja Langsung**	**24.664.320.469,03**	**24.276.613.416,33**	**21.570.726.276,00**	**19.764.615.272,00**	**56,752,346,834.00**
1	Belanja Honorarium PNS Tenaga Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	4.748.615.815,00	2.190.988.437,61	2.666.096.191,00	2.596.415.113,00	18,763,500,560.00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.538.772.000,00	424.093.750,00	1.113.282.000,00	670.000.000,00	502,880,000.00
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor seperti Listrik, Telepon dsb)	18.376.932.654,03	21.661.531.228,72	17.791.348.085,00	16.498.200.159,00	37,380,781,774.00
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada Kontrak jangka Panjang)	-	-	-	-	105,184,500.00
C.	**Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Pembayaran Pokok Hutang					
	Total Belanja	**592.725.443.456,29**	**612.000.510.819,22**	**624.020.308.081,98**	**614.086.528.972,00**	**708,095,750,821.00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser 2016 – 2020

3.1.2. Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

   Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

   a. Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

   b. Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

   Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

   a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

   b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

   a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formulasebagai berikut.

      Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang

      - Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah.
      - Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang): 2

   b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

      Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan

      - Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan.
      - Rata-rata nilai persediaan= (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan)

Tabel III. 12
Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Paser 2016 – 2020

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Asset**					
1.1	**Asset Lancar**					
	Kas di Kas Daerah	315.151.445.810,93	153.751.531.600,05	304.870.507.809,24	430.657.052.361,82	509.872.206.672,69
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	631.500,00	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.455.413,00	-	8.835.000,00	-	106.186.500,00
	Kas di BLUD	14.621.294.389,99	6.952.610.694,04	5.646.520.068,28	5.364.280.043,07	16.543.421.269,52
	Kas di Bendahara FKTP			2.490.574.556,23	930.064.740,03	1.279.559.192,03
	Kas di Bendahara BOS			423.098.343,74	5.422.249.255,85	641.415.540,88
	Kas Lainnya	6.558.773.134,45	4.235.973.865,96	5.133.315.286,62		63.169.934.264,00
	Setara Kas	-	-	-		
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-		
	Piutang Pendapatan	77.617.055.007,75	63.172.442.631,73	78.591.734.367,90		
	Piutang Lainnya	14.295.739.431,46	13.687.884.110,77	14.045.226.201,22		
	Penyisihan Piutang	-13.692.677.592,12	-14.732.557.855,83	-21.274.535.374,67		
	Beban Dibayar Dimuka	-	33.307.480,82	964.207.417,27		
	Persediaan	25.469.714.246,00	42.235.617.699,59	71.621.524.848,42		6.472.300,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**440.023.799.841,46**	**269.336.810.227,13**	**462.521.640.024,25**	**442.373.646.400,77**	**591.619.195.739,12**
1.2	**Investasi Jangka Panjang**					
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Entitas Lainnya					
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya					
	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan					
	Dana Bergulir	514.176.701,83	606.822.502,83	-	-	-

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH Investasi JangkaPanjang Non Permanen	514.176.701,83	606.822.502,83	-	-	-
	Investasi Jangka PanjangPermanen			-	-	-
	Penyertaan Modal PemerintahDaerah	182.337.182.034,00	185.413.200.314,00	-	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH Investasi JangkaPanjang Permanen	182.337.182.034,00	185.413.200.314,00	-	-	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**182.851.358.735,83**	**186.020.022.816,83**	**-**	**-**	**-**
1.3	**Asset Tetap**					
	Tanah	852.908.196.512,00	850.360.978.718,15	850.917.223.668,15	1.218.990.000,00	3.011.470.000,00
	Peralatan dan Mesin	735.377.548.381,35	751.624.878.533,37	781.286.170.460,07	7.389.287.320,00	61.467.165.316,00
	Gedung dan Bangunan	1.606.558.147.061,40	1.686.712.545.540,19	2.053.784.332.777,48	220.768.300,00	94.365.593.583,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.461.489.941.701,73	3.813.067.582.142,30	4.152.501.242.900,88	-	391.338.748.087,47
	Aset Tetap Lainnya	18.196.933.920,28	16.724.161.163,28	24.043.869.379,28	-	239.756.085,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.209.733.163.611,87	890.894.676.122,86	453.018.851.446,48	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-2.277.288.292.706,16	-2.552.248.061.564,40	-2.896.491.204.364,80		
	JUMLAH ASET TETAP	**5.606.975.638.482,47**	**5.457.136.760.655,75**	**5.419.060.486.267,54**	**8.829.045.620,00**	**550.422.733.071,47**
1.4	**Dana Cadangan**					
	Dana Cadangan	-	-	-		
	JUMLAH DANA CADANGAN	**-**	**-**	**-**		
1.5	**Asset Lainnya**					
	Tagihan Jangka Panjang	9.165.015.239,00	7.100.173.379,54	9.008.089.617,82	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	201.926.745.568,04	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	7.534.204.500,00	7.603.504.500,00	-	-
	Aset Lain-lain	3.491.544.637,34	154.431.398.622,94	24.148.106.327,32	-	-

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Aset Lainnya - Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya - TPTGR yang belum ada SKTM	62.137.502,50	-	-	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	**12.718.697.378,84**	**169.065.776.502,48**	**242.686.446.013,18**	**-**	**-**
2	**Kewajiban**					
2.1	**Jangka Pendek**					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	990.100,00	355.701.210,26	55.351.649,37	-	-
	Utang Bunga	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	433.813.373,81	421.035.102,15	605.053.318,03	-	-
	Utang Beban	38.833.646.206,92	1.164.430.338,00	1.348.460.534,00	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	171.631.511.329,00	17.708.178.443,00	6.961.955.139,89	-	63.169.934.264,00
	Utang Pajak	-	-	-	-	
	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**210.899.961.009,73**	**19.649.345.093,41**	**8.970.820.641,29**	**-**	**63.169.934.264,00**
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**					
	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	
	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**-**	**-**	
3	**Ekuitas**	**6.031.669.533.428,86**	**6.061.910.025.108,75**	**6.304.538.235.974,70**	**424,827,582,170.77**	**1,052,496,884,696.59**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

3.1.2.1 Aset Daerah

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) investasi jangka panjang (3) aset tetap, (4) dana cadangan dan, (5) aset lainnya.

a. Aset Lancar
   Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas dan dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) tahun periode akuntansi. Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 memiliki aset lancar yang mencapai nilai Rp. 591.619.195.739,12 yang terdiri dari: (I) Kas di Kas Daerah senilai Rp. 509.872.206.672,69; Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp. -; Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp. 106.186.500,00; Kas di BLUD senilai Rp. 16.534.421.269,52; Kas di Bendaraha FKTP senilai Rp. 1.279.559.192,03; Kas di Bendahara Dana Bansos Pendidikan senilai Rp. 641.415.540,88 dan Kas Lainnya senilai Rp. 63.169.934.264,00; (II) Piutang pendapatan senilai Rp. - dan (III) Persediaan senilai Rp. 6.472.300,00.

b. Investasi Jangka Panjang
   Investasi Jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Kabupaten Paser per 31 Desember2020, tidak memiliki investasi jangka panjang.

c. Aset tetap
   Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 memiliki aset tetap yang mencapai nilai Rp. 550.422.733.071,47 yang terdiri dari (i) Tanah senilai Rp. 3.011.470.000,00; Peralatan dan Mesin Rp. 61.467.165.316,00; Gedung dan Bangunan Rp 94.365.593.583,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 391.338.748.087,47; Aset Tetap Lainnya Rp. 239.756.085,00; Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. -; dan Akumulasi Penyusutan Rp. -.

d. Dana cadangan
   Dana cadangan dimaksudkan untuk menyediakan anggaran yang memerlukan waktu penyediaan anggaran dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran. Dana cadangan Kabupaten Paser tidak tersedia.

e. Aset lainnya
   Aset lainnya adalah aset yang tidak berwujud atau aset yang dalam kondisi tidak bisa dipergunakan (rusak). Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 tidak memiliki aset lainnya.

Kewajiban umumnya timbul sebagai akibat dari pemenuhan terhadap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab dimasa lalu yang mengalami defisit. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 63.169.934.264,00 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 63,169.934.264,00 dan Kewajiban Jangka Panjang Rp 00.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul sebagai akibat dari pemenuhan terhadap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab dimasa lalu yang mengalami defisit. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 8.970.820.641,29 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 8.970.820.641,29 dan Kewajiban Jangka Panjang Rp 00

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 memiliki Ekuitas Danaadalah sebesar Rp. 1.052.496.884.696,59.

Analisis Rasio Keuangan (Tabel III.13) diantaranya terdiri dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas adalah rasio lancar (*Current Ratio*) dan rasio quick (*Quick Ratio*). Rasio Likuiditas Kabupaten Paser pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa nilai rasio lancar Pemerintah Kabupaten Paser dapat mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun perlu diperhatikan juga, nilai rasio Pemerintah Kabupaten Paser yang tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukan semakin berkurangnnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Nilai ratio *quick* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2018 sebesar 43,57 dan pada tahun 2017 sebesar 11,56. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai dari perhituingan tersebut menunjukan bahwa kemampuan aset lancer Kabupaten Paser setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk lebih jelasnya rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Paser periode tahun 2015 sampai 2018 dapat dilihat pada Tabel III.13 berikut ini:

Tabel III.13.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser
Tahun 2015 – 2018

Keterangan	Rasio				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	3,84	2,09	13,71	51,56	32,52
Rasio Quick	3,59	1,97	11,56	43,57	28,00
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang terhadap total aset	5,81	16,58	0,12	0,04	22,52
Rasio hutang terhadap modal	0,01	0,03	0,00	0,00	0,05
Aktivitas					

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2020

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Paser selama periode 2015- 2018 menunjukan fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Paser cukup kuat untuk membayar manakala melakukan pinjaman ke kreditor. Untuk lebih jelasnya rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2015-2019 sebagai tercantum dalam tabel III.13 di atas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama Periode Tahun Anggaran 2016-2020, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan professional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam rangka memenuhi pencapaian target Pendapatan Daerah

terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1) Dalam komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
   a) Menjalankan kebijakan alternatif ketika ada beberapa komponen pembentuk PAD yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, yaitu melalui identifikasi dan pengoptimalan sumber PAD potensial, misalnya melalui revitalisasi destinasi pariwisata
   b) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan manajemen pemungutan disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah
   c) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjagakeberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi
   d) Meningkatkan hasil BUMD melalui revitalisasi manajemen dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD
   e) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, SKPD teknis penghasil, dan kecamatan
   f) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan SKPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis
   g) Optimalisasi berbagai aset daerah, misalnya sarana olahraga
2) Bagi daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser, komponen dana perimbangan masih menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah, karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
   a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana perimbangan
   b) Optimalisasi dana perimbangan dari sumber daya alam batu bara melalui peningkatan akurasi data sebagai dasar pembagian hasil sumber daya alam
   c) Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui koordinasidengan Kemendagri dan Kemenkeu
   d) Menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh 21, dan BPHTB, disertai

upaya sosialisasi untuk meningkatan kesedaran wajib pajak untuk membayar pajak

e) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3) Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

b) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

4) Selain melalui ketiga komponen pendapatan di atas, upaya akselerasi pembangunan daerah juga dapat ditunjang melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan pengoptimalkan peran CSR (*corporate social responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sekaligus agar bersinergi dalam kerangka rencana pembangunan daerah. Kecenderungan pendapatan daerah yang mengalami penurunan dibanding dengan pendapatan daerah lima tahun terakhir maka upaya pencarian sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergarap oleh Pemerintah Daerah perlu dipertimbangkan. Alternatif pendapatan ini dapat dipertimbangkan untuk menutup defisit belanja yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja yang dianggarkan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah tahun 2016-2020, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui :

1) Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan
2) Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra perangkat daerah maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja perangkat daerah
3) Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari:

1) Prioritas Utama: merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10%. Salah satu Program Unggulan Kepala Daerah adalah Program percepatan peningkatan infrastruktur jalan dalam rangka mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, baik wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan.
2) Prioritas Pendukung I: merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap perangkat daerah.
3) Prioritas Pendukung II: merupakan belanja tidak langsung daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS.
4) Kebijakan belanja daerah langsung juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.
5) Alokasi belanja tidak langsung, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
6) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Paser dalam kebijakan belanjanya pada periode tahun 2021-2026 akan memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap tahunnya.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada

pemenuhan belanja yang mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih kecil yang dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Disamping itu arah kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan peningkatan penyertaan modal BUMD.

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun
2) Penyertaan modal pada BUMD disertai upaya revitalisasi kelembagaan dan
3) peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD
4) Penyertaan modal daerah terutama dari dana yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam batu bara. Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah ketika hasil sumber daya alam semakin menurun.
5) Pada penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Paser merencanakan akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp.600.000.000.000,- (*enam ratus milyar rupiah*) sebagai alternatif sumber pembiayaan APBD dalam rangka untuk mendukung percepatan peningkatan infrastruktur jalan, sehingga hal ini dapat mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, baik wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan. Pinjaman daerah tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022.
6) Sehubungan dengan kebijakan melakukan pinjaman daerah seperti pada poin 5 di atas, maka mulai tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Paser akan melakukan kebijakan dalam pengeluaran pembiayaan daerah berupa pengembalian pinjaman daerah berupa angsuran pokok beserta bunganya.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya.

Tabel III.14.

Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**568,061,122,987.26**	**587,723,897,402.89**	**602,449,581,805.98**	**594,321,913,700.00**	**651,343,403,987.00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	360,051,399,276.65	353,894,087,194.33	349,274,153,798.98	312,240,648,129.00	318,927,976,299.00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,747,500,000.00	7,277,500,000.00	11,324,288,000.00	10,243,272,798.00	10,667,072,396.00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	3,129,547,747.00	3,090,000,000.00	3,488,517,000.00	3,665,020,100.00
5	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi /Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	204,022,067,541.61	221,157,919,966.56	229,792,668,567.00	260,429,748,400.00	246,883,799,070.00
6	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1,045,793,169.00	1,273,542,995.00	1,290,338,390.00	1,920,867,373.00	1,232,733,988.00
7	Belanja Tidak Terduga	194,363,000.00	991,299,500.00	7,678,133,050.00	5,998,860,000.00	69,966,802,134.00
B	**Belanja Langsung**	**24,664,320,469.03**	**24,276,613,416.33**	**21,570,726,276.00**	**19,764,615,272.00**	**56,752,346,834.00**
1	Belanja Honorarium PNS Tenaga Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	4,748,615,815.00	2,190,988,437.61	2,666,096,191.00	2,596,415,113.00	18,763,500,560.00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,538,772,000.00	424,093,750.00	1,113,282,000.00	670,000,000.00	502,880,000.00
3	Belanja Jasa Kantor (Tagihan Bulanan Kntr seperti Listrik, Telepon dsb)	18,376,932,654.03	21,661,531,228.72	17,791,348,085.00	16,498,200,159.00	37,380,781,774.00
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada Kontrak jangka Panjang)	-	-	-	-	105,184,500.00
C.	**Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Pembayaran Pokok Hutang					
	Total Belanja	**592,725,443,456.29**	**612,000,510,819.22**	**624,020,308,081.98**	**614,086,528,972.00**	**708,095,750,821.00**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Tabel III.15.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Paser 2022-2026 (Rp)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)					Rata - Rata
		2022	2023	2024	2025	2026	
A.	**Belanja Operasi**						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	726.619.536.447,00	730.252.634.129,00	733.903.897.300,00	737.573.416.786,00	741.261.283.870,00	0,01
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	24.003.997.115,00	24.484.077.057,30	24.973.758.598,45	25.473.233.770,41	25.982.698.445,82	0,08
3	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.120.951.442,00	3.889.395.562,00	4.083.865.340,00	4.288.058.607,00	4.424.383.783,00	0,08
4	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	284.656.702.282,00	249.206.959.320,00	253.326.167.809,00	257.662.151.093,00	262.271.328.683,00	0,08
5	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	57.424.484.425,00	58.572.974.113,50	59.744.433.595,77	60.939.322.267,69	62.158.108.713,04	0,08
6	Belanja Tidak Terduga	7.135.453.554,00	7.242.485.357,00	7.351.122.638,00	7.461.389.477,00	7.573.310.319,00	6
7	Belanja Honorarium PNS Tenaga Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	358.743.754.323,00	365.918.629.409,46	373.237.001.997,65	380.701.742.037,60	388.315.776.878,35	0,08
8	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor seperti Listrik, Telepon dsb)	17.439.085.663,00	17.787.867.376,26	18.143.624.723,79	18.506.497.218,26	18.876.627.162,63	0,08

Sumber: *Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2020*

Tabel III.16.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser

No.	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**808.630.186.309,16**	**782.274.252.392,75**	**856.705.754.092,96**	**926.153.398.762,00**	**970,165,546,645.00**
1	Belanja Pegawai	619.753.605.186,00	540.406.243.080,00	595.334.835.915,74	610.380.921.902,00	580,570,079,682.00
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	8.063.223.252,00	23.607.419.566,00	28.877.948.400,22	41.593.776.058,00	69,079,845,659.00
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	2.975.000.000,00	-
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kab./Kota dan Pemerintah Desa	-	2.995.426.747,20	2.177.206.500,00	4.139.353.500,00	3,665,020,100.00
7	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi /Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	180.618.994.871,16	214.273.863.499,55	222.637.630.227,00	261.065.487.302,00	246,883,799,070.00
8	Belanja Belanja Tak Terduga	194.363.000,00	991.299.500,00	7.678.133.050,00	5.998.860.000,00	69,966,802,134.00
B	**Belanja Langsung**	**708.279.016.664,48**	**914.257.675.226,88**	**1.045.767.438.485,69**	**1.578.136.893.204,41**	**1,334,653,954,388.78**
1	Pegawai	123.927.833.559,50	130.760.754.059,80	145.871.022.750,00	161.831.124.350,00	164,850,992,960.00
2	Barang Jasa	258.828.899.046,98	325.692.864.041,08	369.881.126.808,83	544.912.071.796,09	598,472,440,672.31
3	Modal	325.522.284.058,00	457.804.057.126,00	530.015.288.926,86	871.393.697.058,32	571,330,520,756.47
	Total Belanja	**1.516.909.202.973,64**	**1.696.531.927.619,63**	**1.902.473.192.578,65**	**2.504.290.291.966,41**	**2,304,819,501,033.78**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Tabel III.17.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026

No.	Belanja	Proyeksi Belanja (Rp)				
		2022	2023	2024	2025	2026
5	**Belanja**	**3.355.426.520.310,00**	**2.588.402.875.594,00**	**2.621.152.744.385,00**	**2.654.453.548.573,00**	**2.688.943.056.749,00**
5,1	**Belanja Operasi**	1.613.763.457.178,00	1.657.906.363.911,00	1.673.040.723.661,00	1.686.988.663.806,00	1.699.536.912.065,00
5.1.1	Belanja Pegawai	726.619.536.447,00	730.252.634.129,00	733.903.897.300,00	737.573.416.786,00	741.261.283.870,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	864.188.700.649,00	904.124.629.198,00	915.019.498.263,00	924.694.985.719,00	932.937.360.362,00
5.1..5	Belanja Hibah	22.955.220.082,00	23.529.100.584,00	24.117.328.098,00	24.720.261.301,00	25.338.267.833,00
5,2	**Belanja Modal**	**1.445.749.955.854,00**	**670.157.671.444,00**	**683.350.864.937,00**	**698.053.285.590,00**	**715.137.121.899,00**
5,3	**Belanja Belanja Tak Terduga**	**7.135.453.554,00**	**7.242.485.357,00**	**7.351.122.638,00**	**7.461.389.477,00**	**7.573.310.319,00**
5,4	**Belanja Transfer**	**288.777.653.724,00**	**253.096.354.882,00**	**257.410.033.149,00**	**261.950.209.700,00**	**266.695.712.466,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil ke Pemerintahan Desa	4.120.951.442,00	3.889.395.562,00	4.083.865.340,00	4.288.058.607,00	4.424.383.783,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Desa	284.656.702.282,00	249.206.959.320,00	253.326.167.809,00	257.662.151.093,00	262.271.328.683,00
	Jumlah Belanja	3.355.426.520.310,00	2.588.402.875.594,00	2.621.152.744.385,00	2.654.453.548.573,00	2.688.943.056.749,00
	Surplus/defisit	(1.143.364.928.633,00)	(356.097.586.609,00)	(368.189.949.543,00)	(380.458.753.458,00)	(393.160.318.057,00)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2020

Tabel III.18.
Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Paser 2016 – 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan	1.835.941.008.666,54	1.533.488.349.143,54	2.059.224.450.206,35	2.648.283.348.438,05	2,404,053,511,907.13
	dikurangi					
2	Belanja Daerah	1.516.909.202.973,64	1.696.531.927.619,63	1.902.473.192.578,65	2.504.290.291.966,41	2,304,819,501,033.78
A	Defisit Riil Daerah	319.031.805.692,90	(163.043.578.476,09)	156.751.257.627,70	143.993.056.471,64	99,234,010,873.35
	ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
1	Sisa Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya	26.861.677.932,97	335.563.483.625,88	164.584.905.149,79	318.336.162.777,49	442,373,646,400.77
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	4,164,142,133.44
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah				-	-
B	Total Realisasi PenerimaanPembiayaan	26.861.677.932,97	335.563.483.625,88	164.584.905.149,79	318.336.162.777,49	446,537,788,534.21
(A-B)	Sisa Lebih Pembiayaan TahunBerkenaan	345.893.483.625,87	172.519.905.149,79	321.336.162.777,49	462.329.219.249,13	-347,303,777,660.86

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

3.2.3. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengolah data realisasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel III.19.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Paser 2017–2020

Uraian	2017		2018		2019		2020	
	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
Jumlah SILPA	164,584,905,149.79	100	318,336,162,777.00	100	442,373,646,400.77	100	528,442,789,175.12	
Pelampauan Penerimaan PAD	2,827,759,503.70	1.72	2,051,321,753.64	0.64	-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana								
Perimbangan	-120,307,881,821.00	-73.1	82,432,306,441.63	25.89	-		-	
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain								
Pendapatan yang Sah	15,835,230,511.12	9.62	-545,055,514.13	-0.17	-		-	
lainnya	-		-		-		-	
Kewajiban Kepada pihak ke tiga sampai								
dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-	

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperolehgambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Paser dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2022-2026 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode 2016–2021 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2021-2025. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

a. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
b. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RestribusiDaerah;
c. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan restribusi; Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.

Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadikecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:

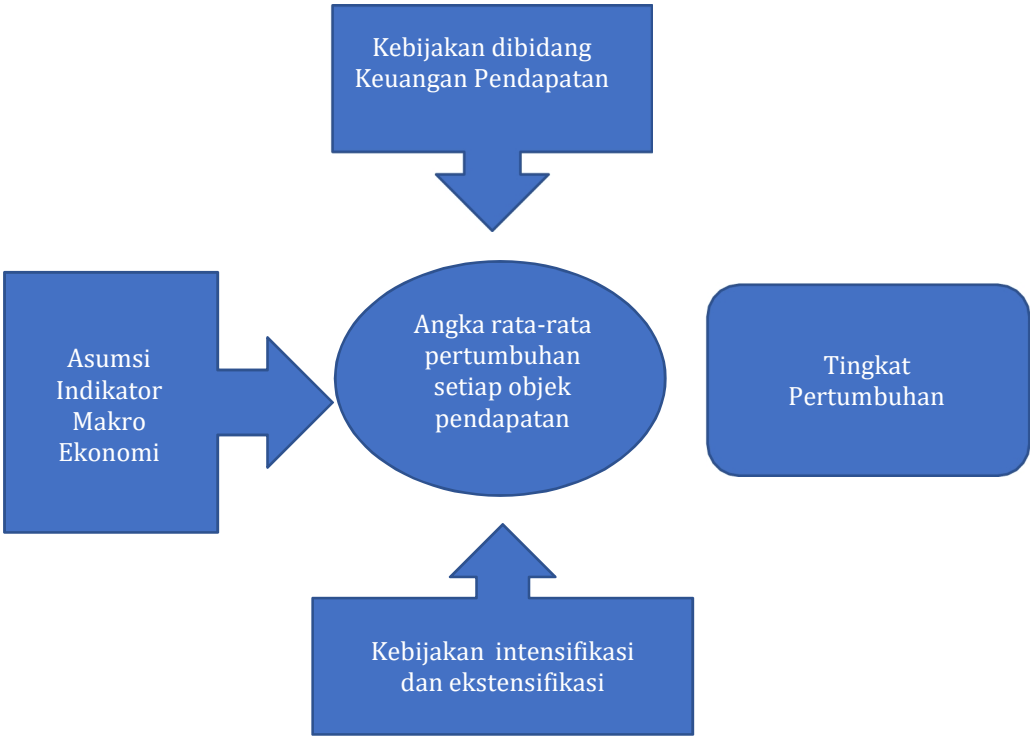
a. Peningkatan DAU cukup kecil karena adanya pengalihan kewenangan terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mempertimbangkan pendapatan negara;

b. Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.

Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan, Pemerintah Kabupaten Paser, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun. Guna mendukung arah kebijakan pengelolaan keuangan dengan tetap mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2021-2026 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut:

1. Belanja Rutin diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur;
2. Lebih berorientasi pada belanja Modal-Produktif;
3. Pemanfaatan pembiayaan pembangunan melalui kemitraan;
4. Memaksimalkan Integrasi potensi unggulan (pertaniaan arti luas);
5. Mensinergikan fokus pembangunan.

Untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar III.2.
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel III.20. berikut:

Tabel III.20.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser 2022-2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	**2.212.061.591.677,00**	**2.232.305.288.985,00**	**2.252.962.794.842,00**	**2.273.994.795.115,00**	**2.295.782.738.692,00**
Pendapatan Asli Daerah	**169.041.615.606,00**	**171.113.810.353,00**	**173.227.040.742,00**	**175.382.278.817,00**	**177.580.520.652,00**
Pajak Daerah	44.142.500.000,00	45.246.062.500,00	46.377.214.062,00	47.536.644.414,00	48.725.060.524,00
Retribusi Daerah	10.706.833.500,00	10.974.504.337,00	11.248.866.946,00	11.530.088.620,00	11.818.340.835,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	6.662.500.000,00	6.829.062.500,00	6.999.789.063,00	7.174.783.789,00
Lain-lain PAD Yang Sah	107.692.282.106,00	108.230.743.516,00	108.771.897.234,00	109.315.756.720,00	109.862.335.504,00
Pendapatan Transfer	**1.989.755.443.491,00**	**2.007.403.784.720,00**	**2.025.274.590.954,00**	**2.043.408.825.244,00**	**2.062.178.345.883,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.365.169.991.186,00**	**1.375.420.845.987,00**	**1.385.802.916.449,00**	**1.396.355.994.014,00**	**1.407.450.749.762,00**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH)	565.601.275.881,00	568.429.282.261,00	571.271.428.672,00	574.127.785.816,00	576.998.424.745,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	378.176.278.020,00	378.629.012.430,00	380.522.157.492,00	382.424.768.280,00	384.336.892.121,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	259.059.622.760,00	261.650.218.987,00	264.266.721.177,00	266.909.388.389,00	269.578.482.273,00
Dana Insentif Daerah (DID)	34.613.565.525,00	35.132.769.008,00	36.189.352.358,00	37.003.612.786,00	37.928.703.105,00
Dana Desa (DD)	127.719.249.000,00	131.579.563.301,00	133.553.256.750,00	135.890.438.743,00	138.608.247.518,00
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	**624.585.452.305,00**	**631.982.938.733,00**	**639.471.674.505,00**	**647.052.831.230,00**	**654.727.596.121,00**
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	230.326.381.145,00	233.781.276.862,00	237.287.996.015,00	240.847.315.955,00	244.460.025.694,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	394.259.071.160,00	398.201.661.871,00	402.183.678.490,00	406.205.515.275,00	410.267.570.427,00

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**53.264.532.580,00**	**53.787.693.912,00**	**54.461.163.146,00**	**55.203.691.054,00**	**56.023.872.157,00**
Pendapatan Hibah	4.000.000.000,00	4.400.000.000,00	4.950.000.000,00	5.568.750.000,00	6.264.843.750,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	49.264.532.580,00	49.387.693.912,00	49.511.163.146,00	49.634.941.054,00	49.759.028.407,00
BELANJA	**3.355.426.520.310,00**	**2.588.402.875.594,00**	**2.621.152.744.385,00**	**2.654.453.548.573,00**	**2.688.943.056.749,00**
Belanja Operasi	**1.613.763.457.178,00**	**1.657.906.363.911,00**	**1.673.040.723.661,00**	**1.686.988.663.806,00**	**1.699.536.912.065,00**
Belanja Pegawai	726.619.536.447,00	730.252.634.129,00	733.903.897.300,00	737.573.416.786,00	741.261.283.870,00
Belanja Barang dan Jasa	864.188.700.649,00	904.124.629.198,00	915.019.498.263,00	924.694.985.719,00	932.937.360.362,00
Belanja Hibah	22.955.220.082,00	23.529.100.584,00	24.117.328.098,00	24.720.261.301,00	25.338.267.833,00
Belanja Modal	**1.445.749.955.854,00**	**670.157.671.444,00**	**683.350.864.937,00**	**698.053.285.590,00**	**715.137.121.899,00**
Belanja Tidak Terduga	**7.135.453.554,00**	**7.242.485.357,00**	**7.351.122.638,00**	**7.461.389.477,00**	**7.573.310.319,00**
Belanja Transfer	**288.777.653.724,00**	**253.096.354.882,00**	**257.410.033.149,00**	**261.950.209.700,00**	**266.695.712.466,00**
Belanja Bagi Hasil ke Pemerintahan Desa	4.120.951.442,00	3.889.395.562,00	4.083.865.340,00	4.288.058.607,00	4.424.383.783,00
Belanja Bantuan Keuangan Desa	284.656.702.282,00	249.206.959.320,00	253.326.167.809,00	257.662.151.093,00	262.271.328.683,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.143.364.928.633,00)**	**(356.097.586.609,00)**	**(368.189.949.543,00)**	**(380.458.753.458,00)**	**(393.160.318.057,00)**
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	**1.154.864.928.633,00**	**557.639.253.276,00**	**560.427.449.543,00**	**563.229.586.791,00**	**566.045.734.724,00**
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	554.864.928.633,00	557.639.253.276,00	560.427.449.543,00	563.229.586.791,00	566.045.734.724,00
Pinjaman Daerah	600.000.000.000,00	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**11.500.000.000,00**	**201.541.666.667,00**	**192.237.500.000,00**	**182.770.833.333,00**	**172.885.416.667,00**
Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
Pengembalian Pinjaman Daerah	-	189.541.666.667,00	179.737.500.000,00	169.770.833.333,00	159.885.416.667,00
Pembiayaan Netto	**1.143.364.928.633,00**	**356.097.586.609,00**	**368.189.949.543,00**	**380.458.753.458,00**	**393.160.318.057,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	-
TOTAL APBD	**3.366.926.520.310,00**	**2.789.944.542.261,00**	**2.813.390.244.385,00**	**2.837.224.381.906,00**	**2.861.828.473.416,00**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan keberbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
c. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
d. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Paser telah memenuhi Belanja Wajib (*mandatory spending)* anggaran Pendidikan sebesar 20%, Kesehatan sebesar 10%, Kewajiban Daerah (Utang) rata-rata sebesar 6%, Dana Transfer rata-rata sebesar 10% dan Belanja Pegawai rata-rata sebesar 14%, serta belanja fungsi pengawasan sebesar 0,3% dan belanja pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,3%.

Berikut kami sampaikan Kapasitas Riil Keuangan Daerah dan Proyeksi Belanja Wajib (*mandatory spending)* Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Paser.

Tabel III.21.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Paser

NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	2.212.061.591.677,00	2.232.305.288.985,00	2.252.962.794.842,00	2.273.994.795.115,00	2.295.782.738.692,00
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1.143.364.928.633,00	356.097.586.609,00	368.189.949.543,00	380.458.753.458,00	393.160.318.057,00
	Total Penerimaan	3.355.426.520.310,00	2.588.402.875.594,00	2.621.152.744.385,00	2.654.453.548.573,00	2.688.943.056.749,00
	Dikurangi :					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.034.231.458.811,00	1.002.988.694.033,00	1.011.347.393.207,00	1.019.955.829.180,00	1.028.870.880.386,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.321.195.061.499,00	1.585.414.181.561,00	1.609.805.351.178,00	1.634.497.719.393,00	1.660.072.176.363,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

Tabel III.22.

Proyeksi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Tahun 2022 - 2026 Kabupaten Paser

NO	BELANJA WAJIB	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDIDIKAN	554.498.117.240,10	560.196.658.230,00	584.741.185.430,19	611.018.962.395,83	632.775.280.184,26
2	KESEHATAN	356.445.789.342,00	378.388.913.733,00	388.588.335.158,00	399.151.554.163,00	410.200.976.591,00
3	KEWAJIBAN DAERAH (UTANG)	11.500.000.000,00	201.541.666.667,00	192.237.500.000,00	182.770.833.333,00	172.885.416.667,00
4	DANA TRANSFER	288.777.653.724,00	253.096.354.882,00	257.410.033.149,00	261.950.209.700,00	266.695.712.466,00
5	LAINNYA (BELANJA PEGAWAI)	429.423.381.940,00	422.205.071.977,66	399.424.378.017,49	374.301.148.088,91	353.442.361.359,19

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

BAB IV

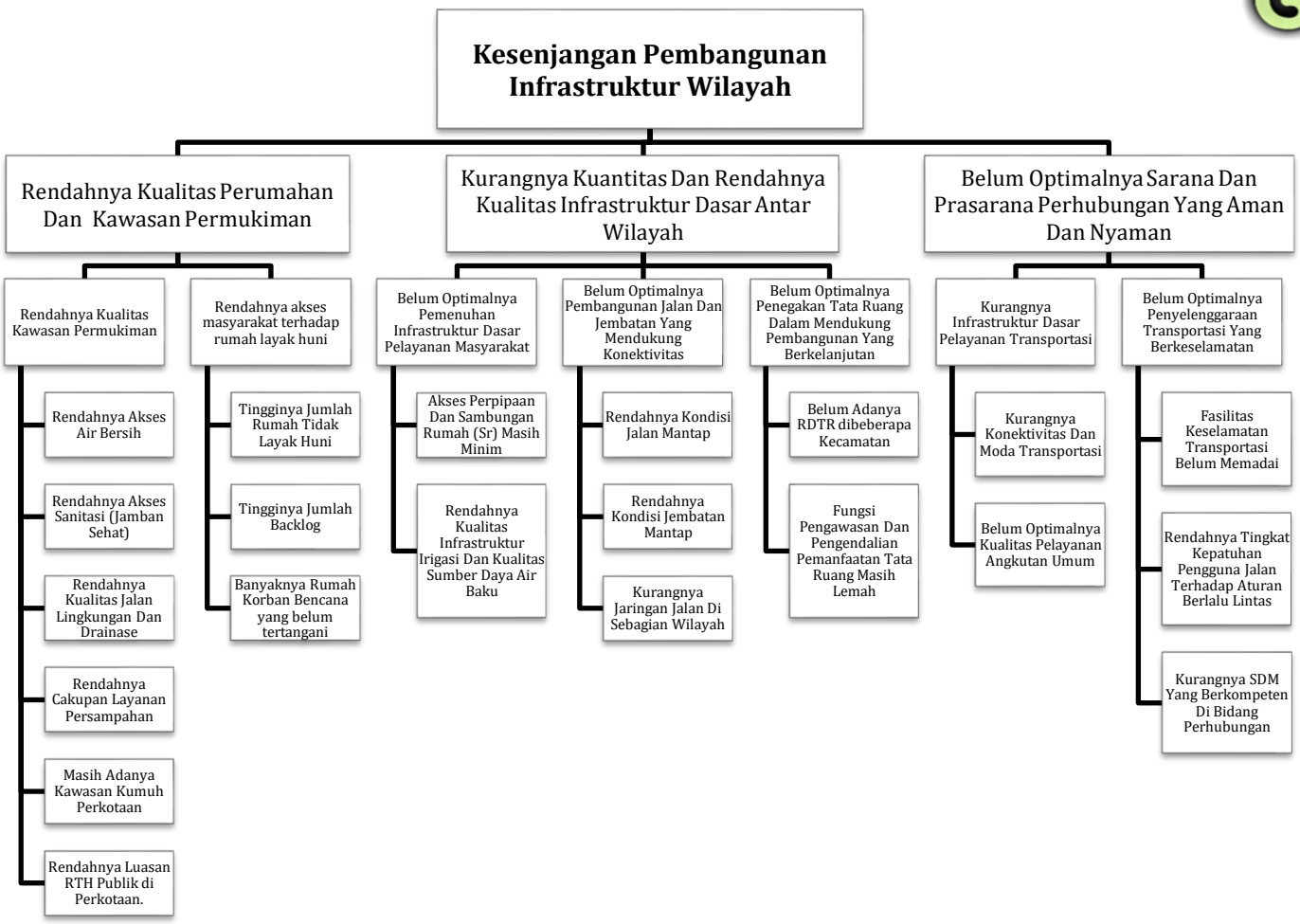
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Bagian ini menyajikan butir-butir penting isu strategis tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bagian ini mendiskusikan 2 aspek penting yakni permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan pembagunan daerah Kabupaten Paser disajikan dalam 4 kelompok permasalahan yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan, serta permasalahan ekonomi. Bagian selanjutnya mendiskusikan isu strategis eksternal baik itu nasional maupun internasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kabupaten Paser baik sebagai peluang maupun ancaman.

4.1.1. Analisis Permasalahan Infrastruktur

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Paser masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah ke depan. Hal ini didasari pada analisis tingkat ketimpangan pembangunan infratruktur antar wilayah dengan menggunakan metode Indeks Konektivitas. Hasil perhitungan indeks konektivitas menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antar wilayah kecamatan (lihat II.50, II.55). Ketimpangan pembangunan infrastruktur teridentifikasi disebabkan karena tidak merata dan rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar antar wilayah, dan belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman. Permasalahan ketimpangan infrastruktur tersebut digambarkan secara bagan dalam gambar berikut.



Sumber: Data Diolah, 2020

Gambar IV.1.
Diagram Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

1. Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Saat ini permasalahan yang dihadapi Kabupaten Paser adalah masih rendahnya kualitas kawasan permukiman yang dilihat dari masih kurangnya infrastruktur yang mendukung kawasan permukiman (sanitasi, jalan lingkungan, persampahan, kawasan kumuh dan RTH) serta kurangnya kualitas perumahan yang ditandai dengan masih tingginya jumlah backlog dan rumah tidak layak huni.

Rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang memiliki persyaratan kesehatan dalam pembudayaan hidup bersih yang bertujuan mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan lainnya yang berbahaya melalui pemutusan mata rantai kuman dari sumbernya dan pengendalian lingkungan. Berdasarkan data yang disajikan dalam BAB II dapat dilihat bahwa akses terhadap sanitasi masih relatif rendah yaitu sebesar 67,13% (lihat tabel II.69). Rendahnya akses sanitasi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki sarana jamban yang layak dan memenuhi standar kesehatan

terutama pada daerah pedesaan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat memiliki rumah tinggal dengan sanitasi layak.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Paser belum optimal, dimana persentase sampah yang terkelola Tahun 2020 baru mencapai 61,67% (Tabel II.71). Kurang optimalnya pengelolaan sampah disebabkan karena kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat untuk membuang sampah.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Paser, luasan permukiman kumuh sebesar 224,52 Ha yang tersebar pada 10 (Sepuluh) Kawasan Perkotaan di Kabupaten Paser (Lihat Tabel II.74). Pada umumnya permasalahan kawasan-kawasan kumuh di perkotaan Tana Paser tidak tersedia sarana sanitasi yang memadai, kualitas jalan lingkungan dan drainase yang kurang baik dan jarak antar rumah yang sangat rapat sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut.

Rumah merupakan salah satu hak dasar masyarakat, oleh karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkunganhidup yang baik dan sehat. Saat ini perumahan di Kabupaten Paser menghadapi tantangan yang cukup berat, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka backlog perumahan dan tingginya angka jumlah rumah tidak layak huni (Lihat Tabel II.75).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan upaya untuk menjaga, menyeimbangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Berdasarkan data yang disajikan dalam BAB II, luasan RTH Publik baru mencapai 335.206 m^2 (lihat tabel II.78). Luasan tersebut tentunya masih belum dapat memenuhi proporsi RTH Publik minimal sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Untuk memenuhi porsi tersebut perlu upaya Pemerintah Kabupaten Paser untuk meningkatkan luasan RTH.

2. Kurangnya Kuantitas dan Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar merupakan salah satu prioritas yang bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakat seperti perumahan dan permukiman, sumberdaya air, penyediaan air baku untuk air bersih, jaringan perpipaan air bersih untuk air minum dan peningkatan pendapatan dalam Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan produktivitas irigasi.

Akses perpipaan dan sambungan rumah (SR) untuk air bersih yang dikelola oleh PDAM hingga saat ini masih minim, sementara itu kualitas air tanah mulai mengalami pencemaran. Secara umum jaringan irigasi yang tersedia juga masih relatif rendah (lihat tabel II.61).

Saat ini akses air bersih kabupaten Paser masih tergolong rendah (Lihat tabel II.65). Masih rendahnya cakupan layanan air bersih ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya masih banyaknya daerah yang tidak memiliki sumber air baku yang layak, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana air

bersih, pengelolaan yang kurang efektif dan efisien dimana terdapat infrastruktur SPAM yang sudah dibangun tetapi belum dapat dikelola dengan baik karena tidak adanya biaya operasional dan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh lembaga pengelola.

Pada aspek infrastruktur jalan, masih teridentifikasi kurangnya jumlah jaringan jalan maupun jembatan dan rendahnya kualitas jalan maupun jembatan di berbagai kecamatan (Tabel II.56 sampai 59). Kondisi Jalan Kabupaten Paser saat ini secara keseluruhan dikatagorikan tidak mantap, karena kondisi jalan rusak masih jauh lebih besar dari pada kondisi jalan baik. Selain jalan kondisi jembatan juga masih banyak dikeluhkan warga masyarakat di berbagai wilayah.

Pada aspek tata ruang penegakan tata ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan belum optimal (tabel II.159 dan II.160). Belum optimalnya kesesuaian/ketaatan terhadap aturan tata ruang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebabkan masih kurangnya ketersediaan informasi Rencana detail tata ruang di beberapa kecamatan dan masih lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Paser.

3. Belum Optimalnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Aman dan Nyaman

Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Permasalahan transportasi yang dihadapi saat ini sangat beragam, sehingga perlu dipengaruhi dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Diantaranya adalah belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni kurangnya inftrastruktur pelayanan dasar dan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan.

Pertama, Kurangnya Infrastruktur dasar pelayanan transportasi. Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor transportasi selama ini yang terkait dengan infrastruktur dasar terutama adalah kurangnya konektivitas (tabel II.50) dan moda transportasi dan belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum (tabel II.110). Konektivitas moda transportasi yang belum baik berdampak langsung pada ongkostransportasi publik yang mahal. Konektivitas dan intermoda sampai saat ini masih terkendala oleh belum maksimalnya system feeder, khususnya pada pelayanan transportasi yang menjangkau antar wilayah dalam satu kecamatan dan transportasi antar kecamatan dalam satu kabupaten. Keterbatasan itu mencakup sarana dan prasarana yang belum tersedia disebagian wilayah Kabupaten Paser (tabel II.111).

Kualitas pelayanan angkutan umum menjadi penyebab selanjutnya masih belum terpenuhinya sarana dan prasaran perhubungan. Saat ini kondisi sarana dan prasarana transportasi masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan,

yang tercermin dari kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang ada (tabel 112.). Akibatnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pertumbuhan kendaraan pribadi juga menimbulkankerentanan kaitannya dengan keamanan dan keselamatan transportasi, salah satunya sepeda motor yang menjadi bagian moda transportasi pribadi dengan pelayanan nyaman, fleksibel, cepat, namun dari aspek keselamatan cukup rendah.

Kedua, penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan belum baik berkaitan denagn 3 aspek yakni fasilitas keselamatan, kepatuhan pengguna jalan, ketersediaan SDM bidang perhubungan. (1). Fasilitas keselamatan transportasi belum memadai. Saat ini fungsi lembaga keselamatan moda transportasi ditangani oleh masing-masing unit kerja moda transportasi, padahal keselamatan transportasisaling berkaitan antar moda transportasi, dan juga terkait dengan unit Perangkat Daerah lain karena keselamatan transportasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. (2). Rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan berlalu lintas yang dapat dilihat dari masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan. Pelanggaran terhadap batas kapasitas maksimal kapal dan perjalanan yang dilakukan saat cuaca buruk adalah beberapa bentuk ketidak patuhan pengguna jalan. (3). Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang perhubungan. Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi.

Permasalahan pengembangan infrastruktur tersebut dapat disajikan kembali ringkasannya dalam tabel berikut.

Tabel IV.1
Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

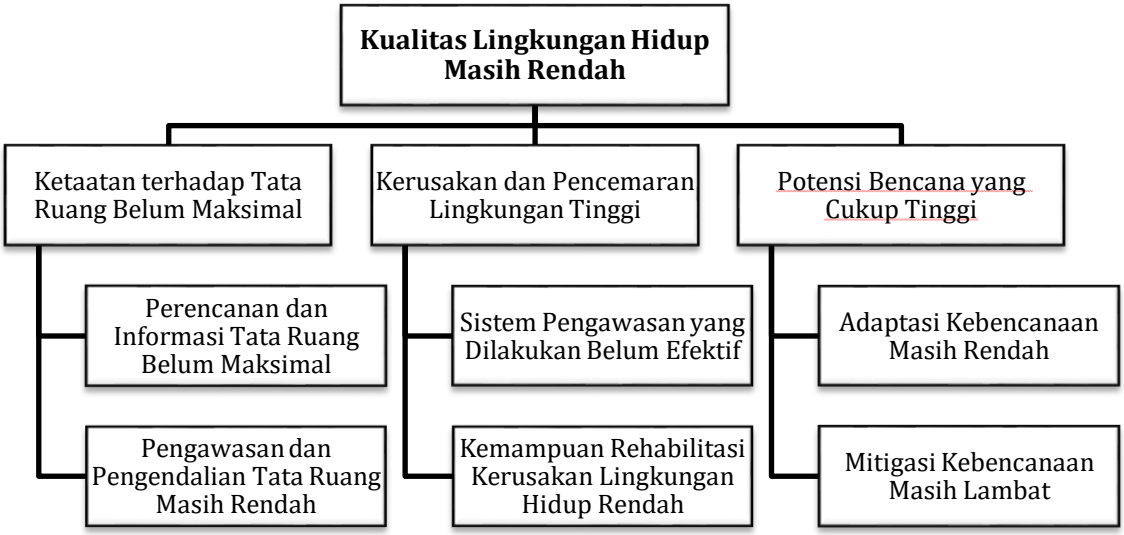
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	**Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Wilayah**	Rendahnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rendahnya Kualitas Kawasan Permukiman
			Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
		Kurangnya Kuantitas Dan Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar Antar Wilayah	Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pelayanan Masyarakat
			Belum Optimalnya Pembangunan Jalan Dan Jembatan Yang Mendukung Konektivitas
			Belum Optimalnya Penegakan Tata Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		Belum Optimalnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Aman Dan Nyaman	Kurangnya Infrastruktur Dasar Pelayanan Transportasi
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan Transportasi Yang Berkeselamatan

Sumber: Data Diolah, 2020

4.1.2. Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup

Berdasar analisis data pada BAB II, saat ini kualitas lingkungan hidup Kabupaten Paser berada pada angka 71,17, di bawah angka provinsi Kaltim dan di atas angka nasional (lihat tabel II.100). Rendahnya kualitas lingkungan hidup itu teridentifikasi dari beberapa penyebab utama yakni ketaatan terhadap tataruang, kerusakan dan pencemaran, juga potensi bencana. Selanjutnya masing masing variable itu dipengruhi oleh berbagai variable berikutnya. Gambar berikut memetakan permasalahan lingkungan hidup di kabupaten Paser.



Sumber: Data Diolah, 2020

Gambar IV.2.
Diagram Permasalahan Lingkungan Hidup

1. **Ketaatan terhadap tata ruang belum maksimal**

Pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Paser masih terdapat permasalahan, baik dari aspek perencanaan, informasi, pemanfaatan hingga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Permasalahan penataan ruang berupa belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar sektor dalam produk rencana tata ruang tersebut diantaranya pada bidang infrastruktur seperti jalan, air bersih, jaringan irigasi, serta prasarana lainnya seperti jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik yang kerap kali belum termuat dalam Rencana

Struktur Ruang sebagai muatan dari produk Rencana Tata Ruang. Informasi terkait rencana tata ruang yang belum maksimal juga menjadi salah satu kendala dalam ketaatan terhadap tata ruang. Selain itu belum padunya rencana beberapa sektor untuk pengembangan permukiman dan perumahan, transmigrasi, pariwisata, perdagangan dan industri, perikanan dan pertanian serta kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang semestinya sudah harus terpadu dalam Rencana Pola Ruang pada sebuah produk Rencana Tata Ruang. Permasalahan lainnya yang saat ini belum terpenuhi adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dalam kawasan perkotaan. Hal tersebut juga nantinya akan berimplikasi pada kebijakan dalam ketentuan Peraturan Zonasi dan kebijakan Indikasi Program dan Kegiatan yang merupakan instrumen pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan pengendaliannya.

2. Kerusakan dan pencemaran lingkungan tinggi

Permasalahan lingkungan hidup yang masih rendah ditandai dengan penurunan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan (lihat tabel II.96). Pencemaran terhadap kualitas air terutama disebabkan pembuangan limbah dari aktifitas pertanian, perkebunan dan pertambangan maupun aktivitas rumah tangga. Data dalam BAB II menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luasan tutupan lahan di Kabupaten Paser, yang disebabkan oleh konversi peruntukan seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan dan lainnya.

3. Potensi bencana yang cukup tinggi

Kabupaten Paser memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim yang menyebabkan panjangnya musim kemarau atau musim penghujan. Untuk bencana alam banjir seringkali terjadi pada wilayah-wilayah dataran rendah dan sekitar sungai, hal ini juga dipicu karena adanya pendangkalan sungai sehingga kemampuan menampung air hujan semakin berkurang.

Musim hujan di Kabupaten Paser biasanya terjadi antara bulan September sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Nopember dan Desember. Curah hujan yang tinggi secara terus menerus dan meningkatnya ketinggian air laut menyebabkan air menjadi pasang dan terjadinya pertemuan air laut dan air daerah pegunungan dan berpotensi air menjadi tinggi dan menggenangi wilayah dataran rendah di Desa-desa dan Kecamatan. Bencana banjir dapat berdampak pada sarana dan prasarana di wilayah kecamatan-kecamatan terdampak antara lain rumah penduduk, gedung perkantoran, sekolah, sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta aktifitas perdagangan.

Berdasarkan data kebencanaan Kabupaten Paser tahun 2020, potensi bencana yang cukup tinggi adalah banjir yaitu sebanyak 22 kejadian. Bencana ini terjadi ketika puncak musim hujan.

Berdasar uraian yang telah dilakukan dapat diresume kembali permasalahan bidang lingkungan hidup sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.2.
Permasalahan Lingkungan Hidup

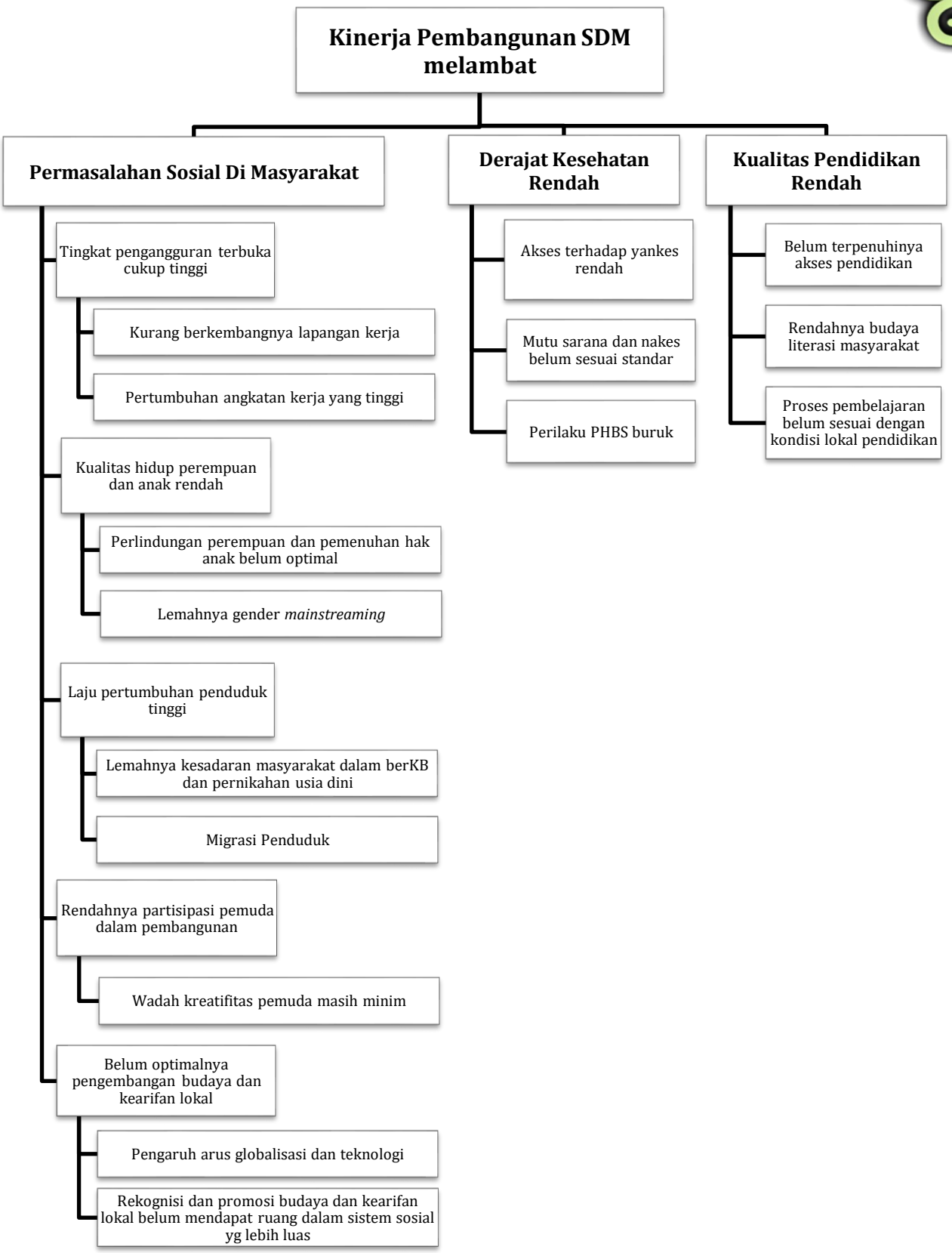
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	**Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah**	Ketaatan terhadap Tata Ruang Belum Maksimal	Perencanan dan Informasi Tata Ruang Belum Maksimal
			Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Masih Rendah
		Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Tinggi	Sistem Pengawasan yang Dilakukan Belum Efektif
			Kemampuan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup Rendah
		Potensi Bencana yang Cukup Tinggi	Adaptasi Kebencanaan Masih Rendah
			Mitigasi Kebencanaan Masih Lambat

Sumber: Data Diolah, 2020

4.1.3. Permasalahan Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kualitas pembangunan manusia hingga saat ini masih didekati dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasar angka IPM yang dicapai, hingga saat ini IPM kabupaten Paser masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPM propinsi Kalimanatan Timur, sebagai induknya. Jika dibandingkan dengan angka nasional angka yang dicapai kabupaten Paser masih sedikit lebih tinggi, namun demikian laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Nasional, sehingga tahun 2020 angka IPM Paser sama dengan angka nasional (Lihat Gambar II.17). Ini artinya hingga saat ini kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Paser bermasalah, masih lebih rendah dari propinsi dan kinerja peningkatannya melambat.

Relatif lambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kabupaten Paser dapat diidentifikasi dari 3 komponen pembentuk IPM itu yakni aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Hingga saat ini teridentifikasi bahwa kualitas pendidikan di Paser masih rendah, demikian juga dengan kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah. Pada komponen ke 3 yakni daya beli yang masih rendah pula yang dapat di identifikasi dari masih banyaknya permasalahan sosial dalam masyarakat. Secara lengkap permasalahan pengembangan sumber daya manusia di kabupaten Paser dapat dilihat dalam Gambar IV.3 berikut.



Sumber: Data Diolah, 2020

Gambar IV.3.

Diagram Permasalahan Pengembangan Sumberdaya Manusia

1. Rendahnya kualitas Pendidikan

Mengidentifikasi kinerja pendidikan berdasar konsep IPM dapat dilihat dari rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berdasar data yang disajikan dalam Bab II (Lihat tabel II.25), rata rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah di Paser lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Timur, namun demikian tingkat pertumbuhannya untuk rata rata lama sekolah lebih lambat tetapi untuk harapan lama sekolah lebih cepat. Relatif rendahnya kinerja pendidikan di Paser terkait dengan 3 aspek penting pendidikan yakni aksesibilitas pendidikan, budaya literasi masyarakat dan proses belajar mengajar.

Aksesibilitas pendidikan yang belum memadai berdampak pada angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni (lihat tabel II.34 dan II.31), juga angka putus sekolah (lihat tabel II.33). Aksesibilitas yang terbatas itu disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana belajar dan ketersediaan tenaga kependidikan yang tidak merata (lihat tabel II.35). Sampai saat ini kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana fisik pendidikan masih terbatas. Terbatasnya ruang kelas, gedung sekolah dalam kondisi rusak, serta sarana lainnya seperti toilet, perpustakaan dan media pembelajaran lainnya belum tersedia secara merata dan baik. Ketimpangan sarana pendidikan yang berada di kota dengan di daerah pedalaman misalnya sekolah di kota sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah di desa tidak memiliki fasilitas itu sehingga menjadi tertinggal. Faktor lain terkait dengan akses pendidikan adalah adalah kualitas tenaga pendidik yang masih rendah. Permasalahan berikutnya yang terjadi adalah rendahnya budaya literasi masyarakat. Budaya literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial.

Di samping kedua hal tersebut, rendahnya kualitas pendidikan berkaitan dengan proses pembelajaran yang belum sesuai dengan kondisi lokal. Beberapa kasus putus sekolah (lihat tabel II.33) terjadi di daerah pesisir atau pedalaman disebabkan karena siswa membantu orang tua dalam mencari nafkah sebagai nelayan atau petani yang disebabkan karena faktor ekonomi dan budaya lokal yang turun temurun. Kehadiran pendidikan non formal belum optimal dalam melayani masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan formal akibat masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal, adanya ketidakjelasan standar-standar penjaminan mutu pendidikan nonformal, ketidakjelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang belum profesional, kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal.

2. Rendahnya Kualitas Kesehatan

Komponen ke dua dari IPM adalah kualitas kesehatan yang diukur dari umur harapan hidup. Sampai dengan tahun 2020, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Paser 72,62 tahun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun yang sama yang sudah mencapai 74,33 tahun. Rendahnya umur harapan hidup itu didukung oleh masalah kesehatan lain yakni tingginya jumlah kematian ibu, kematian balita dan balita stunting (lihat tabel II.39 II.38; II.37). Teridentifikasi 3 faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat kabupaten Paser. Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang rendah, kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan perilaku masyarakat dalam berbudaya bersih dan sehat.

Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat dari persebaran sarana dan prasarana kesehatan. Dilihat dari persebarannya maka sarana dan prasarana kesehatan lebih banyak tersedia di kecamatan kecamatan yang pusat kota (lihat tabel II.43). Masalah ini masih ditambah dengan kendala transportasi yang menyebabkan ibu melahirkan atau pasien sakit terlambat untuk dilayani, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan lainnya. Masalah ketersediaan dan keterjangkauan sarana kesehatan ini menjadi isu penting di Paser. Meskipun jumlah sarana sudah ideal dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk namun persebaran yang tidak merata membuat askes masyarakat menjadi sulit.

Aspek kedua terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan memperhatikan standar ketenagaan Puskesmas, maka terdapat kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas, seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga lainnya (lihat tabel II.45). Jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai disebabkan karena sistem perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang belum optimal dan kewenangan pengadaan tenaga kesehatan yang dimiliki pemerintah pusat. Sementara untuk puskesmas maupun cakupannya dan posyandu telah cukup tersedia (lihat tabel II.42, II.41 dan II.46)

Aspek berikutnya adalah perilaku masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (lihat tabel II.45), akibatnya adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), double burden gizi masyarakat yakni munculnya kasus balita gizi kurang, balita stunting dan balita gizi lebih (lihat tabel II.40). Kekurangan gizi memicu rentannya individu untuk terserang berbagai penyakit menular, seperti diare, sedangkan peningkatan gizi lebih berkorelasi dengan meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, kanker dan Diabetes Mellitus. Faktor penting yang menyumbang pada kejadian gizi buruk adalah kemiskinan. Balita berstatus gizi buruk dan stunting umumnya akibat pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah.

Berbagai permasalahan bidang kesehatan itu tidak berdiri sendiri sendiri

melainkan saling berkaitan. Perilaku hidup sehat yang belum terbentuk bertemu dengan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan ditambah dengan kualitas tenaga kesehatan yang kurang memadai serta tidak merata, seluruhnya berkontribusi pada pelayanan kesehatan yang kurang baik. Akibatnya penyakit menular maupun tidak menular, gizi buruk dan kematian ibu dan balita masih terus terjadi dan bertambah.

3. Banyaknya Permasalahan Sosial di Masyarakat

Masalah sosial di masyarakat dapat diidentifikasi dari indikator rawan dan rentan sosial, mulai dari kemiskinan, anak terlantar sampai kekerasan dalam rumah tangga hingga kejahatan (keamanan). Meskipun penduduk miskin di Kabupaten Paser mengalami penurunan namun sampai saat ini persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur (lihat Gambar II.8). Begitu pula halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Paser dan indeks keparahan kemiskinan(Lihat Gambar II.11 dan Gambar II.14), Selain ketimpangan kemiskinan antara penduduk pedesaan dan perkotaan, juga terjadi ketimpangan antar penduduk miskin yang sehingga sejumlah penduduk miskin semakin sulit keluar dari garis kemiskinan. Sementara itu jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (lihat table II.83). Anak, balita dan lansiaterlantar, penyandang disabilitas, juga komunitas masyarakat adat terpencil dan korban bencana adalah permasalahan sosial yang masih teridentifikasi. Hingga tahun 2020 tercatat masih 9.133 penduduk dalam golongan ini.

Tingginya angka kemiskinan dan masalah masalah sosial ini muncul dari berbagai aspek dan kejadian yang saling terhubung dan mempengaruhi. Dalam kaitan dengan itu, di Paser teridentifikasi sejumlah hal yang menyebabkan munculnya masalah sosial itu, mulai dari kemiskinan, pertumbuhan penduduk, sampai pada sosial budaya. Pada sisi lain belum meratanya pelayanan publik, keterbatasan dalam mengakses pusat perekonomian akibat kondisi infrastruktur yang kurang memadai, belum optimalnya koordinasi dan sinergitas penanggulangan masalah sosial belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan data base untuk penduduk miskin maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial kurang valid sehingga yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program perlindungan sosial. Berikut diuraikan berbagai masalah yang menyumbang pada masih banyaknya permasalahan sosial di Kabupaten Paser.

a. Tingkat Pengangguaran Terbuka,

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Paser cenderung fluktuatif (lihat tabel II.85). Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh

terhadap daya saing dalam memasuki pasar kerja. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap pasar kerja maka akan berpotensi menambah jumlah pengangguran.

b. Ketimpangan Gender.

Aspek berikutnya dari permasalahan sosial ini adalah ketimpangan gender dan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak perempuan dan anak rendah. Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Kabupaten Paser lebih tinggi dari rata rata IDG Provinsi Kalimantan Timur namun demikian masih lebih rendah dari rata-rata nasional (lihat tabel II.89). Kesenjangan gender di bidang sumber daya manusia nampak dari masih rendahnya IPM Perempuan di Kabupaten Paser dibandingkan IPM laki-laki (Lihat Gambar II.22)

Dari aspek politik dan pemerintahan, proporsi perempuan di Kabupaten Paser yang duduk di parlemen dan yang bekerja sebagai tenaga profesional masih rendah (lihat tabel II.89). Dari aspek ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (lihat tabel II.90).

Kualitas hidup perempuan dan anak rendah akibat budaya patriarki yang secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan. Aspek lain yang menyebabkan kualitas hidup perempuan dan anak masih rendah adalah hambatan sosio-kultural yakni masih berkembangnya pandangan bahwa kodrat perempuan menjadi ibu rumah tangga. Akibat dari faktor faktor itu maka kedudukan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

c. Pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk Paser relatif tinggi (lihat tabel II.11). Pertumbuhan penduduk yang tinggi, jika tidak diikuti oleh pertumbuhan lapangan kerja yang setara akan menimbulkan pengangguran. Dampak dari pengangguran itu bisa bermacam macam masalah sosial.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Paser disebabkan karena faktor migrasi dan faktor fertilitas. Migrasi penduduk ke Kabupaten Paser terjadi karena posisi Kabupaten Paser yang strategis yakni berada di jalur perlintasan antar provinsi, daya tarik lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertambangan dan terbukanya banyak peluang usaha mikro kecil. Selain itu pertumbuhan penduduk ini juga dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi, akibat dari kurang berhasilnya program keluarga berencana

d. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan diakibatkan oleh kurangnya wadah berkreasi bagi generasi muda serta kurangnya kesempatan dalam mengembangkan potensi minat dan bakat (Lihat tabel II.124). Upaya peningkatan kualitas pemuda erat kaitannya dengan tersedianya infrastruktur

baik fisik maupun non fisik yang memfasilitasi kegiatan positif mereka. Sebagian besar pemuda adalah mereka yang sedang berada dalam tahap pencarian identitas sehingga mereka membutuhkan ruang untuk penyaluran eksistensi. Ketika ruang-ruang yang mendukung tujuan positif tersebut terbatas bahkan tidak ada, maka mereka akan mencari dan membuat ruang sendiri yang tidak bisa terkontrol dengan baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga, antara lain: terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat, belum optimalnya upaya pembibitan atlet, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan, serta rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (Lihat tabel II.125).

e. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal dan kearifan lokal.

Kabupaten Paser memiliki sejumlah budaya lokal baik berupa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat seperti bangunan peninggalan kesultanan Paser, kesenian tradisional dan bahasa lokal yakni Bahasa Paser (lihat tabel II.128). Di samping itu masyarakat Kabupaten Paser yang secara turun temurun terkenal dekat dengan lingkungan hutan juga memiliki kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia seperti adanya aturan-aturan konservasi yang bersifat tradisional sebagai bentuk pelestarian dalam pembukaan lahan yang masih berupa hutan sampai pada saat dilakukan pemanenan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kemudahan masyarakat mengakses budaya-budaya yang berasal dari luar sehingga budaya yang berasal dari luar sangat mudah masuk meresap dalam ke dalam kehidupan masyarakat. Modernisasi dalam masyarakat Paser memberikan akibat yaitu semakin terdegradasinya nilai-nilai kearifan lokal khususnya pada kegiatan konservasi. Modernisasi yang merupakan proses transformasi dalam segala bidang aspek-aspeknya yang dapat berarti pula proses pergeseran sikap dan mentalitas pada sebagian anggota masyarakat untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan masa kini.

Selain hal tersebut di atas kurang berkembangnya budaya lokal Paser disebabkan juga karena belum optimalnya akses masyarakat lokal rekognisi dan promosi budaya dan kearifan lokal dan minimnya kebijakan yang mendukung pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah seperti rendahnya frekuensi dan jumlah ruang promosi kebudayaan dan kesenian daerah, semakin berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah, belum optimalnya penguatan lembaga kebudayaan dan kesenian daerah, minimnya muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di sekolah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal.

f. Desa sebagai basis masyarakat belum mandiri

Desa merupakan unit pemerintahan terrendah yang memiliki hak dan kemampuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Di Paser hingga saat ini baru satu persen desa yang tergolong dalam ketegori mandiri (lihat tabel II.106), artinya desa desa di Paser belum cukup berdaya untuk meningkatkan kesehateraan masyarakatnya.

Permasalahan pengembangan sumber daya manusia di kabupaten Paser dapat diringkas kembali dalam tabel berikut.

Tabel IV.3.
Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	**Kinerja Pembangunan SDM melambat**	**Masih tingginya permasalahan sosial di masyarakat**	Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi
			Kualitas hidup perempuan dan anak rendah
			Laju pertumbuhan penduduk tinggi
			Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
			Belum optimalnya pengembangan budaya dan kearifan lokal
			Desa sebagai basis masyarakat belum mandiri
		Derajat Kesehatan Rendah	Akses terhadap yankes rendah
			Mutu sarana dan nakes belum sesuai standar
			Perilaku PHBS buruk
		Kualitas Pendidikan Rendah	Belum terpenuhinya akses pendidikan
			Rendahnya budaya literasi masyarakat
			Proses pembelajaran belum sesuai dengan kondisi lokal pendidikan

Sumber: Data Diolah, 2020

4.1.4. Analisis Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan menurut UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi,politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua

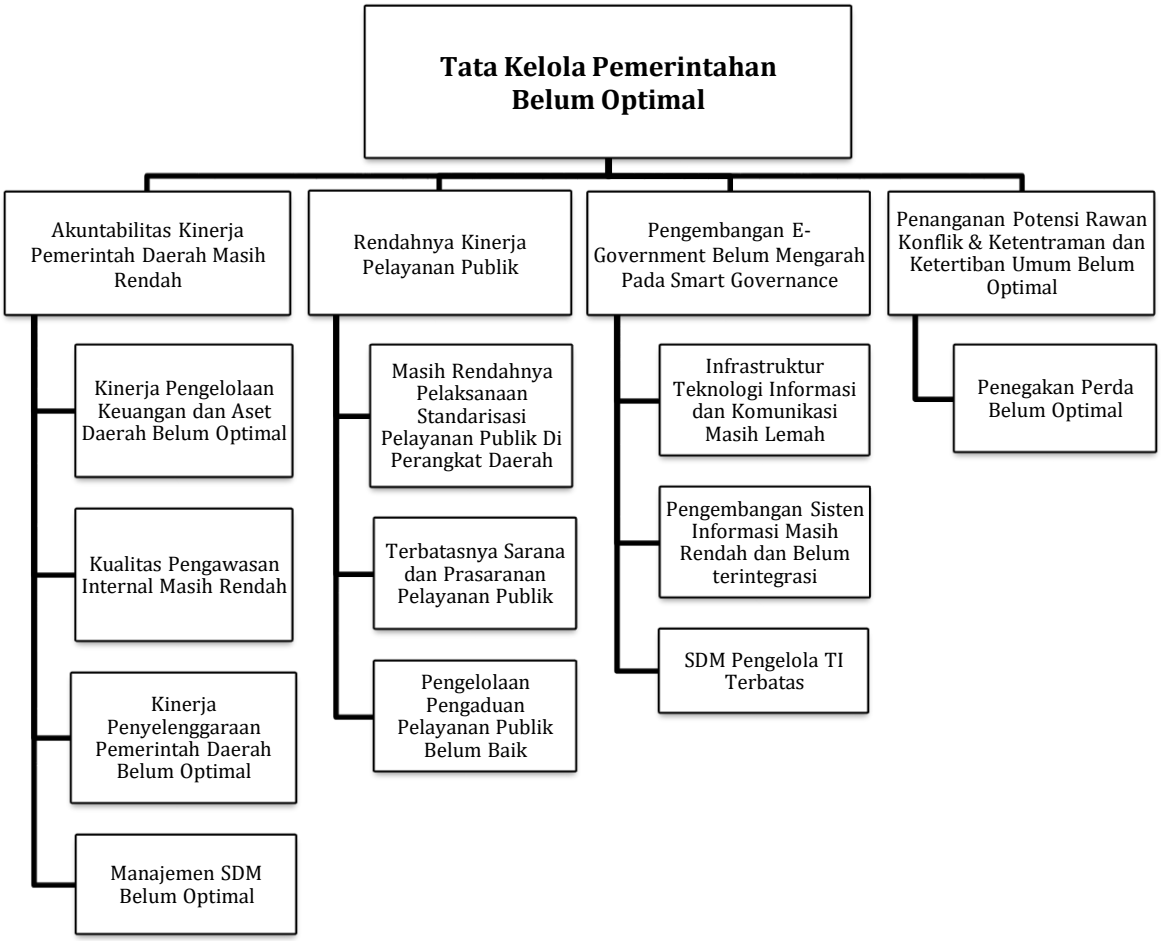
tingkat. Tata kelola pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan organisasi/ lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Dalam proses pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi artinya adanya keterbukaan dari pemerintah terkait berbagai kebijakan/ program/kegiatan yang telah, sedang danakan dilaksanakan kepada publik. Begitu pula data dan informasi kegiatan pemerintahan dapat diakses oleh publik. Partisipasi artinya masyarakat dilibatkan secara aktif baik dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan.Masyarakat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pembangunan daerah. Sedangkan akuntabilitas artinya pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan seluruh amanah yang diberikan publik dalam mengelola berbagai urusan publik denganmemberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip akuntabilitas ini dapat direpresentasikan dengan pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan urusan publk melalui laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Salah satu isu utama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi ini dilakukan sebagai respon sistematis dan komprehensif atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Indeks reformasi birokrasi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja tata kelola pemerintahan di daerah. Namun sampai tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) belum mengeluarkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Paser, karenanya Pemerintah Kabupaten Paser melalui inspektorat melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan data penilaian mandiri di Bab II terlihat bahwa nilai Indek Reformasi Birokrasi yang diperoleh Kabupaten Paser pada tahun 2020 masih rendah yaitu 55,81. Walaupun angka ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun 2019.

Dari hasil penilaian tersebut, apabila dicermati lebih detail pada seluruh komponen penilaian, maka terdapat beberapa aspek yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Diantaranya adalah pada komponen penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayananpublik, kapasitas dan akuntabilitas organisasi, serta pada aspek pemerintah yang bersihdan bebas KKN. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Paser belum optimal. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan permasalahan tersebut diantaranya kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah belum optimal, kualitas

pelayanan publik masih rendah, pelaksanaan e-government belum mengarah pada smart governance dan adanya potensi rawan konflik. Secara rincigambaran permasalahan tata kelola pemerintahan terangkum dalam diagram berikut.



Sumber: Data Diolah, 2020

Gambar IV.4.
Diagram Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih rendah

Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah direpresentasikan dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP) dan hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa penilaian evaluasi AKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2019 masih rendah yaitu 57,76 (Gambar II.39), walaupun pada tahun 2020, penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten paser mengalami peningkatan menjadi 58,14. Hal ini berbanding terbalik dari hasil opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2016-2020 selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari kedua penilaian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan yang sudah

baik belum dapat diimbangi dengan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah, sehingga terjadi perbedaan penilaian yang bertolak belakang diantara kedua aspek tersebut. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah belum optimal yaitu:

a. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belum Optimal

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah tentang APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Disamping itu setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan perhitungan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah pada bab II, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat kemajuan yang signifikan terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah, dimana secara akumulasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahun dan dengan tingkat efektifitas yang sangat baik. Hal ini juga ddidukung dengan tingkat efisiensi yang baik juga dalam hal realisasi belanja yang dilakukan oleh perangkat daerah. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah pada sektor kemandirian keuangan daerah, dimana ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari sektor selain PAD masih besar. Tingkat kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Paser pada Tahun 2020 masih sangat rendah yaitu 8,02 (Tabel II.151). Apabila disandingkan dengan tingkat efektifitas yang mendapatkan predikat sangat efektif, maka hal ini juga dapat diartikan bahwa penentuan besaran PAD yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Paser masih belum sesuai dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, terkait dengan manajemen pengelolaan aset daerah, berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, masih ditemukan kelemahan terhadap sistem pengelolaan aset daerah diantaranya adalah:

1. Pengelolaan belanja bantuan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten Paser belum sesuai ketentuan.
2. Aset lainnya yang rusak berat dan aset tidak ditemukan keberadaannya

masih belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Paser masih belum memadai.
4. Pemerintah Kabupaten Paser belum melakukan inventarisasi atas keberlanjutan konstruksi dalam pengerjaan.

Dari catatan tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kinerja pengelolaan aset daerah. Ketaatan terhadap regulasi yang mengatur tentang pengelolaan aset perlu ditingkatkan agar catatan pada opini terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat diminimalisir.

b. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum optimal

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, pemerintah pusat melakukan evaluasi dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah kepada publik.

Dari hasil penilaian sementara terhadap status dan peringkat kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Timur di Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan skor nilai 2,6945 dengan status tinggi (Gambar II.40). Akan tetapi secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Paser menempati peringkat ke 9 dari 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Hal ini bukan merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan, mengingat Kabupaten pecahan dari Kabupaten Paser, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih baik satu peringkat diatas Kabupaten Paser. Apabila dibandingkan pencapaian Tahun 2018, nilai skor EKPPD tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menceminkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerinatahan belum berjalan optimal, untuk nilai EKPPD tahun 2020 tidak tersedia data (NA).

Berdasarkan data yang tersaji dalam pada bab II (Tabel II.150), terlihat bahwa salah satu penyebab kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan optimal adalah kualitas perencanaan belum baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya inkonsistensi perencanaan baik program RPJMD ke dalam RKPD maupun program RPJMD ke dalam APBD. Begitu pula program dan

kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga, masih ditemukan juga ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, RENSTRA dan dokumen perjanjian kinerja hingga level terendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh unit kerja dibawahnya.

Faktor lainnya yang juga sangat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penataan kelembagaan organisasi daerah. Penataan perangkat daerah yang tepat dan sesuai fungsi akan menciptakan produktivitas dan efisiensi kerja yang baik. Masih adanya pembentukan perangkat daerah yang tidak didasarkan pada kebutuhan, kemampuan dan potensi di Kabupaten Paser, menggambarkan bahwa penataan kelembagaan organisasi di Kabupaten Paser masih lemah. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tidak berjalan optimal. Pembentukan perangkat daerah yang didasarkan pada keinginan daerah akan memberikan dampak bagi pembekakan organisasi dan beban daerah, sehingga akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor ketiga yang menjadi penyebab permasalahan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Paser belum optimal adalah pengelolaan arsip yang belum baik. Hasil laporan audit kearsipan eksternal menggambarkan bahwa pengelolaan arsip di kabupaten Paser masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil penilaian manajemen kearsipan pada tahun 2018 yang masih pada posisi 56% (kategori kurang) (Tabel II.131). Begitu pula perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku baru pada tahun 2020 mencapai 36%(Tabel II.130). Apabila pengelolaan arsip telah dilakukan secara baik, akan dapat mendorong kelancaran proses bisnis dalam suatu organisasi termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Kualitas Pengawasan Internal Masih Rendah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui pengawasan, tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan. Untuk itu, diperlukan pengawasan internal yang berkualitas untuk menjamin tercapainya kinerja yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran terhadap kualitas pengawasan internal dapat diketahui berdasarkan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Adapun hasil penilaian terhadap maturitas SPIP di Kabupaten Paser berada pada level 3 dengan status terdefinisi dan memperoleh penilaian maturitas SPIP sebesar 3,0375 terhadap 25 fokus penilaian. Dengan tingkat maturitas SPIP "terdefinisi" (Tabel II.148). Dengan tingkat maturitas tersebut, maka

karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser:

1. Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian atas sebagian besar kegiatan pokok organisasi.
2. Telah mengomunikasikan kebijakan dan prosedur atas sebagaian besar kegiatan pokok organisasi.
3. Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur secara memadai atas sebagaian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah dan mendokumentasikannya.
4. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prsedur pengendalian atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah secara berkala dan terdokumentasi.
5. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pelaksanaan sebagian besar kegiatan pokok yang didukung oleh sistem pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Pada tingkat ini berarti Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan praktik pengendalian intern atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah. Kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok tersebut belum didesain berdasarkan hasil penilaian risiko sesuai pedoman penilaian risiko yang ditetapkan oleh kepala daerah. Evaluasi berkala belum dilaksanakan secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

d. Manajemen SDM Belum Optimal

Profesionalitas atau profesionalisme aparatur merupakan isu sentral yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen aparatur, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang disampaikan baik secara langsung kepada instansi pemerintah daerah maupun yang melalui media sosial pada saat ini merupakan cerminan bahwa masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan kualitas SDM aparatur. Selain itu, profesionalitas atau profesionaliasme pegawai sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, pegawai yang profesional merupakan suatu kebutuhan dalam mendukung efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Hal ini mengandung makna bahwa SDM aparatur yang profesional merupakan impian dan harapan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur (IPA) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, IPA di Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan nilai 41,36 dengan kategori sangat rendah (Tabel II.154). Hal ini tentunya belum

menggambarkan hasil yang membanggakan apabila melihat keempat dimensi yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian, yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Dari keempat dimensi tersebut, dimensi kualifikasi masih sangat rendah.

Apabila dilihat dari dimensi kualifikasi, dengan nilai 11,64 (Tabel II.154) menggambarkan bahwa pemenuhan aparatur yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaannya dapat dikategorikan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya SDM aparatur yang memiliki kesesuaian dengan jabatan yang dipegang. Selain itu, karena persebaran pegawai yang belum merata untuk mengisi posisi-posisi yang ada di kecamatan-kecamatan mengakibatkan kurangnya jumlah pegawai yang berada di wilayah luar ibukota kabupaten. Kemudian apabila ditinjau dari sisi dimensi kompetensi, terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara pemenuhan standar kompetensi pegawai dengan jumlah pegawai yang ada. Maksudnya adalah pemerintah Kabupaten Paser belum mampu memberikan alokasi yang cukup untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya. Selain itu, dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang secara khusus dialokasikan untuk membiayai peningkatan kompetensi kepada aparatur, Pemerintah Kabupaten Paser belum dapat merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya nilai kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Kemudian pada dimensi selanjutnya yaitu dimensi kinerja, yang diukur dari penilaian prestasi kerja pegawai, nilai pada dimensi ini adalah 14,94 (Tabel II.154). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum prestasi kerja pegawai masih belum optimal. Pemenuhan terhadap penilaian kinerja aparatur masih berdasarkan pertimbangan formal semata dan belum sepenuhnya diukur berdasarkan kaidah-kaidah penilaian prestasi kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi riil yang terjadi.

Selanjutnya pada dimensi terkahir yaitu yang berkaitan dengan dimensi disiplin, mendapatkan nilai 4,99 (Tabel II.154). Penilaian ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat disiplin aparatur sudah baik, walaupun masih ditemukan adanya beberapa pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, sehingga harus diproses penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penilaian tersebut, dapat dikatakan bahwa proses manajemen terhadap aparatur sipil negara yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser belum berjalan seperti semestinya. Hal ini dapat dilihat dari penilaian keempat dimensi yang menjadi indikator dalam pengukuran IPA tersebut. Keseluruhan hasil penilaian terhadap keempat dimensi belum bisa memberikan hasil yang baik, bahkan cenderung sangat kurang. Hal ini perlu

menjadi perhatian, mengingat manajemen terhadap sumber daya manusia, khususnya SDM aparatur sipil negara kedepan tidak lagi dianggap sebagaiobyek pembangunan, akan tetapi merupakan subyek yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Harapan yang hendak dicapai dari pemenuhan profesionalitas atau profesionalisme aparatur yang baik adalah dengan aparatur yang semakin profesional, maka proses jalannya pemerintahan pun menjadi lebih baik, sehingga akan memberikan dampak yangbaik pula terhadap kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah.

2. Rendahnya Kualitas pelayanan publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat dan mempengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan.

Dari hasil penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah (Gambar II.18) menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Paser dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih rendahnya pelaksanaan standarisasi pelayanan publik di Perangkat Daerah, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan umum, dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum baik.

Rendahnya pelaksanaan standarisasi pelayanan publik di Perangkat Daerah ditandai dengan capaian penilaian IKM di beberapa perangkat daerah yang masih rendah (Tabel II.28) diantaranya di RSUD Panglima Sebaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Tanah Grogot, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser (UPT Pengujian Kendaraan Bermotor). Apabila dilihat dari hasil perhitungan di beberapa perangkat daerah tersebut, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu waktu pelayanan, kepastian biaya/tarif layanan, dan produk layanan. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan publik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser belum sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik yang telah ditetapkan. Sementara itu kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih terbatas juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Paser.

Hasil pengukuran IKM Perangkat Daerah di Kabupaten Paser, menunjukkan bahwa unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai maksimal terendah diantara

variabel penilaian pelayanan publik lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Unsur lain yang juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Paser belum berjalan dengan baik. Hasil penilaian IKM Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Paser menggambarkan unsur variabel ini menjadi aspek yang juga perlu mendapat perhatian, karena memperoleh nilai minimum terendah kedua setelah unsur waktu pelayanan yaitu 2,192 (Tabel II.29). Adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik akan dapat mengetahui keluhan atau komplain masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Pengembangan E-Government Belum Mengarah pada Smart Governance

Smart governance merupakan salah satu unsur pembentuk smart city. Pada era keterbukaan informasi dan semakin majunya arus perkembangan teknologi, terutama pada sektor tekonologi informasi mengharuskan lembaga pemerintah untuk turut serta meningkatkan kemampuan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pada era globalisasi saat ini kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dukungan berupa teknologi informasi sangat dibutuhkan di era serba otomatis saat ini terutama dalam mengembangkan sistem informasi.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, pada saat ini Kabupaten Paser telah memiliki portal utama. Namun portal utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya digunakan oleh perangkat daerah lain. Sebagian besar portal perangkat daerah yang telah dibuat belum dimaksimalkan penggunaannya dalam pelaksanaan penyampaian informasi dan pelayanan di tingkat perangkat daerah. Sehingga kesan yang muncul adalah portal perangkat daerah tersebut ada dan dibuat hanya sekedar memenuhi kewajiban akan kepemilikan portal perangkat daerah saja. Akan tetapi tidak dibarengi dengan pembaruan informasi maupun pelayanan.

Secara umum gambaran kondisi pengembangan e-government di lingkungan Kabupaten Paser masih memerlukan perhatian dan komitmen khusus dalam konteks peningkatan kapabilitas dan dukungan seluruh stakeholder dan perangkat daerah. Hasil penilaian penerapan E-Government di Kabupaten Paser ditunjukkan dengan capaian indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Paser yang pada tahun 2019, baru memperoleh angka 1,69 dengan predikat kurang) dan kinerja E-Government baru mencapai 47% (Gambar II.27). Hasil ini menunjukkan bahwa masih perlu banyak perbaikan baik dari aspek Layanan, Tata Kelola dan Kebijakan untuk mendukung percepatan sebuah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik

a. Kondisi infrastruktur Teknologi Informasi Masih Lemah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan aspek penting lain yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran penerapan teknologi informasi di Kabupaten Paser. Dari data yang dimiliki, `sebenarnya Pemerintah Kabupaten Paser telah memiliki sarana prasarana penunjang TIK yang memadai. Akan tetapi sarana prasarana tersebut baru dilengkapi oleh sektor swasta. Oleh karena itu, penyediaan infratruktur TIK khususnya bagi wilayah kecamatan yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan aksesibilitas terhadap jaringan teknologi informasi di seluruh wilayah Kabupaten Paser.

Masih kurang meratanya koneksivitas jaringan internet di beberapa wilayah kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Paser menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Paser mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang berbasis teknologi informasi maupun kegiatan rutin administrasi perkantoran maupun keuangan. Masih ada wilayah kecamatan maupun desa yang kesulitan mendapatkan jaringan internet. Jangankan jaringan internet, untuk mendapatkan sinyal telekomunikasi pun masih ditemui kendala. Selain itu, masih terdapat *blank spot* di beberapa titik pada wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten. Hal inilah yang membuat masih lambannya pemerataan keterhubungan antar wilayah di Kabupaten Paser.

Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan konektivitas jaringan pada seluruh wilayah Kabupaten Paser. Selain itu, perlu upaya yang optimal agar diperoleh strategi yang komperehensif dalam menangani kendala-kendala dalam pemerataan ketersediaan jaringan TIK tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan agar penerapan e-government menuju smart governance dapat dilakukan secara menyeluruh di semua wilayah di Kabupaten Paser.

b. Pengembangan Sistem Informasi Masih Rendah

Penggunaan sistem informasi yang dikembangkan baik itu oleh lembaga pemerintah pusat maupun yang telah dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Paser sudah cukup merata di seluruh perangkat daerah. Dari data yang telah disampaikan pada bab II, dapat diketahui bahwa seluruh perangkat daerah telah memanfaatkan perangkat teknologi informasi tersebut. Akan tetapi sebagian besar perangkat lunak yang digunakan merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat. Sedangkan perangkat lunak yang merupakan hasil pengembangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sendiri belum diterapkan secara siginifikan.

Hal ini berimbas terhadap ketergantungan perangkat daerah maupun pemerintah Kabupaten Paser terhadap aplikasi atau perangkat lunak yang

dibuat atau dikembangkan oleh pihak lain. Dampaknya adalah sulitnya mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah maupun pemerintah daerah, karena terkendala permasalahan hak cipta sehingga kewenangan untuk mengembangkan berada di tangan pihak ketiga tersebut. Tentunya hal ini menjadi permasalahan tersendiri, dimana kebutuhan akan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pemerintah daerah berbasis TIK menjadi tergantung pada pihak ketiga. Untuk itu diperlukan komitmen dan kemauan untuk mendayagunakan sumber daya internal yang dimiliki secara optimal agar penyediaan piranti tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi teknis terkait.

Dari kondisi yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya pengembangan sistem informasi disebabkan belum adanya rencana induk pengembangan sistem informasi yang mendukung pencapaian efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Ketergantungan terhadap penyediaan aplikasi penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada pihak ketiga mengakibatkan sulitnya pengembangan terhadap penyediaan aplikasi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dengan karakteristik yang sesuai dengan kondisi pada masing-masing instansi.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat pada saat ini mengharuskan lembaga pemerintah agar dapat segera bertransformasi menyesuaikan dengan tuntutan perubahan arus informasi yang ada. Untuk itu, salah satu aspek penting dalam manyikapi hal tersebut adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi terkait dengan teknologi infomasi. Disinilah peran aparatur sumber daya manusia yang baik untuk mengelola teknologi informasi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, sampai dengan saat ini pegawai yang menduduki jabatan fungsional pranata komputer hanya berjumlah 3 (tiga) orang dan tersebar di 3 (tiga) perangkat daerah yaitu 1 (satu) orang di Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, 1 (satu) orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, dan 1 (satu) orang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Paser. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat jauh dari jumlah minimal, apabila dikaitkan dengan jumlah perangkat daerah se-Kabupaten Paser yaitu sebanyak 41 Perangkat Daerah dan distribusi SDM IT belum merata walaupun jika dilihat dari sebaran kualifikasi SDM IT ternyata cukup berimbang (Gambar II.33).

Keterbatasan jumlah pegawai yang khusus membidangi pengelolaan teknologi informasi di Kabupaten Paser perlu mendapat perhatian khusus, mengingat salah satu aspek penting yang harus dipenuhi apabila Kabupaten

Paser ingin meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Untuk itu, penyediaan sumber daya yang berkaitan dengan kualifikasi terkait dengan teknologi informasi harus lebih diutamakan disamping pemenuhan tenaga pendidikan dan kesehatan.

4. Pengelolaan Potensi Rawan Konflik dan Trantibum Belum Optimal

Keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya yang berada dalam wilayah Kabupaten Paser pada satu sisi merupakan suatu kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Oleh karena itu, kondisi masyarakat Kabupaten Paser yang heterogen tersebut dapat memicu adanya berbagai potensi konflik. Sampai dengan tahun 2020, masih terdapat kasuskonflik SARA/Demo di Kabupaten Paser (Tabel II.80). Hal ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Paser masih ada potensi konflik. Sementara itu angkakriminalitas tahun 2020 di Kabupaten Paser menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019 (Gambar II.21). Hal ini disebabkan adanya peningkatkan jumlah kasus penganiayaan, kasus kejahatan seksual dan kasus pencurian. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan potensi rawan konflik dan Trantibum belum optimal. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah penegakan perda belum berjalan optimal ditunjukkan dengan belum semua peraturan daerah yang ditetapkan dapat ditegakkan secara konsisten. Begitu pula persentase penyelesaian pelangaran K3 yang baru mencapai 79,07% pada tahun 2020 (Tabel II.80). Keadaan ini menggambarkan bahwa penanganan gangguan ketentraman dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih belum baik. Begitu pula penegakan perda juga belum berjalan secara optimal sehingga mengakibatkan pengelolaanpotensi rawan konflik dan Trantibum belum optimal. Lebih lanjut adanya potensi konflik dan kasus kriminalitas ini akan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Paser yang mengakibatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Paser belum berjalan optimal. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan penegakan perda belum berjalan secara optimal yaitu penanganan penyakit masayrakat belum maksimal, Kegiatan sistem keamanan lingkungan di masyarakat banyak yang vakum/tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sumber daya aparatur PNS di Satpol PP terbatas untuk melaksanakan patroli di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Paser.

Permasalahan tata kelola pemerintahan secara runtut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4.
Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

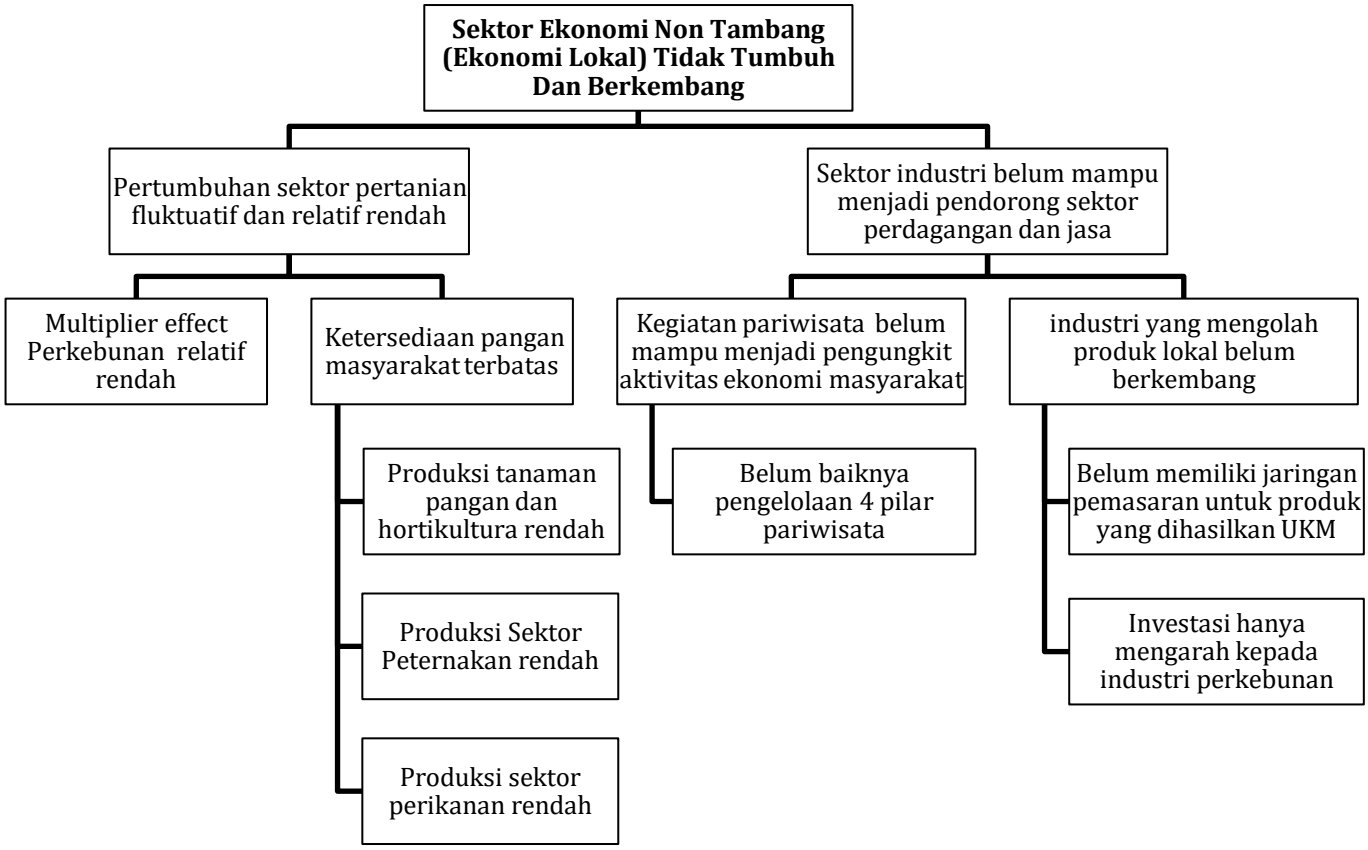
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Masih Rendah	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belum Optimal
			Kualitas Pengawasan Internal Masih Rendah
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal
			Manajemen SDM belum optimal
		Rendahnya Kinerja Pelayanan Publik	Masih rendahnya pelaksnaaan standarisasi pelayanan publik di Perangkat Daerah
			Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan umum
			Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum baik.
		Pengembangan E-Gov Belum Mengarah Pada Smart Governance	Kondisi infrastruktur Teknologi Informasi Masih Lemah
			Pengembangan Sistem Informasi Masih Rendah
			Keterbatasan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
		Pengelolaan Potensi Rawan Konflik dan Trantibum Belum Optimal	Penegakan Perda Belum Optimal

Sumber: Data Diolah, 2020

4.1.5. Analisis Permasalahan Bidang Ekonomi

Berdasar data yang disajikan dalam analisis sektoral pada Bab II naskah ini,berikut disajikan analisis permasalahan bidang perekonomian yang meliputi seluruh sektor ekonomi. Secara makro perekonomian kabupaten Paser memilikikecenderungan untuk tidak berkelanjutan. Perekonomian memiliki pertumbuhan yang cukup baik walaupun cenderung fluktuatif, namun perekonomian itu didominasi oleh sektor pertambangan dan panggalian dan perkebunan kelapa sawit. Sektor pertambangan dan penggalian bukanlah sektor yang memiliki keberlanjutan jangka panjang, ketika bahan tambang telah habis maka selesai pula kemampuannya untuk menumbuhkan perekonomian. Ketika sektor pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian itu berarti sektor ekonomi non tambang (ekonomi lokal) hanya memiliki kontribusi yang kecil. Sektor non tambang

(ekonomi lokal) yang berperan kecil itu juga memiliki tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi lokal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidak mampuan sektor industri maupun pariwisata untuk mengungkit sektor lainnya yang menjadi sumber pendapatan sebagian penduduk. Gambar berikut menyajikan kerangkaanalisis permasalahan yang dibangun berdasar data dan informasi yang disajikan dalam BAB II. Dari kerangka tersebut dapat dilihat bahwa kinerja yang kurang baik pada sektor ekonomi lokal secara umum disebabkan oleh permasalahan yang ada di sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor pariwisata serta arah pengembangan investasinya.



Sumber: Data Diolah, 2020

Gambar IV.5.
Diagram Permasalahan Perekonomian

Berdasar data dan informasi yang disajikan dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Paser sangat bergantung kepada sektor pertambangan dan panggalian dan sifatnya tidak bekelanjutan. Fokus pada pertambangan yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut menyebabkan hilangnya fokus pada ekonomi lokal yang sesungguhnya lebih berkelanjutan (lihat tabel II.16 dan tabel II.17). Dominasi pertambangan dan panggalian lebih dari tiga perempat dari total perekonomian walaupun pertumbuhannya semakin turun. Sementara itu sektor non tambang memiliki kontribusi yang sangat kecil dengan tingkat pertumbuhan yang lebih

baik. Data ini mengkonfirmasi bahwa ketika Kabupaten Paser tetap bertumpu pada pertambangan dan panggalian maka sekalipun ekonomi lokal menunjukkan pertumbuhan, namun dengan kontribusi yang semacam itu, tidak akan mampu untuk menahan turunnya pertumbuhan ekonomi Paser dalam jangka panjang. Kondisi ini dipicu oleh 2 sebab yakni sektor pertanian yang pertumbuhannyarendah dan sektor industri pengolahan yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas lokalnya.

1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Rendah dan Fluktuatif

Pembangunan pertanian dilakukan setidaknya untuk mencapai 2 hal yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Dalam hal ini Paser berhadapan dengan beberapa persoalan yang berakibat pada rendah dan fluktuatifnya perkembangan sektor pertanian.

Pada sektor perkebunan, Paser pada dasarnya memiliki beberapa komoditi perkebunan penting selain kelapa sawit, seperti karet, kakao, kelapa, kopi juga lada (lihat Tabel II.141). Namun demikian seluruh komoditi non sawit itu memiliki kinerja yang sangat buruk, kecuali untuk produksi lada. Salah satu penyebab dari tidak berkembangnya komoditi non sawit adalah kerena pergeseran luas areal tanam perkebunan ke kelapa sawit. Dari tabel II.141 dapat dilihat bahwa luas arealkelapa sawit terus meningkat sedangkan non sawit terus mengalami penurunan. Pegeseran tanaman perkebunan dipicu oleh insentif yang masyarakat rasakan, kelapa sawit secara relatif dapat menghasilkan uang kas setiap bulan, denganpembeli yang sudah jelas, walaupun terdapat masalah struktur pasar yang oligopoli.

Kelapa sawit yang dapat menyediakan uang kas dengan cepat itu pada sisi yang lain berada dalam lingkaran usaha besar yang sangat sulit diakses oleh usahakecil. Sampai saat ini kelapa sawit segar harus segera diolah menjadi CPO, dan hanya perusahaan besar yang memiliki teknologi untuk pengolahan CPO. Selanjutnya CPO ini dijual ke pasar dunia. Itulah sebabnya walaupun produksi kepala sawit terus meningkat namun kurang mampu menciptakan kesejahteraan yang bekelanjutan bagi masyarakat/*multiplier effect*nya rendah. Hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan nilai tambah dari CPO yang dihasilkan. Itulah sebabnya nilai tambah dari kelapa sawit ini secara keseluruhan masih rendah bagi kabupaten Paser, khususnya bagi petani dan pelaku industri.

Fungsi penting lain dari sektor pertanian adalah penyedia pangan. Ketahanan pangan setidaknya dapat dilihat dari dua ukuran yakni skor PPH dan tingkat ketersediaan pangan. Dilihat dari wilayahnya hingga saat ini masih terdapat 33% desa masuk dalam kategori desa rawan pangan. Dilihat dari skor PPH, kabupaten Paser memiliki skor PPH yang cukup tinggi (lihat tabel II.91). namun demikian jika dilihat dari tingkat ketersediaan pangan kebutuhan pangan Paser masih belum dapat dipenuhi sendiri oleh kabupaten Paser. Berdasarkan data pada tabel II.92 dapat dilihat bahwa hampir separo kebutuhan bahan pangan utama Paser masih didatangkan dari luar. Produksi pangan yang fluktuatif dan produktivitasnya yang

rendah menjadi penyebab dari rendahnya kemampuan Paser untuk menyediakan pangan pokok.

Dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah membutuhkan pangan yang beraneka ragam sebagaimana ukuran skor PPH. Paser pada dasarnya memiliki potensi untuk peternakan maupun perikanan dan hortikultura. Berdasar data pada tabel II.142 populasi ternak sebagai sumber protein penduduk secara keseluruhan cenderung turun, utamanya untuk ternak lokal seperti ayam buras dan itik. Sementara ternak lain pertumbuhannya juga cenderung mengalami peningkatan yang relatif rendah. Adapun permasalahan dalam hal pembangunan sub sektor peternakan adalah relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum berkembangnya pembibitan hewan ternak, usaha peternakan rakyat masih belum dikelola secara profesional dan minimnya sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan rakyat.

Sebagai wilayah yang memiliki sungai dan rawa juga danau alam, Paser memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, namun demikian potensi itu hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dari tabel II.132 terlihat bahwa pertumbuhan produksi perikanan terutama perikanan umum negatif. Sementara perikanan laut yang produksinya cukup tinggi, pertumbuhannya relatif lambat. Kurang baiknya produksi perikanan umum dan perikanan laut selian berkaitan dengan cuaca juga berkaitan dengan adanya dugaan pencemaran yang mulai terjadi atau pola perilaku nelayan dalam menangkap ikan tidak berkelanjutan.

2. Industri Pengolahan belum mampu untuk menjadi Pendorong Sektor lainnya

Peran dan pertumbuhan sektor indutri pengolahan di Paser cukup tinggi (lihat gambar II.38), namun demikian sektor industri pengolahan itu didominasi oleh industri pengolahan kelapa sawit. Pertumbuhan industri pengolahan terus mengalami penurunan itu artinya industri CPO ini mulai masuk ke titik jebuh. Sebagaimana diketahui hingga saat ini industri pengolahan kelapa sawit baru menghasilkan CPO dan dilakukan oleh perusahaan perusahaan besar yang relatif padat modal. Untuk menciptakan multiplier yang lebih tinggi pada produk CPO (hilirisasi) dibutuhkan teknologi tinggi dengan pendanaan yang cukup tinggi pula.

Pada sisi lain industri pengolahan Non-CPO belum berkembang di Paser. Kurang berkembangnya industri pengolahan non tambang dapat dilihat dari lambatnya pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah maupun koperasi (lihat tabel II.118). Permasalahan kewirausahaan dan intervensi pemerintah yang belum tepat menjadi penyebab utama dari tidak berkembangnya industri kecil di banyak daerah. Aspek lain yang menyebabkan tidak berkembangnya industri kecil adalah belum terciptanya pasar produk yang dihasilkan.

3. Sektor Pariwisata Belum Mampu Menjadi Pengungkit Ekonomi Lokal

Sektor pariwisata sesungguhnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Namun demikian hingga saat ini tingkat kunjungan wisata ke Paser

masih relatif rendah. Berdasar data yang disajikan pada tabel II.134 dapat dilihat bahwa pertumbuhan kunjungan wisata telah cukup baik, namun demikian dilihat dari jumlahnya masih cukup kecil. Jika di rata rata dalam sehari kunjungan wisatawan hanya sekitar 75 orang saja.

Tingkat kunjungan yang rendah berkaitan dengan belum dikelolanya 4 pilar pariwisata secara baik. Cukup banyak destinasi yang dimiliki, namun pengelolaannya belum mampu menarik wisatawan. Promosi pariwisata yang dilakukan juga belum efektif untuk mendatangkan wisatawan. Akibat dari belum berkembangnya pariwisata maka aktivitas ekonomi lokal yang berkaitan dengan pariwisata, misalnya permintaan terhadap produk lokal, dalam hal ini hasil industripengolahan berbahan baku lokal juga rendah.

4. Permasalahan Investasi Di Daerah

Investasi merupakan aktivitas utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada arah yang tepat yakni sektor dengan keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi akan menciptakan multiplier yang besar bagi perekonomian. Hingga saat ini aktivitas investasi di kabupaten Paser tercatat mengarah ke dua sektor utama yakni pertambangan dan perkebunan kelapa sawit (lihat tabel II.121). Sebagaimana di uraikan di atas kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multipliernya rendah). Kelapa sawit hanya berakhir menjadi CPO, apalagi sektor pertambangan yang hanya berakhir dengan dikirimkanya produk pertambangan dalam bentuk mentah.

Secara umum investasi akan tertarik ke dalam sebuah sektor ketika sektor tersebut menghasilkan keuntungan yang memadai. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengghasilkan keuntungan memadai. Kepastian hukum atas sektor yang dituju, kemudahan perijinan, juga ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja dan yang lebih penting lagi adalah pemasaran dari produk yang hendak dihasilkan. Telah cukup banyak peraturan yang mendukung kemudahan investasi di kabupaten Paser dan menghasilkan pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, namun demikian arah investasi hanya ke sektor pertambangan atau perkebunan kelapa sawit. Artinya peraturan untuk kemudahan investasi itu arahnya masih bersifat umum, sehingga sangat dibutuhkan peraturan yang mendorong ke arah invetasi spesifik yang dibutuhkan untuk menciptakan multiplier lebih tinggi.

Permasalahan perekonomian paser selanjutnya dapat disajikan ringkasananya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel IV.5.
Permasalahan Pembangunan Ekonomi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	Sektor Ekonomi Non Tambang (Ekonomi Lokal) Tidak Tumbuh dan Berkembang	Pertumbuhan sektor pertanian fluktuatif dan relatif rendah	Efek ganda (*Multiplier effect*) Perkebunanrelatif rendah
			Ketersediaan pangan masyarakat terbatas
		Sektor industri belum mampu menjadi pendorong sektor perdagangan dan jasa	Kegiatan pariwisata belum mampu menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat
			Industri yang mengolah produk lokal belum berkembang

Sumber: Data Diolah, 2020

4.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang (Permendagri nomor 86 tahun 2017). Isu strategis dapat digolongkan ke dalam isu internal dan eksternal, yang jika dilihat dari karakternya dapat berupa hal yang mendorong dan juga dapat berupa hal yang menghambat upaya kita untuk mencapai sasaran (Bryson, 2010).

4.2.1. Isu Strategis Internal

A. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama Kabupaten Paser dalam pembangunan adalah terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Paser yang berdampak pada terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari tidak merata dan rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar antar wilayah, dan belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman. Pada aspek lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup kabupaten Paser lebih rendah dari Propinsi maupun Nasional

Kabupaten Paser memiliki potensi dan keunggulan yang dapat dipertimbangkan dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya kondisi geografisyeng terletak pada perlintasan jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain itu Kabupaten Paser juga memiliki posisi yang strategis yaitu berada di sebelah SelatanProvinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan yang terhubung oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional). Dengan letaknya yang sangat strategis Kabupaten Paser berfungsi sebagai pintu gerbang *(gate)* Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan serta provinsi lainyang melakukan transit di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah dalam bidang sumber daya manusia maka dirumuskanlah isu-isu strategis, sebagai berikut. Hingga saat ini kualitas pembangunan manusia yang didekati dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan bahwa Paser masih relatif tertinggal dibandingkan dengan rata rata propinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan yang cenderung melambat. Relatif lambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kabupaten Paser dapat diidentifikasi dari 3 komponen pembentuk IPM itu yakni aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Hingga saat ini teridentifikasi bahwa kualitas pendidikan di Paser masih rendah, demikian juga dengan kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah. Pada komponen ke 3 yakni daya beli yang masih rendah pula yang dapat ididentifikasi dari masih banyaknya permasalahan sosial dalam masyarakat yang menyebabkan angka kemiskinan yang tinggi. Teridentifikasi bahwa penyebab utama dari masih tingginya permasalahan sosial itu bersumber dari kemampuan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, angka pengangguran yang cukup tinggi, kualitas hidup perempuan dan anak yang masih rendah, tingginya angka pertumbuhan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi, belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, belum optimalnya pengembangan budaya dan kearifan lokal,

C. Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser adalah kinerja tata Kelola pemerintahan yang belum optimal. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pengembangan e-government belum sepenuhnya diterapkan dan belum mengarah pada *smart governance*, belum optimalnya pelayanan publik serta pengelolaan potensi rawan konflik dan Trantibum yang belum optimal. Sementara itu ada beberapa tantangan yang dihadapi terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Paser yaitu kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal, lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, manajemen SDM yang masih belum sepenuhnya diterapkan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal. Masih terjadi inkonsistensi antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan belum sinergis dan terintegrasi menjadi

tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Paser.

Dari sudut pandang berbeda, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser memiliki nilai kekuatan yang dapat menjadi modal sebagai landasan menuju sebuah tata kelola yang baik. Keberhasilan Kabupaten Paser tetap dapat mempertahankan perolehan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya, menunjukkan keseriusan menjaga akuntabilitas keuangan. Disamping itu kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Paser dalam aspek pengawasan juga terus meningkat. Peningkatan efektivitas APIP dapat mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi secara keseluruhan.

Tingkat pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Paser menggambarkan perkembangan yang positif. Walaupun masih belum terintegrasi, teknologi informasi sudah diterapkan untuk beberapa tugas administratif daerah dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Memang tantangan ke depan dalam pemanfaatanteknologi informasi harus lebih diarahkan kepada terciptanya sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang handal dan profesional dengan sistem rekrutmen berbasis kompetensi.

D. Isu Strategis Bidang Perekonomian

Perekonomian Paser yang bertumpu pada pertambangan mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di satu sisi pereknomian yang bertumpu pada sektor pertambangan pertumbuhannya mulai menurun sejalan dengan semakin berkurangnya bahan tambang. Pada sisi lain sektor pertanian yang menjadi tumpuan penduduk terbanyak didominasi oleh kelapa sawit yang memiliki efek ganda (*multiplier effect)* rendah bagi perekonomian. Industri skala kecil berbasis sumber daya lokal dan industri kreatif (pariwisata) tidak berkembang. Permasalahan kewirausahaan yang rendah, intervensi pemerintah yang tidak tepat dan pasar yang belum tampak menjadi penyebab dari tidak berkembangnya ekonomi lokal. Permasalahan ini menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian, jika tidak ingin perekonomian Paser berhenti dalam waktu dekat.

Disisi lain Bidang Perekonomian di Kabupaten Paser memiliki kekuatan untuk dapat dikembangkan diantaranya adalah: Obyek wisata yang dapat dikembangkan, tingginya produksi CPO, Perkebunan kelapa sawit yang luas, sumber daya alam untuk tanaman pangan, peternakan dan perikanan juga pelabuhan / dermaga laut.

4.2.2 Isu Strategis Eksternal

Berikut disajikan isu isu eksternal baik nasional maupun internasional yang memiliki dampak besar pada pembangunan di Kabupeten Paser.

A. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Wilayah Penajam Paser Utara

Status Kabupaten Paser sebagai daerah mitra IKN akan menarik masyarakat untuk datang dan tinggal di Kabupaten Paser. Kebijakan pemerintah pusat ini

tentunya menjadi peluang ketika Paser dapat bersiap, namun akan menjadi ancaman jika Paser berjalan seperti biasa. Pada aspek ekonomi peluang itu setidaknya muncul dari tingginya permintaan berbagai produk dari mulai produk pangan sampai produk industri. Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN, dari sektor pertanian akan mendapatkan peluang untuk menyiapkan pangan bagi penduduk di Ibu Kota Negara yang baru ini, seperti beras, sayur, buah-buahan, daging dan ikan, kebutuhan akan hiburan masyarakat, industri pengolahan hasil kecil-menengah dan indutri besar akan tumbuh dengan sendirinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada sisi lain perpindahan itu juga akan mengubah wajah ekonomi Paser dan sekitarnya. Pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia. Ini juga akan dibarengi dengan peningkatan upah tenaga kerja. Dampak akhir dari hal ini adalah kecenderungan terjadinya inflasi sebagai akibat dari perbaikan pendapatan masyarakat.

Pada aspek pengembangan SDM pemindahan ibu kota baru ini dapat memunculkan peluang maupun ancaman. Peluang akan datang dari bermigrasinya SDM yang berkualitas, ini akan memunculkan pionir pionir pengembangan ekonomi maupun sosial yang baru. Namun hadirnya migran merupakan suatu ancaman yang harus diwaspadai apabila masyarakat kawasan ibu kota baru dan wilayah sekitar belum siap khususnya pelaku jasa konstruksi, baik penyedia jasa konstruksi maupun pekerja konstruksi, yang pada akhirnya SDM di luar daerah yang lebih maju yang akan diserap dalam pelaksanaan pembangunan, bukan masyarakat setempat. Pada akhirnya hal iniakan meningkatkan angka pengangguran, utamanya pada penduduk local yang akhirnya menyumbang pada semakin besarnya komposisi masyarakat miskin. Pengangguran yang tinggi dapat memicu tingginya angka kriminalitas.

Pada Aspek Pendidikan, kabupaten Paser berpeluang menjadi penyangga ibukota melalui fasilitas pendidikan seperti Sekolah Kejuruan, perguruan tinggidan pendidikan vokasi lainnya. Pada aspek kesehatan, meningkatnya urbanisasi ke Kabupaten Paser sebagai penyangga ibukota juga penciptakan ancaman sekaligus peluang bagi pelayanan kesehatan yang harus diberikan. Bertambahnya penduduk bermakna bertambahnya pelayanan eksehatan yang harus diberikan, namun pada sisi lain hal ini membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru di sektor kesehatan.

Di sisi lain, keberadaan arus urbanisasi dan pengembangan wilayah mempengaruhi kualitas lingkungan mempunyai konsekwensi negatif pada penurunan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa kasus infeksi banyak terjadi karena masalah lingkungan fisik dan biologi yang tidak tertata dengan baik seperti ISPA, diare, TB Paru, demam berdarah. Selain itu perubahan wilayah menjadi perkotaan dengan mobilitas yang tinggi juga dapat mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat yang berdampak pada berkembangnya berbagai penyakit tidak menular seperti jantung, kanker dan penyakit pembuluh darah lainnya.

Struktur penduduk Kabupaten Paser yang multikultur merupakan suatu kekayaan dan kekuatan dalam pembangunan daerah jika dikelola dengan baik. Namun keberadaan masyarakat multikultur sangat rawan menimbulkankonflik etnis, budaya, agama, sosial, politik dan ekonomi. Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Paser untuk mengembangkan wawasan multikultural dalam semua tatanan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sarana dan prasarana infrastruktur juga perlu disiapkan antara lain fasilitas Perumahan, air bersih, sanitasi dan infrastruktur lainnya yangmendukung kawasan permukiman, sarana dan prasarana yang menunjang sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur ke wilayah destinasi obyek wisata dan pembangunan infrastruktur untuk kawasan industri. Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga ibu kota negara juga harus meningkatkan pengawasan lingkungan dan ketaatan terhadap tata ruang.

Kabupaten Paser harus menyiapkan pengawasan lingkungan dan ketaatan terhadap tata ruang harus ditingkatkan. Sebagai daerah penyangga yang memiliki DAS dan kawasan lindung yang luas, maka dapat dimanfaatkan sebagai jasa lingkungan, nilai ekonomi dan konservasi lahan. Kabupaten Paser masuk dalam zona selatan dari IKN sehingga menjadi daerah yang akan dikendalikan pemanfaatan ruangnya dimana penekanannnya pada pemulihan ekosistem dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Paser akan lebih diperhatikan. Sebagai daerah penyangga maka pembukaan lahan terutama untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan fasilitas umum lainnya dapat menyebabkan keseimbangan kawasan penyangga terganggu.

B. Rencana Pembangunan Bendungan Lambakan dan Telake di Kecamatan Long Kali, menjadi isu strategis eksternal yang sangat didambakan pada sektor pertanian.

Dengan adanya bendungan tersebut setidaknya dapat mengairi sawah di kecamatan Long Kali dan Long Ikis yang merupakan kecamatan sentra sawah di Kabupaten Paser. Pada 2 kecamatan tersebut terdapat potensi sawah yang dapat dicetak. Pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk pengairan sawah, namun juga pemenuhan pengairan pertanian dalam arti luas. Peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan konsumsi masyarakat dan pendistribuan pangan ke daerah lain dapat dilaksanakan.

Pembangunan bendungan tersebut tentu saja membutuhkan fasilitas- fasilitas penunjang di bidang infrastruktur, antara lain: Fasilitas jalan dan jembatan dari dan menuju lokasi tersebut, pembangunan perumahan dan fasilitas umum (Relokasi) untuk masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Pembangunan Bendungan Lambakan akan banyak menggunakan tenaga kerja di bidang konstruksi, sehingga pemerintah kabupaten Paser juga harus mempersiapkan

tenaga ahli maupun terampil untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan tersebut.

Dari aspek lingkungan hidup salah satu fungsi pembangunan Bendungan Lambakan sebagai pengendali banjir yang biasa terjadi terutama di Kecamatan Long Kali. Dengan adanya pembangunan Bendungan Lambakan dengaberbagai fasilitas penunjangnya juga dapat meningkatkan pencemaran air, udara dan mengurangi tutupan lahan sehingga akan menurunkan kualitas lingkungan hidup sekitar

Pembangunan Bendungan Lambakan selain dapat memenuhi kebutuhan air daerah sekitar juga untuk ketahan pangan dimana dengan aliran air irigasi dari bendungan ini, dapat meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG). Disamping itu pula perikanan darat akan tumbuh pula, sehingga hasil ikan akanmelimpah dan menambah pendapatan masyarakat setempat.

Pembangunan bendungan Lambakan nantinya dapat pula menjadi salah satu alternatif destinasi pariwisata buatan. Dengan datangnya wisatawan maka akan memacu pula bergeraknya sektor industri lokal baik yang berbasis pertanian maupun hasil alam lainnya.

Sementara itu Bendungan Telake yang berasa di Kabupaten PPU yang nantinya menjadi sumber pengairan, dipercepat pengerjaannya. Bendung ini rencana dibangun di atas lahan seluas 166.415 hektare beserta saluran irigasinya. Bendung ini diproyeksikan memakan biaya Rp 1,7 triliun bersumber APBN dengan dengan skema pekerjaan multi years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan target selesai 2023 atau 2024. Jika rampung, Bendungan ini berpotensi mengairi sawah seluas 21.000 hektare pada dua kabupaten yakni PPU dan Paser. Selain sawah, 15 desa di dua kabupaten itu juga menggantungkan kebutuhan air dengan Bendungan Telake.

C. Pengembangan *Food Estate* dan *Mini Ranch*

Food Estate atau "Perkampungan Industri Pangan" merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.

Untuk mendukung kebutuhan pangan di ibu kota baru yang direncanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan lahan seluas 2.654 hektar untuk pengembangan kawasan *food estate*. Lahan yang disiapkan yaitu untuk *food estate* itu terbagi di dua kabupaten yang berdekatan dengan ibu kota Negara, Berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 1.154 hektar berada di Kabupaten Paser. Usulan tersebut ditindaklanjuti Kementerian Pertanian melalui Pusat Penelitian Pengambangan Tanaman Pangan (Puslitbang TP) dengan mengindentifikasi dan menggali data di dua calon lokasi pengembangan kawasan food estate yang diusulkan. Program *food estate* yang dikembangkan di Kaltim untuk mendukung kebutuhan pangan di ibu kota negara dan

mendukung percepatan pembangunan. Karena itu, pengembangan *food estate* dilakukan dengan pendekatan kluster dan multi komoditas yang terintegrasi juga melibatkan banyak pihak. Adapun skema pembiayaan *food estate*, porsinya pemerintah pusat 30 persen, provinsi 30 persen, kabupaten atau kota 30 persen dan swasta 10 persen.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) mengembangkan program pembangunan seribu mini ranch (kandang penggembalaan mini) ternak sapi. Program mini ranch untuk ternak sapi merupakan upaya pemeliharaan secara ekstensif bagi peternak sapi. Pengembangan ternak sapi untuk populasi terus didorong kegiatannya terutama bagi kelompok-kelompok petani ternak. Pemeliharaan sistem mini ranch akan semakin efesien dan ekonomis sebab sapi-sapi ternak bisa dilepas bebas di kawasan eks lahan tambang dan perkebunan. Selain itu, imbas pengembangan program mini ranch akan lebih efektif sebab sedikit memerlukan tenaga kerja. Kegiatan ini akan mampu mempercepat pertumbuhan dan pertambahan ternak sebab pakan disiapkan dalam kawasan penggembalaan (mini ranch). Ternak sapi mudah dipindah-pindahkan (rotasi) dan pakannya sudah disiapkan dalam kawasan itu yakni rumput alam diintroduksi rumput unggul.

Kegiatan pengembangan kawasan dengan pembangunan *mini ranch* yang dikelola oleh kelompok tani ternak yang difasilitasi APBD Provinsi dimulai sejak 2019 di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Penajam Paser Utara, setiap *mini ranch* memiliki luas 35 ha dan dikelola oleh kelompok tani. Pada tahun 2020 terdapat 12 unit *mini ranch* yang tersebar di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan luas 2-4 Ha. Fasilitas *mini ranch* berupa pagar, kandang/shelter dan penanaman Hijauan Pakan Ternak Berkualitas. Pembangunan pagar untuk menjaga ternak agar tidak mengganggu lahan orang lain, memudahkan pengaturan penggembalaan dan membatasi *paddock. Shelter* sebagai tempat teduh/naungan, tempat makan dan minum serta memudahkan peternak untuk melakukan penanganan kesehatan. Kegiatan penanaman pakan ternak berkualitas dalam upaya penyediaan pakan secara kontinyu sehingga meningkatkan produktivitas ternak.

D. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

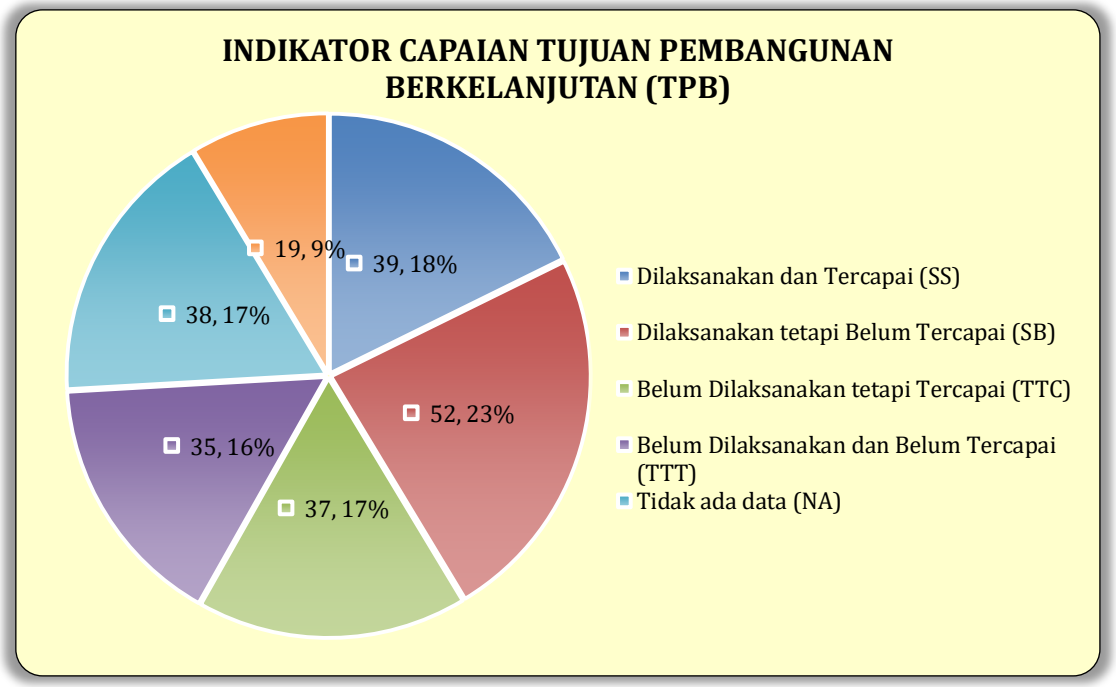
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Paser yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional atau belum target sebesar **41% (91 indikator)** dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Kabupaten Paser masih menghadapi tantangan panjang dalam pencapaian indikator TPB yang didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Capaian indikator TPB Kabupaten Paser terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel IV.6.
Capaian TPB Kabupaten Paser terhadap Target Nasional

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Indi-kator	Dilaksana-kan Mencapai Target (SS)	Dilaksana-kan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)	Belum Dilaksana-kan tetapi Tercapai (TTC)	Belum Dilaksana-kan Belum Tercapai (TTT)	Tidak ada data (NA)	Tidak sesuai karak-teristik daerah (TKD)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	7	11	2	1	3	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	6	1	2	1	1	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	8	8	5	7	5	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	1	5	3	2	2	0
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	3	4	3	3	1	0
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	0	3	5	3	1	6
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	0	0	0	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	4	7	2	1	5	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	1	0	2	2	4	4
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	11	1	2	3	5	0	0
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	2	3	1	0	3	4
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	0	0	2	2	1	0

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Indi-kator	Dilaksana-kan Mencapai Target (SS)	Dilaksana-kan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)	Belum Dilaksana-kan tetapi Tercapai (TTC)	Belum Dilaksana-kan Belum Tercapai (TTT)	Tidak ada data (NA)	Tidak sesuai karak-teristik daerah (TKD)
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	1	0	0	1	0
14	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	0	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4	0	0	0	2	1	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	5	7	2	3	4	0
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16	1	0	5	3	6	1
JUMLAH		**220**	**39**	**52**	**37**	**35**	**38**	**19**
		100%	**18%**	**24%**	**17%**	**16%**	**17%**	**9%**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Paser, 2020

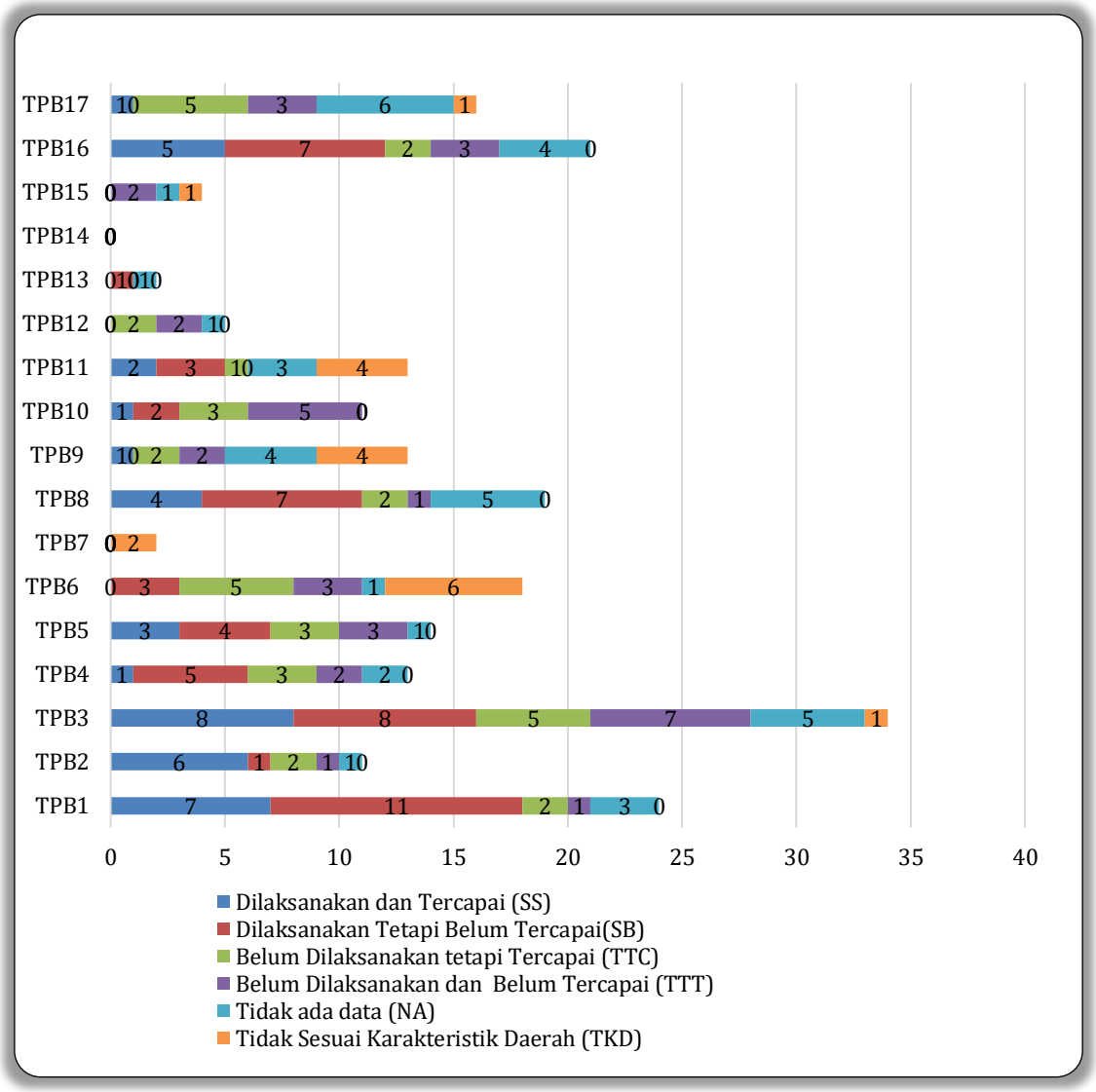


Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kab Paser, 2020

Gambar VI.6.
Komposisi Capaian TPB Kabupaten Paser

Sebanyak 220 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan indikator TPB sebanyak 91 indikator dalam RPJMD, sebanyak 39 indikator (18%) diantaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 52 indikator (24%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 37 indikator (17%) termasuk dalam kriteria indikator belum dilaksanakan dan tercapai, di sisi lain ada 35 indikator (16%) termasuk dalam kriteria belum dilaksanakan dan belum tercapai target nasional. Sisanya 38 indikator (17 %) tidak terdapat data serta terdapat 19 indikator (9%) tidak sesuai karakteristik Kabupaten Paser.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Paser pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu diprioritaskan yaitu target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki indikator sudah dilaksanakan di daerah tetapi tidak tercapai (SB), dan indikator yang belum dilaksanakan di daerah dan belum tercapai (TTT), serta perlu adanya dokumentasi dan penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian TPB Kabupaten Paser.



Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kab Paser, 2020

Gambar IV.7.

Rincian Capaian TPB Kabupaten Paser Menurut Tujuan

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Paser terhadap target nasional, maka terdapat 3 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

1. Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 16 indikator telah dilaksanakan dengan 8 indikator mencapai ataupun belum mencapai target nasional.
2. Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang dinilai totalnya 24 indikator, sebanyak 7 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional, sedangkan 11 indikator telah dilaksanakan walaupun belum mencapai target nasional sehingga perlu dievaluasi untuk periode mendatang.
3. Tujuan 16 yaitu kelembagaan yang tangguh dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dengan capaian 12 indikator yang telah dilaksanakan

dengan rincian 5 indikator mencapai target nasional sedangkan 7 indikator belum mencapai target sehingga perlu dievaluasi agar dapat memenuhi target nasional di masa mendatang. Adapun Indikator TPB yang belum mencapai target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.7.
Indikator TPB/SDG's Yang Sudah dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional

N0.	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR TPB
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
4	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
5	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
6	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
7	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
8	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
9	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
10	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
11	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
12	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
13	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
14	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
15	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
16	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
17	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
18	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
19	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.

NO.	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR TPB
20	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
21	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
22	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
23	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
24	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
25	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
26	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
27	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.
28	8.1.1.(a)	PDB per kapita.
29	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
30	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
31	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.
32	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
33	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
34	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
35	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
36	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
37	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
38	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
39	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
40	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

Sedangkan tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok belum dilaksanakan di daerah tetapi tercapai (TTC) sebanyak 11 tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan 1 adalah Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun,
2. Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan,
3. Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia,
4. Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua,
5. Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan,
6. Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.
7. Tujuan 8 Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak bagi Semua,
8. Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Membantu Perkembangan Inovasi
9. Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan di dalam dan antar Negara
10. Tujuan 16 Mendukung Masyarakat yang Damai dan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan bagi Semua, serta Membangun Institusi yang Efektif dan Akuntabel
11. Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Ke-11 tujuan tersebut tersebar dalam semua pilar pembanggunan yang mana sebagian besar atau 5 diantaranya, merupakan indikator untuk pilar sosial yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dimana belum memiliki indikator dalam kelompok sudah dilaksanakan dan sudah tercapai.

E. New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan)

New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) adalah hasil dari Konferensi PBB mengenai Pembangunan Perumahan dan Perkotaan yang Berkelanjutan atau dikenal dengan Konferensi Habitat yang ke III yang diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016.

Dalam mendukung New Urban Agenda pemerintah Kabupaten Paser perlu melaksanakan beberapa kegiatan diataranya penanganan kawasan permukiman kumuh khususnya pada wilayah perkotaan, pembangunan perumahan yang terjangkau, penyediaan sarana air minum dan sanitasi, penyediaan ruang publik, fasilitas social dan penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Dari aspek lingkungan hidup terdapat beberapa Peluang, dimana Perencanaan dan pembangunan kawasan perkotaan tidak terpisah dari perencanaan dan

pembangunan kawasan di sekitarnya, sehingga dalammelaksanakan pembangunan agenda baru perkotaan akan tetap memastikan keberlanjutan lingkungan hidup yang melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya

Setiap pembangunan pasti akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitar. Agenda baru perkotaan dalam pelaksanaan pembangunannya memberikan ancaman berupa pencemaran air, udara dan mengurangi tutupan lahan sehingga akan menurunkan kualitas lingkunganhidup sekitar

New Urban Agenda juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi regional dan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila kondisi pertumbuhan populasi penduduk lebih besar dibandingkan laju produksi bahan pangan, maka akan terjadi bencana krisis pangan. Kehadiran pertanian di wilayah perkotaan maupun daerah sekitarperkotaan memberikan nilai positif bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhanpangan tetapi juga terdapat nilai-nilai praktis yang dapat berdampak bagi keberlanjutan ekologi maupun ekonomi wilayah perkotaan.

Apabila praktek pertanian perkotaan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka hal ini akan memberikan banyak keuntungan. Nilai kehadiran pertanian perkotaan dapat dilihat dari aspek ekonomi, ekologi, sosial, estetika, edukasi, dan wisata. Keberadaan pertanian dalam masyarakat perkotaan dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang ada di kota dengan menggunakan teknologi tepat guna. Selain itu, masyarakat kota yang umumnya sibuk karena bekerja, pertanian perkotaan dapat menjadi media untuk memanfaatkan waktu luang. Mengoptimalkan penggunaan lahan serta memanfaatkan waktu luang untuk beraktivitas dalam pertanian perkotaan akan mendekatkan mereka terhadap akses pangan serta menjaga keberlanjutan lingkungan dengan adanya ruang terbuka hijau

F. Ancaman Virus Corona

Saat ini semua negara di dunia berhadapan dengan ancaman virus Corona yang menimbulkan wabah penyakit/pandemi COVID-19. Virus ini telah membuat perekonomian di seluruh dunia seolah terhenti. Diberlakukannya aturan untuk jaga jarak, membuat aktivitas di luar rumah menjadi jauh berkurang, akibatnya seluruh aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Dampak akhir yang akan muncul tentu perlambatan pertumbuhan ekonomi yang itu dapat bermakna hilangnya kesempatan kerja yang akan merembet pada kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Dampak ini harsu diantisipasi oleh setiap pemerintahan agar tidak terjadi kekacauan.

Dalam kondisi ekonomi makro diprediksi mengalami penurunan, terdapat beberapa aktivitas yang diprediksikan tumbuh dengan pesat dan beberapasektor akan mengalami kematian. Gambar berikut menunjukkan peta sektor- sektor yang akan tumbuh dan akan turun di masa krisis pandemi COVID-19. Dalam peta tersebut

salah satu sektor yang diprediksi akan jaya adalah pertanian dan pengolahan pangan. Hal ini jelas merupakan peluang yang sangatbaik bagi Paser yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, apalasi didukung oleh keberadaannya yang terletak di perlintasan Pulau Kalimantan. Dengan demikian sesungguhnya krisis pandemi COVID-19 ini memunculkan peluang bagi beberapa sektor dan memunculkan ancaman bagi sektor yang lainnya.



Sumber: Dcode, 2019, *Decoding the Economics of Covid 19*

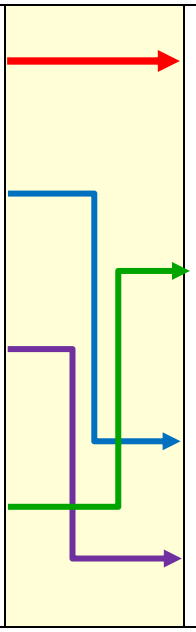
Gambar IV.8.
Sektor-sektor yang Diprediksi akan Kalah dan Menang dalam Jangka Pendek akibat COVID-19

4.2.3. Kajian Keterkaitan RPJMD Kabupaten Paser Dengan RPJMD Kabupaten Yang berbatasan (Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara)

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Paser dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum sudah selaras baik dari aspek Visi maupun aspek Misi dari masing-masing Kabupaten. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Paser dengan RPJMD Kabupaten yang berbatasan sangat penting dalam rangka terciptanya keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun Tabel keselarasan antara RPJMD Kabupaten Paser dengan Kabupaten yang berbatasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.8.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat

No.	Uraian	Kabupaten Paser	Keselarasan	Kabupaten Kutai Barat
1	**VISI**	Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, Dan Sejahtera		Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera, Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		Keselarasan Visi Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat terletak pada unsur "ADIL dan SEJAHTERA", dimana "ADIL dan SEJAHTERA" di Kabupaten Kutai Barat bermakna tidak ada kesenjangan (*gap*) atau disparitas hasil-hasil pembangunan dan hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat		
2	**MISI**	a. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing b. Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan c. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		a. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan; b. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan; c. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel; dan d. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan

Tabel IV.9.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser dengan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Uraian	Kabupaten Paser	Keselarasan	Kabupaten PPU
1	VISI	Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, Dan Sejahtera	⟷	Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju, Modern Dan Religius
		Keselarasan Visi Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU terletak pada unsur Maju, dimana "Maju" di Kabupaten PPU bermakna Meningkatnya kualitas SDM, dan tingkat kemakmuran, hal ini selaras dengan visi Kabupaten Paser "Maju dan Sejahtera		
2	MISI	a. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing b. Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan c. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran b. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan serta industri terpadu c. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan d. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas e. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan f. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan g. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman h. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas i. Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas j. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah k. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser periode 2021–2026 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser 2005-2025 adalah "***Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan***" dengan didukung melalui misi:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar;
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup;
4. Memperkuat kohesivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal; dan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Kabupaten Paser, kedepan lebih menitikberatkan pada pengelolaan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat yang berpihak pada peningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan didukung peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan kohesivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal dan peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam jangka Panjang.

Tahapan RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan yang menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun tahapan RPJPD Kabupaten Paser 5 tahunan adalah:

Tabel V.1

Penekanan Prioritas Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Paser 2005-2025

Periode 5 Tahun Pertama (2005-2010)	Periode 5 Tahun Kedua (2011-2015)	Periode 5 Tahun Ketiga (2016-2020)	Periode 5 Tahun Keempat (2021-2025)
Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan Insfrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penataan Wilayah	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan, Kohesivitas Sosial dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Keberlanjutan Lingkungan

Pada periode 2021-2025, Kabupaten Paser berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Paser. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Keberlanjutan Lingkungan.

Disamping itu Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser periode 2021–2026 selaras dengan Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, serta Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

5.1. Visi

Bertitik tolok dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), yaitu:

"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.
b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing.**

   Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi. Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjamin.

2. **Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan**

   Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

3. **Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan**

   Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

4. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.**

   Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Paser. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART (*spesific, measurable, achievable, relevan* dan *time-bound*), yaitu suatu indikator haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu, sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

1. **Misi 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.**

   Misi 1 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, yaitu:

   Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

   Sasaran 1.1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, dan penanaman modal

   Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan. Yang meliputi urusan Pariwisata, Kebudayaan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

   Pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing merupakan terjemahan dari harapan dan keinginan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan penduduk dari dalam kabupaten Paser, mengurangi ketergantungan barang dan jasa utamanya pangan daeri daerah lain. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pengembangan sektor sektor unggulan yang memiliki keunggulan komepetitif. Hasil akhir yang dicapai tidak saja perekonomian yang mandiri dan berdaya saing, namun didalamnya juga tersirat mengatasi dampak Covid 19 pada pelaku usaha maupun ketersediaan pangan di Paser.

   Saat ini paser telah memiliki keunggulan produk pertanian berupa hasil perkebunan sawit hingga menghasilkan CPO yang cukup besar. Namun demikian industri dasar ini belum mampu menciptakan multiplier yang cukup baik bagi seluruh pelaku ekonomi, untuk itulah maka sasaran pertama dari kemandirian ekonomi ini diarahkan pada penciptaan multiplier melalui hilirisasi pengolahan produk CPO, pada sisi lain multiplier yang ingin diciptakan juga diharapkan hadir dari pertanian tanaman pangan yang saat ini pontesinya belum benar benar tergarap. Paser pada dasarnya memiliki potensi yang sangat luas untuk menghasilkan pangan, apalagi dengan akan dibangunnya waduk Lambakan maka potensi lahan pertanian tergarap

semakin banyak, inilah yang menjadi sasaran dari penciptkaan multuiplier itu. Pada sisi lain pariwisata sebagai sebuah sektor potensial yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengungkit dari berkembangnya perekonomian sebuah wilayah, utamanya ekonomi lokal juga menjadi sasasaran penting untuk menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi Paser.

2. **Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan**

Misi 2 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

Tujuan 2 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas**, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Sasaran 2.1. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**. Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, pengawasan, kearsipan, statistik, persandian, sekretariat DPRD, kecamatan, pemberdayaan masyarakat

Sasaran 2.2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, kependudukan dan catatan sipil, perijinan, serta Komunikasi dan informasi

Sasaran 2.3. **Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif**. Yang meliputi urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat

3. **Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**

Misi 3 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, yaitu:

Tujuan 3 : **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup**, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Sasaran 3.1. **Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur**. Yang meliputi urusan pekerjaan umum, perhubungan, serta perumahan dan pemukiman

Sasaran 3.2. **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana**. Yang meliputi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana

4. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

   Misi 4 ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

   Tujuan 4 : **Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata**, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

   Sasaran 4.1. **Meningkatnya kualitas Pendidikan**. Yang meliputi urusan Pendidikan dan perpustakaan

   Sasaran 4.2. **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**. Yang meliputi urusan kesehatan

   Sasaran 4.3. **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**. Yang meliputi urusan sosial, ketenagakerjaan. pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan

Adapun rincian dari tujuan, sasaran, indikator dan target capaiannya untuk setiap Misi, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel. V.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 1

Misi 1: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing.**		Pertumbuhan Ekonomi	-2.77	1,30	1,32	2,32	2.50	3.64	4.20	4.20
		Sasaran 1.1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	4,87	4,90	4,90	5,14	5,41	5,68	5,95	5,95
		Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	-2,28	-1,00	0.01	1.12	2.21	2.51	2.83	2.83

Tabel. V.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 2

Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas**		Indeks Reformasi Birokrasi	55.81 (CC)	58 (CC)	60 (CC)	65 (CC)	70 (B)	75 (B)	80 (A)	80 (A)
		Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	58.41 (CC)	59 (CC)	61 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)	81 (A)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	70	70	72	74	76	78	78
		Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	78.61	80	80	81	82	83	84	84
		Sasaran 2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas	53	53	52	51	50	49	48	48

Tabel. V.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 3

Misi 3: Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	**Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup**		Indeks Gini	0,290	0,285	0,275	0.270	0.265	0.260	0.250	0.250
		Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	NA	NA	4	5	6	7	8	8
		Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,68	47,50	52,73	59,18	65,82	72,47	78,91	78,91
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,17	70,09	71,43	71,48	71,53	71,58	71,63	71,63
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	196	196,4	195,5	195	194,5	194	193,5	193,5

Tabel. V.4.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Paser Untuk Misi 4

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	**Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata**		Indikator IPM	72.04	73.15	73.03	73.40	74.00	74.50	75.00	75.00
		Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13.10	13.10	13.25	13.30	13.35	13.40	13.50	13.50
			Rata-rata Lama Sekolah	8.55	8.55	8.60	8.70	8.80	8.90	9.00	9.00
		Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72.62	72.71	72.80	72.90	73.10	73.20	73.30	73.30
		Sasaran 4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9.23	8.50	8.00	7.30	6.80	6.30	5.80	5.80
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	4.50	3.45	3.17	3.15	3.12	3.10	3.10

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Paser mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel. VI.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 1

Misi 1: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing**		
	1.1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian	S.1.1.1. Revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN	1. Pengembangan kawasan peternakan (*Mini Ranch*) dan produksi peternakan 2. Pengembangan kawasan pertanian (*Food Estate*) dan kawasan Hortikultura 3. Peremajaan komoditi Kelapa Sawit dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya 4. Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya
		S.1.1.2. Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri)	5. Peningkatan Mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian 6. Pengembangan industri olahan oleh IKM dan UMKM bahan baku berbasis pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		S.1.1.3. Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industrii berbasis kelapa sawit	7. Pengembangan Industri Hilir Produk olahan CPO
		S.1.1.4. Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan pemanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industri	8. Penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan
	1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan	S.1.2.1. Meningkatkan daya tarik wisata dan budaya berbasis masyarakat	9. Pengembangan daya Tarik wisata alam, 10. Pengembangan daya Tarik wisata budaya dan sejarah 11. Pengembangan daya Tarik wisata buatan 12. Peningkatan promosi pariwisata 13. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 14. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pengembangan pusat olahraga (*Sport Center*) 15. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pembangunan Menara Pandang (*viewing deck*)
		S.1.2.2. Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	16. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan setempat berupa pinjaman modal tanpa anggunan dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan mudah
		S.1.2.3. Mendorong tumbuhnya investasi sektor sektor pendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis masyarakat	17. Penguatan peran usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan pariwisata
		S.1.2.4. Mengelola arus perdagangan kawasan untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	18. Mempercepat kemudahan investasi yang berorientasi usaha kecil dan pariwisata
		S.1.2.5. Menjalin kerjasama dengan kawasan sekitar kabupaten Paser dalam pengembangan pariwisata dan usaha kecil	19. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan transportasi menuju objek wisata

Tabel. VI.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 2

Misi 2: Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan

NO	TUJUAN /SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas**		
	2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	S.2.1.1. Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah	1. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berbasis *money follows program priority* 2. Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan 3. Mewujudkan Opini BPK : WTP 4. Peningkatan kontribusi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan 5. Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
		S.2.1.2. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	6. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Penerapan SPIP Terintegrasi di Perangkat Daerah 8. Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sesuai STRANAS PK
		S.2.1.3. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah	9. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi
		S.2.1.4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	10. Implementasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif,Tematik, Spasial
		S.2.1.5. Revitalisasi struktur kelembagaan OPD	11. Penataan struktur organisasi yang proporsional
	2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.2.2.1. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	12. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju *smart city* (kota pintar) 13. Peningkatan penyediaan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
		S.2.2.2. Mengembangkan sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi	14. Percepatan penerapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia 15. Peningkatan kemudahan dan keamanan layanan informasi
		S.2.2.3. Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet	16. Peningkatan kerjasama dengan penyedia jasa jaringan internet

NO	TUJUAN /SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		S.2.2.4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik	17. Peningkatan transparansi dan akuntabiltas pelayanan publik melalui pengembangan zona integritas
		S.2.2.5. Mengembangkan sistem manajemen komplain handling	18. Membuka layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik
		S.2.2.6. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	19. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik 20. Pelaksanaan Desentralisasi urusan pemerintah daerah ke Kecamatan/Kelurahan 21. Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas
	2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	S.2.3.1. Penguatan penegakkan Perda	22. Peningkatan intensitas pengawasan 23. Peningkatan kapasitas personil penertiban 24. Penindakan dan evaluasi pelanggaran Peraturan daerah
		S.2.3.2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	25. Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan 26. Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.
		S.2.3.3. Peningkatan Kualitas Legislasi daerah	27. Penetapan produk hukum daerah tepat waktu 28. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan
		S.2.3.4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	29. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu 30. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
		S.2.3.5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	31. Peningkatan peran BNK dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye, deteksi dini, pendidikan dan pemetaan kawasan. 32. Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN

Tabel. VI.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 3

Misi 3: Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	**Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup**		
	3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	S.3.1.1. Memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi.	1. Peningkatan Infrastruktur jalan di wilayah sentra pertumbuhan ekonomi; 2. Pembangunan Jalan untuk memperlancar mobilitas Barang/Jasa pada daerah rendah konektivitas; 3. Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan mantap khususnya yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan; 4. Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan; 5. Peningkatan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan; 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan;
		S.3.1.2. Meningkatan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik	7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah;
		S.3.1.3. Percepatan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.	8. Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
		S.3.1.4. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi dan infrastruktur lingkungan permukiman.	9. Peningkatan penanganan rumah korban bencana 10. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni 11. Pengelolaan dan pengembangan spam di daerah kabupaten 12. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten. 13. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
		S.3.1.5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.	14. Peningkatan sarana dan prasarana air baku; 15. Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir; 16. Operasi dan Pemeliharaan Sungai wilayah Kabupaten; 17. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder kewenangan Kabupaten

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		S.3.1.6. Melakukan Kerjasama /*Sharing* pendanaan infrastruktur.	18. Melakukan Pinjaman Daerah dalam pengembangan infrastruktur 19. Meningkatkan peran serta perusahaan dalam berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser
	3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	S.3.2.1. Mempercepat dan memperkuat regulasi penataan ruang dan peningkatan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang.	20. Mempercepat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang setiap Kecamatan; 21. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan kawasan sesuai rencana tata ruang.
		S.3.2.2. Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas.	22. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		S.3.2.3. Penguatan komunitas tangguh bencana.	23. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana; 24. Melakukan pembentukan dan kolaborasi komunitas-komunitas peduli bencana
		S.3.2.4. Penguatan advokasi dan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.	25. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya perencanaan strategis lingkungan hidup di daerah; 26. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 27. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah yang fokus di bidang lingkungan hidup
		S.3.2.5. Meningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah	28. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA; 29. Meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah; 30. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat untuk melaksanakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di rumah tangga

Tabel. VI.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Misi 4

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	**Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata**		
	4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	S.4.1.1. Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter	1. Penyediaan sarana dan prasarna pendidikan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan berbasiskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Pelaksanaan pendidikan karakter dengan memperhatikan aspek religious, nasiolisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan
		S.4.1.2. Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi	3. Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi
	4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	S.4.2.1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit	4. Penguatan kapasitas kelembagaan puskesmas dalam bentuk BLUD 5. Peningkatan capaian akreditasi puskesmas serta capaian SPM 6. Penguatan fasilitas pelayanan dasar dan rujukan, kompetensi tenaga kesehatan, tata kelola dan pengendalian penyakit
		S.4.2.2. Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi	7. Meningkatkan upaya promosi, preventif, surveillance serta peran serta masyarakat/dunia usaha dan pemanfaatan inovasi teknologi
	4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.4.3.1. Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan mutu layanan Keluarga Berencana	8. Meningkatkan Pengendalian penduduk, pembinaan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		S.4.3.2. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan	9. Penguatan PUG PUHA, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pengelolaan system data dan pemenuhan hak anak

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		S.4.3.3. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha	10. Meningkatkan pemberdayaan rehabilitasi perlindungan dan jaminan social, serta pelayanan social masyarakat korban bencana 11. Mengembangkan kesenian tradisional pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman 12. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan kapasitas kepramukaan 13. Meningkatkn perlindungan perempuan. Kualias keluarga dan pengarusutamaan hak anak
		S.4.3.4. Meningkatkan Penyerapan, daya saing tenaga kerja serta pencegahan dan optimalisasi penyelesaian konflik ketenaga-kerjaan /hubungan industrial	14. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, produktivitas, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan pekerja mandiri 15. Meningkatkan kualitas balai latihan kerja daerah serta mengoptimalkan peluang kemitraan dengan perusahaan/badan usaha swasta 16. Meningkatkan kondisivitas dan keberlangsungan usaha melalui penyelesaian konflik hubungan industrial yang berkeadilan, dan mendorong peran pengusaha dalam hal kesejahteraan

6.2. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan tahunan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai di Kabupaten Paser pada periode Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, terkait dengan keterbatasan anggaran diperlukan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan dalam menyelesaikan target pembangunan antara lain memaksimalkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak swasta sebagai salah satu tanggungjawab sosial perusahaan yang ada di Kabupaten Paser. Dan untuk mempercepat capaian target indikator tujuan ataupun sasaran, maka pelaksanaan program /kegiatan dapat dilakukan dengan skema pinjaman daerah kepada Lembaga ataupun pihak lainnya atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian diharapan semua pihak dapat memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel. VI.5.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Pengembangan Industri Pengolahan berbasis pertanian untuk menggerakkan perekonomian masyarakat	Pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten Paser	Peningkatan Daya saing SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Untuk Kabupaten Paser Yang Sejahtera	Pemantapan Pelayanan Publik Yang Baik untuk Mewujudkan Kabupaten Paser Yang Maju, Adil dan Sejahtera

6.3. Program Pembangunan Daerah

6.3.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program yang merupakan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Paser terplih pada saat kampanye, yang mana dalam dokumen RPJMD ini dinaungi melalui Program Perangkat daerah, urusan dan Perangkat daerah penanggung jawab, sehingga diharapkan program ini dapat dilaksanakan.

Tabel. VI.6.

Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KERANGKA OPERASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN
1	**BPJS GRATIS BAGI WARGA KURANG MAMPU**	Program Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial	Pemberian bantuan iuran peserta BPJS kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu. dalam rangka mendukung pencapaian Universal Coverage Health (UHC), dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial		
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
				Program Penanganan Bencana		
2	**SATU GURU SATU LAPTOP, GRATIS SERAGAM SEKOLAH DAN BEASISWA PENDIDIKAN**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengadaan 1 Laptop 1 Guru diberikan kepada guru kelas dan guru Mata pelajaran untuk menunjang proses pembelajaran.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan
			Seragam Sekolah Gratis diberikan kepada Siswa Baru khususnya untuk Kelas 1 SD dan Kelas VII SMP			
			Beasiswa pendidikan diberikan khusus untuk putra putri kabupaten Paser yg kurang mampu dan berprestasi yang akan melanjutkan Kuliah di Perguruan tinggi			

NO	PROGRAM BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KERANGKA OPERASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN
3	**PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG BERKUALITAS DAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH**	Program Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas	Pembangunan Infrastruktur jalan yang berkualitas dan penyediaan sarana air bersih sangat berperan penting dalam mendorong keberhasilan Pembangunan sektor lainnya. Dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan sarana air bersih adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, Peningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.	Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	**REHABILITASI RUMAH WARGA KURANG MAMPU**	Program Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas	Rehabilitasi rumah warga kurang mampu merupakan salah satu wujud dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang layak bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan aman, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Paser masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KERANGKA OPERASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN
5	**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TIDAK TETAP /TENAGA HONORER, INSENTIF KETUA RT. INSENTIF GURU NGAJI, DAN IMAM /KAUM MASJID**	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah	Alokasi pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan program pembangunan sampai pada struktur penyelenggara dan lembaga pemerintah mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Keuangan
6	**PEMERATAAN PUSKESMAS RAWAT INAP**	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan dan Jaminan Kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar dalam rangka mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
7	**MENJADIKAN PERTANIAN SEBAGAI ANDALAN KABUPATEN**	Program peningkatan produksi, mutu hasil dan olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi yang cukup tinggi dan laju pertumbuhan yang positif, sehingga sektor pertanian di daerah perlu menjadi prioritas untuk melihat seberapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan laju pertumbuhan ekonomi di daerah pada kurun waktu tahun 2021-2026.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	Pertanian
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	

NO	PROGRAM BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KERANGKA OPERASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	
				Program penyuluhan pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
				Program perizinan usaha pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	
				Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan

NO	PROGRAM BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KERANGKA OPERASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	
				Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
				Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
8	**MENEMPATKAN PARIWISATA SEBAGAI ANDALAN EKONOMI KREATIF**	Program pengembangan industri kreatif	Pengintegrasian industri kreatif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar	Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Disporapar	
				Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disporapar	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar	
				Program Pengembangan kebudayaan	Disdikbud	Kebudayaan
				Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Disperindagkop	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengembangan UMKM	Disperindagkop	
				Program Perencanaan dan pembangunan industri	Disperindagkop	Perindustrian

NO	PROGRAM BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KERANGKA OPERASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN
9	**MENINGKATKAN ANGGARAN DESA**	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan penerimaan porsi anggaran dana desa diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Keuangan

6.3.2. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi

Pencapaian indikator target kinerja Visi dan Misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 2021-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Secara lengkap Program prioritas Pembangunan Daerah dapat di lihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. VI.7.

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 1

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	MISI 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing																	
	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	-2.77	1,30	1,32		2,32		2.50		3.64		4.20		4.20		
	Sasaran 1.1: Meningkatnya efek berganda(*multiplier effect*) sektor pertanian	**Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang**	**%**	4.87	4.90	4.90		5.14		5.41		5.68		5.95		5.95		
	PROGRAM DAERAH: **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU HASIL DAN OLAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**	**Rata-rata pertumbuhan produksi pertanian**	**%**	**1,23**	**2,00**	**2,44**		**2,49**		**2,46**		**2,08**		**2,54**		**2,54**		DTPH, Disbunnak, Diskan dan DKP
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	%	100	100	100	1,977,478,290	100	2,500,000,000	100	2,750,000,000	100	2,750,000,000	100	3,014,331,504	100	12,991,809,794	DTPH
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Presentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	45,029,539,601	100	45,017,891,952	100	46,000,000,000	100	46,471,832,649	100	46,800,000,000	100	229,319,264,202	DTPH
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	%	-2.23	8.00	10.89	125,200,000	10.40	350,000,000	9.34	360,000,000	11.98	360,000,000	9.59	360,000,000	9.59	1,555,200,000	DTPH

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	%	NA	100	100	1,182,087,633	100	1,182,087,633.00	100	1,199,818,947.50	100	1,217,816,231.71	100	1,236,083,475.18	100	6,017,893,920.39	Sekretariat Daerah
	Program Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	%	50	50	60	1,040,004,597	62	1,177,804,597	64	1,250,000,000	66	1,250,000,000	68	1,300,000,000	68	6,017,809,194	DTPH
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	%	0	100	100	5,875,071,800	100	5,900,000,000	100	6,000,000,000	100	6,000,000,000	100	6,500,000,000	100	30,275,071,800	Disbunnak
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	%	0	100	100	1,674,292,323	100	2,200,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,600,000,000	100	11,474,292,323	Disbunnak
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	%	50	50	60	851,054,357	60	1,067,881,157	60	1,157,380,338	60	1,157,380,338	60	1,200,000,000	60	5,433,696,190	Disbunnak
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	%	0	100	100	90,394,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	890,394,000	Disbunnak
	Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	0	100	100	90,980,000	100	600,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,190,980,000	Disbunnak
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-3.29	0.1	0.1	9,517,145,370	0.6	9,520,745,370	0.6	10,000,000,000	0.6	10,000,000,000	0.6	10,500,000,000	0.6	49,537,890,740	Dinas Perikanan

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	6.23	1.00	1.00	3,771,726,400	1.00	3,667,126,400	1.00	4,000,000,000	1.00	4,000,000,000	1.00	4,500,000,000	1.00	19,938,852,800	Dinas Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	%	35	35	35	78,086,000	45	83,086,000	45	83,086,000	45	83,086,000	45	83,086,000	45	410,430,000	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	%	-81.8	0.1	0.1	847,471,513	0.9	875,671,513	0.9	875,671,513	0.9	875,671,513	0.9	875,671,513	3.7	4,350,157,565	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	30	31	110,000,000	50	1,100,000,000	55	1,100,000,000	60	1,100,000,000	65	1,100,000,000	65	4,510,000,000	DKP
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	%	97.59	97.70	97.77	213,591,990	97.90	1,221,628,360	98	1,200,000,000	98.5	1,200,000,000	99	1,200,000,000	99	5,035,220,350	DKP
		Tingkat konsumsi pangan	%	84.1	85	85	468,996,370	86	1,180,000,000	87	1,200,000,000	88	1,200,000,000	89	1,200,000,000	89	5,248,996,370	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	20.83	19.44	18.75	123,798,270	18.06	140,000,000	17.36	150,000,000	16.67	185,000,000	15.97	210,000,000	15.97	808,798,270	DKP
		Persentase Penyaluran cadangan Pangan	%	38.84	10	10	355,811,658	10	610,000,000	10	450,000,000	10	465,000,000	10	490,000,000	50	2,370,811,658	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%	71,67	80	80	266,800,000	82	700,000,000	84	400,000,000	86	400,000,000	88	450,000,000	88	2,216,800,000	DKP
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	%	2,10	2.10	2.40	1,360,800,000	2.40	1,760,800,000	2.40	1,800,000,000	2.40	1,800,000,000	2.40	1,800,000,000	2.40	8,521,600,000	Dinas Perindag kop UKM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	Persentase pemutahiran data IKM	%	40	40	45	55,400,000	50	125,000,000	55	135,000,000	60	145,000,000	60	155,000,000	60	615,400,000	Dinas Perindag kop UKM

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Juta Rupiah	657,970	670,000	690,869	195,919,800	725,412	250,919,800	761,683	250,919,800	837,851	250,919,800	921,636	250,919,800	3,937,450	1,199,599,000	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor non tambang dan non sawit	Investor	56	56	59	98,800,000	62	103,800,000	65	103,800,000	71	103,800,000	78	103,800,000	335	514,000,000	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	80	81.02	535,600,000	82.06	610,400,000	82.06	610,400,000	82.08	610,400,000	82.10	610,400,000	82.10	2,977,200,000	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	Investor	56	56	59	97,600,000	62	102,200,000	65	102,200,000	71	102,200,000	78	102,200,000	335	506,400,000	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	%	50	50	60	156,400,000	70	171,400,000	80	171,400,000	90	171,400,000	100	171,400,000	100	842,000,000	DPMPTSP
	Sasaran1.2 : Berkembangnya sektor kepariwisataan	**Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)**	**%**	-2,28	-1.00	0.01		1.12		2.21		2.51		2.83		2.83		
	PROGRAM DAERAH: **PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF**	**Pertumbuhan industri pengolahan non tambang**	**%**	17.32	17.05	17,10		17,45		17,53		17,75		18,10		18,10		Disporapar Disdikbud, & Disperin-dagkop UKM
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang baik	%	16,13	17	18,75	16,713,088,000	21.21	15,713,088,000	23.53	5,584,396,800	25.71	6,842,836,480.	28.77	8,227,120,128	28.77	53,080,529,408.	Disporapar
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-56,13	10	14,26	194,449,000.00	20	194,449,000.00	25	213,893,900.00	33.33	235,283,290.00	35	258,811,619.00	35	1,096,886,809.00	Disporapar
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perlindungan Hak Cipta dari HAKI	Produk	0	0	1	165,392,388.00	1	165,392,388.00	1	181,931,626.80	1	200,124,789.48	1	220,137,268.43	5	932,978,460.71	Disporapar

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	%	10	10	20	207,106,001.00	20	207,106,001.00	20	227,816,601.10	20	250,598,261.21	20	275,658,087.33	100	1,168,284,951.64	Disporapar
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	%	2.70	1	4	9,419,532,400	4	10,710,652,400	4	10,710,652,400	4	10,710,652,400	4	10,710,652,400	20	52,262,142,000	Disperindag kop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	50	50	50	68,468,000	50	124,000,000	60	134,000,000	60	144,000,000	60	154,000,000	60	624,468,000	Disperindag kop UKM
	Program Pengembangan Eksport	Persentase Peningkatan produk lokal yang dieksport	%	0	0	20	42,308,600	20	156,500,000	20	200,000,000	20	220,000,000	20	258,000,000	100	876,808,600	Disperindag kop UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	%	50	50	100	239,121,134	100	243,721,134	100	243,721,134	100	243,721,134	100	243,721,134	100	1,214,005,670	Disperindag kop UKM
	Proram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan	%	0	0	10	55,400,000	12	155,400,000	15	165,400,000	17	175,400,000	20	185,400,000	20	737,000,000	Disperindag kop UKM
	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat	%	56.33	56.33	59	55,400,000	62	203,000,000	65	253,000,000	67	270,000,000	70	280,000,000	70	1,061,400,000	Disperindag kop UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rata-Rata Omset per koperasi	Juta Rp	219	219	255	55,400,000	257	207,000,000	260	217,000,000	265	227,000,000	270	237,000,000	270	943,400,000	Disperindag kop UKM
	Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang maju	%	0	0	0	-	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	48	800,000,000	Disperindag kop UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	%	0	0	5	55,400,000	5	157,000,000	5	177,000,000	5	197,000,000	5	207,000,000	25	793,400,000	Disperindag kop UKM

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang naik kelas	%	0	0	0.05	105,400,000	0.05	178,000,000	0.05	198,000,000	0.05	208,000,000	0.05	228,000,000	0.25	917,400,000	Disperin dag kop UKM

Tabel. VI.8.

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 2

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	MISI 2 : Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan																	
	TUJUAN 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi		55.81 (CC)	58 (CC)	60 (CC)		65 (CC)		70 (B)		75 (B)		80 (A)		80 (A)		
	SASARAN 2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP		58.41 (CC)	59 (CC)	61 (B)		65 (B)		70 (BB)		75 (BB)		81 (A)		81 (A)		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		NA	70	70		72		74		76		78		78		
	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH	Nilai SAKIP	Nilai	58.41 (CC)	59 (CC)	61 (B)		65 (B)		70 (BB)		75 (BB)		81 (A)		81 (A)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	NA	70	70	905,208,973,605.00	72	909,876,622,834.66	74	915,323,824,866.49	76	920,885,929,529.56	80	926,781,736,637.60	80	4,578,077,087,473.31	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	%	75	75	75	793,708,719.00	80	793,708,719.00	85	805,614,349.79	90	817,698,565.03	90	829,964,043.51	90	4,040,694,396.32	Sekretariat Daerah

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	27,509,464,125	100	28,083,344,627	100	28,739,885,802	100	29,412,157,370	100	30,100,542,343	100	143,845,394,267	Sekretariat Daerah
		Nilai EKPPD		2.80	2.80	2.90		2.95		3.00		3.10		3.20		3.20		
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	92.64	93	93	1,510,734,458.00	94	1,510,734,458.00	95	1,533,395,475.00	96	1,556,396,407.00	97	1,579,742,353.00	97	7,691,003,151.00	Bappeda litbang
		Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	%	NA	90	93		94		95		96		97		97		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91.64	92	92	3,107,609,808.00	93	3,107,609,808.00	94	3,154,223,955.12	95	3,201,537,314.45	96	3,249,560,374.16	96	15,820,541,259.73	Bappeda litbang
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	50	60	2,400,914,959.00	65	2,400,914,959.00	70	2,436,928,683.39	75	2,473,482,613.64	80	2,510,584,852.84	80	12,222,826,067.86	Bappeda litbang
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	%	NA	100	100	5,999,541,240.00	100	5,999,541,240.00	100	6,089,534,359.00	100	6,333,115,733.00	100	6,586,440,362.00	100	31,008,172,934	BKPSDM
		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	%	NA	50	70		75		80		85		90		90		
		Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	%	NA	50	70		75		80		85		90		90		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	%	NA	50	70	7,592,774,031.00	75	7,668,701,771.31	80	7,745,388,789.02	85	7,822,842,676.91	90	7,901,071,103.68	90	7,901,071,103.68	BKPSDM

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	NA	100	100	19,497,661,530	100	19,497,661,530	100	19,527,661,530	100	19,557,661,530	100	19,587,661,530	100	97,668,307,650	Sekretariat DPRD
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	Doku-men	NA	6	6		6		6		6		6		30		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	%	NA	100	100	1.558.149.331,00	100	1.558.149.331,00	100	1.604.771.571,47	100	1.605.244.388,93	100	1.629.323.054,76	100	7.955.637.677,15	Keca matan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	%	NA	10	10	303,069,138,675 .00	10	267,494,871,636 .00	10	272,024,527,654 .96	10	276,783,921,622 .97	10	281,751,930,067 .66	10	1,401,124,389,656 .59	BKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	%	NA	50	50	1,630,257,973. 00	55	1,630,257,973. 00	60	1,654,711,842. 60	65	1,679,532,520. 23	70	1,704,725,508. 04	70	8,299,485,816. 87	BKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,34	7,5	7,5	2,918,106,100. 00	7,7	2,893,106,100. 00	8	2,936,502,691. 50	8,3	2,980,550,231. 87	8,5	3,025,258,485. 35	8,5	14,753,523,608. 72	Bapenda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)		2.50	2.50	3.04	2,547,278,867.00	3.50	2,547,278,867.00	3.70	2,585,488,050.00	3.90	2,624,270,370.76	4.00	2,663,634,426.32	4.00	12,967,950,581.07	Inspek torat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	70	70	0.00	75	300,000,000.00	80	304,500,000.00	85	309,067,500.00	90	313,703,513.00	90	1,227,271,013.00	Inspek torat
		Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	25	70		75		80		85		90		90		Inspek torat

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	36	38	40	136,654,240.00	50	236,654,240.00	60	260,319,664.00	70	286,351,630.40	80	314,986,793.44	80	1,234,966,567.84	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%	44	48	50	162,245,774.00	55	262,245,774.00	60	288,470,351.40	65	317,317,386.54	70	349,049,125.19	70	1,379,328,411.13	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase angka pemakaian arsip	%	100	100	100	40,820,760.00	100	140,821,534.00	100	147,862,610.70	100	162,648,871.77	100	178,913,758.95	100	671,067,535.42	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%	100	100	100	592.320.000,00	100	512.745.700,00	100	536.469.000,00	100	558.006.000,00	100	581.942.300,00	100	2.781.483.000,00	Dinas kominfo staper
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi	%	NA	30	38	150.000.000,00	50	123.543.300,00	63	129.536.500,00	75	134.977.500,00	88	141.024.600,00	88	679.081.900,00	Dinas kominfo staper
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	%	NA	0	2	57,009,800.00	5	107,009,800.00	8	108,614,947.00	10	210,244,171.21	12	248,159,269.77	12	731,037,987.98	DPMD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	%	NA	100	100	41,600,000.00	100	61,600,000.00	100	62,524,000.00	100	64,211,860.00	100	65,175,037.90	100	295,110,897.90	DPMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	%	NA	100	100	3,987,335,000.00	100	3,987,335,000.00	100	4,047,145,025.00	100	4,107,852,200.38	100	4,169,469,983.38	100	20,299,137,208.76	DPMD
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	%	78.61	80	80		81		82		83		84		84		
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	%	95	95	95	240,108,680.00	96	240,108,680.00	97	243,710,310.20	98	285,105,066.85	98	339,381,642.86	98	1,348,414,379.91	Disduk capil

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	%	95	95	95	367,000,000.00	96	367,000,000.00	97	372,505,000.00	98	378,092,575.00	98	433,763,963.63	98	1,918,361,538.63	Disduk capil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	%	95	95	95	1,102,079,958.00	96	1,102,079,958.00	97	1,118,611,157.37	98	1,135,390,324.73	98	1,152,421,179.60	98	5,610,582,577.70	Disduk capil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	22,000,000.00	100	22,000,000.00	100	22,330,000.00	100	22,664,950.00	100	23,004,924.25	100	111,999,874.25	Disduk capil
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	%	NA	100	100	3,190,219,776.00	100	3,700,416,200.00	100	3,827,773,800.00	100	3,943,396,000.00	100	4,071,892,600.00	100	18,733,698,376.00	Dinas kominfo staper
	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	NA	25	30	11,649,600,000.00	40	10,687,538,700.00	50	11,114,300,000.00	60	11,557,600,000.00	70	11,474,202,300.00	70	56,483,241,000.00	Dinas kominfo staper
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	NA	70	70	4.363.758.126,00	72	4.363.758.126,00	74	4.424.391.553,89	76	4.514.356.183,62	80	4.582.071.526,38	80	22.248.335.515,89	Kecama-tan
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Reko-mendasi	120	50	50	55,400,000	50	185,000,000	50	188,500,000	50	191,000,000	50	194,000,000	250	813,900,000	Disperin dag kop UKM
	SASARAN 2.3 : Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas		53.00	53.00	52.00		51.00		50.00		49.00		48.00		48.00		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Angka Kriminalitas		53.00	53.00	52.00		51.00		50.00		49.00		48.00		48.00		

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda	%	NA	50	50	2,791,982,982.00	55	2,791,982,982.00	60	2,833,811,976.73	65	2,876,319,156.38	70	2,919,463,943.73	70	14,213,561,040.84	Satpol PP
		Presentase Demonstrasi Anarkis	%	NA	0	0		0		0		0		0		0		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	%	NA	10	30	1,532,746,700.00	40	1,554,986,654.00	50	1,628,311,454	60	1,903,486,125.62	70	2,132,038,417.50	70	8,751,569,350.93	Dinas Damkar
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penurunan konflik berbau sara	%	50	100	100	150,227,000.00	100	150,227,000.00	100	152,480,405.00	100	154,767,611.08	100	157,089,125.24	100	764,791,141.32	Badan Kesbang pol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	70	70	80	840,146,862.00	80	840,146,862.00	80	852,749,064.93	80	865,540,300.90	80	878,523,405.42	80	4,277,106,495.25	Badan Kesbang pol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	%	NA	75	75	86,287,300.00	75	136,287,300.00	75	138,331,609.50	75	140,406,583.64	75	142,512,682.40	75	643,825,475.54	Badan Kesbang pol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	870,000,000.00	100	870,000,000.00	100	883,050,000.00	100	896,295,750.00	100	909,740,186.25	100	4,429,085,936.25	Dinas Kesbang pol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	NA	100	100	1,631,292,553.00	100	1,631,292,553.00	100	1,655,761,941.30	100	1,680,598,370.41	100	1,705,807,345.97	100	8,304,752,763.68	Dinas Kesbang pol

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	NA	50	50	2.872.762.501,00	55	2.872.762.501,00	60	2.915.853.938,52	65	2.959.591.747,09	70	3.103.985.623,66	70	14.724.956.311,27	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	100	455.720.250,00	100	455.720.250,00	100	462.556.053,75	100	469.494.394,56	100	476.536.810,47	100	2.320.027.758,78	Kecamatan

Tabel. VI.9.

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 3

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	MISI 3 : Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan																	
	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini		0.290	0.285	0.275		0.270		0.265		0.260		0.250		0,250		DPUTR
	Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		NA	4	4		5		6		7		8		8		DPUTR

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	51,05	55	64,5		69		73.5		78		82.5		82.5		DPUTR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,62	39	54	996,684,401,088.90	58	336,858,859,810.49	62	329,805,560,208.01	66	322,583,007,328.26	70	332,722,719,172.65	70	2,318,654,547,608.31	DPUTR
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	67,48	71	75	25,160,000,000.00	80	18,500,000,000.00	85	18,839,931,918.02	90	18,795,733,922.00	95	19,290,009,782.76	95	100,585,675,622.78	DPUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	%	67	68	70	10,335,000,000.00	73	10,351,750,000.00	76	10,368,500,000.00	80	10,385,250,000.00	85	10,402,000,000.00	85	51,842,500,000.	DPUTR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik.	%	78	81	82	22,107,847,827.00	84	30,551,920,000.00	86	36,051,920,000.00	88	39,329,930,030.23	90	37,051,920,000.00	90	165,093,537,857.23	DPUTR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	%	49	55	61	640,400,000.00	68	695,820,000.00	74	727,840,000.00	82	759,860,000.00	91	791,880,000.00	91	3,615,800,000.	DPUTR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	%	1	20	25	30,965,075,340.00	30	36,397,800,000.00	36	43,747,800,000.00	43	51,097,800,000.00	50	58,447,800,000.00	50	220,656,275,340	DPUTR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	%	3.25	8.44	27.92	1,569,358,800.00	47.40	1,584,287,040.00	66.88	1,601,061,392.00	86.36	1,650,174,461.00	100	1,701,743,184.00	100	8,106,624,877.00	DPKPP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%	0	5	15	8,045,053,900.00	30	8,052,710,425.00	50	8,204,399,946.00	70	9,356,089,467.00	90	9,522,947,940.00	90	43,181,201,678.00	DPKPP

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	%	88.30	89.26	90.23	12,046,721,200.00	91.20	12,211,840,900.00	92.17	12,494,842,945.00	93.13	12,791,995,092.00	94.10	13,104,004,846.00	94.10	62,849,404,983,00	DPKPP
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	35.58	39.58	44.58	208,626,127,379	51.58	168,326,924,752	58.58	163,631,940,990	65.58	167,106,292,519	72.58	165,816,587,148	72.58	873,507,872,788	DPKPP
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase capaian akses air minum layak	%	66,88	70	76	63,047,600,000.00	81	52,250,000,000.00	87	58,500,000,000.00	93	59,750,000,000.00	100	55,723,312,632.67	100	289,270,912,632.67	DPUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	%	67,13	71	75	3,385,000,000.00	78	3,404,250,000.00	82	3,423,500,000.00	86	3,442,750,000.00	90	3,462,000,000.00	90	17,117,500,000.00	DPUTR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	%	60	70	85	13,219,902,677.00	90	9,409,811,768.60	90	9,939,370,719.00	95	10,057,827,071.00	100	10,592,123,571.00	100	53,219,035,806.60	Dishub
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	%	50	60	85	2,364,318,480.00	90	4,489,318,600.00	90	4,534,029,000.00	95	4,644,512,000.00	100	4,047,209,500.00	100	20,079,387,580.00	Dishub
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.	%	0	5	20	126,591,600.00	40	118,875,000.00	60	123,972,300.00	80	128,600,000.00	100	133,750,000.00	100	631,788,900.00	Dishub

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan kawasan transmigrasi Yang sesuai perencanaan	%	1	0	100	144,832,000	0	-	0	-	100	318,500,000	0	-	100	463,332,000	Disnaker trans
	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	%	40	50	60	140,000,000	70	140,000,000	80	140,000,000	90	140,000,000	100	140,000,000	100	700,000,000	Disnaker trans
	Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan perkotaan baru yang memiliki sarana prasarana yang memadai	Kawa-san	1	0	1	300,000,000	0	-	0	-	1	595,400,000	0	-	2	895,400,000	Disnaker trans
	Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		44.68	47.50	52.73		59.18		65.82		72.47		78.91		78.91		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	71,17	70.09	71,43		71,48		71,53		71,58		71,63		71,63		
		Indeks Risiko Bencana (IRB)		196	196.4	195,5		195		194,5		194		193,5		193,5		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENATAAN RUANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	71.17	70.09	71,43		71,48		71,53		71,58		71,63		71,63		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	%	50	55	62.5	764,491,040.00	70	769,291,040.00	83.3	769,291,040.00	85.71	769,291,040.00	87,50	769,291,040.00	87,50	3,841,655,200	DLH

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68	69	70	1,300,180,000.00	73	1,300,180,000.00	75	1,300,180,000.00	78	1,300,180,000.00	80	1,300,180,000.00	80	6,500,900,000	DLH
		Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	3	4.5	6	257,400,000.00	9	281,060,000.00	12	281,060,000.00	15	281,060,000.00	18	281,060,000.00	18	1,381,640,000	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase jumlah perusahaan/ pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	%	50	55	60	250,000,000.00	80	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	1,250,000,000	DLH
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	%	55	65	80	275,000,000.00	100	310,000,000.00	100	370,000,000.00	100	435,000,000.00	100	500,000,000.00	100	1,890,000,000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.	%	11,22	25	40	227,000,000.00	55	231,700,000.00	65	231,700,000.00	75	231,700,000.00	85	231,700,000.00	85	1,153,800,000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragman Hayati (KEHATI)	Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	%	48.72	50	55	7,010,000,000.00	60	3,620,400,000.00	65	3,620,400,000.00	70	3,620,400,000.00	75	3,620,400,000.00	75	21,491,600,000	DLH

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	0	100	45,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	445,000,000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah predikat penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Buah	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	155,000,000.00	1 Piagam adipura	200,000,000.00	1 Piagam adipura	200,000,000.00	1 Piagam adipura	200,000,000.00	1 Trofi adipura	200,000,000.00	1 Trofi adipura	955,000,000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	68,75	80	100	207,400,000.00	100	212,200,000.00	100	212,200,000.00	100	212,200,000.00	100	212,200,000.00	100	1,056,200,000	DLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	39,57	42.50	45	11,303,959,471.	53	10,084,619,471	61	10,084,619,471	70	10,084,619,471	70	10,084,619,471	70	51,642,437,355	DLH
		Persentase pengelolaan sampah disumber	%	11,37	12	14	654,340,094.00	19	1,404,340,094.	24	654,340,094.00	30	654,340,094.00	30	654,340,094.00	30	4,021,700,470	DLH
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang berfungsi dengan baik	%	40	45	50	1,000,000,000.00	55	1,050,000,000.00	60	1,100,000,000.00	65	1,150,000,000.00	70	1,200,000,000.00	70	5,500,000,000.00	DPUTR
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	%	68	70.50	73,33	39,636,390,782	76,66	3,242,840,000	78,33	3,242,840,000	80	3,242,840,000	81,66	3,242,840,000	81.66	52,607,750,782	DLH
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	%	44.68	47.50	52.73	2,136,553,605.00	59.18	2,281,021,285.25	65.82	2,387,848,965.50	72.47	2,494,676,645.75	78.91	2,601,504,326.00	78.91	11,901,604,827.5	DPUTR
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	1,871,840,814.00	100	2,209,760,814.00	100	2,243,570,154.00	100	2,277,784,599.00	100	2,313,340,817.00	100	10,916,297,198.00	BPBD

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	%	14.29	28.57	42.86	373,066,000.00	57.14	382,452,800.00	71.43	397,375,440.00	85.71	413,044,212.00	100	429,496,422.00	100	1,995,434,874.00	DPKPP
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	16.67	33.33	44.44	8,552,602,000.00	55.56	6,438,051,500.00	66.67	6,758,774,075.00	83.33	7,095,532,778.00	100	7,449,129,416.00	100	36,294,089,769.00	DPKPP
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase proses penetapan tanah ulayat	%	NA	NA	30	101,304,000.00	50	104,380,000.00	80	108,129,000.00	100	112,004,000.00	-	0.00	100	425,817,000.00	DPKPP
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	%	NA	NA	10	131,763,000.00	30	174,380,300.00	50	178,069,315.00	70	182,004,230.00	100	172,208,641.00	100	838,425,486.00	DPKPP

Tabel. VI.10.

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Misi 4

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing																	
	TUJUAN 4 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	**Indeks pembangunan Manusia**	**%**	**72.04**	**73.15**	**73.03**		**73.40**		**74.00**		**74.50**		**75.00**		**75.00**		
	SASARAN 4.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	**1. Angka Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**13.10**	**13.10**	**13.25**		**13.30**		**13.35**		**13.40**		**13.50**		**13.50**		Disdikbud
		2. Rata - rata Lama Sekolah	**Tahun**	**8.55**	**8.55**	**8.60**		**8.70**		**8.80**		**8.90**		**9.00**		**9.00**		Disdikbud
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	**Rata - rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**8.55**	**8.55**	**8.60**		**8.70**		**8.80**		**8.90**		**9.00**		**9.00**		Disdikbud
	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APK SD	%	108.62	108.62	108.62	205,010,657,114.95	107.00	204,470,447,806.00	108.00	206,987,624,176.19	104.00	209,073,208,709.18	100	210,877,322,894.98	100	1,036,419,260,701.25	Disdikbud
		2. APK SMP	%	95.00	95.00	95.00		95.50		96.00		98.00		100		100		Disdikbud
		3. APM SD	%	97.87	97.87	97.87		98.00		98.50		99.00		100		100		Disdikbud
		4. APM SMP	%	81.58	81.58	95.00		95.50		96.00		98.00		100		100		Disdikbud
		5. APK PAUD	%	37.60	37.60	37.60		38.00		39.00		39.50		40.00		40.00		Disdikbud
		6. Angka Putus Sekolah SD	%	0.94	0.94	0.90		0.70		0.70		0.50		0.25		0.25		Disdikbud
		7. Angka Putus Sekolah SMP	%	2.28	2.28	2		1.5		1		0.5		0		0		Disdikbud
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	%	90	90	100	54,657,500.00	100	54,657,500.00	100	60,123,250.00	100	66,135,575.00	100	72,749,132.50	100	308,322,957.50	Disdikbud

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Pendidik sesuai standar	%	90	90	90	75,000,000.00	91	82,500,000.00	91	90,750,000.00	92	99,825,000.00	92	109,807,500.	92	457,882,500.00	Disdikbud
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Tenaga Kependidikan sesuai standar	%	NA	50	50		55		60		65		70		70		
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	%	100	100	100	396,485,000.00	100	396,350,000.00	100	416,167,500.00	100	436,975,875.00	100	458,824,668.75	100	2,104,803,043.75	Disdikbud
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	%	N/A	N/A	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	55,000,000.00	100	60,500,000.00	100	66,550,000.00	100	282,050,000.00	Disdikbud
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	1	1	1.5	459,400,000.00	2	659,400,000.00	2.5	725,340,000.00	3	797,874,000.00	3.5	877,661,400.00	3.5	3,519,675,400	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Naskah	N/A	2	5	36,000,000.00	5	36,000,000.00	5	39,600,000.00	5	43,560,000.00	5	47,916,000.00	30	203,076,000.00	Dinas Kearsipan & Perpus
	SASARAN 4.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Umur Harapan Hidup**	**Tahun**	**72.62**	**72.71**	**72.80**		**72.90**		**73.10**		**73.20**		**73.30**		**73.30**		Dinkes
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN	**Umur Harapan Hidup**	**Tahun**	**72.62**	**72.71**	**72.80**		**72.90**		**73.10**		**73.20**		**73.30**		**73.30**		Dinkes
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	100	190,057,891,502	100	206,949,045,200	100	210,115,365,592	100	213,319,624,917	100	216,649,544,262	100	1,037,091,471,473	Dinkes

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	%	100	100	100	37,083,880,000	100	36,083,880,000	100	36,635,963,364	100	37,194,661,805	100	37,775,270,476	100	184,773,655,645	Dinkes
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	%	100	100	100	123,307,000.00	100	123,307,000.00	100	125,193,597.00	100	127,102,799.00	100	129,086,874.00	100	627,997,270.00	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	%	NA	57.5	60	181,000,000.00	70	181,000,000.00	80	183,769,300.00	90	186,571,782.00	100	189,484,167.00	100	921,825,249.00	Dinkes
	SASARAN 4.3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	**Angka Kemiskinan**	**%**	**9.23**	**8.50**	**8.00**		**7.30**		**6.80**		**6.30**		**5.80**		**5.80**		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	**4,52**	**4.50**	**3.45**		**3.17**		**3.15**		**3.12**		**3.10**		**3.10**		
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL	**Angka Kemiskinan**	**%**	**9.23**	**8.50**	**8.00**		**7.30**		**6.80**		**6.30**		**5.80**		**5.80**		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	%	100	100	100	127,391,320.00	100	140,000,000.00	100	160,000,000.00	100	170,000,000.00	100	180,000,000.00	100	777,391,320.00	Disnaker trans
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	40	50	544,161,945.00	60	550,000,000.00	70	600,000,000.00	85	650,000,000.00	100	700,000,000.00	100	3,044,161,945.00	Disnaker trans
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	30	40	30	164,716,412.00	30	150,000,000.00	30	160,000,000.00	30	170,000,000.00	30	180,000,000.00	30	824,716,412.00	Disnaker trans
	Program Hubungan Industrial	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	%	38.46	40	40	218,252,384.00	40	230,000,000.00	40	250,000,000.00	40	270,000,000.00	40	300,000,000.00	40	1,268,252,384.00	Disnaker trans

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Kasar		12.61	12.35	12	278,400,000.00	10	295,426,000.00	10	299,946,017.80	10	304,520,194.57	10	309,273,754.81	10	1,487,565,967.18	Dinas PPKBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB		73.6	74.5	75	3,883,661,350.00	76	3,895,244,484.00	76.5	3,954,841,725.00	77	4,015,153,061.00	77.5	4,077,829,600.00	77.5	19,826,730,220.00	Dinas PPKBP3A
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	%	100	100	100	333,318,900	100	353,549,656.00	100	358,958,966.00	100	364,433,090.00	100	370,121,890.00	100	1,780,382,502.00	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	986,719,230	100	1,008,125,999.00	100	1,023,550,327.00	100	1,039,159,469.00	100	1,055,380,749.00	100	5,112,935,774.00	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	681,078,000	100	702,739,120.00	100	713,491,029.00	100	724,371,767.00	100	735,679,210.00	100	3,557,359,126.00	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana	%	100	100	100	408,716,000	100	461,082,640.00	100	468,137,204.00	100	475,276,297.00	100	482,695,360.00	100	2,295,907,501.00	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	128,854,000	100	170,026,160.00	100	172,627,560.00	100	175,260,131.00	100	177,995,941.00	100	824,763,792.00	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	%	100	100	100	125,000,000.00	100	135,890,000.00	100	137,969,117.00	100	140,073,146.00	100	142,259,688.00	100	681,191,951.00	Dinas PPKBP3A
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan	%	34.39	36	37.50	481,000,000.00	40.00	506,130,000.00	43.50	513,873,789.00	46.50	521,710,364.28	49.50	529,854,263.07	49.50	2,552,568,416.35	Dinas PPKBP3A
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	36	45	59.52		71.43		83.33		100		100		100		Dinas PPKBP3A
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	%	82.35	90	100	157,840,000.00	100	158,704,000.00	100	161,132,171.20	100	163,589,436.81	100	166,143,067.92	100	807,408,675.93	Dinas PPKBP3A

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	%	40	45	50	88,012,000.00	60	97,422,480.00	70	98,913,043.94	80	100,421,467.86	90	101,989,046.98	90	486,758,038.79	Dinas PPKBP3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	%	23.81	30	47.62	100,000,000.00	59.52	109,890,000.00	71.43	111,571,317.00	83.33	113,272,779.58	95.24	115,040,967.67	95.24	549,775,064.26	Dinas PPKBP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Poin	560	580	600	125,000,000.00	650	135,890,000.00	700	137,969,117.00	750	140,073,146.03	800	142,259,687.84	800	681,191,950.88	Dinas PPKBP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	100	100	371,036,000.00	100	386,317,840.00	100	392,228,502.95	100	398,209,987.62	100	404,426,045.53	100	1,952,218,376.10	Dinas PPKBP3A
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	15.56	15.56	15.56	1,480,036,800.00	15.56	1,480,036,800.00	17.78	1,628,040,480.00	17.78	1,790,844,528.00	17.78	1,969,928,980.80	17.78	8,348,887,588.80	Dispora-par
		Persentase kelompok wirausaha muda	%	20	20	33		47		60		73		100		100		Dispora-par
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan Cabang olahraga	%	11	11	23	3,187,665,000.00	34	1,844,865,000.00	45	2,029,351,500.00	57	2,232,286,650.00	68	2,455,515,315.00	68	11,749,683,465.00	Dispora-par
		Jumlah atlet berprestasi	Orang	3	3	3		3		3		3		3		15		Dispora-par
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Gugus Pramuka Aktif	%	100	100	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	750,000,000.00	Dispora-par
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	%	NA	NA	70	75,333,800.00	70	200,000,000.00	70	220,000,000.00	70	242,000,000.00	70	266,200,000.00	70	1,003,533,800.00	Disdikbud
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni/sanggar Kesenian yang aktif	%	12	12	18	192,486,500.00	24	150,000,000.00	30	165,000,000.00	36	181,500,000.00	42	199,650,000.00	42	888,636,500.00	Disdikbud

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Penyelenggaraan even dan penulisan buku yang berkaitan dengan sejarah daerah	even	NA	5	5	64,782,900.00	5	100,000,000.00	5	110,000,000.00	5	121,000,000.00	5	133,100,000.00	25	528,882,900.00	Disdikbud
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	60	60	100,000,000.00	70	120,000,000.00	80	132,000,000.00	90	145,200,000.00	100	159,720,000.00	100	656,920,000.00	Disdikbud
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan pengunjung Museum Sadurengas per tahun	%	NA	10	10	326,521,000.00	12	413,921,000.00	14	455,313,100.00	16	500,844,410.00	18	550,928,851.00	18	2,247,528,361.00	Disdikbud
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	%	NA	NA	20	5.535.568.657,00	25	5.535.568.657,00	30	5.600.175.130,36	35	5.684.177.757,31	40	5.769.440.423,67	40	28.124.930.625,34	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	78.65	79	80	2,761,717,000.00	85	2,761,717,000.00	90	2,803,142,755.00	95	2,845,189,896.00	100	2,887,867,745.00	100	14,059,634,396.00	DPMD
		Lembaga Adat Desa yang aktif	%	40	45	50		60		70		80		90		90		
		Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lembaga	2	2	2		2		2		2		2		2		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan pembangunan perlu disinergikan dengan pengganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan program pembangunan untuk pengimplementasiannya. Sehubungan dengan hal tersebut kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel VII.1 sebagai berikut:

Tabel VII.1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Kabupaten Paser

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**2.321.195.061.499,00**	**1.585.414.181.561,00**	**1.609.805.351.178,00**	**1.634.497.719.393,00**	**1.660.072.176.363,00**
5			**BELANJA**	**3.355.426.520.310,00**	**2.588.402.875.594,00**	**2.621.152.744.385,00**	**2.654.453.548.573,00**	**2.688.943.056.749,00**
5	1		**Belanja Operasi**	**1.613.763.457.178,00**	**1.657.906.363.911,00**	**1.673.040.723.661,00**	**1.686.988.663.806,00**	**1.699.536.912.065,00**
5	1	1	Belanja Pegawai	726.619.536.447,00	730.252.634.129,00	733.903.897.300,00	737.573.416.786,00	741.261.283.870,00
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	864.188.700.649,00	904.124.629.198,00	915.019.498.263,00	924.694.985.719,00	932.937.360.362,00
5	1	5	Belanja Hibah	22.955.220.082,00	23.529.100.584,00	24.117.328.098,00	24.720.261.301,00	25.338.267.833,00
5	2		**Belanja Modal**	**1.445.749.955.854,00**	**670.157.671.444,00**	**683.350.864.937,00**	**698.053.285.590,00**	**715.137.121.899,00**
5	3		**Belanja Tidak Terduga**	**7.135.453.554,00**	**7.242.485.357,00**	**7.351.122.638,00**	**7.461.389.477,00**	**7.573.310.319,00**
5	4		**Belanja Transfer**	**288.777.653.724,00**	**253.096.354.882,00**	**257.410.033.149,00**	**261.950.209.700,00**	**266.695.712.466,00**
5	4	01	Belanja Bagi Hasil ke Pemerintahan Desa	4.120.951.442,00	3.889.395.562,00	4.083.865.340,00	4.288.058.607,00	4.424.383.783,00
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan Desa	284.656.702.282,00	249.206.959.320,00	253.326.167.809,00	257.662.151.093,00	262.271.328.683,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, 2021

7.2. Program Perangkat Daerah

Program prioritas dirumuskan dalam rangka pencapaian visi Pembangunan Daerah **"*Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera*".** Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program prioritas ini wajib dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program prioritas ini meliputi program kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar urusan, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Untuk program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah berdasarkan bidang urusan seperti tabel VII.2

Tabel. VII.2.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Paser

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
	PENDIDIKAN																	
	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APK SD	%	108.62	108.62	108.62	205,010,657,114.95	107.00	204,470,447,806.00	108.00	206,987,624,176.19	104.00	209,073,208,709.18	100	210,877,322,894.98	100	1,036,419,260,701.25	Disdikbud
		2. APK SMP	%	95.00	95.00	95.00		95.50		96.00		98.00		100		100		Disdikbud
		3. APM SD	%	97.87	97.87	97.87		98.00		98.50		99.00		100		100		Disdikbud
		4. APM SMP	%	81.58	81.58	95.00		95.50		96.00		98.00		100		100		Disdikbud
		5. APK PAUD	%	37.60	37.60	37.60		38.00		39.00		39.50		40.00		40.00		Disdikbud
		6. Angka Putus Sekolah SD	%	0.94	0.94	0.90		0.70		0.70		0.50		0.25		0.25		Disdikbud
		7. Angka Putus Sekolah SMP	%	2.28	2.28	2		1.5		1		0.5		0		0		Disdikbud
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	%	90	90	100	54,657,500.00	100	54,657,500.00	100	60,123,250.00	100	66,135,575.00	100	72,749,132.50	100	308,322,957.50	Disdikbud
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Pendidik sesuai standar	%	90	90	90	75,000,000.00	91	82,500,000.00	91	90,750,000.00	92	99,825,000.00	92	109,807,500.00	92	457,882,500.00	Disdikbud
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Tenaga Kependidikan sesuai standar	%	NA	50	50		55		60		65		70		70		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	%	100	100	100	396,485,000.00	100	396,350,000.00	100	416,167,500.00	100	436,975,875.00	100	458,824,668.75	100	2,104,803,043.75	Disdikbud
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase jenis bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	%	N/A	N/A	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	55,000,000.00	100	60,500,000.00	100	66,550,000.00	100	282,050,000.00	Disdikbud
	KESEHATAN																	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	100	190,057,891,502	100	206,949,045,200	100	210,115,365,592	100	213,319,624,917	100	216,649,544,262	100	1,037,091,471,473	Dinkes
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	%	100	100	100	37,083,880,000	100	36,083,880,000	100	36,635,963,364	100	37,194,661,805	100	37,775,270,476	100	184,773,655,645	Dinkes
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	%	100	100	100	123,307,000.00	100	123,307,000.00	100	125,193,597.00	100	127,102,799.00	100	129,086,874.00	100	627,997,270.00	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	%	NA	57.5	60	181,000,000.00	70	181,000,000.00	80	183,769,300.00	90	186,571,782.00	100	189,484,167.00	100	921,825,249.00	Dinkes
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,62	39	54	996,684,401,088.90	58	336,858,859,810.49	62	329,805,560,208.01	66	322,583,007,328.26	70	332,722,719,172.65	70	2,318,654,547,608.31	DPUTR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	67,48	71	75	25,160,000,000.00	80	18,500,000,000.00	85	18,839,931,918.02	90	18,795,733,922.00	95	19,290,009,782.76	95	100,585,675,622.78	DPUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	%	67	68	70	10,335,000,000	73	10,351,750,000	76	10,368,500,000	80	10,385,250,000	85	10,402,000,000	85	51,842,500,000.	DPUTR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik.	%	78	81	82	22,107,847,827.00	84	30,551,920,000.00	86	36,051,920,000.00	88	39,329,930,030.23	90	37,051,920,000.00	90	165,093,537,857.23	DPUTR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	%	49	55	61	640,400,000.00	68	695,820,000.00	74	727,840,000.00	82	759,860,000.00	91	791,880,000.00	91	3,615,800,000.	DPUTR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	%	1	20	25	30,965,075,340	30	36,397,800,000	36	43,747,800,000	43	51,097,800,000	50	58,447,800,000	50	220,656,275,340	DPUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase capaian akses air minum layak	%	66,88	70	76	63,047,600,000.00	81	52,250,000,000.00	87	58,500,000,000.00	93	59,750,000,000.00	100	55,723,312,632.67	100	289,270,912,632.67	DPUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	%	67,13	71	75	3,385,000,000.00	78	3,404,250,000.00	82	3,423,500,000.00	86	3,442,750,000.00	90	3,462,000,000.00	90	17,117,500,000	DPUTR
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang berfungsi dengan baik	%	40	45	50	1,000,000,000.00	55	1,050,000,000.00	60	1,100,000,000.00	65	1,150,000,000.00	70	1,200,000,000.00	70	5,500,000,000.00	DPUTR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	%	44.68	47.50	52.73	2,136,553,605.00	59.18	2,281,021,285.25	65.82	2,387,848,965.50	72.47	2,494,676,645.75	78.91	2,601,504,326.00	78.91	11,901,604,827.50	DPUTR
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	%	3.25	8.44	27.92	1,569,358,800.00	47.40	1,584,287,040.00	66.88	1,601,061,392.00	86.36	1,650,174,461.00	100	1,701,743,184.00	100	8,106,624,877.00	DPKPP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%	0	5	15	8,045,053,900.00	30	8,052,710,425.00	50	8,204,399,946.00	70	9,356,089,467.00	90	9,522,947,940.00	90	43,181,201,678.00	DPKPP
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	%	88.30	89.26	90.23	12,046,721,200.	91.20	12,211,840,900.00	92.17	12,494,842,945.00	93.13	12,791,995,092.00	94.10	13,104,004,846.00	94.10	62,849,404,983,00	DPKPP
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	35.58	39.58	44.58	208,626,127,379	51.58	168,326,924,752.	58.58	163,631,940,990.	65.58	167,106,292,519.	72.58	165,816,587,148.	72.58	873,507,872,788.	DPKPP
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda	%	NA	50	50	2,791,982,982.00	55	2,791,982,982.00	60	2,833,811,976.73	65	2,876,319,156.38	70	2,919,463,943.73	70	14,213,561,040.84	Satpol PP
		Presentase Demonstrasi Anarkis	%	NA	0	0		0		0		0		0		0		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	%	NA	10	30	1,532,746,700.00	40	1,554,986,654.00	50	1,628,311,454	60	1,903,486,125.62	70	2,132,038,417.50	70	8,751,569,350.93	Dinas Damkar

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	1,871,840,814.00	100	2,209,760,814.00	100	2,243,570,154.00	100	2,277,784,599.00	100	2,313,340,817.00	100	10,916,297,198.00	BPBD
	SOSIAL																	
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	%	100	100	100	333,318,900	100	353,549,656.00	100	358,958,966.00	100	364,433,090.00	100	370,121,890.00	100	1,780,382,502.00	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	986,719,230	100	1,008,125,999.00	100	1,023,550,327.00	100	1,039,159,469.00	100	1,055,380,749.00	100	5,112,935,774.00	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	681,078,000	100	702,739,120.00	100	713,491,029.00	100	724,371,767.00	100	735,679,210.00	100	3,557,359,126.00	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana	%	100	100	100	408,716,000	100	461,082,640.00	100	468,137,204.00	100	475,276,297.00	100	482,695,360.00	100	2,295,907,501.00	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	128,854,000	100	170,026,160.00	100	172,627,560.00	100	175,260,131.00	100	177,995,941.00	100	824,763,792.00	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
	TENAGA KERJA																	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	%	100	100	100	127,391,320.00	100	140,000,000.00	100	160,000,000.00	100	170,000,000.00	100	180,000,000.00	100	777,391,320.00	Disnaker-tran
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	40	50	544,161,945.00	60	550,000,000.00	70	600,000,000.00	85	650,000,000.00	100	700,000,000.00	100	3,044,161,945.00	Disnaker-tran
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	30	40	30	164,716,412.00	30	150,000,000.00	30	160,000,000.00	30	170,000,000.00	30	180,000,000.00	30	824,716,412.00	Disnaker-tran

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
	Program hubungan industrial	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	%	38.46	40	40	218,252,384.00	40	230,000,000.00	40	250,000,000.00	40	270,000,000.00	40	300,000,000.00	40	1,268,252,384.00	Disnaker-tran
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan	%	34.39	36	37.50	481,000,000.00	40.00	506,130,000.00	43.50	513,873,789.00	46.50	521,710,364.28	49.50	529,854,263.07	49.50	2,552,568,416.35	Dinas PPKBP3A
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	36	45	59.52		71.43		83.33		100		100		100		Dinas PPKBP3A
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	%	82.35	90	100	157,840,000.00	100	158,704,000.00	100	161,132,171.20	100	163,589,436.81	100	166,143,067.92	100	807,408,675.93	Dinas PPKBP3A
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	%	40	45	50	88,012,000.00	60	97,422,480.00	70	98,913,043.94	80	100,421,467.86	90	101,989,046.98	90	486,758,038.79	Dinas PPKBP3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	%	23.81	30	47.62	100,000,000.00	59.52	109,890,000.00	71.43	111,571,317.00	83.33	113,272,779.58	95.24	115,040,967.67	95.24	549,775,064.26	Dinas PPKBP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Poin	560	580	600	125,000,000.00	650	135,890,000.00	700	137,969,117.00	750	140,073,146.03	800	142,259,687.84	800	681,191,950.88	Dinas PPKBP3A

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	100	100	371,036,000.00	100	386,317,840.00	100	392,228,502.95	100	398,209,987.62	100	404,426,045.53	100	1,952,218,376.10	Dinas PPKBP3A
	PANGAN																	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	30	31	110,000,000	50	1,100,000,000	55	1,100,000,000	60	1,100,000,000	65	1,100,000,000	65	4,510,000,000	DKP
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	%	97.59	97.70	97.77	213,591,990	97.90	1,221,628,360	98	1,200,000,000	98.5	1,200,000,000	99	1,200,000,000	99	5,035,220,350	DKP
		Tingkat konsumsi pangan	%	84.1	85	85	468,996,370	86	1,180,000,000	87	1,200,000,000	88	1,200,000,000	89	1,200,000,000	89	5,248,996,370	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	20.83	19.44	18.75	123,798,270	18.06	140,000,000	17.36	150,000,000	16.67	185,000,000	15.97	210,000,000	15.97	808,798,270	DKP
		Persentase Penyaluran cadangan Pangan	%	38.84	10	10	355,811,658	10	610,000,000	10	450,000,000	10	465,000,000	10	490,000,000	50	2,370,811,658	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%	71,67	80	80	266,800,000	82	700,000,000	84	400,000,000	86	400,000,000	88	450,000,000	88	2,216,800,000	DKP
	PERTANAHAN																	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	%	14.29	28.57	42.86	373,066,000.00	57.14	382,452,800.00	71.43	397,375,440.00	85.71	413,044,212.00	100	429,496,422.00	100	1,995,434,874.00	DPKPP
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	16.67	33.33	44.44	8,552,602,000.00	55.56	6,438,051,500.00	66.67	6,758,774,075.00	83.33	7,095,532,778.00	100	7,449,129,416.00	100	36,294,089,769.00	DPKPP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase proses penetapan tanah ulayat	%	NA	NA	30	101,304,000.00	50	104,380,000.00	80	108,129,000.00	100	112,004,000.00	-	0.00	100	425,817,000.00	DPKPP
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	%	NA	NA	10	131,763,000.00	30	174,380,300.00	50	178,069,315.00	70	182,004,230.00	100	172,208,641.00	100	838,425,486.00	DPKPP
	LINGKUNGAN HIDUP																	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	%	50	55	62.5	764,491,040.00	70	769,291,040.00	83.3	769,291,040.00	85.71	769,291,040.00	87,50	769,291,040.00	87,50	3,841,655,200	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68	69	70	1,300,180,000.00	73	1,300,180,000.00	75	1,300,180,000.00	78	1,300,180,000.00	80	1,300,180,000.00	80	6,500,900,000	DLH
		Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	3	4.5	6	257,400,000.00	9	281,060,000.00	12	281,060,000.00	15	281,060,000.00	18	281,060,000.00	18	1,381,640,000	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	%	50	55	60	250,000,000.00	80	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	1,250,000,000	DLH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapat kan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	%	55	65	80	275,000,000.00	100	310,000,000.00	100	370,000,000.00	100	435,000,000.00	100	500,000,000.00	100	1,890,000,000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.	%	11,22	25	40	227,000,000.00	55	231,700,000.00	65	231,700,000.00	75	231,700,000.00	85	231,700,000.00	85	1,153,800,000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragman Hayati (KEHATI)	Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	%	48.72	50	55	7,010,000,000.00	60	3,620,400,000.00	65	3,620,400,000.00	70	3,620,400,000.00	75	3,620,400,000.00	75	21,491,600,000	DLH
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	0	100	45,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	445,000,000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah predikat penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Buah	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	155,000,000.00	1 Piagam adipura	200,000,000.00	1 Piagam adipura	200,000,000.00	1 Piagam adipura	200,000,000.00	1 Trofi adipura	200,000,000.00	1 Trofi adipura	955,000,000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	68,75	80	100	207,400,000.00	100	212,200,000.00	100	212,200,000.00	100	212,200,000.00	100	212,200,000.00	100	1,056,200,000	DLH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	39,57	42.50	45	11,303,959,471.	53	10,084,619,471.	61	10,084,619,471	70	10,084,619,471	70	10,084,619,471	70	51,642,437,355	DLH
		Persentase pengelolaan sampah disumber	%	11,37	12	14	654,340,094.00	19	1,404,340,094.00	24	654,340,094.00	30	654,340,094.00	30	654,340,094.00	30	4,021,700,470	DLH
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	%	95	95	95	240,108,680.00	96	240,108,680.00	97	243,710,310.20	98	285,105,066.85	98	339,381,642.86	98	1,348,414,379.91	Disduk-capil
	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	%	95	95	95	367,000,000.00	96	367,000,000.00	97	372,505,000.00	98	378,092,575.00	98	433,763,963.63	98	1,918,361,538.63	Disduk-capil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	%	95	95	95	1,102,079,958.00	96	1,102,079,958.00	97	1,118,611,157.37	98	1,135,390,324.73	98	1,152,421,179.60	98	5,610,582,577.70	Disduk-capil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	22,000,000.00	100	22,000,000.00	100	22,330,000.00	100	22,664,950.00	100	23,004,924.25	100	111,999,874.25	Disduk-capil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	78.65	79	80	2,761,717,000.00	85	2,761,717,000.00	90	2,803,142,755.00	95	2,845,189,896.00	100	2,887,867,745.00	100	14,059,634,396.00	DPMD
		Lembaga Adat Desa yang aktif	%	40	45	50		60		70		80		90		90		
		Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lem-baga	2	2	2		2		2		2		2		2		
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	%	NA	0	2	57,009,800.00	5	107,009,800.00	8	108,614,947.00	10	210,244,171.21	12	248,159,269.77	12	731,037,987.98	DPMD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	%	NA	100	100	41,600,000.00	100	61,600,000.00	100	62,524,000.00	100	64,211,860.00	100	65,175,037.90	100	295,110,897.90	DPMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	%	NA	100	100	3,987,335,000.00	100	3,987,335,000.00	100	4,047,145,025.00	100	4,107,852,200.38	100	4,169,469,983.38	100	20,299,137,208.76	DPMD
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;																	
	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Kasar		12.61	12.35	12	278,400,000.00	10	295,426,000.00	10	299,946,017.80	10	304,520,194.57	10	309,273,754.81	10	1,487,565,967.18	Dinas PPKBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB		73.6	74.5	75	3,883,661,350.00	76	3,895,244,484.00	76.5	3,954,841,725.00	77	4,015,153,061.00	77.5	4,077,829,600.00	77.5	19,826,730,220.00	Dinas PPKBP3A
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	%	100	100	100	125,000,000.00	100	135,890,000.00	100	137,969,117.00	100	140,073,146.00	100	142,259,688.00	100	681,191,951.00	Dinas PPKBP3A
	PERHUBUNGAN																	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	%	60	70	85	13,219,902,677.00	90	9,409,811,768.60	90	9,939,370,719.00	95	10,057,827,071.00	100	10,592,123,571.00	100	53,219,035,806.60	Dishub
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang - perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	%	50	60	85	2,364,318,480.00	90	4,489,318,600.00	90	4,534,029,000.00	95	4,644,512,000.00	100	4,047,209,500.00	100	20,079,387,580.00	Dishub

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.	%	0	5	20	126,591,600.00	40	118,875,000.00	60	123,972,300.00	80	128,600,000.00	100	133,750,000.00	100	631,788,900.00	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	%	NA	100	100	3,190,219,776.00	100	3,700,416,200.00	100	3,827,773,800.00	100	3,943,396,000.00	100	4,071,892,600.00	100	18,733,698,376.00	Dinas Kominfo staper
	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	NA	25	30	11,649,600,000.00	40	10,687,538,700.00	50	11,114,300,000.00	60	11,557,600,000.00	70	11,474,202,300.00	70	56,483,241,000.00	Dinas Kominfo staper
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat	%	56.33	56.33	59	55,400,000	62	203,000,000	65	253,000,000	67	270,000,000	70	280,000,000	70	1,061,400,000	Disperindagkop UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rata-Rata Omset per koperasi	Juta Rp	219	219	255	55,400,000	257	207,000,000	260	217,000,000	265	227,000,000	270	237,000,000	270	943,400,000	Disperindagkop UKM
	Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang maju	%	0	0	0	-	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	48	800,000,000	Disperindagkop UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	%	0	0	5	55,400,000	5	157,000,000	5	177,000,000	5	197,000,000	5	207,000,000	25	793,400,000	Disperindagkop UKM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang naik kelas	%	0	0	0.05	105,400,000	0.05	178,000,000	0.05	198,000,000	0.05	208,000,000	0.05	228,000,000	0.25	917,400,000	Disperin dagkop UKM
	PENANAMAN MODAL																	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Juta Rupiah	657,970	670.000	690,869	195,919,800	725,412	250,919,800	761,683	250,919,800	837,851	250,919,800	921,636	250,919,800	3,937,450	1,199,599,000	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor non tambang dan non sawit	Inves tor	56	56	59	98,800,000	62	103,800,000	65	103,800,000	71	103,800,000	78	103,800,000	335	514,000,000	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	80	81.02	535,600,000	82.06	610,400,000	82.06	610,400,000	82.08	610,400,000	82.10	610,400,000	82.10	2,977,200,000	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	Inves tor	56	56	59	97,600,000	62	102,200,000	65	102,200,000	71	102,200,000	78	102,200,000	335	506,400,000	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	%	50	50	60	156,400,000	70	171,400,000	80	171,400,000	90	171,400,000	100	171,400,000	100%	842,000,000	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	15.56	15.56	15.56	1,480,036,800.00	15.56	1,480,036,800.00	17.78	1,628,040,480.00	17.78	1,790,844,528.00	17.78	1,969,928,980.80	17.78	8,348,887,588.80	Dinas Porapar
		Persentase kelompok wirausaha muda	%	20	20	33		47		60		73		100		100		Dinas Porapar
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan Cabang olahraga	%	11	11	23	3,187,665,000.00	34	1,844,865,000.00	45	2,029,351,500.00	57	2,232,286,650.00	68	2,455,515,315.00	68	11,749,683,465.00	Dinas Porapar
		Jumlah atlet berprestasi	Orang	3	3	3		3		3		3		3		15		Dinas Porapar

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Gugus Pramuka Aktif	%	100	100	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	750,000,000.00	Dinas Porapar
	STATISTIK																	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%	100	100	100	592.320.000,00	100	512.745.700,00	100	536.469.000,00	100	558.006.000,00	100	581.942.300,00	100	2.781.483.000,00	Dinas Kominfo staper
	PERSANDIAN																	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi	%	NA	30	38	150.000.000,00	50	123.543.300,00	63	129.536.500,00	75	134.977.500,00	88	141.024.600,00	88	679.081.900,00	Dinas Kominfo staper
	KEBUDAYAAN																	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	%	NA	NA	70	75,333,800.00	70	200,000,000.00	70	220,000,000.00	70	242,000,000.00	70	266,200,000.00	70	1,003,533,800.00	Disdikbud
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni/sanggar Kesenian yang aktif	%	12	12	18	192,486,500.00	24	150,000,000.00	30	165,000,000.00	36	181,500,000.00	42	199,650,000.00	42	888,636,500.00	Disdikbud
	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Penyelenggaraan even dan penulisan buku yang berkaitan dengan sejarah daerah	even	NA	5	5	64,782,900.00	5	100,000,000.00	5	110,000,000.00	5	121,000,000.00	5	133,100,000.00	25	528,882,900.00	Disdikbud
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	60	60	100,000,000.00	70	120,000,000.00	80	132,000,000.00	90	145,200,000.00	100	159,720,000.00	100	656,920,000.00	Disdikbud

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan pengunjung Museum Sadurengas per tahun	%	NA	10	10	326,521,000.00	12	413,921,000.00	14	455,313,100.00	16	500,844,410.00	18	550,928,851.00	18	2,247,528,361.00	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN																	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	1	1	1.5	459,400,000.00	2	659,400,000.00	2.5	725,340,000.00	3	797,874,000.00	3.5	877,661,400.00	3.5	3,519,675,400.00	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Naskah	NA	2	5	36,000,000.00	5	36,000,000.00	5	39,600,000.00	5	43,560,000.00	5	47,916,000.00	30	203,076,000.00	Dinas Kearsipan & Perpus
	KEARSIPAN																	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	36	38	40	136,654,240.00	50	236,654,240.00	60	260,319,664.00	70	286,351,630.40	80	314,986,793.44	80	1,234,966,567.84	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%	44	48	50	162,245,774.00	55	262,245,774.00	60	288,470,351.40	65	317,317,386.54	70	349,049,125.19	70	1,379,328,411.13	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase angka pemakaian arsip	%	100	100	100	40,820,760.00	100	140,821,534.00	100	147,862,610.70	100	162,648,871.77	100	178,913,758.95	100	671,067,535.42	Dinas Kearsipan & Perpus
	URUSAN PILIHAN																	
	PERIKANAN																	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-3.29	0.1	0.1	9,517,145,370	0.6	9,520,745,370	0.6	10,000,000,000	0.6	10,000,000,000	0.6	10,500,000,000	0.6	49,537,890,740	Dinas Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	6.23	1.00	1.00	3,771,726,400	1.00	3,667,126,400	1.00	4,000,000,000	1.00	4,000,000,000	1.00	4,500,000,000	1.00	19,938,852,800	Dinas Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	%	35	35	35	78,086,000	45	83,086,000	45	83,086,000	45	83,086,000	45	83,086,000	45	410,430,000	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	%	-81.8	0.1	0.1	847,471,513	0.9	875,671,513	0.9	875,671,513	0.9	875,671,513	0.9	875,671,513	3.7	4,350,157,565	Dinas Perikanan
	PARIWISATA																	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang baik	%	16,13	17	18,75	16,713,088,000.00	21.21	15,713,088,000.00	23.53	5,584,396,800.00	25.71	6,842,836,480.00	28.77	8,227,120,128.00	28.77	53,080,529,408.00	Dinas Porapar
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-56,13	10	14,26	194,449,000.00	20	194,449,000.00	25	213,893,900.00	33.33	235,283,290.00	35	258,811,619.00	35	1,096,886,809.00	Dinas Porapar
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perlindungan Hak Cipta dari HAKI	Produk	0	0	1	165,392,388.00	1	165,392,388.00	1	181,931,626.80	1	200,124,789.48	1	220,137,268.43	5	932,978,460.71	Dinas Porapar
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya	%	10	10	20	207,106,001.00	20	207,106,001.00	20	227,816,601.10	20	250,598,261.21	20	275,658,087.33	100	1,168,284,951.64	Dinas Porapar

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PERTANIAN																	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	%	100	100	100	1,977,478,290	100	2,500,000,000	100	2,750,000,000	100	2,750,000,000	100	3,014,331,504	100	12,991,809,794	DTPH
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Presentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	45,029,539,601	100	45,017,891,952	100	46,000,000,000	100	46,471,832,649	100	46,800,000,000	100	229,319,264,202	DTPH
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	%	-2.23	8.00	10.89	125,200,000	10.40	350,000,000	9.34	360,000,000	11.98	360,000,000	9.59	360,000,000	9.59	1,555,200,000	DTPH
	Program Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	%	50	50	60	1,040,004,597	62	1,177,804,597	64	1,250,000,000	66	1,250,000,000	68	1,300,000,000	68	6,017,809,194	DTPH
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	%	0	100	100	5,875,071,800	100	5,900,000,000	100	6,000,000,000	100	6,000,000,000	100	6,500,000,000	100	30,275,071,800	Disbun-nak
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	%	0	100	100	1,674,292,323	100	2,200,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,600,000,000	100	11,474,292,323	Disbun-nak
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	%	50	50	60	851,054,357	60	1,067,881,157	60	1,157,380,338	60	1,157,380,338	60	1,200,000,000	60	5,433,696,190	Disbun-nak

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	%	0	100	100	90,394,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	890,394,000	Disbun-nak
	Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	0	100	100	90,980,000	100	600,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,190,980,000	Disbun-nak
	KEHUTANAN																	
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	%	68	70.50	73,33	39,636,390,782	76,66	3,242,840,000	78,33	3,242,840,000	80	3,242,840,000	81,66	3,242,840,000	81.66	52,607,750,782	DLH
	PERDAGANGAN																	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Rekomendasi	120	50	50	55,400,000	50	185,000,000	50	188,500,000	50	191,000,000	50	194,000,000	250	813,900,000	Disperindagkop UKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	%	2.70	1	4	9,419,532,400	4	10,710,652,400	4	10,710,652,400	4	10,710,652,400	4	10,710,652,400	20	52,262,142,000	Disperindagkop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	50	50	50	68,468,000	50	124,000,000	60	134,000,000	60	144,000,000	60	154,000,000	60	624,468,000	Disperindagkop UKM
	Program Pengembangan Eksport	Persentase Peningkatan produk lokal yang dieksport	%	0	0	20	42,308,600	20	156,500,000	20	200,000,000	20	220,000,000	20	258,000,000	100	876,808,600	Disperindagkop UKM
	Program Standardisasi dan	Persentase Jumlah UTTP yang ditera /tera ulang	%	50	50	100	239,121,134	100	243,721,134	100	243,721,134	100	243,721,134	100	243,721,134	100	1,214,005,670	Disperindagkop UKM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perlindungan Konsumen																	
	Proram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan /dipromosikan	%	0	0	10	55,400,000	12	155,400,000	15	165,400,000	17	175,400,000	20	185,400,000	20	737,000,000	Disperindagkop UKM
	PERINDUSTRIAN																	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	%	2,10	2.10	2.40	1,360,800,000	2.40	1,760,800,000	2.40	1,800,000,000	2.40	1,800,000,000	2.40	1,800,000,000	2.40	8,521,600,000	Disperindagkop UKM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	Persentase pemutahiran data IKM	%	40	40	45	55,400,000	50	125,000,000	55	135,000,000	60	145,000,000	60	155,000,000	60	615,400,000	Disperindagkop UKM
	TRANSMIGRASI																	
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	%	1	0	100	144,832,000	0	-	0	-	100	318,500,000	0	-	100	463,332,000	Disnaker trans
	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Presentase Peningkatan jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	%	40	50	60	140,000,000	70	140,000,000	80	140,000,000	90	140,000,000	100	140,000,000	100	700,000,000	Disnaker trans
	Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan perkotaan baru yang memiliki sarana prasarana yang memadai	Kawasan	1	0	1	300,000,000	0	-	0	-	1	595,400,000	0	-	2	895,400,000	Disnaker trans

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
	PERENCANAAN																	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	92.64	93	93	1,510,734,458.00	94	1,510,734,458.00	95	1,533,395,475.00	96	1,556,396,407.00	97	1,579,742,353.00	97	7,691,003,151.00	Bappeda litbang
		Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	%	NA	90	93		94		95		96		97		97		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91.64	92	92	3,107,609,808.00	93	3,107,609,808.00	94	3,154,223,955.12	95	3,201,537,314.45	96	3,249,560,374.16	96	15,820,541,259.73	Bappeda litbang
	KEUANGAN																	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penurunan temuan administratif atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	NA	10	10	303,069,138,675	10	267,494,871,636	10	272,024,527,654.96	10	276,783,921,622.97	10	281,751,930,067.66	10	1,401,124,389,656.59	BKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	%	NA	50	50	1,630,257,973.00	55	1,630,257,973.00	60	1,654,711,842.60	65	1,679,532,520.23	70	1,704,725,508.04	70	8,299,485,816.87	BKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,34	7.5	7,5	2,918,106,100	7,7	2,893,106,100	8	2,936,502,691.50	8,3	2,980,550,231.87	8,5	3,025,258,485.35	8,5	14,753,523,608.72	Bapenda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KEPEGAWAIAN																	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	%	NA	100	100	5,999,541,240.00	100	5,999,541,240.00	100	6,089,534,359.00	100	6,333,115,733.00	100	6,586,440,362.00	100	31,008,172,934	BKPSDM
		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	%	NA	50	70		75		80		85		90		90		
		Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	%	NA	50	70		75		80		85		90		90		
	PENGAWASAN																	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen resiko (MRI)		2.50	2.50	3.04	2,547,278,867.00	3.50	2,547,278,867.00	3.70	2,585,488,050.00	3.90	2,624,270,370.76	4.00	2,663,634,426.32	4.00	12,967,950,581.07	Inspek-torat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	70	70	0.00	75	300,000,000.00	80	304,500,000.00	85	309,067,500.00	90	313,703,513.00	90	1,227,271,013.00	Inspek-torat
		Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	25	70		75		80		85		90		90		
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	%	NA	50	70	4,952,078,750.00	75	4,952,078,750.00	80	5,690,517,526.25	85	5,918,138,227.30	90	6,154,863,756.39	90	27,667,677,009.94	BKPSDM
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	50	60	2,400,914,959.00	65	2,400,914,959.00	70	2,436,928,683.39	75	2,473,482,613.64	80	2,510,584,852.84	80	12,222,826,067.86	Bappeda litbang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SEKRETARIAT DPRD																	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	NA	100	100	19,497,661,530.	100	19,497,661,530.	100	19,527,661,530.	100	19,557,661,530.	100	19,587,661,530.	100	97,668,307,650.	Sekretariat DPRD
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100		100		100		100		100		100		
		Dokumen KUA-PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan Tepat waktu	Dokumen	6	6	6		6		6		6		6		30		
	SEKRETARIAT DAERAH																	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	27,509,464,125	100	28,083,344,627	100	28,739,885,802	100	29,412,157,370	100	30,100,542,343	100	143,845,394,267	Sekretariat Daerah
		Nilai EKPPD		2.80	2.80	2.90		2.95		3.00		3.10		3.20		3.20		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	%	NA	100	100	1,182,087,633.00	100	1,182,087,633.00	100	1,199,818,947.50	100	1,217,816,231.71	100	1,236,083,475.18	100	6,017,893,920.39	Sekretariat Daerah
	KECAMATAN																	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	%	NA	NA	20	5.535.568.657,00	25	5.535.568.657,00	30	5.600.175.130,36	35	5.684.177.757,31	40	5.769.440.423,67	40	28.124.930.625,34	Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	%	NA	100	100	1.558.149.331,00	100	1.558.149.331,00	100	1.604.771.571,47	100	1.605.244.388,93	100	1.629.323.054,76	100	7.955.637.677,15	Kecamatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	NA	70	70	4.363.758.126,00	72	4.363.758.126,00	74	4.424.391.553,89	76	4.514.356.183,62	80	4.582.071.526,38	80	22.248.335.515,89	Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	NA	50	50	2.872.762.501,00	55	2.872.762.501,00	60	2.915.853.938,52	65	2.959.591.747,09	70	3.103.985.623,66	70	14.724.956.311,27	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	100	455.720.250,00	100	455.720.250,00	100	462.556.053,75	100	469.494.394,56	100	476.536.810,47	100	2.320.027.758,78	Kecamatan
	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	NA	70	70	836,059,919,605	72	840,727,568,834.66	74	846,174,770,866.49	76	851,736,875,529.56	80	857,632,682,637.60	80	4,232,331,817,473.31	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	%	75	75	75	793,708,719.00	80	793,708,719.00	85	805,614,349.79	90	817,698,565.03	90	829,964,043.51	90	4,040,694,396.32	Sekretariat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penurunan konflik berbau sara	%	50	100	100	150,227,000.00	100	150,227,000.00	100	152,480,405.00	100	154,767,611.08	100	157,089,125.24	100	764,791,141.32	Badan Kesbang pol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	70	70	80	840,146,862.00	80	840,146,862.00	80	852,749,064.93	80	865,540,300.90	80	878,523,405.42	80	4,277,106,495.25	Badan Kesbang pol

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG-KAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	%	NA	75	75	86,287,300.00	75	136,287,300.00	75	138,331,609.50	75	140,406,583.64	75	142,512,682.40	75	643,825,475.54	Badan Kesbang pol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	870,000,000.00	100	870,000,000.00	100	883,050,000.00	100	896,295,750.00	100	909,740,186.25	100	4,429,085,936.25	Badan Kesbang pol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	NA	100	100	1,631,292,553.00	100	1,631,292,553.00	100	1,655,761,941.30	100	1,680,598,370.41	100	1,705,807,345.97	100	8,304,752,763.68	Badan Kesbang pol

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kebijakan umum dan pogram pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Penetapan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Tabel VIII.1 dan VIII.2 di bawah ini:

Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.15	73.03	73.40	74.00	74.50	75.00
2	Angka Kemiskinan	8.50	8.00	7.30	6.80	6.30	5.80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.50	3.45	3.17	3.15	3.12	3.10
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,30	1,32	2.32	2.50	3.64	4.20
5	Indeks Gini	0,285	0,275	0.270	0.265	0.260	0.250
6	Indeks Reformasi Birokrasi	58 (CC)	60 (CC)	65 (CC)	70 (B)	75 (B)	80 (A)
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4	4	5	6	7	8
8	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	47.50	52.73	59.18	65.82	72.47	78.91
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70.09	71,43	71,48	71,53	71,58	71,63
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	196.4	195,5	195	194,5	194	193,5
11	Umur Harapan Hidup	72.71	72.80	72.90	73.10	73.20	73.30
12	Angka Harapan Lama Sekolah	13.10	13.25	13.30	13.35	13.40	13.50
13	Rata-rata Lama Sekolah	8.55	8.60	8.70	8.80	8.90	9.00
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	70	72	74	76	78
15	Nilai SAKIP	59 (CC)	61 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)
16	Nilai IKM daerah	80	80	81	82	83	84
17	Angka Kriminalitas	53	52	51	50	49	48
18	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	4.90	4.90	5.14	5.41	5.68	5.95
19	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	-1.00	0.01	1.12	2.21	2.51	2.83

Tabel VIII.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	PENDIDIKAN									
1	APK SD	%	108.62	108.62	108.62	107.00	108.00	104.00	100	100
2	APK SMP	%	95.00	95.00	95.00	95.50	96.00	98.00	100	100
3	APM SD	%	97.87	97.87	97.87	98.00	98.50	99.00	100	100
4	APM SMP	%	81.58	81.58	95.00	95.50	96.00	98.00	100	100
5	APK PAUD	%	37.60	37.60	37.60	38.00	39.00	39.50	40.00	40.00
6	Angka Putus Sekolah SD	%	0.94	0.94	0.90	0.70	0.70	0.50	0.25	0.25
7	Angka Putus Sekolah SMP	%	2.28	2.28	2	1.5	1	0.5	0	0
8	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	%	90	90	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Pendidik sesuai standar	%	90	90	90	91	91	92	92	92
10	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Tenaga Kependidikan sesuai standar	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
11	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
	KESEHATAN									
1	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase UKBM Aktif	%	NA	57.5	60	70	80	90	100	100
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,62	39	54	58	62	66	70	70
2	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	67,48	71	75	80	85	90	95	95
3	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	%	67	68	70	73	76	80	85	85
4	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik.	%	78	81	82	84	86	88	90	90
5	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	%	49	55	61	68	74	82	91	91

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	%	1	20	25	30	36	43	50	50
7	Persentase capaian akses air minum layak	%	66,88	70	76	81	87	93	100	100
8	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	%	67,13	71	75	78	82	86	90	90
9	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang berfungsi dengan baik	%	40	45	50	55	60	65	70	70
10	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	%	44.68	47.50	52.73	59.18	65.82	72.47	78.91	78.91
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	%	3.25	8.44	27.92	47.40	66.88	86.36	100	100
2	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%	0	5	15	30	50	70	90	90
3	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	%	88.30	89.26	90.23	91.20	92.17	93.13	94.10	94.10
4	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	35.58	39.58	44.58	51.58	58.58	65.58	72.58	72.58
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase penurunan pelanggaran perda	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
2	Presentase Demonstrasi Anarkis	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	%	NA	10	30	40	50	60	70	70
4	Cakupan layanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	SOSIAL									
1	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan layanan penanganan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
	TENAGA KERJA									
1	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	40	50	60	70	85	100	100
3	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	30	40	30	30	30	30	30	30
4	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	%	38.46	40	40	40	40	40	40	40
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase partisipasi perempuan	%	34.39	36	37.50	40.00	43.50	46.50	49.50	49.50

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	36	45	59.52	71.43	83.33	100	100	100
3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	%	82.35	90	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	%	40	45	50	60	70	80	90	90
5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	%	23.81	30	47.62	59.52	71.43	83.33	95.24	95.24
6	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Poin	560	580	600	650	700	750	800	800
7	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	PANGAN									
1	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	30	31	50	55	60	65	65
2	Tingkat ketersediaan pangan	%	97.59	97.70	97.77	97.90	98	98.5	99	99
3	Tingkat konsumsi pangan	%	84.1	85	85	86	87	88	89	89
4	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	20.83	19.44	18.75	18.06	17.36	16.67	15.97	15.97
5	Persentase Penyaluran cadangan Pangan	%	38.84	10	10	10	10	10	10	50
6	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%	71,67	80	80	82	84	86	88	88
	PERTANAHAN									
1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	%	14.29	28.57	42.86	57.14	71.43	85.71	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	16.67	33.33	44.44	55.56	66.67	83.33	100	100
3	Persentase proses penetapan tanah ulayat	%	NA	NA	30	50	80	100	-	100
4	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	%	NA	NA	10	30	50	70	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase Dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	%	50	55	62.5	70	83.3	85.71	87.50	87.50
2	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68	69	70	73	75	78	80	80
3	Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	3	4.5	6	9	12	15	18	18
4	Persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	%	50	55	60	80	100	100	100	100
5	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapat kan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	%	55	65	80	100	100	100	100	100

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
6	Presentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.	%	11.22	25	40	55	65	75	85	85
7	Rasio luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan taman kehati yang dikelola	%	48.71	50	55	60	65	70	75	75
8	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	0	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah predikat penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Buah	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Tropi adipura	1 Tropi adipura
10	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	68.75	80	100	100	100	100	100	100
11	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	39.57	42.50	45	53	61	70	70	70
12	Persentase pengelolaan sampah disumber	%	11.37	12	14	19	24	30	30	30
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	%	95	95	95	96	97	98	98	98
2	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	%	95	95	95	96	97	98	98	98
3	Persentase data kependudukan yang valid	%	95	95	95	96	97	98	98	98
4	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	78.65	79	80	85	90	95	100	100
2	Lembaga Adat Desa yang aktif	%	40	45	50	60	70	80	90	90
3	Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lem-baga	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	%	NA	0	2	5	8	10	12	12
5	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka Kelahiran Kasar		12.61	12.35	12	10	10	10	10	10
2	Rasio Akseptor KB		73.6	74.5	75	76	76.5	77	77.5	77.5
3	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	PERHUBUNGAN									
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	%	60	70	85	90	90	95	100	100
2	Persentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	%	50	60	85	90	90	95	100	100

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.	%	0	5	20	40	60	80	100	100
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	NA	25	30	40	50	60	70	70
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Persentase Koperasi sehat	%	56.33	56.33	59	62	65	67	70	70
2	Rata-Rata Omset per koperasi	Juta Rp	219	219	255	257	260	265	270	270
3	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang maju	%	0	0	0	12	12	12	12	48
4	Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	%	0	0	5	5	5	5	5	25
5	Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang naik kelas	%	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25
	PENANAMAN MODAL									
1	Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Juta Rupiah	657,970	670,000	690,869	725,412	761,683	837,851	921,636	3,937,450
2	Jumlah investor non tambang dan non sawit	Investor	56	56	59	62	65	71	78	335
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	80	81.02	82.06	82.06	82.08	82.10	82.10
4	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	Investor	56	56	59	62	65	71	78	335
5	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	%	50	50	60	70	80	90	100	100
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	15.56	15.56	15.56	15.56	17.78	17.78	17.78	17.78
2	Persentase kelompok wirausaha muda	%	20	20	33	47	60	73	100	100
3	Persentase Pembinaan Cabang olahraga	%	11	11	23	34	45	57	68	68
4	Jumlah atlet berprestasi	orang	3	3	3	3	3	3	3	15
5	Gugus Pramuka Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	STATISTIK									
1	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi	%	NA	30	38	50	63	75	88	88
	KEBUDAYAAN									
1	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	%	NA	NA	70	70	70	70	70	70

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase kelompok seni/sanggar Kesenian yang aktif	%	12	12	18	24	30	36	42	42
3	Jumlah Penyelenggaraan even dan penulisan buku yang berkaitan dengan sejarah daerah	even	NA	5	5	5	5	5	5	25
4	Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	60	60	70	80	90	100	100
5	Persentase peningkatan pengunjung Museum Sadurengas per tahun	%	NA	10	10	12	14	16	18	18
	PERPUSTAKAAN									
1	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	1	1	1.5	2	2.5	3	3.5	3.5
2	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Naskah	NA	2	5	5	5	5	5	25
	KEARSIPAN									
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	36	38	40	50	60	70	80	80
2	Persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%	44	48	50	55	60	65	70	70
3	Persentase angka pemakaian arsip	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	URUSAN PILIHAN									
	PERIKANAN									
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-3.29	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	6.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	%	35	35	35	45	45	45	45	45
4	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	-81.8	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	3.7
	PARIWISATA									
1	Persentase destinasi wisata yang baik	%	16,13	17	18,75	21,21	23,53	25,71	28,77	28,77
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-56,13	10	14,26	20,00	25,00	33,33	35,00	35,00
3	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perlindungan Hak Cipta dari HAKI	Produk	0	0	1	1	1	1	1	5
4	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	%	10	10	20	20	20	20	20	100
	PERTANIAN									
1	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	%	-2.23	8.00	10.89	10.40	9.34	11.98	9.59	9.59
4	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	%	50	50	60	62	64	66	68	68
5	Persentase sarana pertanian (perkebunan dan peternakan) yang dimanfaatkan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentaser prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	%	50	50	60	60	60	60	60	60
8	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	%	0	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	KEHUTANAN									
1	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	%	68	70.50	73.33	76.66	78.33	80	81.66	81.66
	PERDAGANGAN									
1	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Rekomendasi	120	50	50	50	50	50	50	250
2	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	%	2.70	1	4	4	4	4	4	20
3	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	50	50	50	50	60	60	60	60
4	Persentase Peningkatan produk lokal yang dieksport	%	0	0	20	20	20	20	20	100
5	Persentase Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	%	50	50	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan	%	0	0	10	12	15	17	20	20
	PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	%	2.10	2.10	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
2	Persentase pemutahiran data IKM	%	40	40	45	50	55	60	60	60
	TRANSMIGRASI									
1	Cakupan kawasan transmigrasi yg sesuai perencanaan	%	1	0	100	0	0	100	0	100
2	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigrant sejahtera yang ditempatkan	%	40	50	60	70	80	90	100	100
3	Jumlah kawasan perkotaan baru yang memiliki sarana prasarana yang memadai	Kawasan	1	0	1	0	0	1	0	2

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	PERENCANAAN									
1	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	92.64	93	93	94	95	96	97	97
2	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	%	NA	90	93	94	95	96	97	97
3	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91.64	92	92	93	94	95	96	96
	KEUANGAN									
1	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	%	NA	10	10	10	10	10	10	10
2	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
3	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,34	7,5	7,5	7,7	8	8,3	8,5	8,5
	KEPEGAWAIAN									
1	Persentase pegawai berkinerja baik	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	%	NA	50	70	75	80	85	90	90
3	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	%	NA	50	70	75	80	85	90	90
	PENGAWASAN									
1	Indeks Penerapan Manajemen resiko (MRI)		2.50	2.50	3.04	3.50	3.70	3.90	4.00	4.00
2	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	70	70	75	80	85	90	90
3	Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	25	70	75	80	85	90	90
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	%	NA	50	70	75	80	85	90	90
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	50	60	65	70	75	80	80
	SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
3	Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	Dokumen	NA	6	6	6	6	6	6	30

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	SEKRETARIAT DAERAH									
1	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai EKPPD		2.80	2.80	2.90	2.95	3.00	3.10	3.20	3.20
3	Persentase Kebijakan prioritas perekonomian dan pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN									
1	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	%	NA	NA	20	25	30	35	40	40
2	Persentase desa yang Menyampaikan LKP desa tepat waktu	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	NA	70	70	72	74	76	80	80
4	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
5	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA									
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	NA	70	70	72	74	76	80	80
2	Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	%	75	75	75	80	85	90	90	90
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase penurunan konflik berbau sara	%	50	100	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	70	70	80	80	80	80	80	80
3	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	%	NA	75	75	75	75	75	75	75
4	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Paser Periode Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Paser ini disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 menjabarkan perencanaan strategis dalam rangka menentukan arah pembangunan Kabupaten Paser, apa yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah strategis apa yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down, bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh *stakeholders* di Kabupaten Paser. Untuk menjamin pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 berakhir, maka ditetapkan pedoman pada masa transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum serta prioritas program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masa transisi yaitu pada tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1 di atas antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2016-2021 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode 2021-2026.

Untuk terciptanya koordinasi, keberlanjutan program, efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang);
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan pendekatan *outcomes*;
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, Bappeda Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Paser.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, serta kerjasama dan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah, diharapkan dapat Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ini disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

BUPATI PASER,

ttd

dr. FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1007

Lampiran 1. Analisis SWOT untuk Sasaran 1.1. Misi 1 (Ekonomi)

STRATEGI UNTUK MISI 1, SASARAN 1.1. MENINGKATNYA EFEK BERGANDA (*MULTIPLIER EFFECT*) SEKTOR PERTANIAN	**KEKUATAN (S)**	**KELEMAHAN (W)**
	1. Salah satu misi Bupati yaitu memajukan sektor pertanian, perikanan dan peternakan yang berdaya saing guna menunjang perekonomian 2. Lahan produktif pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Perikanan masih tersedia sangat luas 3. Jumlah tenaga di sektor pertanian, Industri pengolahan dan perdagangan sebesar 58,57% 4. Lembaga petani tersedia dan terstruktur 5. Potensi pengembangan inovasi teknologi cukup tersedia	1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Rendah dan Fluktuatif 2. Industri Pengolahan sektor pertanian belum optimal mampu menjadi Pendorong Sektor lainnya 3. Masih rendahnya akses permodalan yang dimiliki oleh petani dan belum adanya lembaga keuangan mikro yang mapan ditingkat petani 4. Semakin kurangnya tenaga kerja petani produktif dan petugas fungsional pertanian
PELUANG (O)	**STRATEGI SO**	**STRATEGI WO**
1. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena adanya alih fungsi lahan oleh berbagai kepentingan 2. Rencana pembangunan Bendungan Lambakan 3. Rencana pembangunan Industri Perikanan 4. Potensi pengembangan inovasi teknologi cukup tersedia	S.1.1.1. Revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN	S.1.1.3. Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industrii berbasis kelapa sawit
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena adanya alih fungsi lahan oleh berbagai kepentingan 2. Lokasi pertanian dan perikanan masih ada berada pada kawasan cagar alam 3. Pertambahan penduduk yang cepat 4. Industri hilir komoditi tertentu belum tersedia	S.1.1.2. Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri) S.1.1.4. Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan pemanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industri	

Lampiran 2. Analisis SWOT untuk Sasaran 1.2. Misi 1 (Pariwisata)

STRATEGI UNTUK MISI 1, SASARAN 1.2. BERKEMBANGNYA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Adanya program prioritas Bupati yaitu menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonomi kreatif 2. Lembaga kepariwisataan yang ada seperti PHRI dan komunitas Pariwisata cukup baik 3. Terdapat berbagai jenis objek wisata diantaranya 10 destinasi wisata unggulan 4. Tingginya potensi kunjungan dari wisatawan lokal, domestik dan Nusantara, 5. Potensi berbagai jenis wisata (kerajinan, kuliner, wisata budaya, wisata religi, dll), 6. Memiliki fasilitasi pendukung pariwisata seperti perhotelan, perbankan, pendidikan	1. Belum dikelolanya 4 pilar pariwisata secara baik 2. Upaya pemasaran dan peningkatan citra pariwisata Kabupaten Paser belum dilakukan secara maksimal, 3. Ketersediaan moda transportasi umum dari dan menuju destinasi wisata belum optimal. 4. Pengelolaan berbagai potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Paser belum terencana dengan baik 5. Kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata belum optimal 6. Aktivitas ekonomi lokal yang berkaitan dengan pariwisata, masih rendah. 7. Belum tersedianya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
PELUANG (O)	**STRATEGI SO**	**STRATEGI WO**
1. Dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. 2. Tingginya potensi wisatawan domestik asal Kalsel 3. Investasi usaha Pariwisata yang masih terbuka 4. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam pembangunan wilayah. 5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam pemasaran Pariwisata	S.1.2.1. Meningkatkan daya tarik wisata dan budaya berbasis masyarakat	S.1.2.2. Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan S.1.2.3. Mendorong tumbuhnya investasi sektor sektor pendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis masyarakat
ANCAMAN (T)	**STRATEGI ST**	**STRATEGI WT**
1. Kabupaten/kota sekitar lebih gencar mempromosikan pariwisata 2. Kurangnya investasi pada sektor pariwisata 3. Kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata yang belum maksimal. 4. Rata-rata lama tamu menginap di Kabupaten Paser, hanya ± 1,5 hari	S.1.2.4. Mengelola arus perdagangan kawasan untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat S.1.2.5. Menjalin kerjasama dengan kawasan sekitar kabupaten Paser dalam pengembangan pariwisata dan usaha kecil	

Lampiran 3. Analisis SWOT untuk Sasaran 2.1., 2.2. dan 2.3. untuk Misi 2

STRATEGI UNTUK MISI 2, SASARAN 2.1., 2.2. dan 2.3.	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Opini BPK terhadap Penyelenggaraan Keuangan Daerah "Baik" / WTP 2. Kondisi ketentraman dan Ketertiban Wilayah terkendali 3. Rasio pertumbuhan PAD per tahun mengalami peningkatan 4. Jumlah SDM aparatur (PNS dan Non PNS) besar	1. Ketersediaan data/informasi dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan belum memadai. 2. Sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah belum optimal. 3. Penegakan Perda belum optimal 4. Sistem manajemen SDM aparatur belum optimal 5. Masih lemahnya akuntabilitas kinerja PD 6. Terbatasnya dukungan SDM pengelola TI 7. Rendahnya kualitas pelayanan publik di PD
PELUANG (O)	**STRATEGI SO**	**STRATEGI WO**
1. Kabupaten Paser memiliki letak dan kondisi geografis yang strategis yaitu berdekatan dengan rencana IKN 2. Adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat 3. Perubahan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpotensi membuka peluang sumber-sumber penerimaan baru 4. Regulasi terkait reformasi birokrasi yang merupakan landasan normatif bagi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser 5. Adanya strategi nasional pencegahan korupsi 6. Infrastruktur TIK yang cukup baik	S.2.1.1. Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah S.2.1.2. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah S.2.1.3. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah S.2.1.4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel S.2.2.1. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	S.2.2.2. Mengembangkan sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi S.2.2.3. Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet S.2.1.5. Revitalisasi struktur kelembagaan OPD S.2.2.6. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik S.2.3.1. Penguatan penegakkan Perda S.2.3.2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban S.2.3.3. Peningkatan Kualitas Legislasi daerah
ANCAMAN (T)	**STRATEGI ST**	**STRATEGI WT**
1. Terkait rencana pemindahan IKN berpotensi menjadi daerah tujuan migrasi penduduk 2. Gangguan ketentraman dan ketertiban 3. Potensi pandemi Covid-19 yang terus menerus 4. Perubahan regulasi terhadap tata kelola pemerintahan di daerah 5. Kebijakan terhadap rekrutmen aparatur di daerah	S.2.3.5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba S.2.3.4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis S.2.2.4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik S.2.2.5. Mengembangkan sistem manajemen *complain handling*	

Lampiran 4. Analisis SWOT untuk Sasaran 3.1., dan 3.2. untuk Misi 3

STRATEGI UNTUK MISI 3, SASARAN 3.1., dan 3.2.	**KEKUATAN (S)**	**KELEMAHAN (W)**
	1. Sumber daya alam yang cukup 2. Indeks kualitas udara tinggi 3. Letak kabupaten Paser berada dijalur perlintasan trans kaltim-kalsel 4. Potensi pelabuhan cukup besar 5. Kuantitas sumber air baku yang melimpah 6. Potensi lahan cukup luas	1. Rendahnya persentase kondisi jalan dan jembatan mantap 2. Luasnya wilayah dan kondisi topografi Kab. Paser 3. Belum semua Kecamatan memiliki Rencana Rinci Tata Ruang 4. Tingginya jumlah RTLH dan backlog perumahan 5. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan 6. Rendahnya akses air bersih dan sanitasi 7. IKLH relatif lebih rendah 8. Rendahnya cakupan layanan persampahan 9. Rendahnya persentase kondisi drainase 10. Rendahnya luasan RTH Publik di perkotaan 11. Rendahnya sarana prasarana transportasi 12. Masih banyaknya area blankspot 13. Rendahnya SDM masyarakat jasa konstruksi 14. Rendahnya Kualitas air baku / air sungai
PELUANG (O)	**STRATEGI SO**	**STRATEGI WO**
1. Kabupaten paser sebagai kawasan penyangga IKN 2. Rencana pembangunan bendungan lambakan yang merupakan Prioritas Strategis Nasional 3. Rencana lanjutan pembangunan bandara oleh kementrian perhubungan	S.3.1.2. Meningkatan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik S.3.1.5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air S.3.1.6. Melakukan Kerjasama /*Sharing* pendanaan infrastruktur	S.3.1.1. Memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi S.3.1.3. Percepatan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. S.3.1.4. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi dan infrastruktur lingkungan permukiman.
ANCAMAN (T)	**STRATEGI ST**	**STRATEGI WT**
1. Sebagian wilayah kabupaten Paser berada di kawasan cagar alam 2. Keterbatasan alokasi anggaran dari provinsi dan pusat 3. Keterbatasan upaya konservasi akibat regulasi	S.3.2.1. Mempercepat dan memperkuat regulasi penataan ruang dan peningkatan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang S.3.2.2. Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas	S.3.2.3. Penguatan komunitas tangguh bencana S.3.2.4. Penguatan advokasi dan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup S.3.2.5. Meningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah

Lampiran 5. Analisis SWOT untuk Sasaran 4.1., 4.2. dan 4.3. untuk Misi 4

STRATEGI UNTUK MISI 4, SASARAN 4.1.,4.2. dan 4.3.	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Komitmen Pemkab dalam meningkatkan SDM 2. Proporsi penduduk usia anak-anak tinggi 3. Dukungan anggaran yang memadai 4. Tersedianya kelembagaan yang memadai 5. Terdapat banyak LSM, lembaga keagamaan, pendidikan, pemuda dan paguyuban kebudayaan	1. RLS dan AHLS masih rendah/aksesibiltas rendah 2. Kemiskinan fluktuatif 3. IPG dan IDG masih rendah 4. Rendahnya inovasi daerah 5. Budaya literasi masih rendah 6. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak 7. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan 8. Kurang berkembangnya budaya lokal
PELUANG (O)	**STRATEGI SO**	**STRATEGI WO**
1. Kondisi geografis dekat dengan wilayah calon IKN 2. Dana perimbangan yang cukup besar 3. Komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran SDGs 4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi 5. Tingginya tuntutan masyarakat akan layanan yang berkuaitas	S.4.1.1. Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter S.4.2.1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit S.4.2.2. Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi	S.4.1.2. Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi S.4.3.1. Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan mutu layanan Keluarga Berencana S.4.3.2. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan
ANCAMAN (T)	**STRATEGI ST**	**STRATEGI WT**
1. Regulasi yang berubah-ubah 2. Kemiskinan kultural yang muncul pada sebagian masyarakat 3. Kerjasama lintas sektor (kemitraan) belum optimal 4. Pandemi Covid-19 belum berakhir 5. Meningkatnya konflik ketenagakerjaan 6. Masuknya Tenaga kerja asing	S.4.3.3. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha S.4.3.4. Meningkatkan Penyerapan, daya saing tenaga kerja serta pencegahan dan optimalisasi penyelesaian konflik ketenagakerjaan /hubungan industrial	

Lampiran 6. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 1 Tujuan 1

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1.1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian	S.1.1.1. Revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN	X	X	X		
	S.1.1.2. Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri)			X		
	S.1.1.3. Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industrii berbasis kelapa sawit				X	X
	S.1.1.4. Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan pemanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industri	X	X	X	X	X
Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan	S.1.2.1. Meningkatkan daya tarik wisata dan budaya berbasis masyarakat	X	X	X		
	S.1.2.2. Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	X	X	X		
	S.1.2.3. Mendorong tumbuhnya investasi sektor sektor pendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis masyarakat			X	X	X
	S.1.2.4. Mengelola arus perdagangan kawasan untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat				X	X
	S.1.2.5. Menjalin kerjasama dengan kawasan sekitar kabupaten Paser dalam pengembangan pariwisata dan usaha kecil	X	X		X	X

Lampiran 7. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 2 Tujuan 2

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	S.2.1.1. Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah	X	X	X		
	S.2.1.2. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	X	X	X	X	X
	S.2.1.3. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah	X	X	X	X	X
	S.2.1.4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	X	X	X	X	X
	S.2.1.5. Revitalisasi struktur kelembagaan OPD	X	X	X	X	X
Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.2.2.1. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	X	X	X		
	S.2.2.2. Mengembangkan sistim pengelolaan satu data yang terintegrasi	X	X	X		
	S.2.2.3. Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet	X	X	X		
	S.2.2.4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik			X	X	X
	S.2.2.5. Mengembangkan sistim manajemen *Complain handling*			X	X	X
	S.2.2.6. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik			X	X	X
Sasaran 2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	S.2.3.1. Penguatan penegakkan Perda	X	X	X	X	X
	S.2.3.2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	X	X	X	X	X
	S.2.3.3. Peningkatan Kualitas Legislasi daerah	X	X	X	X	X
	S.2.3.4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	X	X	X	X	X
	S.2.3.5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	X	X	X	X	X

Lampiran 8. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 3 Tujuan 3

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2022	2026
Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	S.3.1.1. Memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi.	X	X	X	X	X
	S.3.1.2. Meningkatan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik	X	X	X	X	X
	S.3.1.3. Percepatan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.	X	X	X	X	X
	S.3.1.4. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi dan infrastruktur lingkungan permukiman.	X	X	X	X	X
	S.3.1.5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.	X	X	X	X	X
	S.3.1.6. Melakukan Kerjasama /*Sharing* pendanaan infrastruktur.	X	X	X	X	X
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	S.3.2.1. Mempercepat dan memperkuat regulasi penataan ruang dan peningkatan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang.	X	X	X	X	X
	S.3.2.2. Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas.	X	X	X	X	X
	S.3.2.3. Penguatan komunitas tangguh bencana.	X	X	X	X	X
	S.3.2.4. Penguatan advokasi dan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.	X	X	X		
	S.3.2.5. Meningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah	X	X	X	X	X

Lampiran 9. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Misi 4 Tujuan 4

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2022	2026
Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	S.4.1.1. Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter	X	X	X	X	X
	S.4.1.2. Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi	X	X	X	X	X
Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	S.4.2.1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit	X	X	X	X	X
	S.4.2.2. Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi	X	X	X	X	X
Sasaran 4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.4.3.1. Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan mutu layanan Keluarga Berencana	X	X	X	X	X
	S.4.3.2. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan	X	X	X	X	X
	S.4.3.3. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha	X	X	X	X	X
	S.4.3.4. Meningkatkan Penyerapan, daya saing tenaga kerja serta pencegahan dan optimalisasi penyelesaian konflik ketenagakerjaan /hubungan industrial	X	X	X	X	X

Lampiran 10. Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Indikator	Target RPJMN					Indikator	Target RPJMD Provinsi					Indikator	Target RPJMD Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8	6,7	7,1	8	8,5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,85	-1	3,5±1	3,5±1	-	Pertumbuhan Ekonomi	1,32	2,32	2,50	3,64	4,20
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	5,25	4,66	4,11	3,35	Tingkat Kemiskinan (%)	6,10	6,05	6,00	5,9	-	Angka Kemiskinan	8,00	7,30	6,80	6,30	5,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,2	6	5,8	5,4	5,1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87	6,81	6,75	6,50	-	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,45	3,17	3,15	3,12	3,10
Rasio Gini					0.360 - 0.474	Indeks Gini	0,33	0,31	0,31	0,308	-	Indeks Gini	0,285	0,280	0,270	0,260	0,250
Penurunan Emisi GRK (%)					27,3	Penurunan Emisi GRK (%)	50,72	27,75	28,50	29,33	-	Penurunan Emisi GRK (%)					
Indeks Pembangunan Manusia					71,22-79,25	Indeks Pembangunan Manusia	76,2	76,8	77,3	77,75	-	Indeks Pembangunan Manusia	73,03	73,40	74,00	74,50	75,00

Lampiran 11. Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Paser Terhadap Prioritas Nasional

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.01 - PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01.01.0001 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.8480 - Pemanfaatan EBT		6,08	7,34	8,40		-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.01 - PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01.01.0001 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	-	-	-						-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.01 - PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01.01.0002 - Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3	-	-	-						-	-	-						

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.02 - PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01.02.0003 - Produktivitas air (water productivity) (US$/ma)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0004 - Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.8464 - 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ; 2. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi			94/89	96.2/90	97.5/91		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	97,77	97,9	98	98,5	99
																			Tingkat konsumsi pangan	85	86	87	88	89
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0004 - Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0005 - Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100.0	2.100.0	2.100.0	2.100.0	2.100.0	-	-	-							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	97,77	97,9	98	98,5	99
																			Tingkat konsumsi pangan	85	86	87	88	89
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0006 - Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	-	-	-							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	97,77	97,9	98	98,5	99
																			Tingkat konsumsi pangan	85	86	87	88	89
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0007 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment /PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.8466 - Persentase pangan aman di kalimantan timur		90	91	92		-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0007 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment /PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0008 - Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.8467 - Jumlah Desa Rawan Pangan		39	45	50		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	20	20	20	20	20
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.03 - PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	01.03.0008 - Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	-	-	-							-	-	Persentase Penyaluran cadangan Pangan	10	10	10	10	10
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.04 - PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	01.04.0009 - Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.8400 - Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif		289,048	297.805,90	297.805,90			-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.04 - PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	01.04.0009 - Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.04 - PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	01.04.0010 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	<80	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.8377 - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		158938	162593	166170		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.04 - PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	01.04.0010 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	<80	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0011 - Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.8485 - Persentase tercapainya target UKM naik kelas		1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang diberdayakan	25	25	25	25	25

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0011 - Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0012 - Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.8493 - Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih		300	300	300		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koprasi yang maju	0	12	12	12	12
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0012 - Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.8485 - Persentase tercapainya target UKM naik kelas		1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang diberdayakan	25	25	25	25	25
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0012 - Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.8495 - Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital		3	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang naik kelas	5	5	5	5	5

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0012 - Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0013 - Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.8494 - Persentase tercapainya target Koperasi sehat		10	10	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	59	62	65	67	70
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0013 - Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.8498 - Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an		50	50			-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0013 - Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.8493 - Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih		300	300	300		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koprasi yang maju	0	12	12	12	12

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0013 - Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.8483 - Jumlah Koperasi berkualitas		10	10	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rata-Rata Omset per koperasi	255	257	260	265	270
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.05 - PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01.05.0013 - Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	-	-	-						-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8348 - Produksi komoditas perkebunan		17.136.849,15	18.126.490,20	18.313.874,25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (perkebunan dan peternakan)	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8376 - Angka Kelahiran Sapi		20,5	21	22		-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8416 - 1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	0/0	271356/273070	279681/283592	289846/292383		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (tanaman pangan dan holtikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8420 - Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi		193	219	249		-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8440 - 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat ; 2. Jumlah Legalitas Benih TPH yang Terawasi dan Tersertifikasi		82/193	82/222	82/252		-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8352 - 1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun		30/1.425.580	30/1.462.645	30/1.500.674		-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8384 - Jumlah Miniranch yang teregister		24	49	30		PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8429 - 1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura		7100/6	8000/7	8500/7		-	-	-						

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.8398 - Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)		12	13	14		PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60	60	60	60	60
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.8402 - Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular		50	60	70		-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8360 - Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4.079	4.067	4.044		PERTANIAN	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8452 - Luas Penanganan OPT DPI		15000	20000	30000		-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.8367 - Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		35	35	35		PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan		100	100	100	100	199
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.8397 - Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha		25	50	75		-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8365 - Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk		1	1	1		PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh		60	62	64	66	68

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8393 - Cakupan binaan kelompok ternak		43	44	45		PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8448 - 1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	0/0	85/4	330/4	441/4		PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0014 - Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	-	-	-						-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0015 - Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.8400 - Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif		289,048	297.805,90	297.805,90		-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0015 - Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.8377 - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		158938	162593	166170		KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	10677,8	10763,3	10849,4	10936,2	11023,7
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0015 - Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.8380 - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		161216	164441	167730		PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	presentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0015 - Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.8395 - Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan		40,74	44,82	47,06		KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan (%)	35	45	45	45	45

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0015 - Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.8389 - Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan		2	3	4		-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	0,10	0,90	0,90	0,90	0,90
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0015 - Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0016 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	3	3,3	6,3	7,5	8,1	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.8476 - Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri		2	2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0016 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	3	3,3	6,3	7,5	8,1	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.8478 - Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata		5	5	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA	Persentase pemutahiran data IKM	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0016 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	3	3,3	6,3	7,5	8,1	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.8479 - Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya		10	15	20		-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0016 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	3	3,3	6,3	7,5	8,1	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0017 - Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	3	3,2	5,3	5,5	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.8354 - Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan		2	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang baik	18,75	21,21	23,53	25,71	28,77
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0017 - Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	3	3,2	5,3	5,5	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.8353 - Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)		2.015.000	2.005.000	2.310.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	14,26	20	25	33,33	35

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0017 - Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	3	3,2	5,3	5,5	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.8364 - Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi		90	95	97		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	70	80	90	100	110
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0017 - Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	3	3,2	5,3	5,5	-	-	-						-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0018 - Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1689	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.8357 - Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan		23,53	23,53	23,53		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perlindungan Hak Cipta dari HAKI	1	1	1	1	1

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0018 - Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1689	-	-	-							-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0019 - Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	3,6	6,2	6,9	7,8	8,4	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.8374 - Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	59	62	65	71	78	
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0019 - Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	3,6	6,2	6,9	7,8	8,4	-	-	-							-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0020 - Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.8447 - Persentase Penempatan Tenaga Kerja		31	31	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30	30	30	30	30	

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0020 - Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0021 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3.0-3.3	3.1-3.3	3.2-3.7	3.2-4.0	3.5-4.5	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0022 - Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15	15,3	15,7	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.8478 - Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata		5	5	5		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pemutahiran data IKM	100	100	100	100	100
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0022 - Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15	15,3	15,7	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0023 - Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.8478 - Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata		5	5	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pemutahiran data IKM	100	100	100	100	100
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0023 - Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	-	-	-						-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0024 - Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.8364 - Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi		90	95	97		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	70	80	90	100	110
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0024 - Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0025 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.8364 - Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi		90	95	97		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	70	80	90	100	110
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.06 - PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01.06.0025 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0026 - Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.8458 - Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara		5	5	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pelaku usaha yang dibina	2	2	2	2	2

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0026 - Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.8475 - Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran		5	5	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	1	1	1	1	1
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0026 - Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	-	-	-						-	-	-						
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0027 - Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.8458 - Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara		5	5	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pelaku usaha yang dibina	2	2	2	2	2

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0027 - Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0028 - Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.8354 - Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan		2	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang baik	18,75	21,21	23,53	25,71	28,77
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0028 - Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.8353 - Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)		2.015.000	2.005.000	2.310.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	14,26	20	25	33,33	35

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.07 - PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01.07.0028 - Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.08 - PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.0029 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.8369 - Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)		93,519	108,243	124,295		KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks pengelolaan keuangan daerah	60	65	70	75	80
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.08 - PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.0029 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.08 - PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.0030 - Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18	5.02 - KEUANGAN	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.8369 - Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)		93,519	108,243	124,295		KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks pengelolaan keuangan daerah	60	65	70	75	80
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.08 - PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.0030 - Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18	-	-	-							-	-	-					
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.08 - PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.0031 - Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.8354 - Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan		2	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang baik	18,75	21,21	23,53	25,71	28,77
01 - MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	01.08 - PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01.08.0031 - Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0142 - IPM Wilayah Sumatera					71.90 - 78.19	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0143 - IPM Wilayah Sumatera (min-maks)					71.90-78.19	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0161 - Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera					5,58	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0162 - Laju pertumbuhan PDRB Sumatera (persen/tahun)					5,58	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0179 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera					5,76	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0180 - Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (persen)					5,76	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0186 - Share PDRB Wilayah Sumatera (persen)					21,83	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.01 - PP 1: Pengembangan Wilayah Sumatera	02.01.0194 - Share PDRB Wilayah Sumatera					21,83	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0135 - IPM Wilayah Jawa-Bali					74.60 - 84.23	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0136 - IPM Wilayah Jawa-Bali (min-maks)					74.60-84.23	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0153 - Laju Pertumbuhan PDRB Jawa-Bali					6,27	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0154 - Laju pertumbuhan PDRB Jawa-Bali (persen/tahun)					6,27	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0171 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali					5,93	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0172 - Persentase penduduk miskin wilayah Jawa-Bali (persen)					5,93	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0187 - Share PDRB Wilayah Jawa-Bali					59,81	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.02 - PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	02.02.0188 - Share PDRB Wilayah Jawa-Bali (persen)					59,81	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.03 - PP 3: Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	02.03.0139 - IPM Wilayah Nusa Tenggara					68.35 - 71.91	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.03 - PP 3: Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	02.03.0157 - Laju Pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara					5,09	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.03 - PP 3: Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	02.03.0158 - Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara (persen/tahun)					5,09	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.03 - PP 3: Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	02.03.0175 - Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara					13,69	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.03 - PP 3: Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	02.03.0176 - Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (persen)					13,69	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.03 - PP 3: Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	02.03.0183 - Share PDRB Wilayah Nusa Tenggara (persen)					1,51	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.03 - PP 3: Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	02.03.0191 - Share PDRB Wilayah Nusa Tenggara					1,51	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0137 - IPM Wilayah Kalimantan					71.22 - 79.25	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8348 - Produksi komoditas perkebunan		17.136.849,15	18.126.490,20	18.313.874,25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (perkebunan dan peternakan)	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8376 - Angka Kelahiran Sapi		20,5	21	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8416 - 1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	0/0	271356/273070	279681/283592	289846/292383		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (tanaman pangan dan holtikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8420 - Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi		193	219	249		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (tanaman pangan dan holtikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8440 - 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat ; 2. Jumlah Legalitas Benih TPH yang Terawasi dan Tersertifikasi		82/193	82/222	82/252		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (tanaman pangan dan holtikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8352 - 1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun		30/1.425.580	30/1.462.645	30/1.500.674		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8384 - Jumlah Miniranch yang teregister		24	49	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8429 - 1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura		7100/6	8000/7	8500/7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.8398 - Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)		12	13	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60	60	60	60	60

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.8402 - Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular		50	60	70		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60	60	60	60	60
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8360 - Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4.079	4.067	4.044		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	10,89	10,4	9,34	11,98	9,59
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8452 - Luas Penanganan OPT DPI		15000	20000	30000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.8367 - Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		35	35	35		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.8397 - Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha		25	50	75		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8365 - Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk		1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8393 - Cakupan binaan kelompok ternak		43	44	45		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8448 - 1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	0/0	85/4	330/4	441/4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0149 - Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)					5,37	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8348 - Produksi komoditas perkebunan		17.136.849,15	18.126.490,20	18.313.874,25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (perkebunan dan peternakan)	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8376 - Angka Kelahiran Sapi		20,5	21	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (perkebunan dan peternakan)	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8416 - 1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	0/0	271356/273070	279681/283592	289846/292383		PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (tanaman pangan dan holtikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8420 - Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi		193	219	249		PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (tanaman pangan dan holtikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.8440 - 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat ; 2. Jumlah Legalitas Benih TPH yang Terawasi dan Tersertifikasi		82/193	82/222	82/252		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (tanaman pangan dan holtikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8352 - 1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun		30/1.425.580	30/1.462.645	30/1.500.674		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8384 - Jumlah Miniranch yang teregister		24	49	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.8429 - 1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura		7100/6	8000/7	8500/7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	60	65	66	67	68

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.8398 - Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)		12	13	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60	60	60	60	60
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.8402 - Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular		50	60	70		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60	60	60	60	60
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8360 - Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4.079	4.067	4.044		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8452 - Luas Penanganan OPT DPI		15000	20000	30000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.8367 - Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		35	35	35		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.8397 - Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha		25	50	75		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8365 - Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk		1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8393 - Cakupan binaan kelompok ternak		43	44	45			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.8448 - 1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	0/0	85/4	330/4	441/4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	60	62	64	66	68
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0155 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan					5,37	-	-	-							-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0166 - Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen)					3,29	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.8444 - Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja		70	70	70			-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0166 - Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen)					3,29	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0173 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan					3,29	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0181 - Share PDRB Wilayah Kalimantan (persen)					8,22	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.04 - PP 4: Pengembangan Wilayah Kalimantan	02.04.0189 - Share PDRB Wilayah Kalimantan					8,22	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.05 - PP 5: Pengembangan Wilayah Sulawesi	02.05.0141 - IPM Wilayah Sulawesi					69.41 - 75.83	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.05 - PP 5: Pengembangan Wilayah Sulawesi	02.05.0150 - Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun)					6,91	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.05 - PP 5: Pengembangan Wilayah Sulawesi	02.05.0160 - Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi					6,91	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.05 - PP 5: Pengembangan Wilayah Sulawesi	02.05.0169 - Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen)					7,9	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.05 - PP 5: Pengembangan Wilayah Sulawesi	02.05.0178 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi					7,9	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.05 - PP 5: Pengembangan Wilayah Sulawesi	02.05.0185 - Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen)					6,23	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.05 - PP 5: Pengembangan Wilayah Sulawesi	02.05.0193 - Share PDRB Wilayah Sulawesi					6,23	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.06 - PP 6: Pengembangan Wilayah Maluku	02.06.0138 - IPM Wilayah Maluku					72.25-72.33	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.06 - PP 6: Pengembangan Wilayah Maluku	02.06.0151 - Laju Pertumbuhan PDRB Maluku					6	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.06 - PP 6: Pengembangan Wilayah Maluku	02.06.0156 - Laju Pertumbuhan PDRB Maluku					6	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.06 - PP 6: Pengembangan Wilayah Maluku	02.06.0167 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku					9,4	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.06 - PP 6: Pengembangan Wilayah Maluku	02.06.0174 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku					9,4	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.06 - PP 6: Pengembangan Wilayah Maluku	02.06.0182 - Share PDRB Wilayah Maluku					0,55	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.06 - PP 6: Pengembangan Wilayah Maluku	02.06.0190 - Share PDRB Wilayah Maluku					0,55	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.07 - PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	02.07.0140 - IPM Wilayah Papua					63.94 - 67.24	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.07 - PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	02.07.0152 - Laju Pertumbuhan PDRB Papua					6,04	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.07 - PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	02.07.0159 - Laju Pertumbuhan PDRB Papua					6,04	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.07 - PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	02.07.0168 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua					19,02	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.07 - PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	02.07.0177 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua					19,02	-	-	-						-	-	-					
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.07 - PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	02.07.0184 - Share PDRB Wilayah Papua					1,96	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
02 - MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	02.07 - PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	02.07.0192 - Share PDRB Wilayah Papua					1,96	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.01 - PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	03.01.0032 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.8460 - Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		1169	1169	1169		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.01 - PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	03.01.0032 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	-	-	-								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.01 - PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	03.01.0033 - Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Kasar	12	10	10	10	10

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.01 - PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	03.01.0033 - Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	-	-	-							Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif (%)	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.01 - PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	03.01.0034 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.8461 - Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		440	440	440		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.01 - PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	03.01.0034 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	-	-	-							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan layanan penanganan bencana	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.02 - PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	03.02.0035 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.8461 - Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		440	440	440		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.02 - PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	03.02.0035 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.02 - PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	03.02.0036 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	6S.2				80	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.8461 - Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		440	440	440		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.02 - PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	03.02.0036 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	6S.2				80	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0037 - Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0037 - Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0038 - Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0038 - Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0039 - Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0039 - Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0040 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.8474 - Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial		90	92	94		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	75	76	76,5	77	77,5

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0040 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0041 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.8474 - Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial		90	92	94			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	75	76	76,5	77	77,5
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0041 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0042 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	75	76	76,5	77	77,5
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0042 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0043 - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0043 - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0044 - Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0044 - Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0045 - Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0045 - Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0046 - Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0046 - Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0047 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0047 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0048 - Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0048 - Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0049 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.8390 - Kab/Kota yang melakukan PHBS		3	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	60	70	80	90	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0049 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0050 - Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.8390 - Kab/Kota yang melakukan PHBS		3	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	60	70	80	90	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0050 - Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	-	-	-						-	-	-						
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0051 - Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0051 - Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	-	-	-						-	-	-						

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0052 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0052 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0053 - Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.8378 - Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan		100	100	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.03 - PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	03.03.0053 - Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0054 - Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399.1 388.7 400.4	NA NA NA	NA NA NA	399.7 392.3 406.2	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.8450 - Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100	70	86	90		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0054 - Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399.1 388.7 400.4	NA NA NA	NA NA NA	399.7 392.3 406.2	-	-	-						-									
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0055 - Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34.4 46.6 49	NA NA NA	NA NA NA	35.6 47.4 51	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.8450 - Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100	70	86	90		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0055 - Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34.4 46.6 49	NA NA NA	NA NA NA	35.6 47.4 51	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0056 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.7S	8,85	8,95	9,06	9,16	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.8433 - Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	100	77	82	85		-							
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0056 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.7S	8,85	8,95	9,06	9,16	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0057 - Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.8433 - Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	100	77	82	85		-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.04 - PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	03.04.0057 - Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0058 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	12,49	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.8423 - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak		0,06	0,05	0,4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak (%)	47,62	59,52	71,43	83,33	95,24
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0058 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	12,49	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	100	100	100	100	100
																URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Sekolah Ramah Anak yang sesuai standar (%)	25	35	50	65	80

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
																		Persentase Puskesmas Ramah Anak yang sesuai standar (%)	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0059 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61.7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.8423 - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak		0,06	0,05	0,4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0059 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61.7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0060 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.211647S	912779 4284	912789 6233	913346 9578	913862 7023	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.8412 - Implementasi Kelembagaan PUG		1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rasio pekerja perempuan (%)	37,50	40,00	43,50	46,50	49,50

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0060 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.211647S	912779 4284	912789 6233	913346 9578	913862 7023	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0061 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	732448 1017	735005 0042	737405 1922	739659 2027	741774 7551	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.8412 - Implementasi Kelembagaan PUG		1	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (%)	35,52	71,43	83,33	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0061 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	732448 1017	735005 0042	737405 1922	739659 2027	741774 7551	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0062 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52512	53134	53756	54378	55	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.8438 - Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		70	70	70		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1	1,00	1,00	1	1

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0062 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52512	53134	53756	54378	55	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0063 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9.4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.8414 - Kebijakan Perlindungan Perempuan		4	4	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0063 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9.4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0064 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.8492 - Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	15,5	16,77	17,5	18,3		-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.05 - PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	03.05.0064 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0065 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.8461 - Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		440	440	440		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100	100	100	100	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0065 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40	-	-	-														
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0066 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6				50	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.8461 - Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		440	440	440		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0066 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6				50	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0067 - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.8456 - Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)		32000	32000	32000			-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0067 - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0068 - Bidang tanah yang diredistribusi	7S0.000				7.750.000	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.06 - PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	03.06.0069 - Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0070 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.8444 - Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja		70	70	70		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50	60	70	85	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0070 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0071 - Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University					1 (UI) 2 (ITB dan UGM) 3 (IPB. Unair. Unpad)	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0072 - a. Top 200	0	0	0	0	1	-	-	-						-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0073 - b. Top 300	1	1	1	1	2	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0074 - c. Top 500	2	2	2	2	3	-	-	-							-	-	-					
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0075 - Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.8444 - Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja		70	70	70		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50	60	70	85	100
03 - MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	03.07 - PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	03.07.0075 - Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	-	-	-							-	-	-					
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.01 - PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER	04.01.0076 -						-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.01 - PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER	04.01.0130 - Indeks Capaian Revolusi Mental					74,3	-	-	-							-	-	-					
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.02 - PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA	04.02.0077 -						2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.8528 - Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	100	80	85	88		-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.02 - PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA	04.02.0077 -						-	-	-						-	-	-					
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.02 - PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA	04.02.0134 - Indeks Pembangunan Kebudayaan					62,7	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.8528 - Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	100	80	85	88		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	70	70	70	70	70

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.02 - PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA	04.02.0134 - Indeks Pembangunan Kebudayaan					62,7	-	-	-							-		-					
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.02 - PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA	04.02.0163 - Nilai Budaya Literasi					71	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.8528 - Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	100	80	85	88		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	70	70	70	70	70

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.02 - PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA	04.02.0163 - Nilai Budaya Literasi					71	-	-	-						-	-	-					
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.03 - PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	04.03.0078 - Indeks Kemkunan Umat Beragama						-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.03 - PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	04.03.0133 - Indeks Kerukunan Umat Beragama					75,8	-	-	-						-	-	-					
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.04 - PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER	04.04.0079 -						2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.8528 - Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	100	80	85	88		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	70	70	70	70	70
04 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	04.04 - PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER	04.04.0079 -						-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0080 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	-	-	-							-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0081 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.8518 - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	####	71781	70781	69681		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	15	30	50	70	90
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0081 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	-	-	-							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	90.23	91.20	92.17	93.13	94.10

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
																URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	15	30	50	70	90
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0082 - Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	SS.46	56,85	58,23	59,62	60	-	-	-						-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0083 - Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3. OS	3,1	3,3	3,6	4	-	-	-						-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0084 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78.1% akses layak (termasuk 9.65% akses aman	79.43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82.07% akses layak (termasuk 13% akses aman	86.03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	75	78	82	86	90

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0085 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	S.9S	4,46	2,98	1,49	0	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	75	78	82	86	90
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0086 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang berfungsi dengan baik	50	55	60	65	70
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0087 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%. BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%. BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%. BJP: 69.5%)	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.8514 - Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	62,64	64,64	66,64	68,64		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian akses air minum layak	73	81	87	93	100

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0087 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%. BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%. BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%. BJP: 69.5%)	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian akses air minum layak	73	81	87	93	100
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0088 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.8514 - Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	62,64	64,64	66,64	68,64		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian akses air minum layak	73	81	87	93	100
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0088 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	-	-	-						-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0089 - Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	5250189621	5518146289	5705999842	5810498273	5849863205	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0090 - Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	-	-	-							-	-	-						
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0091 - Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	4S229.16667	1159427083	1161427083	1163427083	1163427083	-	-	-							-	-	-						
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0092 - Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.8386 - Panjang saluran drainase yang berfungsi baik		2785	3020	3455		-	-	-						
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0092 - Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	-	-	-							-	-	-						

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0093 - Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	114325	114325	114325	114325	-	-	-							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	10	20	30	40	50
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0094 - Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	S3	55	57	60	65	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.8358 - Jumlah Lakalantas	448	512	427	342		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	85	90	90	95	100
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.01 - PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	05.01.0094 - Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	S3	55	57	60	65	-	-	-							-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.02 - PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	05.02.0095 - Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)					2500 km	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.02 - PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	05.02.0096 - Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)					7 pelabuhan	-	-	-						-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.02 - PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	05.02.0097 - Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)					0,9	-	-	-						-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.02 - PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	05.02.0098 - Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)					7.635 km	-	-	-						-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.03 - PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	05.03.0099 - Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)					6 kota	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.04 - PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	05.04.0100 -						-	-	-							-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.04 - PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	05.04.0101 - Rasio elektriflkasi (%)	100	100	100	100	100	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.8481 - Jumlah KK Berlistrik		1135000	1165000	1200000		-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.04 - PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	05.04.0101 - Rasio elektriflkasi (%)	100	100	100	100	100	-	-	-							-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.04 - PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	05.04.0102 - Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.04 - PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	05.04.0103 - Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	-	-	-							-	-	-						
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.05 - PP : TRANSFORMASI DIGITAL	05.05.0104 - Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.8511 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,04	3,10	3,15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	30	40	60	50	70	
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.05 - PP : TRANSFORMASI DIGITAL	05.05.0104 - Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	-							-	-	-						
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.05 - PP : TRANSFORMASI DIGITAL	05.05.0105 - Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3	-	-	-							-	-	-						

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.05 - PP : TRANSFORMASI DIGITAL	05.05.0106 - Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100	-	-	-						-	-	-					
05 - MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	05.05 - PP : TRANSFORMASI DIGITAL	05.05.0107 - Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7	-	-	-						-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.01 - PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	06.01.0108 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	70	73	75	78	80
																		Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	6	9	12	15	18

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.01 - PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	06.01.0109 - Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	70	73	75	78	80
																		Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	6	9	12	15	18
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.01 - PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	06.01.0110 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	-	-	-						-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.01 - PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	06.01.0111 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	-	-	-						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	70	73	75	78	80

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota						
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
																			Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	6	9	12	15	18
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.02 - PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	06.02.0112 - Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8361 - Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT		1.047.138.860	916.648.000	774.940.000		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan layanan penanganan bencana	100	100	100	100	100
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.02 - PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	06.02.0112 - Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8452 - Luas Penanganan OPT DPI		15000	20000	30000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	10,89	10,4	9,34	11,98	9,59
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.02 - PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	06.02.0112 - Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.02 - PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	06.02.0113 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya ildim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8360 - Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4.079	4.067	4.044		-	-	-						
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.02 - PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	06.02.0113 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya ildim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15	-	-	-							-	-	-						
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.02 - PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	06.02.0114 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.8530 - Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana		66,67	82,67	100		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan layanan penanganan bencana	100	100	100	100	100

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.02 - PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	06.02.0114 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	-	-	-							-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.03 - PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	06.03.0115 - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	-	-	-							-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.03 - PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	06.03.0116 - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.8360 - Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4.079	4.067	4.044		-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.03 - PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	06.03.0116 - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.03 - PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	06.03.0117 - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4	-	-	-							-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.03 - PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	06.03.0118 - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9	-	-	-							-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.03 - PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	06.03.0119 - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.8400 - Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif		289,048	297.805,90	297.805,90		-	-	-					
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	06.03 - PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	06.03.0119 - Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.01 - PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI	07.01.0120 -						-	-	-						-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.01 - PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI	07.01.0131 - Indeks Demokrasi Indonesia					78.37*	-	-	-						-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.01 - PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI	07.01.0132 - Indeks Kerawanan Pemilu					39	-	-	-						-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.01 - PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI	07.01.0147 - Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)					50000	-	-	-						-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.01 - PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI	07.01.0170 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)					72	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.8510 - Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik		75	77	80		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100	100	100	100	100
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.01 - PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI	07.01.0170 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)					72	-	-	-							-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.02 - PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	07.02.0121 - Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67	-	-	-							-	-	-					

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota								
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026	
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.03 - PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	07.03.0122 - Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	-	-	-							-	-	-						
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.04 - PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	07.04.0123 - Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	-	-	-							-	-	-						
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.04 - PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	07.04.0124 - Persentaseln stansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	SO	60	70	80	85	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.8538 - Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)			77	79	81		SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase PD dengan nilai IRB Baik	75	80	85	90	90
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.04 - PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	07.04.0124 - Persentaseln stansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	SO	60	70	80	85	-	-	-							-	-	-						

RPJMN								RPJMD Provinsi									RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target						BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024					2022	2023	2024	2025	2026
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.04 - PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	07.04.0125 - Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70	-	-	-							-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.05 - PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	07.05.0126 - Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2	-	-	-							-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.05 - PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	07.05.0127 - Global Terorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24	-	-	-							-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.05 - PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	07.05.0128 - Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>SS%	>55%	>55%	>60%	>60%	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.8533 - Persentase penyelesaian penegakan Perda dan Pergub, gangguan ketertiban umum, ketertiban masyarakat serta Satlinmas yang terlatih dan Poskamling k		90	93	95		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda	50	55	60	65	70

RPJMN								RPJMD Provinsi								RPJMD Kabupaten/Kota							
PN	PP	Urai Indikator	Target					Bidang	Program	Urai Indikator	Target					BIDANG	Program	Urai Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024				2022	2023	2024	2025	2026
																		Presentase Demonstrasi Anarkis	0	0	0	0	0
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.05 - PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	07.05.0128 - Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>SS%	>55%	>55%	>60%	>60%	-	-	-						-	-	-					
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.05 - PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	07.05.0129 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.8533 - Persentase penyelesaian penegakan Perda dan Pergub, gangguan ketertiban umum, ketertiban masyarakat serta Satlinmas yang terlatih dan Poskamling k		90	93	95		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda	50	55	60	65	70
																		Presentase Demonstrasi Anarkis	0	0	0	0	0
07 - MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	07.05 - PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	07.05.0129 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	-	-	-						-	-	-					

BAPPEDALITBANG KABUPATEN PASER
Kompleks Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM. 5 Gedung C Lantai 1 Kav. 1 dan 2
Email : bapedapaser@bappeda.paserkab.go.id Website : http://bappedalitbang.paserkab.go.id/
Tana Paser Kode Pos 76211

